

MAKING ALL
VOICES COUNT

Revy Sjahrial dkk.

A GRAND CHALLENGE
FOR DEVELOPMENT

COMPLAINTS AND RATINGS PLATFORMS
DIGITAL CROWDSOURCING
MAPPING INCLUSIVE GOVERNANCE
TRANSPARENCY
HARD-TO-REACH
ACCESS
EXCLUSION
CIVIL SOCIETY ADVOCACY
RADIO
VIDEO
ONLINE CROWDSOURCING PLATFORMS
CIVIL SOCIETY MONITORING
FOR TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
MOBILE APPS
CITIZEN-GENERATED DATA
ENGAGEMENT
AND VOICE
GOVERNMENT RESPONSIVENESS
TECHNOLOGIES

Bunga Rampai
Catatan Pengetahuan
Inisiatif
MAVC
di Indonesia



Hivos
people unlimited

Ushahidi

IDS
Institute of
Development Studies

Revy Sjahrial dkk.

COMPLAINTS AND RATINGS PLATFORMS
DIGITAL MAPPING
CROWDSOURCING
INCLUSIVE GOVERNANCE
BUNGA RAMPAI
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
PARTICIPATORY
MOBILE APPS
CITIZEN-GENERATED DATA
CITIZEN ENGAGEMENT
AND VOICE
GOVERNMENT RESPONSIVENESS
TECHNOLOGIES
FOR TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
ONLINE CROWDSOURCING PLATFORMS
INTERACTIVE VOICE RESPONSE
CIVIL SOCIETY ADVOCACY
CHAMPIONS
HARD-TO-REACH
ACC
CONCLUSION
TRANS
HARD-TO-REACH
ACC
CONCLUSION
TRANS

Bunga Rampai Catatan Pengetahuan Inisiatif MAVC di Indonesia



Judul : Bunga Rampai Catatan Pengetahuan Inisiatif MAVC di Indonesia

Penulis : Revy Sjahrial dan mitra MAVC Indonesia

Penyunting : M. Irsyadul Ibad

Desain Sampul dan Tata Letak : Iqbal Muttaqin

Penerbit :

Hivos Asia Tenggara

Kantor Redaksi

Jalan Kemang Selatan XII no. 1 Jakarta 12560

Telepon 021-7892489

Fax 021-7808115

Email: info@hivos.org

Web: www.sea.hivos.org



Siapun diizinkan mengutip, menyalin dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersial.

Pengantar

Making All Voices Count (MAVC) adalah sebuah inisiatif global antara Hivos, Ushahidi dan Institute of Development Studies (IDS) yang mendukung inovasi, *scaling-up* dan penelitian untuk memperdalam inovasi yang sudah ada serta membantu mendapatkan teknologi-teknologi baru untuk membuat pemerintah menjadi lebih efektif dan bertanggungjawab.

Making All Voices Count berfokus pada perhatian global tentang solusi-solusi kreatif dan canggih, misalnya penggunaan teknologi bergerak dan web, guna meyakini bahwa semua suara di kalangan warga didengarkan dan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan insentif untuk merespon suara-suara tersebut. MAVC dengan dana 43juta USD berusaha merebut momen ini untuk memperkuat komitmen kami bagi terdorongnya transparansi, pemberantasan korupsi dan memperkuat warga Negara.

Di Indonesia, MAVC mendukung 18 organisasi untuk mengerjakan 20 projects dengan total nilai lebih dari 1,1 juta poundsterling atau 20 milyar rupiah lebih, tersebar di 37 kabupaten dan kota serta 258 desa di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali.

Tema yang kami kerjakan sejak tahun 2014 terkait dengan peningkatan layanan publik melalui penerapan data terbuka dan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Secara garis besar, setengah dari para mitra MAVC menggarap isu partisipasi warga dan setengah nya lagi terkait dengan pemerintah yang responsif. Dalam lingkup bidang transparency dan accountability, penggunaan teknologi yang menjadi titik tolak MAVC kami mendapati banyak sekali sisi-sisi pembelajaran. Sisi pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting untuk kami sajikan sebagai bentuk warisan setelah program ini selesai pada November tahun 2017.

Sebagai program yang mengusung teknologi, kami sadari bahwa kami bekerja di target yang terus bergerak dan kemanapun menembak, sasaran terus berubah tempat. Namun dokumentasi dari pergerakan dan sasaran ini perlu untuk terus dibuat dan bisa diakses oleh siapa saja mengingat pembelajaran soal ini masih sangat minim baik di Indonesia maupun di dunia. Buku ini merupakan salah satu pendokumentasian hasil pembelajaran yang dilakukan delapan mitra kerja MAVC Indonesia dan sintesanya menjadi narasi yang membantu percakapan soal teknologi dalam isu transparansi dan akuntabilitas di tingkat global. Itu mengapa buku ini dibuka oleh paper berbahasa Inggris dan diikuti oleh delapan tulisan lain yang berangkat dari empat pertanyaan kunci mengenai peran serta warga, pemerintah yang responsif serta ruang-ruang yang dimana warga bisa berinteraksi dengan pemerintah.

Dari 12 negara fokus MAVC dan puluhan negara lain yang menjadi target riset, kami mengumpulkannya di website www.makingallvoicescount.org. Platform ini menyediakan berbagai pengetahuan yang sangat kaya terkait tata kelola inklusiv serta pembelajaran berharga dan pengakuan yang brutally honest bagaimana sektor pembangunan memandang teknologi.

Salam hangat,

Ria Ernunsari

MAVC Country Engagement Developer Indonesia – Pakistan

rennunsari@hivos.org / ernunsari@gmail.com

Prakata

Sejak September 2013, Hivos mengelola sebuah program berskala global selama 4 tahun bernama Making All Voices Count (Membuat Semua Suara Diperhitungkan). Program ini dikembangkan guna merespon beragam tantangan terkait isu keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu bagaimana pemerintah merespon suara warga negara; sekaligus merebut kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan menggunakan teknologi (informasi dan komunikasi) yang terus berkembang.

Indonesia merupakan satu dari enam negara utama lokasi proyek yang berakhir pada bulan November 2017 lalu. Untuk membuat suara Indonesia diperhitungkan, menjelang berakhirnya program ini, Hivos dan Institute of Development Studies, Universitas Sussex di Inggris mengadakan serangkaian kegiatan untuk menarik pelajaran dari konteks local Indonesia. Berdasarkan dua puluh project dari MAVC, kami memfokuskan kepada tiga tema: (1) interaksi antara pemerintah dan warga/non-pemerintah dalam menciptakan ruang (partisipasi) (2) hubungan antara platform daring (*online*) dan luring (*offline*) serta (3) kemitraan dan kolaborasi dari para pemampu dan perantara (*intermediaries*) dalam arena keterbukaan dan akuntabilitas.

MAVC adalah sebuah ‘institusi’ pembelajaran dan Hivos bertanggung jawab membangun bukti (*evidence*) agar pembelajaran dari ragam inisiatif yang telah berjalan dapat menjadi rujukan bagi inisiatif serupa di kemudian hari. Kami mencoba menelaah dari pelbagai pembelajaran di area ini di mana teknologi berubah sangat cepat sementara masyarakat terus-menerus berupaya untuk mengejar ketertinggalan ini. Hivos menyadari hal tersebut dan berupaya untuk berkontribusi sebaik mungkin guna membuat masyarakat menjadi lebih terbuka.

Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan terima kasih kepada INFEST Yogyakarta atas inisiatifnya mengumpulkan semua paper pembelajaran MAVC menjadi buku elektronik ini.

Saya harap kompilasi ini bermanfaat sebagai alat pembelajaran dan menyambut lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif lain yang mendukung inisiatif keterbukaan dan akuntabilitas baik secara daring maupun luring. Selamat membaca.

Biranchi Upadhyaya
Direktur Regional Hivos Asia Tenggara
Jakarta, Maret 2018

Daftar Isi

Prologue

Introduction	3
Prakata	5

Research Report

A 'Helicopter View' of MAVC Learning from Indonesia	9
Mengenal Ruang Kapabilitas dalam Upaya Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sasi Masyarakat Sipil sebagai Enabler)	31
Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Memperkuat Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi (TAP) serta Bagaimana Keserasian Interaksi Antara Platform Online dan Platform Offline	45
Towards an Effective Citizen Interaction in Invited Space in Indonesia: A Human Action Perspective	63
Connecting the dots: Memperkuat interaksi berbagai jenjang pemerintahan Indonesia dalam T&A	77
Membagi Kekuatan Penengah dan Pemampu untuk Keterbukaan	87
Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Transparansi dan Akuntabilitas yang Didorong oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia	101
Riset <i>Learning</i> ; Tipologi Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Sektor <i>Governance</i>	121
The Dynamic of the ICT Citizen Users in Generating the Government Response	135

Projects and Organizations Profiles

ACSTF - Menginovasi Advokasi demi Kebenaran dan Keadilan	147
INFEST - Penguatan Akses Masyarakat Desa pada Pembangunan	148
OPEN DATA LABS - Berinovasi untuk memastikan Data Terbuka mengarah pada <i>Social Benefit</i>	149
SINERGANTARA - Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	150
PRAKARSA - Pemerintah Terbuka: Menilai Pemanfaatan <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> Pemerintah Daerah Di Indonesia	152
FAMM Indonesia - Mahina Masohi: Aksi Kolektif untuk Akuntabilitas di Indonesia	153
KOTA KITA - Meningkatkan Transparansi, Inklusivitas dan Dampak Penganggaran Partisipatif di Indonesia	154

PATTIRO - Mempromosikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU Desa melalui Forum berbasis ICT dan Mekanisme <i>feedback loop</i>	155
BIG - Memahami Implementasi dan Dampak ICT di beberapa Inisiatif Tata Kelola Pemerintah	156
CIPG - Seberapa publik Alat Pelaporan Publik?	157
WYDII - Suara Kita: Mengedepankan Suara Perempuan dalam Demokrasi	158
SLOKA INSTITUTE - Menantang Layanan Kesehatan yang Buruk di Indonesia	159
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - Cek Sekolah-Ku: Meningkatkan Kondisi dan Tata Kelola Sekolah melalui Pemantauan Partisipatif	160
SAVE THE CHILDREN - Mengubah Sistem Perlindungan Anak di Indonesia	161
WIKIMEDIA - Konten Terbuka di Kalimantan	162
ICW - Menantang Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Open Data	163
FIK - ORNOP SULSEL - Pengumpulan Data Partisipatif untuk Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkualitas	164
BEBAS SAMPAH ID - Dari Rating Pos Pembuangan ke Kota Bebas Sampah	165

Epilogue

Kepercayaan Rakyat: Sebuah Keharusan dalam Pemerintahan	167
---	-----

A 'Helicopter View' of MAVC Learning from Indonesia

By Revy Sjahrial¹

Introduction

Making All Voices Count programme has arisen from the recognition of a series of challenges relating to citizens' voice, government responsiveness, transparency and accountability on the one hand; and a series of opportunities to improve work on these areas through the use of various technologies, on the other hand.² Utilising technologies in these areas involves a lot of assumptions, ideals and propositions, of which some are common to other, non-tech, governance programmes; while others have not been very much tried and tested, if not at all.³ This makes research, evidence harvesting and learning a crucial element of the programme to contribute to enhanced knowledge and deeper understanding of not only what use of technology works and what does not in these areas, but also in which contexts and with what kind of processes. Stakeholders' improved understanding about the complex interweaving of contexts, processes and types of technology to use/not is indispensable, whether working on the side of the citizens or the government, within either the national, subnational or global sphere.

This learning paper is produced to be part of that contribution aiming to pass on a legacy of evidence and knowledge to better inform future initiatives alike, as the programme concluded at the end of 2017. Since context matters, this paper specifically endeavours to synthesise and share the reflections of technology practitioners, observers and innovators

in transparency and accountability 'arena' within the diverse context of Indonesia, with its rural-urban divide, less-to-more developed regions and national-to-subnational agendas. It is written in English to communicate to a wider, international audience what eight national learning papers written in Bahasa Indonesia have reflected on. It covers the common thread they have shared in three themes, i.e. interaction of government invited spaces and citizen/non-government created spaces; interplay between offline and online platforms; and partnering and collaboration of enablers and intermediaries in transparency and accountability arena.

Background

Making All Voices Count (MAVC) is a programme initiated by multi-donor and managed by a consortium of multi-organisations involving manifold funded partners from different continents, particularly Africa and Asia. Its official kick-off was in August 2013, with actual selection and granting processes in Indonesia started in September 2013⁴. In short, MAVC is about promoting the use of Information and Communication Technology (ICT) in making all voices in the society heard and matter to improve transparency, accountability and governance in each participating country⁵.

Together with Ghana, Kenya, the Philippines, South Africa and Tanzania, Indonesia was part of the six priority

countries in MAVC, from a total of 12 which includes Bangladesh, Liberia, Mozambique, Nigeria, Pakistan and Uganda. In Indonesia, implementation of the above objective was closely linked to elaboration of MAVC's Indonesia Country Plan 2014-2017 on improving access to and quality of public services, as well as the opportune determination in opening government data and processes as part of the country's

commitment to the Open Government Partnership (OGP) initiative since 2011⁶.

The grantees in each participating country have come from three distinct backgrounds: the innovators, the practitioners scaling up the innovations and the think tanks/researchers investigating the initiatives. There were 18 grantees in Indonesia within this mix of backgrounds, with the following description:

Table 1 - Description of MAVC Funded-Partners in Indonesia

MAVC-funded Partner	Funded Project	Grant Type
1. ACSTF – Civil Society Task Force http://www.acstf.org/profile/latar-belakang/	Innovating Advocacy for Truth and Justice. Reconciliation through high quality citizen polling and video testimonials	Innovation – GIC (Global Innovation Competition)
2. BSID – Bebas Sampah Indonesia (Waste-Free Indonesia) https://en-gb.facebook.com/bebassampahID/	Strengthening Waste Management System Accountability using BebasSampah.ID platform in Indonesia	Innovation – GIC
3. Sinergantara http://sinergantara.or.id/	- Game My Village: Tools for Improving and Inspiring Village Participatory Planning and Budgeting in Indonesia - Reducing Maternal Mortality using SMS Technology	Innovation – GIC
4. WYDII – Women and Youth Development Institute of Indonesia http://www.wydii.org/	A voice to deepen Indonesian Women's Democracy	Innovation – GIC
5. Perkumpulan Wikimedia Indonesia and Open Street Map http://www.wikimedia.or.id/wiki/Wikimedia_Indonesia:Perihal https://openstreetmap.id/en/about/	Open Content in Kalimantan – Wikipedia and OpenStreetMap for Transparency	Innovation

RESEARCH REPORT

MAVC-funded Partner	Funded Project	Grant Type
6. Save The Children's Partner – Yayasan Sayangi Tunas Cilik https://www.stc.or.id/	Establishing feedback loops between citizens and the government to transform Indonesia's Child Protection System – Contract Extension	Innovation
7. Sloka Institute http://www.sloka.or.id/ten-tang/	Using Bali-Based Citizen Journalism Media Bale Bengong to Improve Quality Government's Universal Health Insurance Scheme (BPJS)	Innovation
8. Web Foundation – OD Lab Jakarta http://labs.webfoundation.org/labs/	Open Data for High Impact Ventures	Innovation – Tech Hub
9. FIK ORNOP – Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah https://en-gb.facebook.com/fikornopsulsel/	Program Empowerment for Village Development – Providing Qualitative and Quantitative Data with Participatory Method to Guarantee Transparency and Accountability	Scaling
10. ICW – Indonesia Corruption Watch https://antikorupsi.org/content/siapa-icw	e-Procurement Potential Fraud Analysis – Network Expansion	Scaling
11. INFEST – Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies https://infest.or.id/ten-tang-infest/	Amplifying Citizen Voice to Promote Public Participation in Improving Service Delivery in Yogyakarta, Indonesia	Scaling
12. TII – Transparency International Indonesia http://ti.or.id/	Cek Sekolahku (Check My School) – Improving School Condition and Governance	Scaling
13. BIGS – Bandung Institute of Governance Study https://www.facebook.com/BIGS.Indonesia/	Learning on Conception, Implementation and Impact of ICT Initiatives in Governance Sector in Indonesia	Research
14. CIPG – Centre for Innovation Policy and Governance http://cipg.or.id/about-us/organisation-profile/	Utilising public reporting tools as a means of engagement – The Indonesian experience	Research

MAVC-funded Partner	Funded Project	Grant Type
15. PATTIRO – Pusat Telaah dan Informasi Regional http://pattiro.org/ten-tang-kami/?lang=en	An Advanced and Applied Research of Village Law Annotation – Promoting Accountability of Village Law Implementation through ICT-based forum and feedback loop mechanism	Research
16. PEKKA-FAMM Indonesia https://www.pekka.or.id/index.php/en/ http://fammm.or.id/	Mahina Masohi – Young Women’s Collective Action for Accountability in Indonesia	Research
17. Perkumpulan Prakarsa http://theprakarsa.org/new/en/profile-organization	Open Government Partnership (OGP) – Assessing Utilisation of e-planning and e-budgeting of sub-national governments in Indonesia	Research – OGP
18. Yayasan Kota Kita http://www.kotakita.org/about-us	Promoting Participatory Budgeting in Indonesia – A Reflection and Review of the Musrenbang Process in Solo and Other Cities	Research

Objective

Contributing to a legacy of contextual knowledge and experience to share with the global tech-enabled T&A stakeholders, this paper serves as a ‘helicopter view’ in attempting to capture and document the rich learning nuances from MAVC and other similar initiatives in Indonesia, within the period of programme implementation. About a year towards the programme completion, MAVC asked the priority countries to put learning element more visible in their country’s working process and outputs. Each has then developed a Country Learning Engagement Plan (CLEP), recognising the different contexts participating countries bear. Each CLEP had then been designed in keeping with each of the countries’ specific condition and current development.

For Indonesia, this has been approached by undertaking a ‘bigger picture’ learning in which the funded partners could learn from one another and gain a higher-level understanding than a programmatic perspective of success vis-à-vis failure. Four Key Learning Questions (KLQs) were developed, of which experiences in dealing with had been presumably shared by the partners. They were then asked to prioritise response to only two KLQs they would think as highly relevant to the work they had done, one out of the two primary questions (KLQs #1 or #2) and another of the two supporting questions (KLQs #3 & #4). Based on the priority, they needed to write a 2-page reflection on the two they chose to prioritise. This reflection serves as an initial learning document from each partner. For further learning of the

bigger picture, partners were then asked to nominate themselves as the producers of eight national learning papers (written in Bahasa Indonesia), of which every two papers would respond to each of the four KLQs. Fellow partners, building on

from their reflection pages, would be the respondents to gather more data and to enable weaving of the common threads.

The Key Learning Questions to respond to are the following:

Table 2 - Four Key Learning Questions to Respond to by the National Learning Papers

1. How do the different layers of government interplay when responding to citizens' enquiry in the invited spaces, aimed at public service delivery improvement?
2. Which types of citizens use ICT-platform to engage with accountability and governance issues, and in what ICT-ways possible do they push for government responsiveness? What are their motivations and incentives in using or not using ICT in engaging with governance and accountability issues?
3. How effective is the use of ICT in enabling interaction between citizens and government for problem solving to improve public service delivery? How is its relationship with non-ICT/more traditional platform of interaction?
4. How do 'enablers' or 'intermediaries' function in the invited and e-invited spaces of T&A ecosystem to solve problems in accessing and/or improving public services?

Table 3 - Summary Table of Learning Paper Writing Allocation Responding to the KLQs

KLQ	Partner-Writer	Learning Partner-Contributor	Chosen Theory/Approach
1. - Government	CIPG INFEST	ACSTF, BSID, CIPG, INFEST, PATTI RO, Prakarsa, STC-Partner, Sinergantara, TII, Web Foundation, Yayasan Kota Kita	Vertical Integration
2. - Typology of ICT Users-Citizens	BIGS WYDII	BIGS, FIK ORNOP, ICW, PEKKA-FAMM, Sloka Institute, WMID-OSM, WYDII	Diffusion of Innovations Force Field Analysis
3. - ICT Use and Offline-Online Interface	Sinergantara Web Foundation-OD Lab	BIGS, CIPG, FIK ORNOP, Prakarsa, STC-Partner, Sinergantara, Web Foundation, WYDII	Practical model of offline-online interaction Human Action Typology, Action Constitutive Resources, Ladders of Participation in Civic Technologies and Discrepancy Model of End-User Computing Involvement

4. – Enabler and Intermediary Functions	Sloka Institute Yayasan Kota Kita	ACSTF, BSID, ICW, INFEST, PATTIRO, PEKKA-FAMM, Sloka Institute, TII, WMID- OSM, Yayasan Kota Kita	Practical approach Capability Approach and Capability Space Theory
---	---	--	--

The Learning

Eight different organisation partners nominated themselves as writers of the national learning papers. CIPG, Jakarta and INFEST, Yogyakarta are writers of papers to respond to KLQ #1 on government responsiveness. They have approached their writing by taking inspiration from “vertical integration” theory⁷. BIGS, Bandung and WYDII, Surabaya are writers in responding to KLQ #2 on typology of ICT-using citizens. They took different approaches in analysis, BIGS examined through “diffusion of innovations” theory⁸, while WYDII explored through “force field analysis” model. Sinergantara, Bandung and Web Foundation/Open Data Lab, Jakarta are writers of papers responding to KLQ #3 on the use of ICT in enabling citizens-government interaction for problem solving. Sinergantara investigated the question with a practical model of interaction between offline and online platforms; while Web Foundation/Open Data Lab took a more theoretical approach, with a combination of “human action typology”⁹, “action constitutive resources”¹⁰, “ladders of participation in civic technologies”¹¹ and “a discrepancy model of end-user computing involvement”¹² theories. Sloka Institute, Bali and Yayasan Kota Kita, Solo are writers responding to KLQ #4 on the roles of civil society organisations as enabler and intermediary in ICT-enabled transparency and accountability processes. Sloka’s exploration used a practical model while Kota Kita approached the question using “capability approach”¹³ and “capability space” theories¹⁴.

The limited space of this paper does not allow a detailed description of each national paper. Instead, attempting to present a helicopter view, it cites relevant pieces of information and/or thoughts in the respective papers for supporting evidences and arguments. While the production of this paper aims to provide a synthesis of the eight national papers, it acknowledges the rich nuances specific conditions discussed that there is a need to further explore more variety of the Indonesian context, to enable more empirical evidence. This paper, hence, proposes an indication of what the bigger picture may look like in some parts of Indonesia’s transparency and accountability (T&A) ecosystem, which is by no means a comprehensive conclusion of the overall, massive and complex ecosystem.

1. Government Invited vis-à-vis Citizen Created Spaces

This section deals with exploration related to KLQs #1 and #2 in the context of invited and claimed/created spaces as described in the Power Cube framework¹⁵.

With Indonesia’s policy context and primary focus on improving public service delivery, both in terms of access and quality, as well as making government processes open for public accountability and citizen participation in the spirit of OGP, the experience and observation of T&A ecosystem in Indonesia suggested

how citizen participation tends to occur and is accommodated in a number of spaces provided by the government (invited spaces) as compared to the spaces claimed by the community itself (created spaces)¹⁶. However, as learnings from the national papers show, there is a fluid movement between the two spaces when citizens participate and endeavour to invoke government response with the support of enablers and intermediaries.

In both spaces, the interest and push to use ICT in amplifying citizens' voices and participation have been apparent at different levels of governance system. Nevertheless, achieving improvement in public service delivery requires not only citizens' voices and participation to materialise. It is equally important to ensure that the government has the right capacity and incentive to listen and respond at the relevant level(s) of the governance system. CIPG learning paper¹⁷ highlights three aspects to allow for in improving government's capacity to respond at those separate levels, i.e. interplay between offline and online platforms; leadership and bureaucracy; and partnership/collaboration.

The three aspects are highly context specific with different regions across Indonesia having particular opportunities and challenges, and INFEST learning paper¹⁸ presents an interesting example of interplay amongst different levels of governance involving communities, governments and CSOs in two Java districts originated by created spaces. With a shared focus on strengthening communities' access to information and decision-making process at the village level, two

initiatives in Gunung Kidul, Yogyakarta and Wonosobo, Central Java have been initiated respectively by two CSOs upon realising a pressing need to have a participatory data collection regarding poverty, where local indicators derived from community involvement could be used to reassess appropriateness of government targeting in social assistance delivery.

While both initiatives entail a strong ICT element which had first become the pivot, the leading CSOs soon recognised how the offline processes were as equally important to ensure that the community remains the centre of what each tried to achieve. As INFEST reflectively concludes, "An approach solely directed at ICT use cannot fully respond to the village's need to change, especially in terms of having access to its own decision making." True community participation has been conceived through layers of partnership with fellow CSOs and different government counterparts, in the form of advocacy, mentoring and training through the offline avenues to be able to make effective use of the online platforms. The 'conceptual' understanding of what it means for the community to own a decision-making process is strengthened offline, while the technical capacity to enable effective participation in decision making is enhanced through online means.

Layers of government response differently to the respective initiatives as INFEST paper presents in tables. This paper translates and combines the two tables to provide a comparison. The chain of government responses and citizens' follow-up illustrates an interesting flow of

how created spaces in turn led to opening of invited spaces and vice versa. Surely, the relation of both spaces is not always consequential. As shown below, responses obtained are a result of manifold forms of partnership, bureaucracy and leadership manoeuvred through diverse opportunities

and challenges, with which the initiative in Wonosobo has been responded by government institutions at the national level, while Gunung Kidul initiative reaches the district level.

Table 4 - Response across Levels of Government for CSO-led Initiatives in Two Java Districts

Gov. Level	Value*	Gov. Response for Gunung Kidul	Gov. Response for Wonosobo	Value*
Village	(+)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation of collaborative working group by representatives of the people & village government. ▪ Provision of facility, e.g. computer ▪ Collection of citizens' data from the Family Card. ▪ Opening access for the people to monitor participatory-collected poverty data. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Team formation with representatives of the people & village government to 'co-respond' to the initiative ▪ Drafting village regulation reinforcing T&A values ▪ Provision of funding resources for the village-level initiative ▪ Opening access to village planning and information for the people 	(+)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limiting community participation by selecting only a component of community with the same voice as the government's. ▪ Limiting access to just a particular set of data, e.g. just to data collection but not to planning information. 	(-)
Sub-district	(+)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation of special team to monitor implementation of Village Info System (SID) in each village. ▪ Channelling poverty data from the village level to the district. ▪ Evaluating SID implementation in each village. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporting capacity strengthening at the village level. ▪ Monitoring implementation of the initiative at the village level. ▪ Evaluating village development planning based on participation and T&A principles. 	(+)

RESEARCH REPORT

Gov. Level	Value*	Gov. Response for Gunung Kidul	Gov. Response for Wonosobo	Value*
District	(+)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initiating the governance of role division for the different organisations supporting the initiative in Gunung Kidul. ▪ Assigning volunteer team to help SID implementation process. ▪ Providing basic data needed by the villages ▪ Providing inputs and ideas related to SID development in Gunung Kidul area. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorporating the initiative as part of the government work program. ▪ Drafting supporting regulations. ▪ Allocating human resources to be involved in programme implementation. ▪ Allocating funding resources to widen the scope and achievements of the initiative ▪ Providing supporting infrastructure internally. 	(+)
	(-)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Refusal of Citizen Registry Office (Dukcapil) to provide citizens' data due to its assumption that it is not public data and takes long to process. ▪ Dukcapil provides data to a village only when the village needs it and sends a formal notification. 		
	(-)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Refusal of the National Bureau of Statistics (BPS) towards participatory-collected poverty data from the community, until the district government used the Unified Database (BDT) containing such data. 		
Province			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responding to the initiative by regarding it as a matter of (tech) application. ▪ Reluctance to conduct appropriate assessment prior to installation of equipment. ▪ More focused on financial aid to implement SID. ▪ Not recognising the diversity occurring in the initiative at the district level. 	(-)
National				
Ministry of Home Affairs			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recognising the initiative as a model to strengthen village T&A ▪ Opening discussion space to exchange learning 	(+)
Ministry of Villages			Not responding to the initiative	0

*Value of the government response is categorised into positive (+) to mean supporting the initiative and negative (-) to mean hampering the initiative. 0 value is where there is no response at all from the government

Source: Translated and combined for comparison from INFEST's MAVC-Indonesia National Paper (without page numbers)

While INFEST and CIPG focus their exploration on government responses in the invited and created spaces, BIGS's examination is on the other side of the equation, i.e. the typology of ICT-user citizens¹⁹. BIGS looks into eight ICT-enabled governance initiatives where three are in invited spaces: LAPOR! (Online Service for Citizens' Aspirations & Grievances)²⁰, LAPOR BOS (Report on School Operational Fund)²¹ and JSC (Jakarta Smart City)²²; and five others are in created spaces: CSK (Check My School)²³, EMAS (Expanding Maternal & Neonatal Survival)²⁴, GDM (Developing Village Movement)²⁵, SID (Village Information System in Gunung Kidul, was also examined in INFEST learning paper)²⁶ and SMS Iklim & Cuaca (SMS-based information on climate & weather for farmers & fishermen)²⁷.

In its analysis, BIGS simplifies "diffusion of innovations" theory into four categories of innovation adopters: innovator, early adopter, majority and laggards; and sees that citizens using ICT in LAPOR! and JSC, two of the three initiatives in the invited spaces, have reached the majority category. BIGS credits this to their "active users" who have been concerned about public service delivery performance even before there were such ICT-based applications, that they have always found a way to monitor. GDM and SID, two out of five initiatives in the created spaces, have also reached the majority users despite their village-level focus, due to village activists who have been in the early adopter category keep widening their reach of advocacy on these initiatives to more villages, many of which had been untouched by ICT for long.

Users of the other four initiatives, three of which happen in created spaces: CSK, EMAS, LAPOR BOS and SMS Iklim & Cuaca have only reached the early adopter category since the initiatives are designed to specifically target their beneficiaries to be their involved users who receive

trainings and get access to updated information. Targeted users like them can invite others to be part of the majority category as the initiatives advance and attract people outside their respective targets.

Learning from these insights where active public users and targeted ones can influence others to adopt the above innovations, partnership with either fellow engaged CSOs and/or already skilled and active users is key to widen the access for and strengthen the capacities of the 'lay people', whether in the invited or created spaces of Indonesia's T&A ecosystem. The process of interaction and the transfer of information and knowledge between the two categories can enable the rest of the citizens feel more technically confident in using an ICT innovation, and more conceptually knowledgeable to actively demand their government to be more transparent and accountable. Partnership effort in the technical and conceptual streams seems to require a fluid movement between created and invited spaces.

BIGS further identifies several features of ICT-users which may link to whether and how quickly an innovation can be adopted by other categories of users, not only stay at the early adopter category. The 'target groups' BIGS says are those who receive special training, information, mentoring and/or promotion from the ICT innovator/initiative. The 'beneficiaries' are those who may not receive special training/mentoring but are expected to benefit from the initiative. These two features are especially prominent as early adopters in initiatives happening in created spaces, like CSK, EMAS, SMS Iklim & Cuaca, GDM and SID.

The 'public' is another feature of those who are expected to use the innovation but do not receive direct training/mentoring from the initiative. According to BIGS, the initiative usually "does not perform

any direct interaction with the public” except in promoting the innovation existence through its channel, e.g. active users, regular observers. This can be seen particularly in initiatives in the invited spaces, like LAPOR! and JSC. The last is the ‘victims’, those who are impacted by problems caused by ineffective policies and/or public service delivery. Interestingly, this is a cross-cutting feature of both created and invited spaces. It seems citizens are likely to participate, engage in the initiatives and adopt the innovations when they themselves or people they know have been directly impacted by some troublesome experience. Even in T&A, not just in public health, people tend to take a curative rather preventive approach.

The takeaway from this section is not conclusive but leads to several points that can be useful to further explore in other T&A contexts and initiatives in Indonesia:

- i> The fluid movement in interacting between ICT-enabled invited and created spaces requires effective partnership with fellow CSOs, regular observers, as well as skilled and active adopters of an innovation.
- ii> This fluid interaction, however, is subject to the style of leadership and bureaucracy on the government side.
- iii> While technical innovation is exciting to be welcomed and adopted, potential users need to be well informed about the ‘conceptual’ importance of why T&A should matter to them. This requires utilisation of both offline and online avenues to tackle conceptual and technological challenges, which will be further discussed in the next section.
- iv> Initiatives aim to scale up ICT innovations would need to recognise from the get-go the kind of ‘user-feature spectrum’ they would expect participation from and strategize accordingly. The cross-cutting feature of victims as users may be able to be transformed someday, so instead of expecting users to engage when a problem has happened – the curative

approach – users should become part of pre-emptive efforts, co-creating and safeguarding good governance processes to remain mutually accountable.

2. Interplay between Offline and Online Platforms

Indonesia’s MAVC partners above are not alone in their reflection on ICT in relation to its users. Research of Roberts and Hernandez (2017) echoes them by asserting “techno-centric gaze” as the reason many citizens remain excluded in the T&A ecosystem. They, hence, suggest the adoption of “a human-centric approach” which centres on “identifying the contextual social norms and structural power relations that explain the use and non-use of citizen participation technologies” (2017, p. 4) and introduce the Five ‘A’s framework to analyse the appropriateness of ICT against its intended users.

The scientific world of ICT has often explored the nature of ICT and uses theory of affordances (Gibson, 1986)²⁸ borrowing from the field of ecological psychology to deduce the relational and, thus, unneutral nature of ICT. “Affordances are always relative to something and, in the context of ICT, relative to desirable goals or strategies...”²⁹. Specifically, in the context of ‘ICT4D’ (ICT for Development which ICT-enabled T&A is part of), affordance is defined as “the potential for behaviours associated with achieving an immediate concrete outcome and arising from the relation between the object (e.g. IT artefact) and a goal-oriented actor or actors” (Volkoff & Strong, 2013)³⁰.

Linking these to the previous section’s discussion on addressing conceptual and technical challenges in T&A processes, online platforms and/or tech-applications in Indonesia are only as effective in enhancing citizens’ participation as offline

platforms' success in improving people's understanding of why it matters and what change can be expected from effective participation. The interplay of online and offline relies highly on the ability of an initiative to recognise and manoeuvre the complexity of context differences, user-feature spectrum including users socio-economic and education status as well as at which government layer(s) it wants and is expected to operate. To illustrate the notion of affordances in Indonesia's ICT4D context, I will use Sinergantara's exploration in its learning paper³¹.

Sinergantara has found three patterns of interplay between the online and offline platforms. Pattern #1 is when the online platform is created to improve what has been done in the offline platform, showing its advantages in speed, accuracy, volume of data transferring. EMAS initiative for maternal survival, for instance, has experienced this pattern optimally. Seeing its success with affordance lens, the strategy of the innovator to tackle matters of urgency with SMS gateway matches with the goal of its users. When a midwife transfers necessary information to a referral hospital about a mother in labour with high-risk pregnancy, both expect and rely on speedy and accurate transfer.

The second pattern is the use of offline platform to improve performance of the online platform. This is seen particularly in the context where online platform is a replication or scaling project applied in a new location; hence, facing different social, political and cultural contexts. When the Regent of Bojonegoro, Mr. Suyoto, first adopted the online grievance system LAPOR! from the national level in 2014, his citizens were still used to lodging complaints face-to-face or through a radio. Hence, the Regent established a weekly meeting offline to discuss follow-ups of the lodged complaints. Applying affordances theory in this, the strategy of the designer/

owner of LAPOR! at the national level which focused more on receiving voluminous data from citizens across Indonesia in a streamlined process did not match Bojonegoro citizens' expectation to remain having a familiar experience by putting a face or a voice to a name, in ensuring a follow-up. The national government expected a 'speedy relation', while the Bojonegoro citizens sought an 'intimate relation' in complaint handling.

Pattern #3 is called a simultaneous solution where online and offline platforms are established at once. This creates a new 'business process' to problem solving which has never been seen before and, thus, may be difficult to be imagined by potential users. The ICT employed enables the combined platforms to materialise. Game My Village (GMV)³² fits this pattern, where tech application and tools to be utilised in the online platform can only be effective when combined with the 'social modality' of the citizens using them. Data collection by the people for the people using their smartphones synergises to create an activity never imagined by this particular village context. In affordances perspective, GMV's interactivity, comprehensiveness and ease of use are its strength to appeal to the intended users which the designer has aptly captured. Envisioning citizen participation in a broader sense beyond complaint lodging, hence in a more pre-emptive perspective rather than curative, when strategizing has seemed to enable intended users' acceptance of something totally new in their daily life.

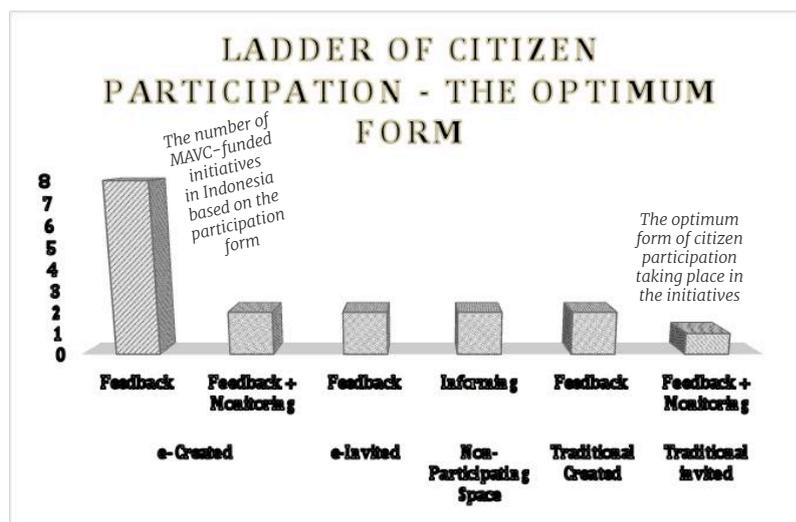
My rapid trial with affordances approach needs to be accompanied by strategist's/ designer's further examination on who the intended users really are. Since only one from the three examples above has a quite specific intended group of users, i.e. midwives; it is helpful for other initiatives which intend to target more variety of users to be assiduous in recognising who

would likely use with relative ease and who would be excluded without further customisation. Participation with the use of smartphones at the village level, for instance, may exclude villagers from lower socio-economic backgrounds. On top of that, participation in the village planning process, may require knowledge or familiarity on certain subjects accessible only to those who are more educated.

Through its three proposed patterns, Sinergantara has explored contextual differences to be accommodated through the perspective of the innovation/initiative. From the perspective of potential users, it is equally important to recognise the optimum form of participation one can expect when engaging in governance and T&A processes. Web Foundation/OD Lab's paper brings its attention to Offenhuber's "ladder of participation in civic technologies" (2015) when observing this through 19 MAVC initiatives from 18 funded partners in Indonesia.

institutions to change the system. Contacts with the external were maintained to get resources and technical advice, but citizens retain control over how resources are used.

Applying the ladder to analyse MAVC initiatives in Indonesia and linking it to affordances theory, it is important to be reminded that the design of a governance/T&A space determines the expected stratum of citizen participation. The chart in Figure 1 below shows the distribution of the optimum form that can be expected from citizen participation through all T&A initiatives under MAVC programme in Indonesia, using Offenhuber's ladder as a framework.



Source: Web Foundation/OD Lab's MAVC-Indonesia National Paper p.8

The ladder identifies 'compliance', 'feedback' and 'monitoring' as the lowest to middle strata which positions citizens as an outsider. From citizens' viewpoint at these strata, they are not part of problem definition, information-gathering processes, nor do they take charge of the analysis. The agents responsible for this – external to the citizens – are under no obligation to reckon with their views. The fourth stratum is 'co-production' where citizens start to become part of the internal process by being involved in planning, implementing and managing. At the highest stratum is 'self-governance' where citizens take their own initiatives independently of the external

The X-axis of the chart above collects all MAVC initiatives in Indonesia and distinguishes them into created and invited spaces, both online (e-created and e-invited) and offline (traditionally created and invited), also in a non-participating space. It then categorises the initiatives, anonymously, according to the optimum form can possibly be expected of citizen participation in each of them. The Y-axis represents the number of MAVC initiatives in Indonesia in which a particular form of citizen participation takes place. The chart shows that most MAVC-funded initiatives in Indonesia happen in e-created spaces

and accommodate citizens participation in the form of feedback, a second-lowest stratum in the Offenhuber's ladder. Feedback is also the optimum form of citizen participation in e-invited spaces where there is a fewer number of initiatives take place. An equal number of initiatives, accommodating feedback form of participation takes place in traditionally created spaces.

Monitoring, a form of citizen participation at the middle stratum of Offenhuber's ladder, takes place in a few initiatives within the e-created spaces like CSK, GMV and ICW's as well as INFEST's initiatives (see Table 1 in the beginning of this paper). In traditionally invited spaces, its most salient example is 'Friday Dialogue' of Regent Suyoto in Bojonegoro as discussed in the previous section. This illustration speaks volumes about how rare an effort it remains the design of a space that can accommodate a higher stratum of citizen participation in Indonesia. And through the initiatives with monitoring as the optimum form, we can see the potential of how desirable it is to encourage participation at the higher strata, i.e. co-production and self-governance.

It is also interesting to point out that these potential initiatives mostly happen within the sub-national sphere of the government system. With LAPOR! as an evident example of national initiative designed to invite citizen participation in the form of feedback, the question remains on how to synergise and systemise good governance efforts into the national sphere. There remains a big gap to fill in enhancing citizen participation to a more active form at the national scale.

To conclude this section, I would like to reemphasise the importance of how the design of a T&A space determines the form of citizen participation and connect it to the significance of perspective change

discussed in the previous section. Both the innovators/initiatives and the users would benefit from a paradigm change that focuses on pre-emptive efforts instead of curative ones like grievance handling, to be able to envision co-creating and self-governing forms of active participation. A further challenge would be in synergising potentially good governance initiatives in the sub-national regions with the national sphere. Also, in instigating and then systemising innovations and initiatives that allow more engaged and equal forms of participation.

3. Partnership & Collaboration - Capability & Functioning as Enablers & Intermediaries

Web Foundation/OD Lab Jakarta assesses that more than 70% of the T&A initiatives under MAVC Indonesia can be categorised as created spaces, with four out of five of these have used ICT in mediating citizens' interactions. Created by the MAVC Indonesia partners, these spaces are located in several cities across different islands. This depiction indicates that the CSOs continue to play a leading role in advancing democratic rights of the citizens in Indonesia. They have also been able to successfully integrate ICT into the system design. Recognising the wide range of organisations that can be classified as CSOs, it is useful to be clear about what this paper defines as CSOs. Borrowing from Nugroho (2011, p. 762) a CSO is "an autonomous, democratic societal entity, as expressed in organisations independent of the state and of corporate structure" which in this context enables society and citizens to participate in governance and T&A processes as well as intermediating the communication between citizens and the government during such processes.

Learning paper of Yayasan Kota Kita³³ deals with the role of CSOs and NGOs as enablers and intermediaries in

Indonesia’s T&A ecosystem, particularly in supporting development planning process (Musrenbang). Adopting Sen’s capability approach (1985) in the context of CSOs and NGOs, the paper defines ‘agency’ as the active role of CSOs/NGOs in pushing for T&A in development planning processes. Appreciating the original concept of agency which focuses on individual capacity to act independently and to actively pursue the wellbeing of themselves and their community, Kota Kita sees a CSO’s independence and commitment to actively push for T&A in Musrenbang process as an ‘organisational agency’. With this kind of agency, a CSO utilises its capacity and resources to achieve its mission and vision of societal change.

Actively pushing for T&A in public service delivery through Musrenbang process makes T&A the ‘functioning’ or the targeted achievement; while ‘capabilities’ are defined as factors influencing agency, i.e. choice, resources, opportunities and socio-political context which operate in what Frediani (2010) identifies as ‘capability space’ (p.178-180).

The paper concludes with six roles a CSO can choose in exercising its organisational agency, i.e. as initiator, facilitator, monitor and mentor, supporting system, capacity developer and advocate. These roles, Kota Kita asserts, have not changed much from the essential roles CSOs needed to take back during the starting period of Musrenbang. This was when many CSOs and NGOs focusing work on good governance were just thriving in post-autocracy climate. The difference in the present time and future is that the capacity and forms of movement when taking the roles should be able to keep track of and attune to technological advancement. While this conclusion is derived from an observation towards Musrenbang processes, it bears relevant to the more general context in which other CSOs and NGOs for democracy and development operate. Hence, the summary table of CSOs/NGOs Capability Space to achieve T&A presented below provides insights for all enablers and intermediaries working in T&A ecosystem in Indonesia.

Table 5 - Summary of CSOs’ & NGOs’ Capability Space in Indonesia’s T&A ecosystem

CSOs/NGOs Vision		Functioning (Ideal Condition)
Roles in Exercising Agency	Opportunity, Resources & Context	CSOs/NGOs Vision
Monitoring the process of participatory budgeting & planning	<p>Opportunity: Accountability mechanism is not yet fully open and accessible to the public.</p> <p>Resources: ICT.</p> <p>Socio-political context: political commitment from multi-stakeholder, active and responsive citizens towards advancement of information system.</p>	<p>Achievement of good governance with multi-stakeholder’s involvement.</p> <p>Improved quality of public services.</p>

CSOs/NGOs Vision		Functioning (Ideal Condition)
Mentoring the public in the process of participatory budgeting & planning	<p>Opportunity: Access to information still has not reached all layers of society.</p> <p>Resources: Mentoring and facilitating skills of CSOs/NGOs.</p> <p>Socio-political context: dynamic condition of society, consistent supply of mentors.</p>	Existence of civil strength to be proactive and empowered.
Facilitating the development of capacity building model for government and the people	<p>Opportunity: A space to develop participatory planning and budgeting model in keeping up with technological advancement and modernity.</p> <p>Resources: Innovation and creativity of CSOs/NGOs</p> <p>Socio-political context: Government support and openness towards improvement and modernity.</p>	<p>Existence of civil strength to be proactive and empowered.</p> <p>Improved quality of public services.</p>
Initiating more participatory and open planning and budgeting model E.g.: IPGI, JERAMI, and FORMASI (associations of CSOs/NGOs)	<p>Opportunity: With government regulation non-existing, CSO-led initiatives can push for drafting of relevant regulations to fit with the existing circumstances.</p> <p>Resources: human resources within the CSOs/NGOs to support the development of the participatory model and T&A system.</p> <p>Socio-political context: multi-stakeholder commitment at the local and national levels and strong citizen participation.</p>	Strengthened regulatory support for government's accountability and transparency.

CSOs/NGOs Vision		Functioning (Ideal Condition)
Implementer of advocacy pushing for participatory budgeting & planning processes	<p>Opportunity: Existing regulation has not accommodated people's aspirations.</p> <p>Resources: Capacity in advocacy and intensive communication with the decision makers.</p> <p>Socio-political context: Government openness in accepting feedback.</p>	Strengthened regulatory support for government's accountability and transparency.
Supporting system in technology utilisation and transfer of knowledge	<p>Opportunity: A space to develop participatory planning and budgeting model in keeping up with technological advancement and modernity.</p> <p>Resources: Innovation and creativity of CSOs/NGOs.</p> <p>Socio-political context: Government support and openness towards improvement and modernity.</p>	Improved quality of public services.

Source: Translated from Yayasan Kota Kita's MAVC-Indonesia National Paper p.10-12

The first section of this paper discusses the significance of partnership and collaboration amongst CSOs, between CSOs and skilled and active ICT users-citizens, as well as between CSOs and government at the different layers. The summary table above suggests the kinds of collaboration and partnership to be had when CSOs exercise their organisational agency. Equipped with different resources and seeing different opportunities even if within the same socio-political context, it is strategic to collaborate and partner with others to fill each other's gap, especially if targeting impacts on the national scale.

In addressing the conceptual and technical challenges citizens face in participating, as previously discussed, a CSO can take a role as supporting system in technology utilisation and transfer of knowledge (the last row in Table 5). This entails the function of an enabler to navigate interchangeably in the online and offline avenues as performed by MAVC Indonesia funded partners. To fluidly move and manoeuvre between created and invited spaces, a CSO can take a role as initiator and monitor of more open and participatory planning models and processes (the first and fourth rows in Table 5). These

roles intermediate between the need to systemise transparent and participatory decision-making models by working along with government to enact supporting regulations; and the need to demonstrate and push for more meaningful and equally positioned forms of participation from the citizens.

Moving Forward with the Learning

This paper endeavours to highlight three factors the national learning papers have shared as crucial for effective ICT-enabled initiatives in improving governance and pushing for more transparent and accountable government in Indonesia: i> interaction of government invited spaces and citizens/non-government created spaces; ii> interplay between offline and online platforms; iii> partnering and collaboration of CSOs/NGOs as enablers and intermediaries. In its discussion, it has come to several understanding and implications shared below:

UNDERSTANDING

- Interaction of government invited spaces and citizens/non-government created spaces is quite fluid. As shown in INFEST exploration in the first section, it requires effective partnership with fellow CSOs, regular observers, as well as skilled and active adopters of innovations. This fluid interaction, however, is subject to the style of leadership and bureaucracy on the government side.
- Whether in created or invited spaces, there needs to be an 'empathetic' interplay between online and offline platforms. The cases of BIGS, INFEST and SINERGANTARA illustrate how potential ICT users in T&A ecosystem need to be well informed about the 'conceptual' importance of why

T&A should matter to them before embarking on technological innovation adoption. The conceptual understanding is usually strengthened offline, while the technical capacity is enhanced through online means.

- Web Foundation/OD Lab Jakarta emphasises the importance to acknowledge how the design of a T&A space determines the form of citizen participation. And since most T&A initiatives in Indonesia still only accommodate citizens participation in the form of feedback, a less active form of participation, there is a need to innovate and push for more active and equally positioned forms of participation from the citizens.
- Partnership and collaboration to manoeuvre in created and invites spaces, both online and offline, materialise through the work of capable and committed CSOs and NGOs as enabler and intermediary. They have the option to exercise the following essential roles as initiator, facilitator, monitor, mentor, supporting system, capacity developer and advocate.
- Although these roles, as Yayasan Kota Kita asserts, remain the same as when Indonesia just entered its post-autocracy period, CSOs' current and future capacity and commitment would need to keep track of and attune to technological advancement.

PRACTICAL IMPLICATION

- As discussed in BIGS learning case, initiatives aim to scale up ICT innovations would need to recognise from the get-go the kind of 'user-feature spectrum' they would expect participation from and to strategize accordingly. The spectrum includes targeted users, beneficiaries, the public and the 'victims'.

- The cross-cutting feature of victims as ICT users found in most T&A initiatives in invited and created spaces suggests a curative perspective in decision making, as opposed to preventive. This paradigm should be transformed to enable envisioning of more active and equally positioned forms of citizen participation as Web Foundation/OD Lab Jakarta discusses. Rather than expecting ICT users to participate by raising grievances when a T&A problem has occurred, users should become part of pre-emptive efforts, co-creating and safeguarding good governance processes to remain mutually accountable.

POLICY IMPLICATION

- Since contextual details and user-design relationship matter, a rather top-down replication of information systems and tech applications at the sub-national levels of governance system should be handled with more care and caution.
- A further challenge would be in 'bottom-up synergising' of potentially good governance initiatives in the sub-national regions with the national sphere.
- At all levels of government and governance spaces, there remain untapped avenues to instigate and then systemise innovations and initiatives that allow more engaged and equal forms of citizen participation.

ICT application in numerous contexts will benefit from continuous learning on what works and does not that is well documented to provide empirical evidence. Indonesia is lagging on this, while it is in serious need to catch up its knowledge in keeping with its archipelagicly vast and rapidly changing contexts.

Works Cited

- BIGS, Bandung - Fatimah, S.; Widiyanti, S., 2017. *Tipologi Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.
- CIPG, Jakarta - Nugraha, L. K., 2017. *Connecting the dots: Memperkuat interaksi berbagai jenjang pemerintahan Indonesia dalam T&A*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.
- Doll, W. J. & Torkzadeh, G., 1989. A discrepancy model of end-user computing involvement. *Management Science*, 35(10), pp. 1151-1171.
- Fox, J., 2001. Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society Policy Advocacy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, p. 616-27.
- Fox, J., 2016. *Scaling Accountability Through Vertically Integrated Civil Society Monitoring and Advocacy*, Brighton, UK: Making All Voices Count Working Paper, IDS.
- Frediani, A. A., 2010. Sen's Capability Approach a framework to practice of development. *Development in Practice*, 20(2), pp. 173-187.
- Gaventa, J., 2006. Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, November, 37(6), pp. 23-33.
- Habermas, J., 1984. *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society..* Boston, Massachusetts: Beacon Press.
- Hammond, M., 2010. *What is an affordance and can it help us understand the use of ICT in education?*, Warwick: Springerlink, Univeristy of Warwick.
- INFEST, Yogyakarta - Ibad, M. I.; Fauzan, A., 2017. *Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Transparansi dan Akuntabilitas yang didorong oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.

Mc.Gee, R. et al., 2015. *Making All Voices Count Research and Evidence Strategy*, Brighton: IDS.

Ngwenyama, O. K. & Kalle, L., 1997. Groupware environments as action constitute resources: A social action framework for analysing groupware technologies. *The Journal of Collaborative Computing*, Issue 6, pp. 71-93.

Nugroho, Y., 2011. Opening the black box: The adoption of innovations in the voluntary sector - The case of Indonesian civil society organisations. *Research Policy*, 40(5), p. 761-777.

OECD, 2016. *Open Government in Indonesia*, s.l.: OECD.

Offenhuber, D., 2015. *Civic Technologies: Tools or Therapy*, s.l.: Keynote Lecture at Ars Electronica.

Roberts, T. & Hernandez, K., 2017. *The Techno-centric Gaze: Incorporating citizen participation technologies into participatory governance processes in the Philippines*, Brighton, UK: Making All Voices Count, IDS.

Rogers, E. M., 1995. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Free Press.

Sen, A., 1985. *Commodities and capabilities*. Amsterdam: North-Holland.

Sinergantara - Srimarga, I.C., Wibowo, A., Aisah, S., 2017. *Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi untuk Memperkuat Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi serta Keselarasan Interaksinya dengan Platform Offline*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.

Thapa, D. & Hatakka, M., 2017. *Understanding ICT in ICT4D: An Affordance Perspective*. s.l., Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS).

World Wide Web Foundation's Open Data Lab Jakarta, 2017. *Towards an Effective Citizen Interaction in Invited Space in Indonesia: A Human Action Perspective*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.

Yayasan Kota Kita, Solo - Asterina, N.; Rifai, A., 2017. *Mengenal Ruang Kapabilitas dalam Upaya Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi: Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) - Potret Organisasi Masyarakat Sipil sebagai Enabler*, Jakarta: Unpublished MAVC Learning Paper.

Notes

1. Revy Sjahrial is an independent socio-development researcher, who has been part of country-based Research Outreach Team of MAVC managed by IDS, UK and led the learning documentation process of MAVC in Indonesia managed by Hivos.
2. (Mc.Gee, et al., 2015, p. 10)
3. Idem p.26
4. Based on confirmation by Indonesia's Country Engagement Developer, Ria Ernunsari at Hivos ROSEA.
5. Further elaboration of the programme is available at <http://www.makingallvoicescount.org/about/>
6. Indonesia was among the initiator of OGP in 2011. Indonesia co-chaired the Partnership in 2012-2013 and is a member of its Steering Committee until 2018. OGP is implemented in Indonesia through Open Government Indonesia (OGI).
7. (Fox, 2001) and (Fox, 2016)
8. (Rogers, 1995)
9. (Habermas, 1984)
10. (Ngwenyama & Kalle, 1997)
11. (Offenhuber, 2015)
12. (Doll & Torkzadeh, 1989)
13. (Sen, 1985)
14. (Frediani, 2010)
15. (Gaventa, 2006) <http://www.powercube.net/analyse-power/spaces-of-power/> [accessed on 19 Nov 2017]
16. (OECD, 2016)
17. (CIPG, Jakarta - Nugraha, L. K., 2017)
18. (INFEST, Yogyakarta - Ibad, M. I.; Fauzan, A., 2017)
19. (BIGS, Bandung - Fatimah, S.; Widiarti, S., 2017)
20. APOR! was originated from UKP4, the previous Presidential Working Unit in development monitoring and control, to enable citizens sending aspirations/reports/complaints about development program through ICT means. More in <https://lapor.go.id/>.
21. LAPOR BOS was initiated by MOEC to accommodate citizens' complaints related to the use of school operational fund (BOS) at public schools. More in <http://bos.kemdikbud.go.id/index.php/complaint>.
22. JSC was first developed by the Special Provincial Government of Jakarta Capital. Jakartans can monitor government performance through QLUE application which allows citizens' reports/complaint to be sent and followed up by the

- Provincial/Municipality government. More in <http://smartcity.jakarta.go.id/>.
23. CSK deals with the education communities' grievances related to public school service in 4 cities in Indonesia (Semarang, Makasar, Palangkaraya and Batang). Transparency International Indonesia (TII) is the implementer. More in <http://ceksekolahku.or.id/>.
 24. EMAS aims to reduce maternal and neonatal mortality rates and covers 6 provinces, 30 districts, 150 hospitals and 300 community health centres. Implementers are Jhpiego, Yayasan Budi Kemuliaan and Muhammadiyah funded by USAID. More in <https://emasindonesia.org/>.
 25. GDM, based in Banyumas, Central Jawa, aims to establish village autonomy through ICT . Yayasan Gedhe Nusantara is the initiator. More in <http://desamembangun.id/>.
 26. SID was initiated by Combine Resource Institution (CRI) in Yogyakarta. It aims to pool and be the hub of village data needed for development. More in <https://www.combine.or.id/tag/sid/>.
 27. SMS Iklim & Cuaca was first developed by Pikul, a Kupang-based NGO. It's an SMS-gateway to distribute climate and weather information from BMKG (Indonesia's National Weather Service) to farming/fishing communities. More in <http://www.perkumpulanpikul.org/2014/07/bersama-petani-nelayan-mengembangkan-sistim-informasi-iklim-dan-cuaca/>.
 28. Quoted in (Hammond, 2010) p.1
 29. Idem p.12
 30. Quoted in (Thapa & Hatakka, 2017) p.2619
 31. (Sinergantara - Srimarga, I.C., Wibowo, A., Aisah, S., 2017)
 32. GMV aims to improve the quality of citizen participation in development planning, implementation and monitoring processes at the village level by providing accurate and up-to-date data collected by the villagers themselves. More in <http://sinergantara.or.id/tag/game-my-village/>.
 33. (Yayasan Kota Kita, Solo - Asterina, N.; Rifai, A., 2017)

Mengenal Ruang Kapabilitas dalam Upaya Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), (Potret Organisasi Masyarakat Sipil sebagai Enabler)

Oleh : Nina Asterina & Ahmad Rifai | Yayasan Kota Kita

Pendahuluan

Inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara berinteraksi pemerintah dan warga negaranya dan memungkinkan terciptanya proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah berlangsung secara terbuka atau transparan. Making All Voices Count (selanjutnya MAVC) Indonesia melihat kesempatan ini sebagai peluang nyata untuk mengarusutamakan platform akuntabilitas di Indonesia guna tercapainya transparansi, penguatan masyarakat, pemerintahan yang efektif dan terpercaya melalui pendayagunaan teknologi dan informasi (www.makiangallvoicecount.org). Inisiatif ini telah dikembangkan di Indonesia sejak 2014 dengan fokus sentral yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan layanan publik melalui open data serta mendukung terciptanya *good governance* dalam sistem pemerintahan yang didesentralisasi dari jenjang tertinggi hingga ke jenjang terendah, termasuk jenjang pemerintahan desa (MAVC Indonesia, 2017).

Tulisan ini akan mempresentasikan sebuah catatan pembelajaran yang diambil dari pengalaman aktor-aktor pelaku yang berperan dalam inisiatif yang didorong oleh MAVC Indonesia. Kerangka besar yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah bagaimana peran pelaku dalam turut memperbaiki layanan publik melalui ruang-ruang akuntabilitas dan transparansi yang diciptakan. Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, Yayasan Kota Kita yang menjadi mitra kerja MAVC, telah mendokumentasikan pengalaman partisipasi warga dalam Musrenbang - Musyawarah Perencanaan Pembangunan - sistem perencanaan dan penganggaran di lima kota yaitu Surakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta dan satu kabupaten, Kebumen. Untuk kepentingan penulisan pembelajaran MAVC Indonesia, tulisan ini akan melihat secara umum bagaimana ruang intervensi yang dipilih para aktor penengah atau “intermediary” sebagai pemampu atau “enabler” bagi masyarakat. Kerangka teoritik yang dianggap sepadan dengan konsep pemampu itu adalah konsep tentang

“agency, capability dan functioning” yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1992

Metodologi

Tulisan ini bertumpu pada data awal yang dikumpulkan dalam riset yang dilakukan oleh Yayasan Kota Kita pada periode Februari hingga September 2016 (lihat: Rifai, et.al, 2016). Adapun, wawancara tambahan dilakukan guna memperoleh kebaruan perkembangan terkini terkait peran-peran Organisasi Masyarakat Sipil (terjemahan langsung dari Civil Society Organisation atau CSO) yang masih aktif di tiap kota. Wawancara dengan Perkumpulan INISIATIF Bandung, KUPAS Makassar, Jerami dan Yayasan Kota Kita Solo dilakukan

secara langsung, sementara aktor-aktor lain seperti Formasi Kebumen dan Combine Research Institute (CRI) Yogya dilakukan via telepon. Dokumen-dokumen tambahan termasuk informasi dari website organisasi dan berita online menjadi data sekunder yang mendukung penulisan ini.

Agency, Capability dan Functioning dalam melihat peran CSOs

Dalam melihat peran CSOs untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan (Musrenbang), tulisan ini menggunakan pendekatan kapabilitas Amartya Sen (1992), yang menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu *agency*, *capability*, dan *functioning*.

Konsep *agency* digunakan untuk menjelaskan kemampuan seseorang dalam mewujudkan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai, terlepas apakah hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan pribadinya atau di luar itu. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mewujudkan kesejahteraan komunitasnya maka manifestasi *agency*-nya terwujud dalam keterlibatan aktif dalam mendorong pembangunan yang

lebih inklusif. Dalam konteks kajian ini, *agency* bisa dipakai untuk melihat peran aktif kelompok masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan. Secara umum, organisasi masyarakat sipil dapat dianggap sebagai kelembagaan dengan *agency*, atau kemampuan untuk mengerahkan sumber daya nya untuk mencapai tujuan dan visi tertentu terkait perubahan di dalam masyarakat. Namun, *agency* juga bisa dipakai sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana masyarakat umum telah mampu secara mandiri mengupayakan kesejahteraan yang ingin dicapai

Selanjutnya, *functioning* dimaknai sebagai pencapaian seseorang dan terdiri dari beberapa aspek dalam kehidupan (seperti kesehatan yang prima, pendidikan yang baik, pekerjaan yang mapan, kesenangan dan lain-lain). Untuk mencapai *functioning* tersebut, *agency* atau kemampuan aktif tersebut harus dimiliki dimana sangat dipengaruhi oleh kondisi, sumber daya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Itulah yang sering kemudian disebut sebagai *capability*.

Untuk lebih mempertegas alur analisis kajian ini, penulis mengambil secara langsung model analisis berbasis pemikiran Sen yaitu ruang kapabilitas (*capability space*) (Frediani, 2010). Model analisis ini nampaknya akan tepat untuk melihat model intervensi organisasi masyarakat sipil terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Jika akuntabilitas dan transparansi diasumsikan dengan *functioning*, maka medan atau ruang dimana terdapat faktor-faktor dan juga pilihan intervensi yang dapat diambil dalam meraih tujuan disebut sebagai ruang kapabilitas.

Ruang kapabilitas ini berisi rangkaian berbagai faktor yang menentukan kondisi seseorang / institusi dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan (*functioning*

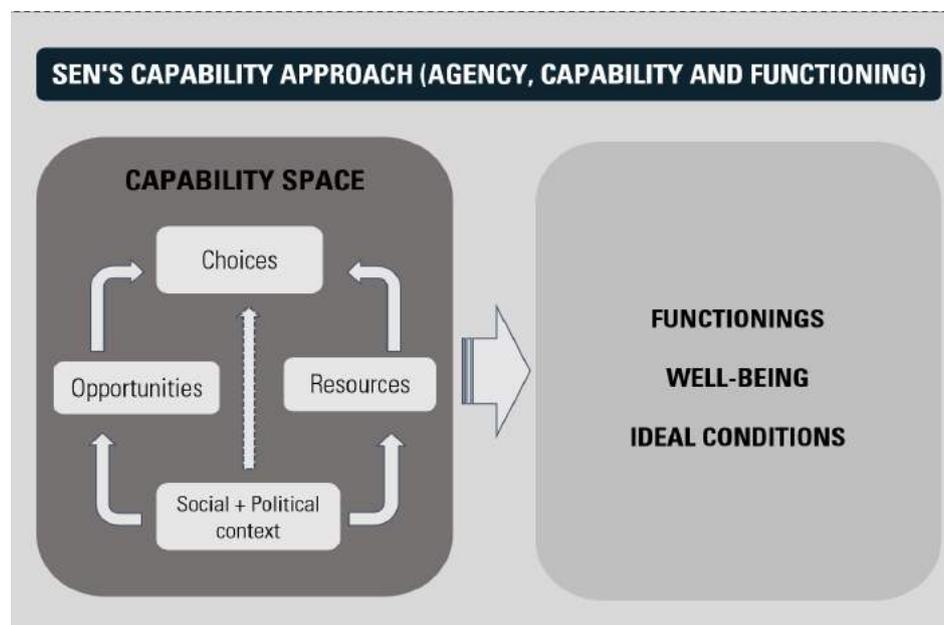
atau well-being). Dalam konteks ini, status “functioning” yang diinginkan (ideal) adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam layanan publik. Akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai

pandangan akan dikupas tersendiri dengan berbagai kerangka analisis yang memungkinkan memahami skenario ideal yang diinginkan. Seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini:

yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai alur pikir kerangka teoritis ini akan dibahas relevansinya pada bagian analisis temuan

Analisa Functioning : Kondisi Ideal yang Diperjuangkan Para Aktor

Berkaitan dengan kerangka ruang kapabilitas, organisasi masyarakat sipil bisa dikatakan sebagai pemegang “agency” karena mereka bergerak



Gambar 1. Kontekstualisasi Ruang Kapabilitas
(Diambil dengan sedikit pengembangan dari Frediani, 2010)

Diilustrasikan pada gambar 1 tersebut, Sen's capability approach menjadi kerangka acuan berpikir dalam analisis tulisan ini dimana capability space yang meliputi pilihan (choices), sumber daya (resources), peluang (opportunities), dan konteks sosial politik (social and political context) saling terhubung membangun ruang-ruang kapabilitas bagi organisasi masyarakat sipil sebagai agency untuk bergerak menuju pencapaian (functionings) kinerja dimana kondisi ideal diharapkan dapat tercapai melalui upaya yang direncanakan dan dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil

sebagai representasi kelompok dalam hal menyusun keinginan perubahan dan menuangkannya dalam bentuk visi dan misi yang ingin diwujudkan. Secara sadar, mereka menentukan langkah dan mendesain intervensi untuk mengubah atau memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi-kondisi ideal inilah yang menjadi target, dan sering diasosiasikan sebagai “functioning” atau “well-being”. Dalam konteks ruang perencanaan partisipatif (Musrenbang), kelompok masyarakat sipil menginginkan perubahan-perubahan dan perbaikan di berbagai lini, misalnya aspek

partisipasi, aspek kapasitas masyarakat, perubahan kebijakan dan juga perbaikan kesejahteraan secara umum melalui layanan atau proyek yang menjadi realisasi dari Musrenbang.

Tulisan ini mencatat ada setidaknya empat kondisi ideal terkait akuntabilitas dan transparansi yang menjadi fokus dari beberapa kelompok masyarakat sipil.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melibatkan multi-pihak (good governance)

Kondisi ini berkaitan dengan 'siapa yang terlibat' dan 'bagaimana mekanisme partisipasi yang dapat diakses' untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan bertanggungjawab. Kuncinya adalah organisasi masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai 'enablers' yang memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi melalui prosedur yang tepat. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat sipil pada tataran implementasi kegiatan tidaklah cukup, partisipasi secara menyeluruh harus menyentuh sejak tahapan perencanaan. Dalam konteks musrenbang, ide mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah payung besar dalam gerakan partisipasi masyarakat dalam rencana kelurahan, desa, hingga tingkat kota.

McCarney P, et.al. (1995) menjelaskan bahwa ide tentang *good governance* adalah setali tiga uang dengan akuntabilitas dimana ruang ideal yang ingin dicapai adalah adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan warganya atau negara dengan civil society dalam bingkai hak dan tanggung jawab. Lebih jauh lagi "good governance" membutuhkan penegakan akuntabilitas hak dan kewajiban negara,

masyarakat sipil dan pasar. Wood (1997) juga menjelaskan dalam melihat peran organisasi masyarakat sipil tidak lepas dari hubungan segitiga (triangle) antara negara, pasar dan masyarakat sipil. Dimana dalam konteks pembangunan menuju kesejahteraan, peran organisasi masyarakat sipil sering selalu dikaitkan dengan aktor yang meminta akuntabilitas dari negara dan pasar.

Dalam kerangka ini, organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Kota Kita, Perkumpulan Inisiatif, dan Jerami melihat dan menjadikan "good governance" sebagai kondisi ideal. Misalnya Yayasan Kota Kita yang menjunjung tinggi partisipasi sebagai model utama pencapaian kota yang ideal (kota untuk semua - *a city for all*). Keterlibatan multi-pihak menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan perubahan pembangunan perkotaan. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan pengembangan transfer pengetahuan (pedagogi), membuat informasi kota tersedia dan mudah diakses (transparansi), dan memfasilitasi serta mendorong keterlibatan multi-pihak (partisipasi), utamanya bagi masyarakat yang terpinggirkan dan dikecualikan, Yayasan Kota Kita berkomitmen untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat mengakomodasi kebutuhan warganya (Kota Kita, n.d.).

Sementara itu, Perkumpulan INISIATIF yang semula berada dalam payung *Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives* (IPGI) dalam mempromosikan perbaikan tata pemerintahan lokal melalui pendekatan kemitraan, kemudian memfokuskan haluannya pada peningkatan derajat kehidupan kelompok marjinal serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat

akan pemerintahan yang repsonsif, akuntabel, dan transparan. Kondisi ini diinginkan untuk dicapai melalui empat inisiatif, yaitu reformasi kebijakan publik, reformasi perencanaan dan anggaran, pengembangan komunitas, dan manajemen pengetahuan sebagai bagian dari pendekatan kemitraan (Inisiatif, n.d) yang kesemuanya mengarah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jerami memiliki visi untuk mengaregasi inisiatif lokal dan daerah baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jerami kemudian membuat road map yang disederhanakan ke dalam tiga misi, yaitu membantu komite lokal untuk agregasi pengurangan kemiskinan yang lebih baik, pengembangan kapasitas dalam pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, advokasi tingkat kota untuk kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Jerami menyadari benar bahwa kondisi akuntabilitas dan transparansi yang ideal diinginkan agar dalam proses perencanaan pembangunan mempertimbangkan faktor partisipasi dimana dukungan multi-pihak menjadi signifikan sebagai upaya penguatan proses tersebut dan melegitimasi hasil yang telah didokumentasikan.

2. Munculnya kekuatan masyarakat sipil yang pro-aktif dan berdaya

Aspek kapabilitas dalam ruang kontestasi Musrenbang juga menjadi perhatian beberapa kelompok masyarakat sipil, dan hampir sebagian besar organisasi masyarakat sipil dalam cakupan riset ini secara manifest menyebut penguatan kapasitas sebagai kondisi penting yang harus diwujudkan. Secara umum pemaknaan tentang partisipasi aktif masyarakat sipil

dimaknai bukan hanya ketertarikan untuk terlibat dan datang pada proses Musrenbang, namun lebih jauh bisa mempengaruhi dan membawa perubahan dalam lingkungannya. Dengan kata lain, dalam kondisi ideal, kekuatan partisipasi tidak melulu berkaitan dengan jumlah partisipan, tetapi juga pada substansi partisipasi. Dalam mendorong partisipasi, kondisi ideal seperti adanya transparansi menjadi signifikan sebab dengan adanya kebebasan dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaannya, dan pencapaian hasilnya dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk memantau akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Kemampuan-kemampuan teknis dalam mengelola partisipasi juga menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil, misalnya bagaimana aspek fasilitasi diskusi lebih bisa deliberatif dan menyusun prioritas proyek.

Sebagaimana disadari bahwa transparansi dalam bentuk ketersediaan dan penyebaran arus informasi mengenai kebijakan, program, alokasi sumber daya, dan hasilnya merupakan elemen inti dari tata kelola pemerintah yang baik (Brinkerhoff, 2005) juga efektifitas partisipasi masyarakat sipil (Brinkerhoff dan Wetterberg, 2013). Dalam mencapai masyarakat yang pro-aktif dan berdaya, perluasan arus informasi akan berkontribusi pada prediksi dan alokasi sumber daya, pemanfaatan layanan yang lebih baik, melalui sistem informasi manajemen, atau perencanaan partisipasif dan penganggaran. Penguatan interaksi antar multi-pihak dapat meminimalisir

terjadinya asimetri informasi, selagi menguatkan pemantauan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sebagai contoh, Yayasan Kota Kita melakukan fokus pada upaya memunculkan aktor-aktor yang terberdayakan. Melalui literasi informasi berbasis kelurahan, upaya memperkuat kemampuan aktor lokal untuk bisa merencanakan dengan efektif. Diskusi yang deliberatif dengan basis informasi yang kuat diharapkan mampu membantu masyarakat menyusun prioritas pembangunan berbasis data / bukti (*evidence based priority*). Upaya lain misalnya melalui berbagai pendidikan masyarakat dan memperkuat munculnya fasilitator lokal. Gerakan Kota Kita juga punya kemiripan dengan KUPAS Makassar yang mendorong keterbukaan informasi dengan harapan mampu mendobrak kebisan proses dalam Musrenbang. LSM lain yang juga melakukan pendekatan penguatan berbasis informasi adalah Combine Resource Insituuion (CRI), dimana memperkuat basis informasi di desa untuk membedah status-quo.

CRI sendiri mengidamkan tercapainya kondisi dimana warga berdaya dan terpenuhi hak sosial, politik, dan ekonominya secara berkeadilan dan berbasis kearifan lokal. Bermula dari pengembangan radio komunitas, CRI mengarah pada penguatan institusi lokal dan jejaring serta pengembangan sistem informasi dan teknologi yang tepat guna. Komitmen CRI dalam mewujudkan kondisi ideal tersebut diwujudkan dengan mengintegrasikan dan membangun jaringan antarmedia komunitas berbasis internet, guna mempermudah arus pertukaran informasi dan pengetahuan. Hal ini menjadi penting mengingat dengan adanya transparansi informasi dapat

menjadi landasan dalam melakukan perubahan sosial, dan memudahkan pengartikulasian kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang pro-rakyat.

3. Kokohnya regulasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah tidak bisa lepas dari adanya sokongan dari regulasi yang menjadi payung bagi perwujudan kondisi tersebut. Pada sistem transparansi, ada dua hal yang menjadi penting untuk dipertimbangkan, yaitu untuk melekatkan informasi pada proses pengambilan keputusan dan kegiatan. Yang kedua, pemberitahuan informasi dan tanggapan pengguna informasi tersebut semestinya sejalan dengan tujuan kebijakan itu sendiri (Fung, et.al.,2014). Hal ini dikarenakan target perubahan di level kebijakan juga menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil.

Dalam riset yang dilakukan Kota Kita bersama MAVC, ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang mendedikasikan gerakan perubahannya pada perubahan yang lebih *top-down*. Jerami Solo misalnya menarget adanya garis regulasi yang tegas tentang perencanaan partisipatif di Kota Solo yang lebih long-term oriented. Visi ideal itu terlihat dari bagaimana mereka melakukan gerakan advokasi kebijakan kota dengan mendesak adanya peraturan walikota dan atau Perda penanggulangan kemiskinan dan Rencana Pembangunan Kelurahan Jangka Menengah yang disingkat RPJMKel.

FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) di Kebumen membangun upaya adanya peraturan tentang partisipasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan juga memastikan secara regulatif tentang peran serta masyarakat dalam Musrenbang. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan desa, jaringan, dan ekonomi kerakyatan.

4. Membaiknya kualitas layanan publik

Dalam skema penyediaan layanan publik, inisiatif alternatif yang dapat mewadahi proses akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, adalah melalui *community-driven development* atau CDD (Levy, 2014). Mekanisme ini mengharuskan adanya prioritas bagi keputusan yang dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tulisan ini, hasil yang dicapai melalui Musrenbang. Pembahasan dalam penyelenggaraan mekanisme ini setidaknya mencakup bagaimana sumber daya digunakan dan keterlibatan masyarakat penerima manfaat, dengan mewaspadaikan kemungkinan terjadinya korupsi di segala lini, guna mencapai keputusan dan hasil kolektif, serta membaiknya kualitas layanan publik.

Sebagai contoh, KUPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil) di Makassar melakukan penguatan masyarakat sipil dengan mewadahi inovasi strategis melalui inovasi penyediaan informasi dan memperkuat hubungan (kemitraan) dengan jejaring organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam guna mengembangkan model-model alternatif pemberdayaan masyarakat sipil. Inisiatif baik dari KUPAS dengan model partisipatif ini diarahkan guna meningkatkan kualitas layanan publik di Makassar.

Para Aktor sebagai Enablers dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam konteks ruang kapabilitas, kelompok masyarakat sipil memiliki pilihan (*choices*) dalam menentukan perannya sebagai *enablers* pada proses akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, yang dalam tulisan ini berfokus pada penyelenggaraan Musrenbang. Sejalan dengan hal tersebut, temuan studi Yayasan Kota Kita

menggarisbawahi beberapa peran organisasi masyarakat sipil dalam konteks partisipasi lokal (Rifai, et.al., 2016) dimana organisasi masyarakat sipil terkait memaksimalkan potensi sumber daya (*resources*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang berbeda di masing-masing daerah, sehingga berpengaruh pula pada *functionings / well-being / ideal condition* yang ingin dicapai.

1. Organisasi masyarakat sipil sebagai inisiator model perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif dan terbuka

Mengambil peranan sebagai inisiator mengindikasikan bahwa organisasi masyarakat sipil telah memiliki kesiapan, baik dari segi ketersediaan sumber daya maupun adanya peluang untuk menerapkan inisiatif tersebut. Menilik dari kiprah organisasi lama seperti IPGI (*Institute for Partnership and Good Governance Initiative*), tidak dapat ditampikan bahwa peranan IPGI dalam mengembangkan model perencanaan dan penganggaran partisipatif di Indonesia sangatlah besar. IPGI berhasil memprakarsai terselenggaranya forum Musyawarah Membangun (atau dikenal sebagai Musbang) di Solo pada tahun 2000. Dengan diinisiasinya forum

tersebut, organisasi masyarakat sipil berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Solo untuk melibatkan warga masyarakat dalam forum partisipatif di tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Adanya kolaborasi tersebut mengindikasikan situasi sosial dan politik yang mendukung inisiatif tersebut. *Functioning* dari tindakan aktif dari IPGI ini adalah guna membangun dan menguatkan kapasitas kontrol masyarakat pada proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memantau akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut. Perlu diketahui, Musbang inilah yang menjadi fondasi awal digagasnya Musrenbang yang diaplikasikan secara nasional sejak tahun 2004, setelah adanya penguatan regulasi mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) melalui UU No. 25 Tahun 2004. Masih dari Solo, JERAMI juga merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang memiliki inisiatif untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi perencanaan di tingkat kelurahan pada proses Musrenbang. Selain itu, JERAMI juga menginisiasi dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan kerja sama multi-pihak dalam menggali serta menemukan kembali semangat partisipasi publik dalam setiap agenda perencanaan pembangunan.

Adapun di Kebumen, FORMASI memiliki peran yang sangat sentral dalam mendorong reformasi kebijakan pengembangan desa dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas penganggaran. Upaya ini dimulai pada tahun 2000, dimana FORMASI mulai melakukan advokasi penyusunan regulasi untuk proses penganggaran,

termasuk mendorong adanya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dari kabupaten, serta meningkatkan kapasitas perangkat desa. Upaya yang dilakukan selama beberapa tahun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2004 dengan disahkannya Perda No. 3 / tahun 2004 mengenai Anggaran Dana Desa dan Perda No. 12 / Tahun 2004 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Organisasi masyarakat sipil sebagai pelaksana advokasi untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif

Salah satu peran organisasi masyarakat sipil yang sangat penting adalah mempromosikan pentingnya proses partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran serta pembangunan secara umum melalui advokasi. Sebagai contoh, di Yogyakarta, IDEA sudah sejak lama aktif melakukan advokasi penganggaran partisipatif untuk perubahan kebijakan penganggaran baik di tingkat kota dan nasional. Adapun di Surabaya, jaringan advokasi dan transparansi penganggaran, yang dikenal dengan nama Java Sutra, juga mempunyai peran dalam mengadvokasikan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Di Kebumen, K3D (Komite Kajian Kebijakan Desa) memiliki peran yang signifikan sebagai mediator dalam mengadvokasi hak masyarakat.

3. Organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas terhadap proses perencanaan dan penganggaran partisipatif

Terkait perencanaan dan penganggaran partisipatif, organisasi masyarakat sipil juga mengambil peranan untuk

melaksanakan monitoring sebagai bentuk mekanisme *check and balance* bagi pemerintah guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Dalam hal ini, KUPAS berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk mendorong adanya transparansi sebagai mekanisme monitoring publik melalui pemanfaatan penggunaan teknologi dan informasi.

FORKADA (Forum Advokasi Kebijakan & Anggaran Daerah) terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen, memiliki peranan yang sama dalam konteks wilayah pedesaan di Kebumen. FORKADA sendiri merupakan sayap dari FORMASI Kebumen yang menangani langsung tentang kebijakan daerah, berperan dalam meningkatkan kapasitas legislatif dalam mengoptimalkan peran penganggaran yang mereka miliki.

4. Organisasi masyarakat sipil sebagai pendamping terhadap masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif

Riset yang dilakukan oleh Yayasan Kota Kita juga menemukan bahwa beberapa organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat terutama dalam merangkul segala lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pembangunan. Sebagai contoh, di Bandung, Yayasan Akatiga membantu masyarakat marginal dalam mengakses sumber daya melalui pendampingan terhadap proses pembuatan kebijakan publik, sedangkan PRAKSIS memiliki fokus pada peningkatan inklusi sosial dan ekonomi dari kelompok rentan di Bandung. Pendampingan juga ditujukan untuk merangkul kelompok rentan, seperti penyandang cacat, perempuan, dan anak, menuju inklusivitas. Misalnya

saja di Solo, InterAksi dan Yayasan Talenta memiliki fokus

untuk mendorong partisipasi kelompok penyandang cacat. Beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya bergerak untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong partisipasi perempuan, seperti SPEK-HAM di Solo, KPI di Kebumen, Savy Amira di Surabaya, LPMP di Makassar, dan PKBI di Bandung yang memiliki fokus pada isu gender secara lebih luas. Selain itu, SARI Solo dan INDIPT (Institute for Social Strengthening Studies) di Kebumen melakukan pendampingan terhadap buruh migran.

5. Organisasi masyarakat sipil sebagai fasilitator dalam pengembangan model peningkatan kapasitas untuk pemerintah dan masyarakat

Peningkatan kapasitas untuk pemerintah dan masyarakat merupakan aspek penting dalam perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif dan terbuka mengingat sumber daya manusia merupakan subjek pembuat perubahan. Sebelum UU SPPN disahkan di tingkat nasional, organisasi masyarakat sipil di Bandung sudah lebih dahulu secara aktif mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Salah satu lembaga yang cukup aktif dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah kota dan masyarakat adalah Sawarung (Sarasehan Warga Bandung), yang merupakan aliansi dari LSM dan organisasi akar rumput di Bandung yang didirikan sejak tahun 1999. Peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Sawarung ini meliputi peningkatan kapasitas pada sektor *good governance* dan aspek transparansi.

Sama halnya dengan Bandung, pembelajaran dari Solo menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

dari adanya organisasi masyarakat sipil dalam hal peningkatan kapasitas dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Konsorsium Solo, yang didirikan pada tahun 2007 oleh gabungan dari 14 LSM di Kota Solo, mendorong keterlibatan berbagai asosiasi di kota seperti asosiasi becak, sektor informal, seniman, dan lain sebagainya dalam perencanaan pembangunan di Kota Solo. Di Makassar, FIK Ornop, yang merupakan forum komunikasi dan informasi untuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak sejak tahun 1981, telah bekerja dalam penguatan jaringan LSM dan stakeholder terkait (Triwibowo). Salah satu fokus kerja dari FIK Ornop ini adalah mendorong partisipasi publik dalam implementasi dan monitoring kualitas pelayanan publik, yang dilakukan melalui pembuatan modul mengenai partisipasi dan advokasi kebijakan publik. Selain itu, Center of Economic Development (CoED) di Makassar juga bekerja untuk mendorong kapasitas ekonomi masyarakat.

Di Yogyakarta, peran pendampingan dan fasilitasi terkait dengan isu transparansi dan pembangunan dilakukan oleh Yayasan Satunama yang berkecimpung di dalam ranah pemberdayaan masyarakat. Adapun di Kebumen, selain berperan sebagai inisiator, FORMASI secara progresif juga memberikan pelatihan kepada perangkat desa untuk memperkaya pengetahuan terkait dengan perencanaan dan manajemen anggaran dan memperkuat kapasitas perangkat desa sebagai motor perubahan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pedesaan.

6. Organisasi masyarakat sipil sebagai sistem pendukung dalam pendayagunaan teknologi dan transfer pengetahuan

Aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan mendorong adanya transparansi. Oleh karena itu, salah satu peran sentral organisasi masyarakat sipil di beberapa Kota di Indonesia dalam mendorong akuntabilitas adalah dalam bentuk penyediaan dukungan teknologi dan transfer pengetahuan baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Di Makassar, YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) mendorong literasi anggaran melalui riset dan peningkatan kapasitas di level masyarakat, sedangkan KUPAS memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong penggunaan teknologi dalam proses perencanaan dan penganggaran di level kota. Upaya ini dilakukan melalui pembuatan platform Musrenbang online yang kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang memuat informasi lain mengenai RPJMD dan RKPD sehingga sistem perencanaan lebih terintegrasi dalam satu platform. Sejalan dengan yang dilakukan oleh KUPAS, Combine (Community Based Information Network) juga memberikan dukungan dalam upaya pengaktualisasian *good governance* di sistem pemerintahan desa di Provinsi Di Yogyakarta melalui dukungan teknologi yang disebut dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang menampilkan profil dan potensi desa, data penduduk, kerja-kerja pemerintah desa, artikel karya jurnalis warga, serta informasi publik yang wajib disediakan pemerintah desa yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat.

Bentuk dukungan yang berbeda lain berupa penyediaan perangkat dan pengetahuan diberikan oleh beberapa institusi di kota lain. Yayasan Kota Kita di Solo berperan dalam pengumpulan dan penyediaan data di tingkat kelurahan sebagai media informasi yang membantu masyarakat dalam perencanaan dan prioritas usulan di dalam Musrenbang. Siddikara Foundation di Bandung memiliki peran sebagai pusat riset yang menganalisis isu dan permasalahan sosial budaya termasuk dalam hal akuntabilitas. Sementara di Yogyakarta, INSIST (Indonesian Society for Social Transformation) membantu

memperkuat proses transformasi sosial melalui analisis kritis dan mendorong revitalisasi kebijakan.

PEMBELAJARAN YANG DIAMBIL

Ruang kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tata kelola yang baik, dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, yang didukung oleh adanya peluang dalam konteks politik dan sosial yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil mengambil peranannya masing-masing demi terwujudnya kondisi ideal yang diinginkan sebagai suatu agency.

Ruang Kapabilitas		Kondisi Ideal
Peranan sebagai agency (choices)	Peluang, Sumber Daya, dan Konteks	Visi Organisasi Masyarakat Sipil
Pengawas terhadap proses perencanaan dan penganggaran partisipatif	<p>Peluang: Mekanisme akuntabilitas yang belum sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.</p> <p>Sumber daya: Teknologi dan informasi</p> <p>Konteks sosial dan politik: Komitmen politik multi-pihak, masyarakat yang aktif dan responsif terhadap pembaruan sistem informasi.</p>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melibatkan multi-pihak (good governance)</p> <p>Membaiknya kualitas layanan publik</p>
Pendamping terhadap masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif	<p>Peluang: Keterbatasan akses informasi di semua lapisan masyarakat.</p> <p>Sumber daya: Kemampuan pendampingan dan fasilitasi organisasi masyarakat sipil</p> <p>Konteks sosial dan politik: Kondisi masyarakat yang dinamis, konsistensi tenaga pendamping</p>	Munculnya kekuatan masyarakat sipil yang pro-aktif dan berdaya

<p>Fasilitator dalam pengembangan model peningkatan kapasitas untuk pemerintah dan masyarakat</p>	<p>Peluang: Adanya ruang untuk pengembangan model perencanaan dan penganggaran partisipatif seiring perkembangan zaman dan teknologi.</p> <p>Sumber daya: Daya cipta dan kreasi (inovasi dan kreativitas) organisasi masyarakat sipil</p> <p>Konteks sosial dan politik: Dukungan dari pemerintah dan keterbukaan terhadap kebaruan.</p>	<p>Munculnya kekuatan masyarakat sipil yang pro-aktif dan berdaya</p> <p>Membaiknya kualitas layanan publik</p>
<p>Inisiator model perencanaan dan penganggaran yang</p>	<p>Peluang: Belum adanya peraturan dari pemerintah, sehingga inisiasi yang diprakarsai organisasi masyarakat sipil berpeluang untuk dapat menguatkan regulasi terhadap kondisi yang ada.</p>	<p>Kokohnya regulasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah</p>
<p>lebih partisipatif dan terbuka</p> <p>Contoh: IPGI, JERAMI, dan FORMASI</p>	<p>Sumber daya: Adanya kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi masyarakat sipil yang mendorong pengembangan model dan sistem akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>Konteks sosial dan politik: Adanya komitmen politik dari multi-pihak di skala lokal maupun nasional, dan partisipasi masyarakat yang kuat.</p>	
<p>Pelaksana advokasi untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif</p>	<p>Peluang: Regulasi yang ada belum mewadahi aspirasi masyarakat.</p> <p>Sumber daya: Kapasitas advokasi dan komunikasi intensive dengan pengambil kebijakan</p> <p>Konteks sosial dan politik: Keterbukaan pemerintah dalam mendengar masukan.</p>	<p>Kokohnya regulasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah</p>
<p>Sistem pendukung dalam pendayagunaan teknologi dan transfer pengetahuan</p>	<p>Peluang: Adanya ruang untuk pengembangan model perencanaan dan penganggaran partisipatif seiring perkembangan zaman dan teknologi.</p> <p>Sumber daya: Daya cipta dan kreasi (inovasi dan kreativitas) organisasi masyarakat sipil</p> <p>Konteks sosial dan politik: Dukungan dari pemerintah dan keterbukaan terhadap kebaruan.</p>	<p>Membaiknya kualitas layanan publik</p>

Secara umum, tulisan ini menyimpulkan bahwa ruang kapabilitas dalam mendorong akuntabilitas Musrenbang yang digeluti oleh kelompok masyarakat sipil berada pada enam ranah besar yaitu membangun pilot model, fasilitasi, pengawasan dan pendampingan, supporting system, pengembangan kapasitas dan advokasi. Ruang ini sebenarnya tidak bergeser jauh dari apa yang ditemukan pada periode-periode awal munculnya Musrenbang dan merebaknya kelompok masyarakat sipil yang mengawal good governance. Antlov, et.al. (2005) menyebutkan bahwa NGOs Indonesia yang merupakan entitas masyarakat sipil menguat seiring runtuhnya rezim Suharto, dan membangun ruang gerak pada penguatan ruang akuntabilitas negara terhadap publik melalui bangunan good governance, akuntabilitas dan transparansi publik. Praktek monitoring serta “watchdog” juga menguat pada waktu itu. Temuan lain oleh Sumarto (2003) yang menyebutkan peran-peran seperti “peningkatan kesadaran publik”, “advokasi kebijakan”, “pengembangan institusi”, dan “pengembangan kapasitas”, tampaknya juga masih relevan dengan refleksi ini. Dengan demikian ruang kapabilitas saat ini, sebagai medan aktualisasi agency dari aktor enabler masih memiliki relevansi dan keterkaitan dengan strategi atau pilihan opsi gerakan di masa lalu. Konsistensi ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan pendekatan “bottom-up” , mendorong perubahan dari bawah, dan sekaligus memuluskan agenda perubahan kebijakan dari atas (top-down).

Analisa tentang ruang kapabilitas ini bisa berguna sebagai pijakan dimana dan apa yang bisa diperbaiki oleh gerakan masyarakat sipil dalam konteks akuntabilitas perencanaan partisipatif. Variasi opsi gerakan seiring dengan bertumbuhkembangnya teknologi sangat mungkin diperlukan dimasa mendatang.

Inovasi dan adaptasi akan menentukan sejauh mana nanti kapabilitas meningkat seiring dengan tuntutan jaman.

Daftar Pustaka

- Ackerman, John, 2004, “Co-governance for Accountability: Beyond ‘Exit and Voice’”, *World Development*, Vol 32, No 3, pp 447 – 463
- Antlov, H., Ibrahim, R. and Van Tuijl, P. 2005, “NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country”. Retrieved from: <http://202.154.59.182/ejournal/files/NGO%20GOVERNANCE%20AND%20ACCOUNTABILITY.pdf>
- Brinkerhoff, Derick W, 2005, *Accountability and good governance: Concepts and issues*. In: Huque AS and Zafarullah H (eds) *International Development and Governance*. New York: CRC Press, pp. 269–289.
- Brinkerhoff, Derick W and Anna Wetterberg, 2013, *Performance-based public management reforms: experience and emerging lessons from service delivery improvement in Indonesia*, *International Review of Administrative Sciences*, Vol 79, No 3, pp 433–457, DOI: 10.1177/0020852313491059.ras.sagepub.com
- BIGS, n.d., *Visi dan Misi*, diakses pada 29 September 2017, <http://bigs.or.id/in-brief/vision-and-mission?lang=en>
- Cornwall, Andrea, 2004, “Introduction: New Democratic Spaces? The Politics and Dynamics of Institutionalized Participation”. *IDS Bulletin* 35 : 2 , 1–10. DOI:10.1111/j.1759-5436.2004.tb00115.x
- CRI, n.d. *Visi dan Misi Organisasi*, diakses pada 29 September 2017, <https://www.combine.or.id/profil-2/visi-misi-lembaga/>
- FORMASI, n.d. *Visi dan Misi*, diakses pada 29 September 2017, <http://www.formasi.org/visi-misi/>

- Frediani, Alexandre Apsan, 2010, "Sen's Capability Approach a framework to practice of development", *Development in Practice*, 20:2, 173-187, DOI:10.1080/09614520903564181
- Fung, et.al., 2004, *The political economy of transparency: what makes disclosure policies effective?* Harvard University.
- Goetz, A.M. and R. Jenkins, 2001, 'Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public Sector Oversight in India', *Public Management Review*, Vol 3. Issue 3, pp 363 – 383.
- Inisiatif, n.d. Sejarah Inisiatif, diakses pada 29 September 2017, http://inisiatif.org/?page_id=8029.
- Jerami, n.d. Profil Organisasi, diakses pada 29 September 2017, <http://jeramisolo.blogspot.co.id/2011/09/yayasan-jerami.html>
- Kilby, Patrick, 2006, "Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-Government organisations", *World Development*, Vol 34, No. 6, pp. 951-963.
- Kota Kita, n.d., Kota Kita: About us, diakses pada 29 September 2017, <http://www.kotakita.org/about-us>
- KUPAS Makassar, n.d. Visi dan Misi, diakses pada 29 September 2017, <https://kupasmakassar.wordpress.com/visi-misi-2/>
- Levy, Brian, 2014, *Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies*.
- MAVC n.d., *Making All Voices Count: What we do in Indonesia*, diakses pada 3 Agustus 2017, <http://www.makingallvoicescount.org/country/indonesia/>
- McCarney P, Halfani and Rodriguez, 1995, "Towards an understanding of governance" in R. Stren and JK Bell, *Perspectives on the City*, University of Toronto
- Paul, Samuel, 1992, "Accountability in Public Services: Exit, Voice and Control" *World Development*, Vol. 20, No. 7, pp 1047-1060.
- Rifai, Ahmad, et al., 2016, *Making All Voices Count: Improving The Transparency, Inclusivity, and Impact of Participatory Budgeting in Indonesian Cities*. MAVC. Nairobi.
- Schedler, A, 1999, "Conceptualising Accountability" in A Schedler, L. Diamond and M.F. Plattner (eds) *The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Boulder
- Sen, Amartya, 2009, "The Idea of Justice", *The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts*
- Sen, Amartya Kumar, 1992, "Inequality Reexamined", *Harvard University Press, Harvard, USA*
- Sumarto, Hetifah SJ, 2003, "Inovasi, Partisipasi dan Good Governance; 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia", *Yayasan Obor Indonesia*
- White, Sarah C., 1996, "Depoliticising Development: The Uses and Abuses of Participation", *Development in Practice*, Vol. 6, No. 1, pp. 6-15.
- Wood, Geof, (1997) "States without citizens: the problem of the franchise state" from NGOs, states and donors: too close for comfort? pp.79-92, Basingstoke: Macmillan in association with Save the Children ©

Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Memperkuat Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi (TAP) serta Bagaimana Keresasian Interaksi Antara Platform Online dan Platform Offline

Oleh: Ilham Cendekia Srimarga, Agus Wibowo dan Siti Aisah | Sinergantara

Pendahuluan

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (atau sering disingkat dengan TAP) adalah jantung dari good governance yang menjadi tumpuan untuk terciptanya demokrasi yang substansial. Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), muncul berbagai inisiatif untuk mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan memanfaatkan TIK tersebut di berbagai ruang publik. Pemanfaatan TIK tersebut oleh banyak pihak diharapkan dapat menjadikan demokrasi substansial dapat lebih nyata terwujud, karena TIK dianggap dapat membawa kemudahan, kecepatan, keleluasaan jangkauan yang dapat membantu terciptanya relasi yang adil antara negara dan warga negara.

Making All Voices Counts (MAVC), sebuah inisiatif kolaborasi organisasi-organisasi masyarakat sipil level internasional untuk mendorong pemanfaatan TIK dalam

sektor governance, telah mendukung lebih dari 200 inisiatif penguatan TAP dengan memanfaatkan TIK di 8 negara Asia-Afrika. Sekitar 40 inisiatif di antaranya telah dilakukan di Indonesia, baik berupa inovasi, riset maupun skaling-up dari good practice terkait TIK dan TAP. Tulisan ini bermaksud menemukan sejumlah learning atas pemanfaatan TIK dalam mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di Indonesia berdasar pengalaman dari 8 mitra MAVC di Indonesia. Dari kedelapan mitra tersebut, lima mitra mengembangkan inovasi atau penguatan kapasitas pada stakeholder yaitu: FIK ORNOP Sulawesi Selatan, Sinergantara, Women and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII), Open Data Lab (ODL), dan Save The Children. Sementara tiga mitra melakukan riset yaitu: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Bandung Institute of Governance Studie

(BIGS), dan Perkumpulan Prakarsa.

Tulisan ini akan mengambil learning dengan mengamati inovasi-inovasi dari kelima mitra yang melakukan pengembangan inovasi, serta mengamati topik-topik yang diteliti dari tiga organisasi mitra yang melakukan riset. Selain itu, sebagai perbandingan kami juga mewawancarai tiga NGO lain yang sudah lama berpengalaman dalam mengembangkan advokasi penguatan TAP sejak lama ketika pemanfaatan TIK dalam penguatan TAP belum banyak dilakukan. Ketiga organisasi tersebut adalah: YAPPIKA, PATTIRO dan Indonesia Parliamentary Centre (IPC). Dari pengalaman ketiga lembaga tersebut kami hendak mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang muncul ketika TIK belum dimanfaatkan dalam memperkuat advokasi TAP.

Tulisan ini terutama akan menjawab pertanyaan mengenai: (1) bagaimana efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP); dan (2) bagaimana keserasian interaksi antara platform online dan platform offline dalam mendukung efektifitas tersebut. Yang dimaksud platform online disini adalah relasi-relasi warga negara dan lembaga-lembaga pemerintah yang diperantarai dengan perangkat-perangkat TIK. Sedangkan yang dimaksud platform offline adalah relasi-relasi warga negara dan lembaga-lembaga pemerintah yang terjadi tanpa perantara perangkat-perangkat TIK tersebut.

Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang kami lakukan untuk menjawab pertanyaan di atas adalah dengan melihat dan memahami transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dari sisi aktor, aksi dan informasi. Dalam ranah pembangunan dan kehidupan bernegara aktor-aktor (yang kami sederhanakan sebagai pemerintah dan

warga negara) memiliki relasi dalam berbagai urusan, mereka berinteraksi dan melakukan aksi-aksi informasi. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan bagian dari interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara dan warga negara tersebut khususnya untuk menjadikan relasi tersebut adil, bermanfaat dan tumbuh berkembang. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terjadi dalam bentuk pengiriman dan penerimaan informasi di antara aktor-aktor tersebut. Dalam hal ini, proses-proses pengiriman dan penerimaan informasi tersebut memiliki arah, kualitas, dan sifat.

Dengan pendekatan tersebut, pembahasan dalam tulisan ini akan lebih berfokus melihat TAP dari aspek aksi-aksi informasi dibanding sebagai aspek norma, kerangka sosiologis atau kerangka legal-politik. Karena dengan dilihat TAP dari sisi aksi-aksi tersebut, akan lebih mudah dipahami bagaimana TIK dapat berkontribusi, atau gagal memberi kontribusi pada penguatan TAP. Dengan memahami bagaimana aliran-aliran informasi tersebut berlangsung, termasuk memahami secara visual, akan lebih mudah diketahui bagaimana peran TIK dalam memperkuat aksi-aksi pertukaran informasi tersebut.

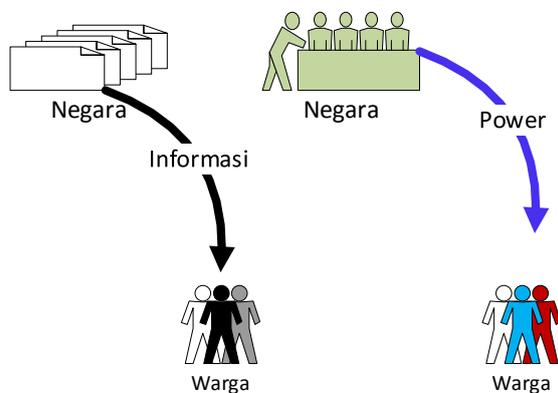
I. Penguatan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi (TAP)

1.1. Transparansi

Transparansi dipahami sebagai suatu proses mendorong / menjadikan informasi mengalir dari lembaga-lembaga negara menuju warga negara atau publik, seperti dalam gambar 1 dibawah. Informasi dalam transparansi bisa berupa dokumen-dokumen publik, informasi anggaran pembangunan, informasi atas proses-proses pembahasan kebijakan dan lain-lain. Dalam hal ini, terdapat kualifikasi yang membedakan proses pengaliran

informasi tersebut sebagai transparansi atau bukan sebagai transparansi (seperti sosialisasi, pemberitahuan atau disseminasi). Proses tersebut akan disebut sebagai proses transparansi jika: (1) informasi yang mengalir bebas dan tidak dikendalikan atau diseleksi terlebih dahulu oleh aktor-aktor penyedia informasi; (2) volume informasi yang mengalir tersebut dibiarkan sebanyak mungkin, hingga seluruh informasi yang tersedia mengalir.

Gambar 1.



Informasi mengalir, bukan berarti informasi tersebut akan habis secara bendanya. Tapi mengalirnya informasi ini akan menghabiskan kerahasiaan dari informasi tersebut, yang berarti juga mengalirkan kontrol atas informasi tersebut dari negara kepada warga. Dalam hal ini, ketika transparansi dilakukan, negara dengan sadar dan volunteer membiarkan terjadinya power sharing dengan warga negaranya.

Kami menekankan bahwa transparansi tidak cukup diartikan bahwa informasi tersebut terbuka. Tapi lebih penting lagi informasi tersebut harus dapat diakses oleh publik. Pengertian diakses ini menyiratkan bahwa informasi tersebut harus mengalir (ketika diminta ataupun secara serta merta) dari lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyedia informasi kepada publik sebagai pihak yang berhak atas informasi tersebut.

Tranparansi di Indonesia

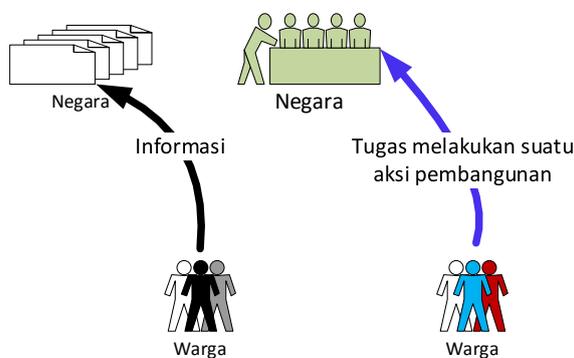
Mulai tahun 2000 an, transparansi telah menjadi agenda dari berbagai inisiatif transformasi governance di Indonesia. Apa yang didorong pada waktu itu adalah agar informasi publik menjadi bebas diakses oleh publik. Sejumlah besar Civil Society Organization (CSO) di tingkat nasional dan di tingkat sub-nasional (propinsi dan kota/kabupaten) aktif membangun gerakan dan advokasi untuk mendorong terjadinya transparansi tersebut. Dorongan dari CSO-CSO tersebut, dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti partai politik, DPR, dan sektor privat, membuahkannya dengan disahkannya UU no 14/2008 mengenai Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Bersamaan dengan itu, khususnya setelah UU KIP tersebut disahkan, transparansi mulai didorong masuk ke sektor-sektor riil seperti pelayanan publik, procurement, kontrak pemerintah, keparlemenan dan lain-lain. Sejauh ini, menurut IPC (Indonesian Parlemetary Centre) transparansi di badan-badan publik di Indonesia, seperti KPU (Komisi Pelayanan Umum) sudah meningkat dengan diberlakukannya sejumlah aksi seperti penyediaan PPID (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumen) dan penerapan SOP Pelayanan Informasi.

Namun transparansi di lembaga-lembaga pemerintah masih mengalami sejumlah hambatan. Antara lain hal tersebut terjadi karena proses pelayanan informasi belum memanfaatkan TIK. Misalnya adalah sulitnya bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan penyampaian informasi secara menyeluruh karena keterbatasan media penyampaian informasi dalam bentuk cetak, serta sulitnya warga untuk melakukan pengajuan informasi kepada lembaga-lembaga publik.

1.2. Partisipasi

Gambar 2.



Partisipasi, seperti juga transparansi, dapat dipahami sebagai suatu proses aksi-aksi informasi antar aktor. Partisipasi pada dasarnya terjadi karena lembaga negara membuka pintu atau mengundang informasi dari warga negara mengalir masuk. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa proses tersebut melibatkan keaktifan dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan warga. Pemerintah aktif dalam mengundang atau setidaknya mengkondisikan supaya informasi masuk dari warga. Sedangkan di pihak warga, keaktifan yang diperlukan adalah memproduksi informasi dan mendorong informasi tersebut mengalir masuk ke meja pemerintah.

Konten dari informasi dalam partisipasi, berbeda dengan proses transparansi, adalah informasi mengenai tindakan-tindakan yang warga inginkan untuk dilakukan negara. Misalnya informasi tersebut berupa keinginan atau kebutuhan warga atas pembangunan, komplain atas permasalahan pembangunan. Pengaliran informasi seperti dalam gambar 2 di bawah berarti proses pemberian mandat atau permintaan dari warga kepada negara untuk melakukan sesuatu. Semakin banyak mandat / permintaan dari warga yang diterima oleh lembaga negara, lembaga negara itu dikatakan semakin partisipatif.

Terdapat tiga aspek penting dalam partisipasi yang menentukan kualitas dari partisipasi tersebut, yaitu pertama adalah bagaimana kapasitas warga untuk menghasilkan informasi yang mampu mempengaruhi kebijakan atau prioritas pembangunan. Kedua adalah bagaimana kemampuan warga untuk mengalirkan informasi tersebut hingga sampai ke lembaga-lembaga negara. Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut membuka keran untuk masuknya informasi-informasi yang dikirim dari warga serta meresponnya.

Partisipasi di Indonesia

Partisipasi publik mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Pada mulanya sejumlah CSO (Civil Society Organization) mendorong terjadinya partisipasi masyarakat yang jadi kelompok sasaran dari proyek-proyek pemerintah atau lembaga-lembaga pembangunan internasional. Dimana mereka didorong untuk bisa menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya dalam pembuatan keputusan terkait proyek. Kemudian pada tahun 2000-an, mulai didorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. Partisipasi dalam kebijakan ini mendapat tanah yang subur pada waktu itu karena pada saat itu pemerintah memberlakukan otonomi daerah (kota/kabupaten) melalui UU 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, dengan otonomi daerah, proses pengambilan kebijakan pembangunan dilakukan pada level yang lebih rendah (kota / kabupaten), sehingga proses partisipasi publik menjadi lebih scalable atau memiliki skala yang realistis untuk dijalankan. Jika dibanding sebelum otonomi daerah, dimana segala keputusan publik dilakukan di tingkat pusat, partisipasi publik serasa mengawang-awang. Maka pada era otonomi daerah ini

partisipasi publik terasa lebih membumi. Penerapan UU Desa tahun 2014, kemudian membuat partisipasi publik lebih bisa semakin membumi.

Hal tersebut dikuatkan oleh PATTIRO, yang melihat makin masifnya partisipasi dan makin banyaknya aktor-aktor warga yang terlibat aktif dalam proses-proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa setelah pemberlakuan UU Desa. Namun masih terdapat hambatan, yang hingga saat ini masih mengganjal diterapkannya partisipasi warga, misalnya hambatan kultural, di mana warga desa masih merasa tertekan bila berdialog tatap muka dengan pejabat desa / pejabat kabupaten atau warga masih menghadapi kesulitan untuk melontarkan usulannya dengan mekanisme perencanaan pembangunan seperti yang ada saat ini.

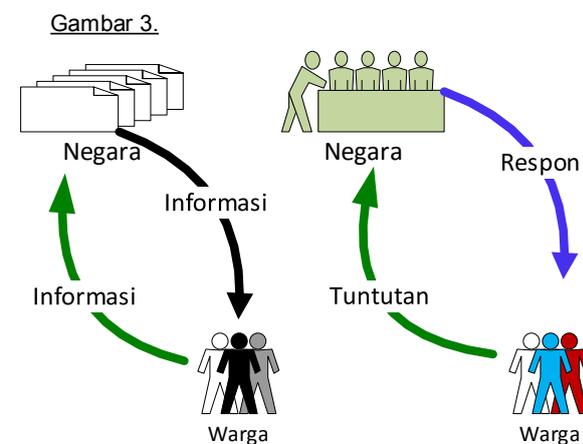
1.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam beberapa pengertian umum disebut sebagai proses tanggung-jawab atau lebih spesifik lagi sebagai proses tanggung gugat. Akuntabilitas dapat digambarkan dengan skema aliran sirkular, yang menyatakan bahwa informasinya mengalir bolak balik dari warga ke lembaga negara dan harus kembali lagi ke warga (lihat gambar 3). Dalam hal ini informasi yang dari warga misalnya berupa pertanyaan atau komplain tentang kondisi pembangunan disampaikan pada pemerintah. Pemerintah, atas adanya informasi ini, kemudian pemerintah memberikan respon (yang bentuknya adalah pengiriman informasi) kepada warga negara tersebut. Respon atas pertanyaan atau gugatan warga tersebut itulah yang disebut proses akuntabilitas.

Keadaan yang akuntabel terjadi ketika negara bersama warga menjadikan aliran informasi yang sirkuler informasi tersebut berjalan. Dalam hal ini, negara membuka saluran yang memungkinkan warga negara menyampaikan informasi,

misalnya berupa berupa komplain atau usulan pembangunan. Ketika informasi tersebut telah sampai pada lembaga negara, maka ketika lembaga negara tidak membiarkan informasi diam disitu saja, tapi direspon dengan memberi informasi yang dibutuhkan warga, maka terjadilah proses akuntabilitas oleh negara.

Akuntabilitas di Indonesia



Akuntabilitas lembaga-lembaga publik banyak secara kuat disuarakan oleh CSO-CSO di Indonesia dengan dukungan lembaga-lembaga pembangunan internasional mulai sekitar 2010. Dorongan terhadap akuntabilitas tersebut muncul menyusul dorongan terhadap transparansi dan partisipasi. Transparansi yang sudah berhasil diterapkan, ternyata dirasakan belum mampu meningkatkan hal-hal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu praktek-praktek pemerintah benar-benar bertanggung-jawab mendengar dan melaksanakan apa yang diminta oleh warga menjadi sangat diharapkan.

Menguatnya tuntutan terhadap akuntabilitas salah satunya terjadi pada pelayanan publik. Setelah UU Pelayanan Publik disahkan pada tahun 2009, banyak suara yang meminta penerapan dari UU Pelayanan Publik tersebut tidak hanya bicara masalah performansi pelayanan,

namun lebih penting lagi adalah pada akuntabilitas pelayanan publik.

Menurut YAPPIKA, akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia setelah UU Pelayanan Publik diterapkan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fenomena yang terlihat adalah para penyelenggara pelayanan publik masih sulit dituntut untuk mempertanggung-jawabkan kinerja pelayanan publik mereka. Selain itu, jika masyarakat mengalami kerugian atau ketidak-puasan atas pelayanan publik, tidak tersedia saluran bagi mereka untuk menyatakan ketidak-puasannya.

II. Penguatan TAP dengan Memanfaatkan TIK

Seiring dengan perkembangan TIK di sektor governance dan munculnya sejumlah inovasi data (Open Data, BIG Data dan Revolusi Data), banyak CSO yang sebelumnya telah bekerja memperkuat TAP mulai mengadopsi TIK dan inovasi-inovasi data untuk memperkuat pekerjaannya. Selain itu, sejumlah CSO baru juga bermunculan untuk memanfaatkan TIK dalam kerja-kerja penguatan TAP.

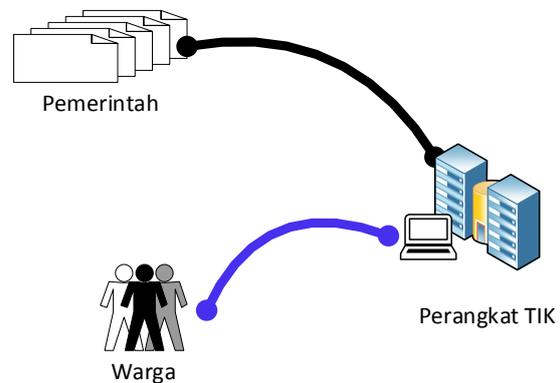
Pemanfaatan TIK dalam mendorong TAP ini menciptakan platform online dalam relasi warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintah. Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menjelaskan makna dari platform online dan platform offline, kontribusi platform online dalam meningkatkan TAP, serta menjelaskan bagaimana keserasian platform online dan platform offline ini akan meningkatkan efektifitas inisiatif TAP.

2.1. TIK sebagai Perantara Komunikasi Pemerintah – Warga Negara

Pemanfaatan TIK baik untuk transparansi, partisipasi maupun akuntabilitas menciptakan relasi antara warga negara dan pemerintah seperti dalam gambar 4 di bawah ini. Gambar 4 tersebut menjelaskan

bahwa ketika TIK digunakan maka komunikasi antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintah menjadi dijumpai oleh perangkat TIK. Perangkat TIK yang hadir di tengah-tengah antara warga negara dengan pemerintah. Sistem komunikasi yang seperti inilah yang disebut sebagai platform online.

Gambar 4.



Dalam transparansi dengan memanfaatkan TIK, misalnya, lembaga pemerintah kini meletakkan informasi yang ditransparansikan tersebut pada perangkat-perangkat TIK seperti server, aplikasi ICT, cell phone, laptop dan lain-lain. Tidak lagi memberikan informasi langsung pada warga negara. Publik atau peminta informasi juga akan berinteraksi dengan perangkat-perangkat ICT tersebut. Bukan lagi dengan pegawai dari lembaga-lembaga pemerintah. Dalam hal ini sifat-sifat yang dibawa oleh TIK akan mempengaruhi karakteristik relasi antara aktor-aktor dan informasi yang terkait dengannya. Sifat-sifat yang dibawa TIK seperti kecepatan tinggi, volume data dalam jumlah yang besar, kemungkinan untuk komunikasi interaktif dan lain-lain, telah berkontribusi pada peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus yang ditunjukkan oleh sejumlah grantee MAVC.

2.2. Hasil Pemanfaatan TIK pada Penguatan TAP

Beberapa hasil dari penerapan TIK pada kualitas TAP dapat dilihat dari pengalaman grantee-grantee MAVC adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan kualitas transparansi karena penerapan TIK membawa peningkatan volume dan kecepatan informasi yang dapat ditransfer dari lembaga-lembaga pemerintah kepada warga negara.

Transparansi seringkali dituntut, khususnya oleh kalangan CSO, adalah transparansi yang utuh, dimana seluruh informasi terbuka dan secara segera bisa sampai tangan peminta informasi. Ketika pemerintah hanya mampu menyediakan informasi dalam jumlah terbatas dan tidak cepat, seringkali nilai informasi tersebut berkurang dan keadaan inilah yang kadang-kadang menyebabkan lembaga pemerintah dianggap tidak transparan. Padahal seringkali kurangnya transparansi tersebut terjadi akibat mereka tidak menggunakan TIK, sehingga sulit menyediakan informasi dalam jumlah besar yang terkirim secara cepat.

Pengalaman dari inisiatif Sistem Informasi Desa (SID) yang diteliti oleh BIGS menunjukkan bahwa pemerintah desa bisa menyediakan informasi terbuka pada warga-warganya ketika mereka telah menerapkan platform SID yang sifatnya online di desanya. Sebelum menggunakan TIK, walaupun pemerintah desa berkomitmen transparan, pemerintah desa kesulitan menyediakan informasi yang dibutuhkan karena jika itu dilakukan akan dibutuhkan kertas yang banyak untuk mencetak informasi.

2. Memfasilitasi munculnya kolaborasi antara penyedia informasi dan

pengguna informasi dengan memperkuat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemanfaatan TIK dalam transparansi memungkinkan terjadinya dialog antara penyedia informasi dan pengguna informasi.

Pada transparansi tanpa TIK, penyedia informasi (umumnya lembaga-lembaga pemerintah) hanya menyediakan informasi searah pada masyarakat tanpa terjadi relasi dialogis. Namun ketika TIK diterapkan pada transparansi maka munculah respon dari masyarakat atas informasi yang tersedia, bahkan kadang-kadang masyarakat juga berkontribusi dengan memberikan informasi yang menguatkan, melengkapi atau menyeimbangkan. Proses tersebut menciptakan situasi kolaborasi antara penyedia informasi dan pengguna informasi, seperti kolaborasi antara pemerintah dan warga negara.

Pengalaman Save The Children dalam mengembangkan sistem feedback dan loop untuk perlindungan anak di Kota Bandung menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat menjadikan anak, keluarga anak dan stakeholder kunci (khususnya pemerintah kota) dapat memahami permasalahan perlindungan anak secara bersama. Hal tersebut karena terjadi persebaran informasi yang dengan diperantarai TIK bisa menjangkau semuanya secara tepat.

Begitu pula, pengalaman PATTIRO dalam mengembangkan situs informasi desa Kedesa.id menunjukan bahwa platform TIK yang digunakannya mengencourage para pengguna informasi Kedesa.id untuk juga terlibat dalam proses-proses kontribusi informasi. Para pengguna informasi Kedesa.id yang terdiri dari pemerinyah desa dan aktifis-aktifis LSM di sektor desa, yang

awalnya datang terlibat karena sekedar mendapat informasi, kemudian menjadi aktif berkontribusi informasi.

3. Terjadinya penurunan entry barrier untuk berpartisipasi mempengaruhi kebijakan. Karena platform online menjadikan komunikasi tidak langsung tatap muka, tapi diperantarai oleh perangkat TIK, maka TIK sangat membantu bagi kelompok warga yang secara kultural mengalami hambatan untuk berkomunikasi secara setara.

Hasil kerja yang dilakukan WYDII (Women and Youth Development Institute of Indonesia) menunjukkan bahwa partisipasi kelompok perempuan meningkat dalam mempengaruhi proses-proses perencanaan pembangunan desa ketika TIK diterapkan. Survey menggunakan SMS atau sosial media pada kelompok perempuan di desa terbukti mampu menjadikan kelompok perempuan bersuara dan karenanya itu pemerintah desa mulai memperhatikan agenda-agenda kelompok perempuan dalam pembangunan desa. Karena dengan pemanfaatan TIK, kelompok perempuan tidak lagi harus berhadapan langsung dengan stakeholder lain dalam menyampaikan pendapat atau keberatan. Saluran yang diciptakan TIK, bisa menjadi saluran eksklusif bagi mereka untuk memberikan masukan.

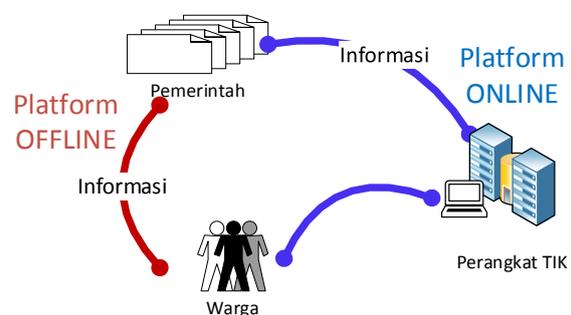
Turunnya entri barrier dalam partisipasi warga tersebut juga terjadi dalam pengaduan complain masyarakat. Study yang dilakukan oleh CIPG (Center for Innovation Policy and Governance) mengenai penerapan LAPOR!SP4N menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi untuk pelaporan complain, meningkatkan keaktifan masyarakat dalam melakukan partisipasi dalam bentuk pelaporan.

III. Keserasisan Online - Offline

Relasi antara warga dengan pemerintah terkait TAP setelah implementasi TIK terjadi dalam bentuk online maupun offline. Relasi online adalah relasi-relasi yang terjadi pada platform online atau relasi yang diperantarai oleh perangkat-perangkat TIK, seperti aplikasi, website, SMS gateway dan sebagainya. Sedangkan relasi offline terjadi ketika warga dan pemerintah berinteraksi tidak melalui perangkat-perangkat TIK tersebut. Relasi offline dapat terjadi dalam bentuk interaksi langsung antara pemerintah dengan warga, misalnya pertemuan tatap muka, forum warga dan lain-lain. Namun dapat pula terjadi dalam bentuk interaksi yang tidak melibatkan pertemuan langsung, misalnya interaksi ketika pemberlakuan regulasi oleh pemerintah dan responnya oleh warga, interaksi yang terjadi dalam proses-proses implementasi proyek-proyek pemerintah, interaksi ketika warga merespon pelayanan publik yang diterimanya dll.

3.1. Transparansi – Akuntabilitas – Partisipasi (TAP) dalam Platform Online dan Platform Offline

Gambar 5



Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, yang melibatkan interaksi antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintah, terjadi baik dalam platform online maupun

dalam platform offline. Interaksi negara – warga negara dalam platform online terjadi ketika proses tukar-menukar informasi dari lembaga pemerintah kepada warga terjadi melalui media perangkat TIK. Sedangkan platform offline terjadi ketika pengaliran informasi tersebut dilakukan tanpa melalui media perangkat TIK.

Inisiatif-inisiatif yang dikembangkan atau diteliti oleh para grantee dari MAVC sebagian telah mengkolaborasikan platform online dan platform offline secara simultan, sebagian mengarah ke sana, dan sebagian lagi masih mencari bentuk bagaimana supaya platform online dan platform offline tidak justru saling meniadakan.

Inisiatif adopsi sistem pengaduan online LAPOR oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, misalnya, menunjukkan terjadinya sinergi antara platform online dan platform offline. Platform offline, yang berupa pertemuan-pertemuan langsung antar warga dan bupati serta pengontrolan langsung oleh bupati atas tindak-lanjut dari setiap komplain (laporan) warga yang dikirimkan melalui aplikasi online LAPOR, menunjukkan terjadinya sinergi tersebut. Integrasi platform online LAPOR pada

platform offline yang telah berkembang di Kabupaten Bojonegoro, menurut hasil riset BIGS dan CIPG, telah meningkatkan respon pemerintah atas pengaduan warga. Hal ini terjadi karena platform online LAPOR yang dibangun mampu melengkapi fungsi dari platform offline mekanisme pengaduan yang terlah ada, sehingga menjadikan warga lebih mudah mengirimkan dan memantau komplainnya pada pemerintah.

Di sisi lain, menurut penelitian BIGS, penerapan sistem LAPOR di beberapa daerah lain yang dilakukan hanya mengandalkan platform online saja dan tanpa diintegrasikan dengan platform offline ternyata memberikan hasil yang kurang memuaskan. Bentuk hambatan yang terjadi misalnya adalah kurang antusiasnya warga menggunakan sistem itu karena warga merasa kurang akrab dengan platform online LAPOR yang didatangkan pada mereka. Di beberapa daerah tersebut, mekanisme komplain dengan cara lebih tradisional seperti pengaduan melalui forum warga, surat kabar atau radio daerah telah ada, ketika diganti dengan aplikasi LAPOR ternyata preferensi warga tidak berubah.

3.2. Karakteristik Platform Online dan Platform Offline

Untuk mempermudah pengertian mengenai platform online dan platform offline, berikut ini kami tampilkan deskripsi kedua platform tersebut dalam bentuk tabel.

	Platform Online	Platform Offline
Bentuknya	Perangkat TIK, aplikasi-aplikasi TIK termasuk prosedur-prosedurnya, sosial media, saluran komunikasi online.	Keterlibatan orang, diskusi-diskusi tatap muka, observasi masalah, ruang pembuatan keputusan, aksi-aksi langsung tanpa diperantarai TIK.
Peranannya	Meningkatkan kinerja dari solusi-solusi atas masalah, melakukan <i>act of enabling</i> .	Memahami masalah, mendefinisikan masalah, menentukan solusi, mengambil keputusan.
Hasilnya	Perluasan jangkauan sebaran informasi, peningkatan kecepatan transfer informasi.	Pemahaman atas masalah, solusi atas masalah, keputusan-keputusan.

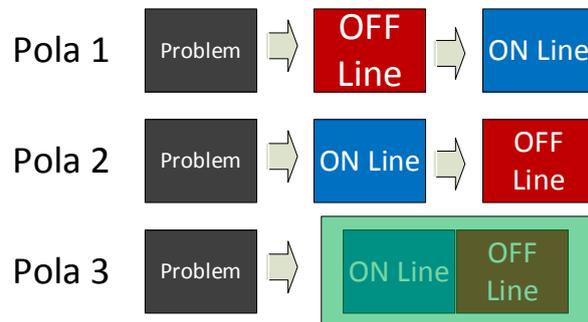
3.3. Proses terbentuknya platform online dan platform offline

Pencapaian solusi atas suatu masalah-masalah publik dengan memanfaatkan TAP dengan TIK umumnya melibatkan interaksi-interaksi antara pemerintah dan warga negara baik secara offline maupun secara online. Umumnya interaksi tersebut dimulai terlebih dahulu dari interaksi secara offline, baru kemudian muncul interaksi online. Atau dengan kata lain ada terlebih dahulu platform offline / solusi offline, yang umumnya sifatnya lebih alami, baru setelah itu dibangun platform online / solusi online. Namun tidak semuanya terjadi dengan pola seperti itu. Beberapa inisiatif justru dimulai dengan dibangun platform online terlebih dahulu, baru kemudian muncul platform offline. Beberapa inisiatif muncul secara simultan platform online dan platform offline.

Terkait dengan itu, Terdapat tiga pola pembentukan platform online dan platform offline yang kami amati dari inisiatif-inisiatif tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6 di bawah ini. Ketiga pola ini menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi pada inisiatif-inisiatif tersebut dalam menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapinya.

Pola pertama, seperti yang disebutkan di atas, yaitu adanya platform offline (solusi offline) terlebih dahulu baru kemudian dibangun platform online (solusi online). Pembuatan platform online tersebut umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas platform offline yang sudah ada. Seringkali ini karena penggagas melihat ada sesuatu yang kurang efektif di platform offline, maka kemudian platform online dibangun. Dalam hal ini solusi atas masalah sebenarnya sudah diketahui, namun perlu dioptimalkan lagi dengan melakukan digitalisasi atas proses-proses.

Gambar 6.



Contoh dari pola ini adalah pada inisiatif EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) dari USAID, yang diteliti oleh BIGS. Inisiatif EMAS tersebut menunjukkan bagaimana platform online sistem perujukan pada ibu-ibu hamil beresiko tinggi dibangun untuk melengkapi platform offline sistem perujukan oleh bidan desa pada para ibu hamil beresiko tinggi ke rumah sakit yang telah ada cukup lama. Solusi offline yang berupa perujukan secara manual tersebut selama ini sudah berjalan, namun dipandang kurang efektif sehingga dibuatkan platform online. Hal tersebut, karena karakteristik dari penanganan ibu hamil membutuhkan kecepatan dan kepastian penyampaian informasi, dan hal itu baru efektif ketika menggunakan TIK.

Pola kedua adalah ketika sudah ada platform online yang telah lama dibangun, namun dirasakan sistem tersebut kurang lengkap, dan kurang terkoneksi dengan perkembangan realitas dunia nyata. Sehingga dirasa diperlukan platform offline tertentu untuk menjadikan sistem tersebut mampu memahami konteks. Bentuk platform offline untuk ini misalnya adalah pelatihan, bantuan teknis, pelibatan warga dalam bentuk forum warga dan lain-lain.

Sebagai contoh adalah dari Open Data Lab Jakarta (ODL Jakarta), dimana ODL Jakarta datang ke lembaga pemerintah dengan telah membawa platform Open Data, yang berupa metodologi menjadikan data-data

yang tersedia di pemerintah menjadi online untuk mendukung transparansi. Ketika inisiatif tersebut disampaikan ke pemerintah-pemerintah daerah, ternyata aparat pemerintah daerah masih belum siap untuk mengimplementasikan pendekatan Open Data tersebut, dan platform Open Data belum dapat langsung diterapkan. Karena itu, Web Foundation, kemudian menciptakan sejumlah kegiatan yang dilakukan offline seperti hackaton, pelatihan-pelatihan mengenai data, workshop pengenalan mengenai open data dan sebagainya. Platform online tersebut tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh calon pengguna, karena ada gap antara kapasitas pengguna dengan persyaratan yang diminta oleh sistem.

Sedangkan pada **pola ketiga**, platform online dan platform offline dibangun simultan untuk mengatasi permasalahan dengan solusi baru. Dalam hal ini, platform online dan offline dibangun bersamaan sebagai terobosan langsung tanpa harus ada platform offline terlebih dahulu. Solusi baru atau kegiatan-kegiatan baru dalam mendukung TAP, baru dapat dilaksanakan dengan platform online dan platform offline baru yang munculnya juga harus bersamaan.

Misalnya hal ini yang terjadi pada inisiatif Game My Village yang dilakukan oleh Sinergantara dan inisiatif Sistem Feedback Loop untuk Perlindungan Anak. Game My Village memiliki platform online berupa aplikasi pendataan melalui smartphone berbasis peta digital yang simultan dengan platform offline berupa prosedur pendataan dan temu warga dalam pendataan, dibangun untuk memungkinkan pendataan partisipatif oleh warga desa. Proses perencanaan pembangunan desa yang selama ini ada, umumnya tidak memiliki kegiatan pendataan desa oleh warga. Berarti tidak ada platform offline pengumpulan data desa oleh warga untuk mendukung perencanaan pembangunan

desa sebelumnya. Inisiatif Game My Village ini menciptakan platform online dan offline sekaligus untuk memfasilitasi munculnya kegiatan baru tersebut. Begitu pula Sistem Feedback Loop yang dikembangkan Save The Children, menghadirkan platform online dan platform offline bersama-sama. Ketika sistem online dijalankan barulah mekanisme feedback loop ini bisa berjalan platform offlinenya, begitu pula sebaliknya.

3.4. Bagaimana Keselarasan Platform Online dan Platform Offline terbangun?

Pola-pola yang disampaikan di atas juga dapat menggambarkan bagaimana relasi antara platform online dengan platform offline terjadi. Kami mengelompokkan keselarasan tersebut dalam tiga kelompok, yaitu berdasar pada pola 1, pola 2 atau pola 3 di atas.

Platform online sebagai improvement atas solusi offline

Pada Pola 1, platform online muncul sebagai *improvement* terhadap solusi yang sebelumnya telah dihasilkan oleh platform offline. Atau dengan kata lain, sebelumnya sudah ada solusi atas suatu masalah secara offline, namun solusi tersebut dirasakan masih kurang efektif, sehingga perlu diperbaiki dengan diadakannya platform online. Tanpa adanya platform online tersebut, mungkin solusi yang kurang efektif yang ada di platform offline tersebut tidak akan cepat bisa diperbaiki.

Dalam hal ini platform online, berkontribusi meningkatkan sejumlah hal, seperti volume data, kecepatan transfer data, keakuratan data, perhitungan (komputasi) dan lain-lain, yang memungkinkan diperolehnya solusi yang lebih baik daripada dengan cara lama yang tanpa TIK. Misalnya dalam inisiatif EMAS yang dikemukakan di atas, masuknya

platform online menjadikan tugas penyampaian informasi kedaruratan mengenai ibu hamil beresiko tinggi dari bidan ke rumah sakit rujukan menjadi lebih berguna. Karena dengan TIK informasi kedaruratan tersebut dapat lebih dipastikan sampai pada rumah sakit pada saat yang tepat, tidak tertunda karena alasan-alasan non-teknis, sehingga penanganan tepat waktu terhadap ibu hamil beresiko tinggi dapat dilakukan. Tanpa platform online seringkali informasi mengenai ibu hamil beresiko tinggi ini datang terlambat di rumah sakit.

Platform offline berperan mendefinisikan masalah dan langkah-langkah untuk menghasilkan solusi. Platform offline jugalah yang telah meringkai aktor-aktor tertentu untuk terlibat dan menentukan tata-laksana tertentu agar solusi tersebut tercapai. Sehingga ketika platform online datang, platform online telah memiliki aktor-aktor yang akan terlibat dan tinggal melaksanakan langkah-langkah yang sudah ada dengan dilengkapi perangkat TIK. Mengacu lagi pada contoh inisiatif EMAS di atas, prosedur penanganan ibu hamil beresiko tinggi telah berhasil dibangun secara offline sebelum inisiatif EMAS tersebut datang. Begitu juga para dokter, bidan, rumah sakit, relawan-relawan Posyandu dan lain-lain telah sepakat untuk mendukung prosedur tersebut. Sehingga ketika inisiatif EMAS datang dan ingin meningkatkan kinerja dari proses penanganan ibu hamil beresiko tinggi tersebut, yang mereka lakukan cukup melengkapi prosedur itu dengan penambahan TIK dengan aktor-aktor yang sudah tahu tugasnya, tanpa perlu terlalu banyak membangun prosedur baru dan aktor baru.

Pembaharuan platform offline baru untuk menjaga konektivitas platform online dengan dunia nyata

Dalam suatu inisiatif pemanfaatan TIK, khususnya untuk memperkuat TAP, platform online berperan meningkatkan kinerja bagi sistem dalam menghasilkan solusi. Sedangkan platform offline, seperti disampaikan di atas, adalah yang mendefinisikan masalah serta solusi. Platform online berperan menjadikan sistem bisa melakukan sesuatu secara lebih luas, lebih cepat dan lebih tepat. Sedangkan platform offline, yang merupakan tempat dimana terjadi aktifitas-aktifitas yang lebih natural dan menyentuh persoalan nyata, berperan memahami perubahan konteks dan merumuskan solusi baru ketika konteks baru terjadi. Platform offline akan terkait dengan aspek kultural, aspek politik dan aspek-aspek sosial lainnya. Platform offline ini misalnya adalah interaksi langsung antar aktor-aktor warga dan pemerintah, akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bagaimana perubahan komposisi orang-orang yang duduk di pemerintahan, siapa saja anggota masyarakat yang datang dalam pertemuan antar stakeholder, bagaimana kultur yang dianut masyarakat dalam bermusyawarah dan lain sebagainya.

Pola 2, yang berupa pembaharuan platform offline ini, dilakukan adalah agar sistem dapat menyentuh permasalahan sosial / organisasi khususnya ketika dirasakan terjadi perubahan konteks sosial / organisasi. Atau ketika ada platform online yang direplikasi dari tempat lain, hendak diterapkan di suatu lingkungan sosial / organisasi baru.

Pengembangan platform offline menyusul adanya platform online, dapat dilihat dalam inisiatif Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan sistem LAPOR menurut laporan CIPG dan BIGS. Aplikasi LAPOR merupakan platform online mekanisme pengaduan yang dikembangkan Pemerintah Indonesia melalui UKP4 (Unit Kerja Pemerintah untuk Percepatan dan Pengawasan Pembangunan) yang kemudian dilanjutkan oleh KSP (Kantor Sekretariat Presiden). Bupati Bojonegoro, Suyoto setelah mengadopsi sistem LAPOR dari UKP4 pada tahun 2014, menemukan bahwa masyarakat masih lebih familiar menggunakan model pelaporan / komplain yang lebih konvensional seperti pengaduan ke radio atau tatap muka. Tetapi di sisi lain mekanisme pengaduan konvensional tidak memiliki manajemen yang memungkinkan setiap laporan dari masyarakat dapat diawasi oleh Bupati follow-upnya, seperti pada sistem LAPOR. Sehingga dengan itu, kemudian Bojonegoro membangun platform offline untuk menjembatani sistem LAPOR dengan mekanisme pengaduan konvensional. Dalam hal ini, platform offline yang dibangun adalah pertemuan rutin seminggu sekali untuk membahas follow up setiap komplain yang dikirim warga. Keberadaan platform offline ini menjaga supaya sistem LAPOR selalu dapat terhubung dengan dunia nyata, yaitu dunia keputusan / implementasi tindak lanjut atas laporan.

Platform online-offline simultan untuk mengembangkan solusi baru

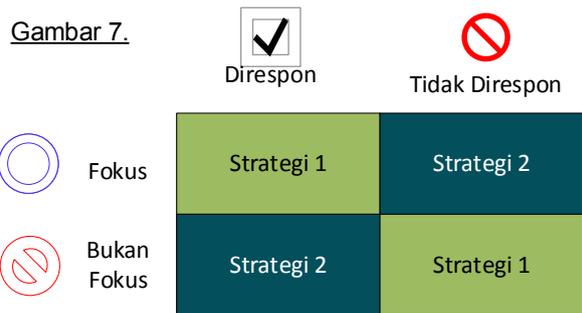
Pada pola 3, solusi simultan (gabungan) yang meliputi solusi online dan solusi offline dibangun secara sekaligus. Intervensi tersebut akan menghasilkan “proses bisnis” baru yang menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Proses bisnis baru yang tercipta

tersebut bukanlah proses bisnis yang selama ini dijalankan, karena dengan belum adanya aplikasi TIK proses tersebut dianggap masyarakat sebagai proses yang sulit dilakukan.

Dalam hal ini, platform offline membangun sejumlah solusi-solusi namun dengan ruang yang dipermudah atau diperluas oleh platform online. Platform online yang berupa TIK melakukan aksi *enabling* sehingga solusi yang jika tanpa kehadiran TIK tersebut tidak mungkin dilakukan, kini menjadi mungkin.

Dalam contoh inisiatif Game my Village, komponen platform online berupa aplikasi ICT untuk pendataan dan komponen platform offline berupa “modal sosial” yang diberdayakan memungkinkan dilakukannya praktek pendataan oleh masyarakat dengan menggunakan smartphone, secara sinergis membentuk kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada.

4. Strategi Ketika Inisiatif TIK Tidak Mendapat Respon



Tidak semua inisiatif menggunakan TIK yang dibawa oleh CSO-CSO inisiator menghasilkan respon yang positif dari warga maupun pemerintah. Walaupun tidak ditemui kasus dimana inisiatif penguatan TAP dengan TIK ini secara keseluruhan ditolak oleh komunitas atau pemerintah, namun banyak ditemui bahwa pemerintah atau warga hanya merespon sebagian

komponen dari inisiatif. Misalnya hanya platform online atau platform offline-nya saja yang direspon.

Terkait dengan itu, maka kami melihat bagaimana strategi yang kemudian dikembangkan oleh CSO inisiator untuk tetap mencapai tujuannya. Strategi pertama adalah CSO inisiator memperkuat komponen yang direspon oleh komunitas atau pemerintah, dan mengurangi fokus terhadap komponen yang tidak direspon oleh pemerintah / masyarakat. Strategi kedua adalah CSO inisiator justru lebih memperkuat komponen yang tidak direspon oleh komunitas / pemerintah.

Strategi pertama dilakukan oleh FIK ORNOP dimana komunitas yang didampinginya merespon platform offline yang dibawa oleh FIK ORNOP, namun kurang merespon platform online yang berupa aplikasi-aplikasi TIK. Platform offline yang berupa metoda Participatory Rural Apraisal (PRA) and Participatory Local Social Development (PLSD) mendapat respon yang sangat baik dari komunitas. Strategi yang dipilih oleh FIK-ORNOP dalam hal ini adalah memperkuat dialog-dialog menggunakan pendekatan PRA dan PLSD, yang merupakan platform offline dari inisiatif ini. Namun dalam hal ini, FIK ORNOP tetap dapat mengambil manfaat dari platform online yang dikembangkannya, karena dengan platform online tersebut, FIK ORNOP memiliki sesuatu yang baru untuk ditawarkan pada masyarakat. Walaupun dalam perjalannya akhirnya masyarakat lebih memilih platform yang lebih konvensional.

Sementara strategi kedua dilakukan oleh Sinergantara dalam inisiatif SMS Gateway untuk Mengurangi Maternal Mortality di Kabupaten Gresik. Platform online berupa aplikasi SMS Gateway yang dibawa oleh Sinergantara sangat direspon oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, namun platform offline yang berupa

prosedur penanganan ibu hamil beresiko tinggi dengan menggunakan aplikasi tersebut masih kurang mendapat respon dari pemerintah kabupaten. Walaupun secara kebijakan pemerintah kabupaten telah menyetujui adanya tim kerja dari kalangan staf pemerintah kabupaten yang menjalankan platform offline tersebut, namun pada operasionalnya tim kerja yang dibentuk memiliki banyak beban lain untuk terlibat. Dalam menghadapi situasi seperti itu Sinergantara justru berusaha memperkuat platform offline yang tidak mendapat respon dari pemerintah tersebut, dengan berusaha menjadikan platform offline tersebut menjadi lebih inline dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten.

Pilihan pada strategi pertama terjadi karena mungkin CSO melihat bahwa dalam kasus yang ditemui, tidak diresponnya suatu komponen tidak mengakibatkan gagalnya upaya mencapai tujuan. Seperti dalam pengalaman PIK ORNOP, tidak diresponnya platform online masih bisa diatasi dengan penguatan pada platform offline. Sedangkan pada strategi kedua yang dilakukan oleh Sinergantara, kasus yang terjadi mengharuskan bahwa semua komponen harus seluruhnya direspon, baru tujuan tercapai. Ada hal menarik disini, bahwa ternyata pada kedua kasus tersebut, platform offline-lah yang harus dipastikan direspon oleh kelompok sasaran.

5. Kesimpulan

1. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penguatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP) oleh sejumlah CSO yang menjadi grantee dari Making All Voices Count (MAVC) dalam beberapa hal telah menunjukkan bahwa TIK dapat meningkatkan efektifitas TAP, misalnya dalam peningkatan kualitas transparansi,

peningkatan kemudahan partisipasi, dan kolaborasi warga dengan pemerintah.

2. Peningkatan efektifitas TAP tersebut terjadi salah satunya adalah karena adanya keselarasan antara platform online dengan platform offline dalam inisiatif TIK tersebut. Kontribusi platform online dalam hal ini, di antaranya adalah membuat transparansi yang tak terjeda (tanpa delay), mengubah komunikasi searah menjadi komunikasi dua arah yang interaktif, dan memberi opsi komunikasi bisa berwujud komunikasi impersonal. Sementara platform offline berkontribusi pada menguatkan konektivitas antara solusi yang dihasilkan dengan realitas permasalahan yang hendak diselesaikan sistem, menjadikan sistem bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bisa menggunakan TIK.
3. Pengembangan platform online akan berasosiasi dengan pengembangan kinerja dari sistem, sedangkan pengembangan platform offline berasosiasi dengan peningkatan pemahaman atas permasalahan-permasalahan nyata dan pengembangan solusi-solusi baru yang sesuai.
4. Penyelarasan platform online dan platform offline dilakukan dengan beberapa pola sebagai berikut:
 - Platform online dikembangkan sebagai improvement di atas platform offline yang telah ada dan terbukti memberi solusi atas permasalahan (pola 1). Dengan adanya platform online tersebut, solusi yang biasanya dilakukan tanpa TIK, sekarang dilakukan dengan TIK dan menjadi lebih

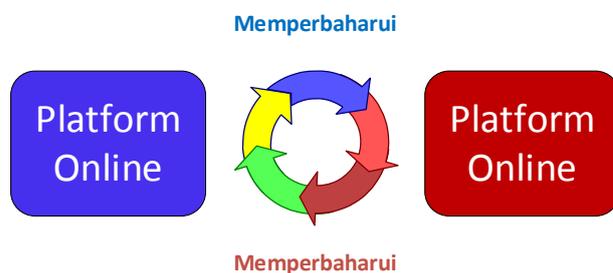
baik, lebih cepat, dan lebih handal. Misalnya adalah pada penanganan ibu hamil beresiko tinggi, platform offline yang berupa mekanisme pelibatan kader-kader Posyandu dan prosedur di bidan desa telah ada. Namun dengan penambahan platform online berupa SMS gateway, proses penanganan ibu hamil beresiko tinggi tersebut dapat lebih mudah dilakukan oleh bidan desa dengan tetap melibatkan kader-kader Posyandu.

- Platform offline yang baru dikembangkan sebagai komplemen dari platform online yang telah ada, agar platform online tersebut dapat lebih menyentuh realitas dan dapat menghasilkan solusi yang dibutuhkan (pola 2). Dalam hal ini suatu platform online diperkirakan akan mengalami diskoneksi dengan realitas jika tidak dilengkapi oleh platform offline tersebut. Misalnya suatu sistem pengaduan online membutuhkan platform offline seperti forum pertemuan langsung antara pengadu dengan dan mekanisme pertemuan reguler antara kepala daerah dengan dinas yang dikomplain pelayannya.
- Platform online dan platform offline dikembangkan bersama-sama (pola 3). Untuk menghasilkan solusi baru atas persoalan-persoalan, yang sebelumnya tidak coba disentuh baik dengan cara online dan offline. Dalam hal ini keberadaan platform online lah yang memungkinkan dilakukannya solusi-solusi

yang baru dengan platform offline. Misalnya kegiatan pengambilan data partisipatif dan memungkinkan terupdate secara segera, baru dapat terjadi dengan adanya platform online aplikasi pendataan berbasis smartphone yang bersamaan dengan munculnya platform offline dalam bentuk kegiatan pendataan partisipatif oleh warga.

5. Antisipasi ke depan yang perlu diperhatikan dari adanya peningkatan efektifitas penguatan TAP karena keselarasan platform online – offline seperti yang dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut:

Gambar 8.



- Improvement yang terjadi karena pengembangan platform online untuk memperkuat platform offline yang telah berjalan (pola 1) mungkin akan menjadikan sistem memiliki pengguna lebih luas, lebih bervariasi atau lebih kompleks. Peningkatan pengguna ini mungkin akan meningkatkan demand atas sistem dan karenanya sejumlah solusi

yang telah disediakan sistem bisa menjadi tidak cukup, perlu sejumlah solusi baru dibuat. Karena itu mungkin akan perlu pengembangan platform offline baru kembali untuk menghasilkan solusi yang baru.

- Konsekuensi dari pembaharuan platform offline yang dilakukan pada pola 2 mungkin akan mengakibatkan terjadinya penambahan aktor-aktor pendukung inisiatif, seperti akan munculnya penambahan intermediaries / infomediaries baru. Karena platform offline membutuhkan keterlibatan orang. Munculnya aktor-aktor baru tersebut, selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya kebutuhan modifikasi sistem. Situasi tersebut mungkin akan membawa pada munculnya kebutuhan untuk membangun platform online baru untuk mengakomodasi kebutuhan yang berkembang dari para aktor.
- Berdasar dua kemungkinan situasi yang disampaikan tersebut, terlihat bahwa kebutuhan akan pembangunan platform online dan platform offline adalah proses sirkuler seperti dalam gambar 8. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penguatan platform online membawa pada munculnya kebutuhan platform offline yang baru, begitu pula penguatan platform offline membawa pada kebutuhan pengembangan platform online baru.

Daftar Pustaka

1. Antlov, Hans, Wetterberg, Anna. (2011). *Citizen Engagement, Deliberative Spaces and the Consolidation of a Post-Authoritarian Democracy: The Case of Indonesia*. Visby, Sweden: ICLD.
2. Bijker, Wiebe E., John Law. (1992). *Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change*. Cambridge: The MIT Press.
3. Bingley, Scott, Burgess, Stephen. (2009). *Using data Visualitation to Represent Stages of the Innovation-Decision Process, Actor Network Theory and Technological Innovation*, Volume 2, International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, IGI Publishing.
4. Yuliar, Sonny. (2009). *The Governance of Technology*. Bandung: Bandung Institute of Technology (ITB) Press.
5. Gaventa, John (2001). Enam Proposisi Menuju Pemerintahan Daerah Partisipatoris. <http://www.ids.ac.uk/logolink>.

Towards an Effective Citizen Interaction in Invited Space in Indonesia: A Human Action Perspective

Oleh: Glenn Maail | Web Foundation

Introduction

This study is part of Making All Voices Count Indonesia (MAVCI) Learning Plan to document the experience of the project partners and their network in terms of achieving the goal of MAVC Program Plan for Indonesia 2014-2017. The goal is to improve availability and delivery of public services through open data in Indonesia and to support the strengthening of good governance in a decentralized government system from the highest to the lowest level, including village level administration.

The experience and observation of the Transparency and Accountability (T&A) ecosystem in Indonesia indicates how citizen participation tends to occur and is accommodated in a number of spaces provided by the government (invited spaces) as compared to the spaces created by the community itself (created spaces)(OECD 2016). This shows that the government's initiative is critical in providing space for interaction with citizens. However, the effectiveness of T&A ecosystems certainly does not rest at the availability of interaction space and government invitations to enable citizens to participate. Instead, community participation in invited spaces depends on the quality and effectiveness of government response to the voice of its citizens. When the government and concerned citizens united in a common goal of improving

access and quality of public service provision, it is interesting to learn how both sides use the invited spaces within the Indonesian T&A ecosystem at the national and subnational level, how effective the use of these spaces to achieve this common goal, and how information technology (IT) enables effective citizen participation in these spaces.

Research Objective and Questions

During the course of the project, MAVCI partners have conducted either research or directly involved in the implementation of several invited spaces in Indonesia. This study builds on these works by focusing on providing a high-level concept to synthesise their findings with regards to the ways to achieve an effective citizen interaction in IT-mediated spaces. In the process, the research addresses two main questions:

- **RQ1:** How can an effective citizen interaction in IT-mediated invited space be achieved?
- **RQ2:** How does the IT-based interaction relate to the non-IT based interaction?

Methodology

The findings from this study were largely derived from an extensive desk research.

The first part of our desk research aims to build theoretical frameworks that can guide us to answer the research questions. This covers academic literature related to citizen participation from the field of development studies and public administration. Theories from the information systems research were also examined to cover the “IT” element of the questions under investigation.

The second part of the desk research aims to provide practical evidence to support our theoretical propositions. This activity largely consists of the review of reports from MAVCI project partners. In addition to the partner’s reports, findings from other sources related to the selected case studies were also used to triangulate the findings.

The three case studies used in this report were selected using the purposeful sampling (Neuman 2006). The researcher made the determination on the type of space for each T&A initiative based on the reading of the partner’s report. From the list of the initiatives, we then selected e-Musrenbang and LAPOR! as the case study for IT-mediated space. These cases were investigated by Yayasan Kota Kita and Center for Innovation and Policy Governance (CIPG) respectively. We also selected the traditional face-to-face musrenbang to represent case study of non-IT mediated space

Theoretical Framework

A new wave of democratic experiments aiming in transforming older forms of governance has led to a widening of political space for public engagement with their government (Cornwall 2004). Inspired by the promise of achieving better decision-making, improving government transparency and accountability, and maintaining efficient public service delivery, the creation of political space offers reconfiguration of relationships and responsibilities that transform interactions

Box 1: e-Invited space e-Musrenbang

Musrenbang is an Indonesian abbreviation of Development Planning Assembly that was initiated by Bappeko (Planning and Development Body). This system aims to invite the participation of the citizens in the budgeting of Indonesia. In 2015, Yayasan Kota Kita conducted research on the tracking process to learn whether the outcomes are democratic and effective. Kota Kita collected and studied the data from four years of the Musrenbang. The application is named Musrenbang Tracker (or MusTracker in short). In order to conduct the research, Kota Kita generated data from 51 different neighborhoods in the city. The information was digitized to create a publicly accessible citywide database that can be studied to analyze the performance of *Musrenbang*.

LAPOR!

The governments in Bojonegoro and Indragiri Hulu adopted LAPOR and a mandatory Information and Documentation Unit (PPID) to be used in their areas. LAPOR is seen as a successful e-invited space in Indonesia. LAPOR was introduced in 2011 to enable citizens file reports or complaints regarding public services. The users can use SMS or mobile application to access LAPOR. In 2017, LAPOR has 285,444 users and has registered more than 1.29 million complaints.

In Indragiri Hulu, LAPOR remains unpopular among the citizens - there are only 26% out of the total number of surveyed that are aware of the application. Coupled with this lack of awareness is the slow progress of incoming complaints. For example, less than 70% of some 250 complaints have been accepted by the regency. On the other hand, the regent of Bojonegoro (Mr. Suyoto) took the initiative to integrate LAPOR and Bojonegoro’s monitoring system. With a population of 1,209,073, the region has many active users, registering more than 1.67 million complaints.

between citizen and state (Gaventa 2006).

While opening spaces for citizen-government interaction is necessary, it is by no means sufficient to ensure effective participation. If not carefully designed or implemented, it may delay decisions, increase conflict, disappoint participants, and lead to more distrust. Indeed, previous studies have shown some inconsistencies concerning the effectiveness of citizen interaction in invited space (Yang and Pandey 2011), particularly since there could be different interpretations of what constitutes of effectiveness from the point of view of the government and the citizens/users (Berner et al. 2011).

The effectiveness of citizen participation

Other fields of study such as information systems have tried to explain these conflicting findings from the point of view of the users. Figure 1 shows the discrepancy model of user involvement in the context of information systems proposed by Doll and Torkzadeh (1989). The model suggests that when the desired participation level is less or greater than the actual participation level, it has a negative effect on the user satisfaction which is used to measure the

success of user participation. Doll and Torkzadeh posited that user participation will have a positive impact only when it was done under the equilibrium condition. The equilibrium condition exists when the actual level of participation roughly corresponds to the desired level of participation designed by the system. They found that under this condition, participation, whether low or high, has positive effects on all three physiological measures (i.e., value attainment, cognitive, and motivational). As predicted, outside this condition user participation has negative or no impact on user satisfaction.

Designing the desired level of citizen participation

Doll and Torkzadeh (1989)'s model points to the fact that the design of the "space" determines the possibility of achieving the equilibrium condition. The design of the space limits the desired level of citizen participation. Different levels of desired participation could be identified depending on the typology used as the theoretical lens. For example, the Arnstein's Model (1969), articulated a typology of eight levels of participation, namely (in ascending order from the lowest rung), manipulation,

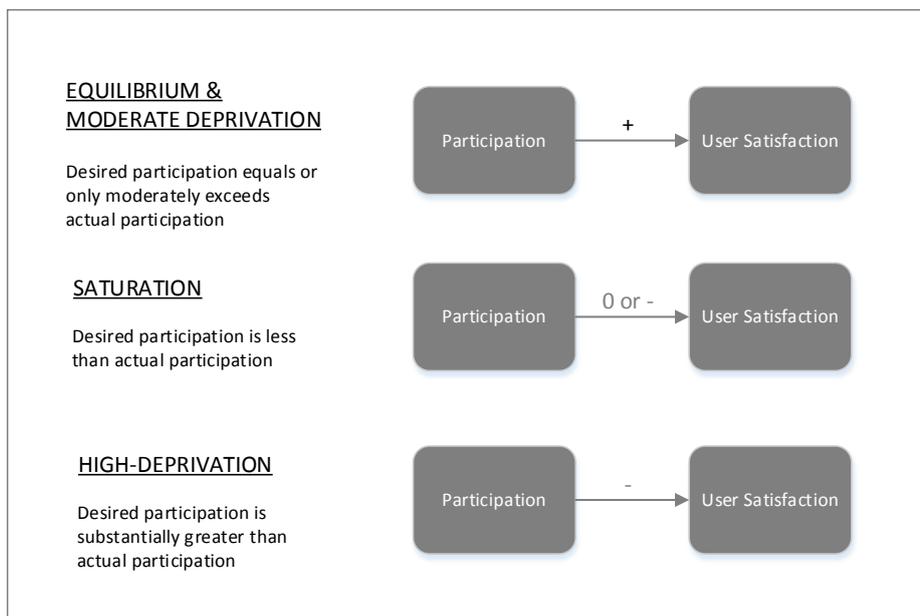


Figure 1. Discrepancy model of participation (Doll and Torkzadeh 1989)

therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, and citizen control. While Arnstein's ladder looks at participation from the perspective of those on the receiving end, Jules Pretty's (1995) typology of participation speaks more to the user of participatory approaches. He suggested that citizen participation may include seven levels ranging from 'bad' forms of participation - manipulative participation to self-mobilization.

This study adopts the ladder of participation in civic technologies suggested by Offenhuber (2015). In a review of smart cities and the role of citizen participation, Offenhuber (2015) presented five layers by which citizens participate in smart cities, including 1) Compliance: citizen follows government directives, 2) Feedback: citizens provide government with feedback 3) Monitoring: citizens collect information and challenge the government's decision 4) Co-production: citizens involved in planning, implementing, managing, and 5) Self-Governance: governance is managed by the people.

The lowest to middle levels in the ladder, those of compliance, feedback, and monitoring, positions the citizens as an outsider. For citizens in this context, it is the external agents who define problems and information-gathering processes, and control the analysis. These forms of interaction do not concede any share in decision-making, and external agents are under no obligation to take on board people's views. At the highest level, self-governance, citizens take their own initiatives independently of the external institutions to change the system. Contacts with external institutions were maintained to get resources and technical advice, but they retain control over how resources are used.

Understanding enabling factors affecting the actual level of citizen participation

The other variable in Doll and Torkzadeh's model is the actual level of citizen participation. In practice, the actual level of citizen participation is affected by contextual factors that make up a complex social and political structure within the space. Hence, understanding the enabling factors are critical for achieving the equilibrium condition in the invited space.

To accomplish this objective, we argue that citizens participation is a type of human action performed by individuals who are involved in the invited space. As such, the Habermas' Theory of Communicative Action (TCA) provides logical reasoning in guiding our exploration and interpretations of desired citizen participation level for each invited space and relevant enabling factors. The goal is to analyse the type(s) of human action associated with citizen participation for each invited space and then identify a set of enabling factors that affect the ability of the human actors (i.e. government, citizens) to perform the expected action(s) (Maail et al. 2010; Ngwenyama and Lyytinen 1997). Two important concepts within Habermas' TCA used to guide the study: (1) the typology of human action and (2) the action constitutive resources.

Typology of Human Action

As a social theorist, Habermas is interested in how individual actions can be coordinated into a pattern of interactions. In TCA, Habermas derives a typology of human actions based on the observation of two human tendencies or orientations (Habermas 1984) (see Table 1). The first type of action is based on the tendency towards achieving their own success, which is called the "purposive-rational

action”. The purposive-rational actions are the actions that are directed towards the achievement of given objectives. Success is measured by how nearly one achieves this objective. If the action is an intervention in the physical world and is achieved by following technical rules (or the non-social domain), the action is called “instrumental action”. If the purposive-rational action is taken by considering the impact of the action on social situations or other people who may engage in counter-action, the action is called “strategic action”.

The second type of human action is based on human orientation to achieve a mutual agreement. Here, the success orientation is replaced by a desire to understand a communicating partner. There are two types of action in this orientation: “communicative action” and “discursive action”. With the communicative action, people reach an agreement by having a common background of values, shared norms, conventions, habits and assumptions about the world. The discursive action is oriented towards achieving clarification and justification of claims by providing reasons and evidence. It places an emphasis on the concept of argumentation where various assumptions must be carefully examined, clarified and tested.

Habermas supports the view that all actions might be strategic in some sense because all individuals pursue particular aims of their own (Outhwaite 2009). However, the mechanisms of coordination are different (Baxter 2011). The purposive-rational actions (i.e. instrumental and strategic actions) specify coordination based on a calculation of cost-benefits and consideration of individual’s self-interests. On the other hand, the communicative action and discursive action emphasise on cooperative processes as the mechanisms for coordination. Habermas argues that the cooperative process of interpretations requires complex coordination of individual acts as well as their self-interests. Therefore, the concept of coordination separates the purposive-rational actions and communicative actions.

Each type of actions maintains a specific orientation, which assumes a set of resources and understanding of the rules governing social interactions and procedures for enacting the action within specific institutional practices. The basic resources that individual needs to skillfully perform the action within specific institutional contexts are called “action constitutive resources”.

Table 1. Habermas’ typology of human action (Habermas 1984)

Domain of action	Type of action		Type of interaction
	<i>Purposive-rational or teleological</i> <i>One or more actors are oriented towards their own success</i>	<i>Communicative</i> <i>Actors (at least two) are oriented towards mutual agreement</i>	
Non-social	Instrumental action	N/A	Technical Interaction
Social	Strategic action	Communicative action Discursive action	Social Interaction

Action Constitutive Resources

The instrumental action and strategic action are success-oriented actions. However, the instrumental action focuses on control, manipulation, and transformation of the physical object. Hence, for the enactment of this type of action, the individual depends upon the technical knowledge of input-output relationships and the tools needed to achieve the given ends. In contrast, the strategic action focuses on transforming the behaviour of the other people. The individuals who engage in strategic action also recognise that their opponent may engage in intelligent counter-action. Hence, they need to have an understanding of the feasible outcomes. In addition, the individuals also need to recognise their opponent's goals, positions, and potential for counter-action (Ngwenyama and Lee 1997). The transformation of the behaviour of other people consequently needs domination of one individual over the others. This power can be attained through possession of social resources such as social status, authority/power, and items of exchange value (e.g., time, expertise) (Habermas 1984).

The communicative and discursive actions aim towards achieving agreement among the participating individuals. Both actions presuppose the existence of shared media for communication. The communicative action is generally oriented towards maintaining mutual understanding among participating individuals engaged in coordinated action. It is enacted via language and other forms of symbolic interaction to seek possible basis for agreements and compromises, interpretations of shared norms, values and the meanings of situated action. When the validity of the agreement is challenged, the individuals enter the discursive action, which is oriented towards restoring agreement and condition for coordinated action. Discursive activity manifests through critical debate and argumentation. These two activities form the basis for joint decision-making and agreement. Habermas argues that the effectiveness of discursive activity depends on the existence of rules of discourse and critical debate, as well as the tools for analysis and evaluation of alternative arguments.



Figure 2. Action Constitutive Resources. Adapted from Ngwenyama and Lyytinen (1997)

The above theoretical frameworks provide theoretical lenses to entangle complexity of citizens-government interactions within the invited space. The next section will discuss the findings of the study.

Findings

This section begins with a categorisation of the desired citizen participation level for selected case study under MAVCI project. Prior to determining the desired level of citizen participation, we analysed the list of T&A initiatives (Total N=17) involved in the MAVCI project and provide the classification based on detailed description of each project. The section then continues with the analysis of typology of citizen interaction involved in each space. The results of the analysis lead to the insights of the role of IT and consequently the enabling factors that affect the effectiveness of citizen interactions.

Designing the “space”

Figure 3 shows that more than 70% of the T&A initiatives under MAVCI project can be categorised as created spaces. These spaces were created by the MAVCI partners

themselves and they are located in several cities including Makassar, Bojonegoro, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, and Samarinda. Furthermore, 4 out of 5 of these created spaces have used IT in mediating citizens interactions. These results indicate that the CSOs continue to play a leading role in advancing democratic rights of the citizens in Indonesia. They have also been able to successfully integrate IT into the system design.

Several well-known invited spaces such as LAPOR! and Musrenbang/e-Musrenbang also became the focus of an investigation by the MAVCI project partners. These were mainly research projects that focus on the lesson-learned from the implementation of these initiatives at several local governments in both Java and outside Java. In Bojonegoro Regency, the government has found that providing both a forum for consistent communication as well as reliable and up-to-date information can encourage participation from communities and their involvement in supporting decision-making. This is a public forum held every Friday, attended by high-level officials who take note of and respond to

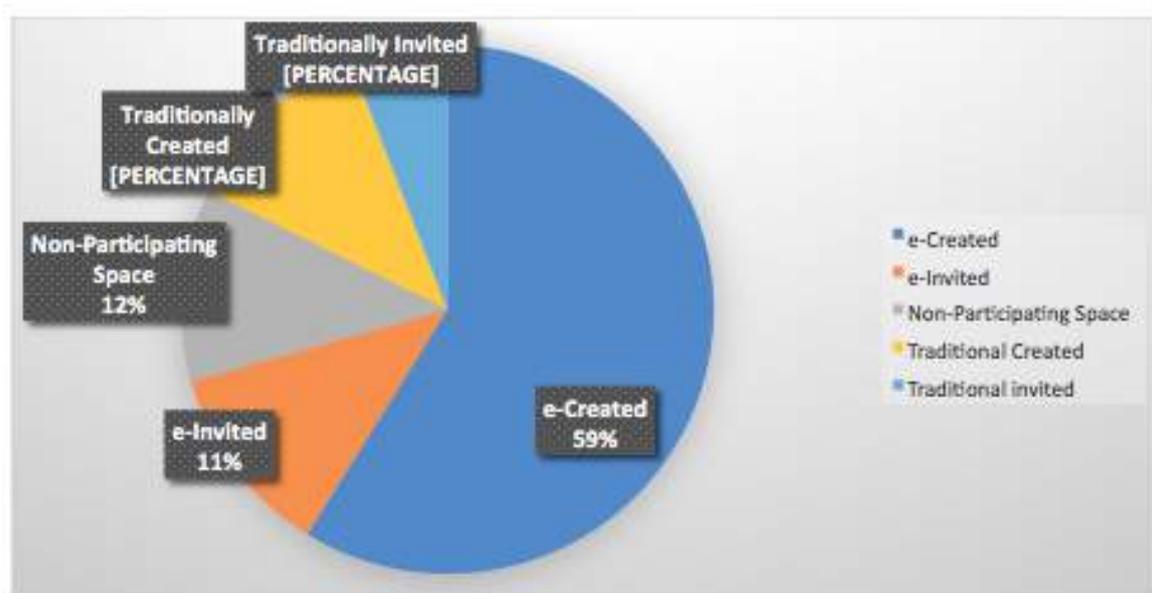


Figure 3. Classification of T&A initiatives under MAVCI project (N=17)

issues raised by the audience. All citizens interested in participating are invited to join the dialogue in person or listen to it on the two local radio stations. Every week, almost 200 people attended the dialogue in-person (OECD 2016).

Although the total number of political spaces for public engagement initiated by both government and civil society shows an encouraging sign, the effectiveness of these spaces depends on the design of the space. As discussed in prior sections, the design of the space determines the desired level of citizen participation. Figure 4 shows the distribution of the desired level of citizen participation in all T&A initiatives included in MAVC project based on Offenhuber (2015)'s ladder of civic participation. It is apparent that most of the political spaces were only designed to accommodate a lower degree of participation, where citizens can only provide feedback. This pattern applies to both IT and non-IT mediated spaces. The results speak volumes about how highly desirable an effort is to encourage the design of a space that can accommodate a higher level of citizen participation. An example of such is CEK SEKOLAH-KU, an e-created space that facilitates

public's access to accurate information on school data in a consolidated and easily accessible format on an online platform; thereby, enabling citizens to comment on the data and identify issues of concern. It also increases community awareness and involvement in the provision of education services by monitoring the conditions of public schools, and engaging community members in collaborative problem solving around issues of concern identified by schools.

Citizen interaction in invited space

To understand enabling factors for equilibrium condition in invited spaces, we then selected three cases of from the list of MAVCI T&A initiatives to understand the types of citizen interaction associated with each space. The results of the analysis in Table 2 shows that invited spaces like Musrenbang/e-Musrenbang and LAPOR! have a *purposive-rational orientation*. That means interactions that occurred in these spaces were directed towards the fulfilment of certain objective and, therefore, the success of this interaction is measured by how nearly this objective was achieved.



Figure 4. The desired level of citizen participation for each type of space under MAVCI project.

Table 2. Typology of citizen interaction for LAPOR, e-Musrenbang, and Musrenbang

Space	Type	Purposive Rational One or more actors are oriented towards their own success		Communicative Actors (at least two) are oriented towards mutual agreement	
			Strategic (social)		Discursive (social)
	IT-mediated	✓	✓		
LAPOR!	IT-mediated	✓	✓		
Musrenbang	Traditional/ non-IT		✓		

According to the Law No. 25 of 2004, the purpose of Musrenbang (and e-Musrenbang) is to seek citizens' input regarding community development priorities. While the Musrenbang process is an important formal opportunity to involve the public in determining development priorities, both government and CSO representatives noted their limitations. A recent report from OECD (2016) shown a decline in number in participating CSOs, leading to claims that the Musrenbang are not participatory or representative. Some government representatives have also noted that enthusiasm from CSOs is decreasing, primarily because CSOs have

said it is not clear whether their inputs are taken into account.

For a complaint handling system like LAPOR!, the strategic action started when citizens submitted their complaints through the system with an aim that they would be satisfactorily addressed by the government. As an illustration, Figure 5 shows citizens-government interaction for LAPOR! Citizens can send complaints by texting 1708, on its website lapor.go.id, through its mobile app or @LAPOR1708 on Twitter. They get a unique tracking ID for each report and a notification when an official responds. Agencies are supposed to respond within five working days. If a citizen does not get a response within five working days, Lapor's team calls the agency's liaison officer. If a week later there is still no progress, it sends a report to a senior official. It includes which units in the agency received the most complaints and how they were managed. This usually pushes agencies to be more responsive. Finally, if that doesn't work, the agency can be reported to the Ombudsman of Indonesia which will investigate the case and give a binding order to the agency. The workflow indicated that the government will decide how to satisfactory address the complaint from the LAPOR platform. In these two instances, there is no room for the citizens



Figure 5. Social interaction based on the workflow of LAPOR! (source: https://lapor.go.id/lapor/tentang_lapor)

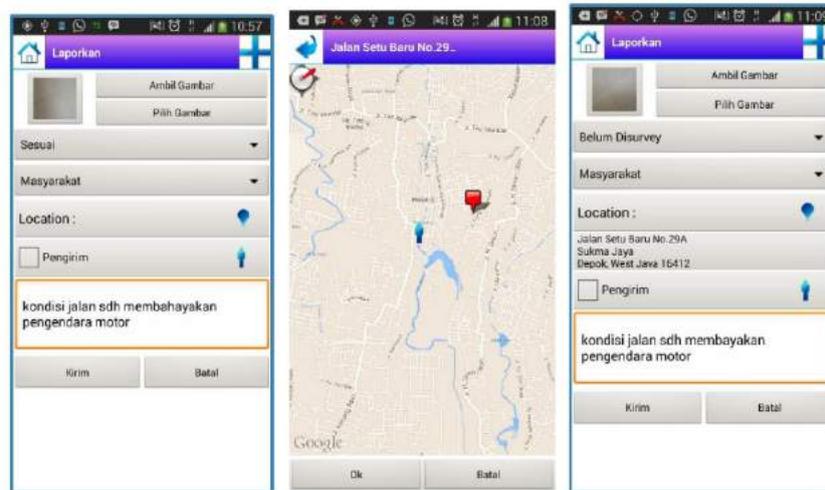


Figure 6. Example of technical interaction in e-Musrenbang (source: Pedoman Sistem Musrenbang DKI 2016 <http://musrenbang.jakarta.go.id/2016>)

to negotiate government action other than to accept, ignore, or file a new complaint.

Another form of interaction is the technical interaction, which as shown in Table 2, only applies to the IT-mediated spaces. An example of the kind of interaction is when citizens interact with the mobile application that allows them to provide their suggestions. Using this app, they can also enter reasons for their suggestion, insert supporting documentation (i.e. picture), and tag the proposed location.

The enabling factors

Once the types of interaction involved in each space have been identified, it is then possible to map enabling factors for

effective citizen interactions. We conducted an exercise to map the enabling factors that have been reported by MAVCI partners and other literature. This literature was selected to match the case studies under investigation (i.e. e-Musrenbang/ Musrenbang and LAPOR!).

To do the mapping, one shall interpret the action constitutive resources inherently attached to each enabling factor (see Figure 2 for the list of such resources). Table 3 lists the type of interaction as identified in the previous section (i.e. technical and strategic-social interactions), the required action-constitutive resources, and the enabling factors according to its implicit assumption as reported in the prior studies.

Table 3. Mapping of the enabling factors for LAPOR! and e-Musrenbang from the human action perspective

Interaction	Enabling Factors
Technical	<p><i>Technical knowledge</i></p> <p>Public awareness regarding the system (Siregar et al. 2017; Taylor and Kota Kita 2015)</p> <p>Tools</p> <p>Access to and ownership of ICT tools (CIPG 2015; Feruglio and Rifai 2017)</p> <p>Availability of easy-to-use technology (Feruglio and Rifai 2017; Putri 2015)</p>

<p>Social (strategic)</p>	<p><i>Items of exchange value</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear incentives to the citizens (i.e. more funding at the neighbourhood level, better public services) (Feruglio and Rifai 2017) <p><i>Authority/power</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Support from the key political champion(s) (CIPG 2015; OECD 2016) <p><i>Knowledge of the rules of process and opponent</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consistent policies that support citizen engagement (OECD 2016) • Availability of clear guidelines for citizen participation (Aswad et al. 2012; OECD 2016) • Capacity development for the government officials and citizens (OECD 2016) <p><i>Shared media for communication</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Variety of communication channels (CIPG 2015)
---------------------------	--

Technical knowledge about the IT system affects the ability to perform technical interaction in e-invited space. Prior studies have suggested that creating awareness is the key for continued use of the complaint-handling system (Siregar et al. 2017). Also, access to the ICT tools including the Internet is necessary. Siregar et al. (2017) noted that “*“The geographic spread of complaints [submitted to LAPOR!] corresponds with the varying state of development across Indonesia, [but it] has not been able to reach more isolated citizens, who have no access to basic ICT infrastructure”*. Moreover, availability of easy-to-use technology is essential to interact with the digital platform (Feruglio and Rifai 2017). To this extent, LAPOR! offers several flexibilities. For example, to submit their complaint, citizens can use SMS, Mobile apps, or Web portal. Citizens can use their Facebook or Twitter account to log into the system. Looking through the lens of Habermas’ TCA, strategic social interaction requires both government and citizens to rely on

the resources at their own disposal. Such resources are what Habermas describes as “social and material resources that are involved in the generation of power and dominion of some actors over others” (Ngwenyama and Lyytinen 1997). Habermas contends that such resources may include charisma, social status, authority, time, and financial resources or items of exchange value (Habermas 1984). Therefore, a symbolic action of support by political champion contributes to the legitimisation of the invited space and may persuade the citizens to expend the effort required to participate meaningfully. Similarly, the incentive given to the users is another important enabling factor. The literature on organisational change theory posits that people are generally used to the status quo and any disruptions may evoke human resistance (Tait and Vessey 1988). However, when the perceived impacts are in line with their goals, people are more willing to participate (Lin and Shao 2000). Feruglio and Rifai (2017) suggest that such benefits can be in the form of efficiency due

to streamlining budgeting process or in the distribution of funds to the neighbourhood level.

In addition, availability of clear and consistent guidelines for citizen participation is also necessary to provide an understanding of rules and processes. While the Musrenbang process is an important formal opportunity to involve the public in determining development priorities of local governments, several steps have been taken to improve the quality of the Musrenbang, such as socialisation to try to build a culture of participation and engagement, as well as measures to ensure concrete follow-ups (Siliwanti 2014).

Social interaction also requires shared medium for communication. Implementation of LAPOR! and e-Musrenbang showed that IT can contribute to successful social interactions in the electronic-based system. Integration of electronic system into the traditional musrenbang has significantly expanded capacity and coverage of citizens included in the planning process. Likewise, availability of easy-to-use technology such as social media or SMS has helped the citizens to interact in the invited or created space. Nevertheless, IT design, in its role as a shared medium, can also limit social interaction in invited space. Design of e-Musrenbang and LAPOR as feedback mechanism system limit capability of the citizens to perform follow-up action, which is needed when citizens are to perform a communicative action including clarification or negotiation. CEK SEKOLAH-KU overcomes this limitation by resorting to in-person (non-electronic) communication. Here, CSOs act as intermediaries to facilitate, organize, communicate and coordinate with the schools' as well as students' representatives and parents. Follow-up mechanism is put in place to verify, clarify and mediate the complaint, where key

stakeholders will convene in a monthly consultation meeting to decide the final result of complaint resolution¹.

Finally, it should be emphasised that the mapping shown in Table 3 only outlines a set of conjectures on the possible enabling factors affecting the effectiveness of citizen interactions in LAPOR and Musrenbang/e-Musrenbang. Hence, it needs to be further refined through empirical investigations. This is even more true for social interactions, which are contextually embedded in the local practices and characteristics. Some factors might be more prominent in a certain local context compared to the others. The Habermas' TCA has a limitation to capture the complexity of the local context. The main criticism of Habermas' TCA is that it largely ignores asymmetrical distribution of power in particular settings and is restricted to hierarchically structured relations (Fraser 1989; Moose 2002). Therefore, future research may endeavour to apply different theories useful to capture the complexity in these contexts. Such exploration can utilise the results of the mapping suggested in this study as *a priori* theory.

Conclusion

This learning paper aims to understand ways to achieve effective citizens interaction in IT-mediated invited space with T&A ecosystem in Indonesia. The Doll and Torkzadeh (1989)'s discrepancy model shows that effective participation can only be achieved when conducted under the equilibrium condition. Therefore, the two important elements that affect the equilibrium condition were then assessed using two theoretical frameworks. The study utilised Offenhuber (2015)'s ladder of civic participation to categorise the desired level of citizen participation in several T&A initiatives under MAVCI project. Using the

¹ See complaint handling CEK SEKOLAH-KU at <http://ceksekolahku.or.id/data>

selected e-invited spaces, we then applied Habermas' TCA to delineate enabling factors affecting the specific interaction as reported by prior studies. The following are the key insights from the study.

- **Invited spaces in Indonesia were mainly designed for a lower level of citizen participation.** Analysis of various IT based and non-IT based systems have shown the mixed level of desired citizen participation designed for the T&A ecosystem in Indonesia. Most of the e-invited spaces have a lower level of citizen participation than the traditional (non-IT) interaction or the e-created space. By design, most e-invited space is only intended to solicit feedbacks/comments and complaints from the community.
- **The study has also shown that IT provides “medium for communication” necessary for social interactions among the key stakeholders in invited or created space.** This allows for an effective and an efficient use of resources during interaction within the space.
- **However, it is also apparent that IT has a limitation in providing communication “medium” for a space that requires a higher level of citizen participation.** Other spaces overcome this limitation by combining IT-based with traditional in-person interaction. For example, citizens can submit feedback using the IT-based system and use in-person consultation session for discussing follow-up actions. In the future, e-invited space may use video conference functionality to replace in-person consultation.
- **Habermas' TCA shows that the type of social interaction in IT-mediated invited space is quite similar to those of traditional non-IT invited space.** In both spaces, social interaction manifests in the form of strategic action. Hence, the set of enabling factors for the effectiveness of stakeholder interaction within both systems are also quite similar. The political support, consistent procedures, clear guideline for citizen participation, and public awareness of benefits of participation are among key enabling factors for the space that was designed to solicit citizen feedback.
- **The only difference between both systems is on the application of technical interaction needed when interacting with IT.** For successful interactions, citizens need technical knowledge about the IT system and access to ICT tools and infrastructures.
- **The enabling factors for effective interactions within the invited space are contextually embedded in the local practices and characteristics.** Future research may endeavour to apply different theories useful to capture the complexity in these contexts.

References

- Arnstein, Sherry R. 1969. "A ladder of citizen participation." *Journal of the American Planning Association* 35(4):216-224.
- Aswad, Setiawan, Phil Heywood and Connie Susilawati. 2012. "The roles of procedural justice and social learning in improving self organizing capabilities of local communities for sustainable development in decentralized Indonesia."
- Baxter, Hugh. 2011. *Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Berner, Maureen M, Justin M Amos and Ricardo S Morse. 2011. "What constitutes effective citizen participation in local government? Views from city stakeholders." *Public Administration Quarterly*:128-163.
- CIPG. 2015. "How Public is Public Reporting Tools?" In Presented for Indonesian Conference on Governance and Sustainability 2015. Jakarta.
- Cornwall, Andrea. 2004. "Introduction: New democratic spaces? The politics and dynamics of institutionalised participation." *IDS Bulletin* 35(2):1-10.
- Doll, William J and Gholamreza Torkzadeh. 1989. "A discrepancy model of end-user computing environment." *Management Science* 35(10):1151-1171.
- Feruglio, Francesca and Amhad Rifai. 2017. "Participatory budgeting in Indonesia: past, present and future."
- Fraser, N. 1989. "Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender, i."
- Gaventa, John. 2006. "Finding the spaces for change: a power analysis." *IDS Bulletin* 37(6):23-33.
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Boston, Massachusetts: Beacon Press.
- Lin, Winston T and Benjamin BM Shao. 2000. "The relationship between user participation and system success: a simultaneous contingency approach." *Information & Management* 37:283-295.
- Maail, Arthur Glenn, Sherah Kurnia and Shanton Chang. 2010. "A Framework for Exploring Conditional Factors Affecting User Participation in Information Systems Development." In *Australasian Conference on Information Systems*. Brisbane, Australia.
- Moose, D. 2002. "People's Knowledge, Participation and Patronage: Operations and Representations in Rural Development." In *Participation: The new tyranny*, eds. B Cooke and U Kothari. New York: Zed Books.
- Neuman, William L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th Edition. 6th Edition. Boston: Allyn and Bacon: Pearson Education, Inc.
- Ngwenyama, Ojelanki K and Allen S Lee. 1997. "Communication richness in electronic mail: Critical social theory and the contextuality of meaning." *MIS Quarterly* 21(2):145-167.
- Ngwenyama, Ojelanki K and Kalle Lyytinen. 1997. "Groupware environments as action constitute resources: A social action framework for analysing groupware technologies." *The Journal of Collaborative Computing* 6:71-93.
- OECD. 2016. "Open Government in Indonesia." OECD.
- Offenhuber, Dietmar. 2015. "Civic Technologies: Tools or Therapy?" In *Keynote Lecture at Ars Electronica 2015*.
- Outhwaite, William. 2009. *Habermas: a critical introduction*. Cambridge, UK: Polity.
- Pretty, Jules N. 1995. "Participatory learning for sustainable agriculture." *World Development* 23(8):1247-1263.
- Putri, Nindia Prisca. 2015. "Studi Eksplorasi tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Musrenbang di Bappeko Surabaya." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3(3).
- Siliwanti. 2014. "Measuring Civic Engagement for Better Open Government Policies and Services." In *OGP Asia Pacific Regional Conference*.
- Siregar, Fajri, Mona Luthfina Usmani, Larastri Kumaralalita, Halida Nufaisa and Dinita Andriani Putri. 2017. "Complaining to Improve Governance: Four Stories of Complaint-handling Systems in Indonesia,." In *Making All Voices Count Research Report*. Brighton: IDS.
- Tait, Peter and Iris Vessey. 1988. "The effect of user involvement on system success: a contingency approach." *MIS Quarterly* 12(1):91-108.
- Taylor, John and Kota Kita. 2015. "Toward Pro-Poor and Accountable Infrastructure Development Planning: Kota Kita Local Budget Transparency Research." *Yayasan Kota Kita*.
- Yang, Kaifeng and Sanjay K Pandey. 2011. "Further dissecting the black box of citizen participation: When does citizen involvement lead to good outcomes?" *Public Administration Review* 71(6):880-892.

Connecting the dots: Memperkuat interaksi berbagai jenjang pemerintahan Indonesia dalam T&A

Oleh: Leonardus K. Nugraha | Centre for Innovation Policy and Governance

Pengantar: Mendorong T&A melalui penggunaan TI¹

Sejak lama, partisipasi warga dalam sistem tata kelola sebuah negara telah dipandang sebagai tonggak demokrasi (Arnstein, 1969). Partisipasi tersebut tidak hanya mengandaikan akses pada informasi sebagai fondasi bagi panduan pilihan-pilihan politis (Joseph, 2005, Samassekou, 2006), melainkan juga sarana untuk memperkuat suara warga (*voice*) dalam mendorong tata kelola yang lebih responsif dan akuntabel (Tembo, 2012). Kendati kebutuhan akan sarana untuk memperkuat suara warga ini sudah disadari – dan aneka upaya telah dibuat sejak adanya kesadaran tersebut – jauh sebelum kehadiran teknologi digital seperti tersedia pada hari ini, harus diakui bahwa perkembangan aneka teknologi informasi terbaru memberi amunisi baru bagi upaya mempercepat proses perubahan. Demikian, teknologi informasi baru seakan menjadi katalisator bagi partisipasi warga yang lebih kuat dan bagi perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini dapat dilakukan tanpa bermaksud mengurangi beragam upaya melalui pendekatan tradisional yang barangkali masih sangat relevan di tengah komunitas warga yang memiliki akses terbatas pada teknologi informasi terbaru.

Salah satu contoh penerapan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas adalah Layanan Aspirasi

dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).² Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, LAPOR! menyediakan platform pengaduan satu pintu yang terhubung dengan seluruh instansi pemerintah³ sehingga memudahkan warga dalam menyampaikan aspirasi. Mengusung desain terbuka, LAPOR! menyediakan berbagai fitur, antara lain statistik kinerja instansi pemerintah, fitur anonim, unggah data pendukung, hingga pemantauan status tindak lanjut atas laporan oleh warga maupun oleh pimpinan instansi terkait. Hingga 2015, LAPOR! tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 290.000 pengguna, menerima rata-rata lebih dari 800 laporan per hari melalui berbagai kanal yang tersedia, dan mencapai tingkat penyelesaian pengaduan sebesar 81%. LAPOR! menjadi salah satu bukti nyata bagaimana teknologi informasi memungkinkan warga untuk berinteraksi lebih dekat dengan pemerintah, sekaligus mendorong pemerintah agar responsif dalam proses penyampaian layanan publik dan dalam pembangunan.

Mempertimbangkan latar belakang di atas, Making All Voices Count (MAVC) hadir sebagai inisiatif yang mendukung berbagai inovasi, peningkatan skala, dan penelitian untuk membantu warga dan pemerintah memanfaatkan teknologi dalam membuat

perubahan (*tech-enabled change*).⁴ Secara spesifik, salah satu fokus inisiatif MAVC adalah bagaimana membuat teknologi berkontribusi lebih untuk mendorong proses perubahan tata kelola yang lebih akuntabel, efisien, efektif, berdampak, transformatif, sekaligus berkelanjutan.

Sekadar memastikan suara warga agar terdengar tidaklah cukup

Walaupun kehadiran teknologi informasi telah membantu suara warga terdengar oleh pemerintah, hal tersebut bukanlah satu-satunya penentu bagi upaya mempersempit celah komunikasi antara pemerintah dan warga. Selain memastikan suara warga terdengar oleh pemerintah, faktor yang juga tidak kalah penting adalah memastikan pemerintah memiliki kapasitas dan insentif untuk mendengar serta merespon suara tersebut. Jonathan Fox (2014) menyebut kapasitas untuk merespon ini sebagai *'teeth'*. Bagi Fox (2015:353), untuk meningkatkan dampak dari aneka strategi akuntabilitas sosial⁵, adalah penting untuk memastikan terjadi sinergi antara *voice*, atau suara warga, dengan *teeth*, atau kapasitas pemerintah untuk merespon. Dengan kata lain, terlalu berat menitikberatkan pentingnya suara warga belaka dan menegasi kapasitas untuk merespon akan menghalangi akuntabilitas sosial (Fox, 2007, Fox, 2014). Kemampuan untuk merespon suara ini pun krusial demi insentif bagi lebih banyak suara. Ketika kapasitas merespon ini dipenuhi, lebih banyak suara akan muncul sehingga pencapaian partisipasi warga dalam tata kelola pun meningkat.

Senada dengan Fox, Loureiro et al. (2016) melalui konsep "konsertasi" (*concertation*) menekankan arti penting terbentuknya koalisi antara pejabat publik yang berorientasi pada perubahan (juga disebut dengan istilah *champions*) dan konstituen yang berdaya dan terorganisir. Apa yang

dimaknai sebagai "konsertasi" ini juga dimaknai Fox (2007) sebagai fondasi sosial dari akuntabilitas. Dalam konteks yang kurang lebih sama, Carothers (2016) juga menyebutkan:

Untuk mencapai perubahan kelembagaan yang berkelanjutan, organisasi masyarakat sipil dan para reformis harus bergabung menjadi sebuah koalisi yang bekerja pada tingkat lokal, subnasional, nasional, maupun transnasional.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai "integrasi vertikal (*vertical integration*)" (Fox, 2001, Fox, 2007, Fox, 2014, Fox, 2016) ramai di kalangan para akademisi maupun praktisi transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan konsep ini adalah sebuah prakarsa akuntabilitas yang berupaya mengatasi kesenjangan kuasa melalui pengawasan independen yang terkoordinasi dari para pelaku sektor publik di berbagai tingkat (Fox, 2016). Dalam penjelasan Fox, inti dari gagasan ini adalah bahwa lembaga pengawasan di pemerintahan dapat melakukan pemindaian menyeluruh dari seluruh rangkaian keputusan dan kinerja sektor publik di berbagai sektor. Sebagai sebuah strategi yang dimaksudkan untuk pelibatan masyarakat sipil dalam "meneliti kinerja pemerintah di berbagai tingkat pengambilan keputusan dan mempertimbangkan beragam otoritas dalam skala berbeda" (Fox, 2001: 621), integrasi vertikal dipandang efektif dalam kerja akuntabilitas karena mampu mengungkap dasar persoalan dan memungkinkan strategi advokasi mencapai sasaran secara akurat. Di luar itu, strategi ini dipandang paling mampu untuk mendukung tindakan kolektif dari para aktor terkait, meningkatkan keterlibatan warga, serta pada saat yang bersamaan juga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merespon suara warga (Fox, 2014: 35). Dengan kapasitas untuk

menghubungkan titik-titik aksi di akar rumput maupun tindakan lain hingga di tingkat nasional,⁷ dapat dipahami jika integrasi vertikal – sebagai strategi dalam mencapai akuntabilitas sosial – menjadi sangat relevan dengan konsep *teeth*.

Mengacu pada gagasan-gagasan ini, jelaslah bahwa demi menjembatani celah komunikasi antara warga dan pemerintah, memberi perhatian lebih pada kapasitas pemerintah untuk merespon adalah hal yang strategis mengingat kapasitas (atau ketiadaan kapasitas) merespon ini merupakan faktor yang akan mendukung (atau menghambat) akuntabilitas sosial. Dalam kerangka ini, bagian berikut dari tulisan ini mengidentifikasi respon-respon pemerintah di berbagai jenjang pemerintahan dalam kerangka T&A sekaligus membangun pemahaman atas interaksi berbagai jenjang pemerintahan dalam T&A.

Implementasi integrasi vertikal: Tantangan dan peluang

Demi mencapai perubahan kelembagaan yang berkelanjutan, pemerintah tidak dapat hanya meningkatkan kapasitas untuk merespon. Di luar itu, pemerintah juga membutuhkan dukungan dan kerja sama kuat dari para kelompok masyarakat sipil dan reformis (Carothers, 2016, Loureiro et al., 2016), selain tentu saja dari para warga/konstituen yang berdaya.

Dalam kerangka inilah, aneka prakarsa akuntabilitas yang berupaya mengatasi kesenjangan kuasa melalui pengawasan independen yang terkoordinasi dari para pelaku sektor publik di berbagai tingkat (Fox, 2016) muncul. Strategi aneka prakarsa ini tidak berhenti pada mereproduksi inisiatif-inisiatif yang ada, melainkan berupaya untuk menghubungkan titik-titik (*connecting the dots*) antara inisiatif-inisiatif warga di akar rumput dengan inisiatif di

level nasional. Selain itu, strategi ini juga sekaligus berupaya memperluas jangkauan bagi para warga yang tereksklusi baik secara geografis maupun sosial.

Dalam sektor pendidikan, salah satu prakarsa yang muncul sebagai bentuk implementasi integrasi vertikal adalah Cek Sekolah-Ku⁸. Melibatkan kelompok masyarakat sipil dan sukarelawan mitra advokasi, inisiatif ini menggunakan baik platform daring maupun luring untuk memfasilitasi keterlibatan siswa, orang tua, dan warga untuk secara aktif turut mengawasi tata kelola dan kondisi sekolah. Melalui beragam kanal daring yang disediakan, warga dapat mengajukan keluhan antar lain melalui situs, SMS, email, dan twitter. Adapun platform luring memungkinkan pertemuan konsultatif antara orang tua, para siswa, guru, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala.

Dengan menjalin kerjasama dengan beragam pihak di berbagai jenjang pemerintahan, Cek Sekolah-Ku dapat memfasilitasi aneka keluhan melalui mekanisme pengelolaan berjenjang. Laporan masuk ke dalam Cek Sekolah-Ku akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu sekolah. Jika laporan tidak dapat diselesaikan di tingkat paling dasar, laporan akan diteruskan ke tingkat kota/kabupaten (Dinas Pendidikan). Jika masih belum dapat diselesaikan di level pemerintah daerah, persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat nasional. Dari praktik ini, Cek Sekolah-Ku tampak memahami bahwa relasi yang dinamis dengan para aktor pada aneka level pemerintahan yang berbeda merupakan kunci dalam memastikan kesinambungan antara keluhan dan respon terus terjaga. Dalam refleksi Cek Sekolah-Ku, inisiatif ini tidak hanya menawarkan penyelesaian persoalan bagi warga, melainkan juga memberi nilai tambah berupa reputasi yang

baik bagi para aparat pemerintah, sekolah, maupun bagi kelompok masyarakat sipil.

Namun demikian, kekuatan dari Cek Sekolah-Ku sekaligus juga merupakan tantangan bagi keberlangsungannya. Keberlangsungan Cek Sekolah-Ku terutama erat tergantung pada para aktor di tingkat lokal (baik dari sisi pemerintah dan warga), memperkuat jaringan pada setiap jenjang skala vertikal, maupun mempertahankan dinamika antar jenjang yang ada. Dukungan legalitas dalam aneka bentuk juga akan mempercepat transparansi dan tingkat partisipasi di sekolah-sekolah.

Sama halnya Cek Sekolah-Ku yang hendak menggerakkan komunikasi dua arah, Sinergantara juga mengembangkan Game My Village (GMV) sebagai inisiatif berbasis informasi dan komunikasi untuk memungkinkan warga bertindak sebagai perencana desa, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan desa.⁹ Sebagai mitra kunci dalam insiatif ini, pemerintah pun dapat menggunakan GMV sebagai pemicu percakapan antara aparat pemerintahan dan para pengguna layanan publik. Aspirasi untuk menjembatani warga dengan berbagai tingkat pemerintahan hingga level kota/kabupaten ini ditanggapi dengan baik, salah satunya, oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini ditunjukkan, misalnya, melalui alokasi anggaran untuk implementasi GMV. Di luar itu, birokrasi – dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika – pun terlibat aktif dalam insiatif ini, kendati masih terbatas pada distribusi teknologi alih-alih pada perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan.

Walaupun dapat dianggap berhasil dalam mendorong pemerintah dalam meningkatkan kapasitas merespon terhadap kebutuhan warga, inisiatif ini terkendala dengan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik yang bervariasi. Lebih-lebih pada level

yang paling rendah, yaitu pemerintah desa, komitmen pada keterbukaan anggaran masih rendah. Hal ini pula yang menjadi tantangan tersendiri pada berbagai forum desa.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi, salah satu yang dilakukan oleh inisiatif Cek Sekolah-Ku maupun GMV adalah fasilitasi ruang-ruang partisipasi dengan membangun ruang elektronik (*e-created space*). Hal ini pula yang tampak dalam kasus kedesa.id¹⁰. Sebagai platform pemangku kepentingan majemuk untuk mendukung akuntabilitas penerapan UU Desa, kedesa.id menjembatani warga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta para pembuat kebijakan untuk berkolaborasi. Melalui kedesa.id, Pattiro mendesain sebuah *locus* sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat saling menyelaraskan strategi dan regulasi dalam penerapan UU Desa – selain tetap mengembangkan ruang partisipasi luring. Demikian, dapat terjadi diskusi antara pemerintah kabupaten/kota dan aparat di level desa sehingga program di tingkat kabupaten/kota selaras dengan kebutuhan desa. Ruang ini didesain sedemikian hingga dimungkinkan interaksi yang mendukung *feedback loop mechanism* untuk menciptakan ekosistem T&A dalam konteks UU Desa.

Di dalam catatan Pattiro, kendati belum terjadi diskusi langsung daring antara pemerintah dan para penerima manfaat, aneka konten yang telah diunggah ke dalam portal ini lantas dapat digunakan sebagai materi dan pemicu diskusi kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa. Hal-hal krusial dari diskusi tersebut yang lantas disampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk ditindaklanjuti. Salah satu buah dari diskusi tersebut tampak dalam rencana penerbitan Peraturan Menteri Desa tentang BUMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BPD, serta Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Dalam konteks Musrenbang, aneka *e-spaces* yang diciptakan¹¹ pun telah dianggap mampu melengkapi proses penyusunan perencanaan pembangunan di kabupaten/kota. Aneka ruang elektronik ini tidak lantas meniadakan diskusi langsung antara perwakilan warga dengan pejabat publik, melainkan dapat memperluas partisipasi warga yang terkendala oleh undangan/kehadiran fisik. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini berperan dalam meningkatkan akses informasi serta dalam pengawasan musrenbang. Walaupun demikian, dalam catatan Yayasan Kota Kita, teknologi yang sama justru berpotensi menghambat partisipasi warga lantaran akses kepada TIK hanya dikuasai oleh sebagian warga. Oleh karena itu, yang justru dianggap lebih penting adalah integrasi antara *created space* tradisional dan *e-created space* sehingga tercipta sebuah mekanisme pengawasan yang saling melengkapi.

Kisah-kisah di atas menyiratkan bahwa *e-created space* pun telah mampu mengundang keterlibatan dari pemerintah setempat, kendati sifatnya belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, aneka inisiatif ini cukup berhasil dalam mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas merespon. Namun, tanggapan dan komitmen atas inisiatif ini tentu saja sangat bervariasi di setiap level pemerintahan yang ada.

Inisiatif yang mengimplementasikan semangat integrasi vertikal bukanlah hal biasa dalam konteks Indonesia. Aneka inisiatif yang mengusung integrasi vertikal di atas, kendati masih menemui banyak tantangan dan kesulitan dalam implementasi, dapat dipandang bersifat transformatif karena menawarkan praktik baru yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan praktik politik yang umum berlaku di Indonesia.

Menakar kapasitas merespon atas suara warga

Berkaca pada beragam inisiatif dan program yang telah dilakukan pemerintah, saat ini Indonesia telah menunjukkan kemauan untuk membangun pemerintah yang terbuka dan akuntabel, seperti misalnya tampak dalam mekanisme lelang barang dan jasa maupun dalam intensi penerapan e-musrenbang. Selain itu, kini kementerian/lembaga serta pemerintah daerah pun telah diwajibkan untuk memberikan akses terhadap informasi publik. Sebagai sarana penghubung antara warga dengan pemerintah dan untuk menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar pelayanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengembangkan alat pengaduan publik. Alat pengaduan publik bahkan kini dianggap sebagai salah satu tolok ukur dalam mengawasi jalannya pembangunan.¹²

Selain sistem yang tengah dibangun, pembelajaran para mitra MAVC Indonesia pun mengidentifikasi munculnya berbagai *champions* (termasuk adalah para politisi dan pejabat pemerintah, baik di tataran nasional maupun subnasional) yang menginginkan perubahan. Tidak hanya menjadi semangat dari pemerintah pusat, sebagaimana yang tercermin dalam gerakan Open Government Indonesia (OGI) dan berbagai turunannya, kemauan untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel juga terjadi di level subnasional.

Di dalam pengalaman Open Data Lab (ODL) Jakarta melalui program *Innovating for Open Cities*¹³, misalnya, semangat perubahan tampak dalam komitmen dan visi yang kuat dari para pimpinan Pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Banda Aceh untuk meningkatkan performa T&A di

pemerintahan mereka. Selama fase kerja sama, ODL Jakarta juga mengamati bahwa komitmen itu tampak dalam kinerja para pejabat madya di pemerintahan. Selain itu, sebagai kisah yang paling sering disebut dan telah diakui publik internasional, keberhasilan Bojonegoro dalam mengimplementasikan standar transparansi¹⁴ juga menjadi pendorong munculnya *champions* pemerintah lokal yang lain. Kisah-kisah ini merupakan angin segar di tengah dunia politik Indonesia yang tengah dihantam isu megakorupsi dan terpengaruh oleh politik fitnah.

Kendati angin perubahan tampak berhembus di tingkat nasional dan subnasional, jika dilihat secara lebih mendalam, terdapat peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi untuk meningkatkan kapasitas merespon pada tataran pemerintahan. Setidaknya ada tiga aspek yang terkait dengan kapasitas ini, yaitu: (i) penggunaan teknologi dan integrasi daring-luring; (ii) faktor kepemimpinan dan birokrasi; serta (iii) kemitraan.

Pertama, perihal penggunaan teknologi dan integrasi daring-luring.

Proses dan luaran dari akuntabilitas sosial sangat erat terkait dengan konteks (O'Meally, 2013). Dengan mempertimbangkan gagasan ini, meski perkembangan TI terus bergerak ke komunikasi berbasis sarana digital, pengalaman para mitra MAVCI menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi harus selalu disertai dengan ketepatan dan kepekaan. Dengan kata lain, para pemimpin daerah perlu memahami *habitus* dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi sebelum mengimplementasikan teknologi tertentu.

Merefleksikan pengalaman ODL di DKI Jakarta, tampak bahwa Pemprov DKI Jakarta menggunakan pendekatan yang sangat berorientasi pada penggunaan

teknologi. Melalui beragam kanal yang disediakan, warga dapat berinteraksi aktif dengan pemerintah; untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah. Interaksi antara warga dengan pemerintah dalam kasus ini terjadi melalui mekanisme komunikasi yang diatur melalui sistem berbasis teknologi. Yang menarik adalah pemerintah melengkapi penggunaan teknologi dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan produk kebijakan yang mengatur secara jelas pemanfaatan teknologi tersebut (Putri et al., 2016). Sikap ini sejalan dengan prinsip bahwa teknologi hadir untuk membantu meningkatkan kualitas proses bisnis, bukan sebaliknya. Lagi-lagi, peran pemimpin menjadi krusial dalam menentukan cara pelayanan publik yang lebih baik.

Bagaimanapun, teknologi hanya dapat membawa perubahan jika memperhitungkan konteks yang mengikat. Teknologi adalah alat pemungkin (*enabler*) bagi penyelesaian sebuah masalah secara efektif dan efisien. Tanpa *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas, dalam hal standardisasi data kependudukan dan geospasial misalnya, pemanfaatan teknologi justru akan menimbulkan kebingungan alih-alih solusi atas persoalan.

Senada dengan hal ini, penelitian CIPG (Siregar et al., 2017) mengungkapkan bahwa meskipun kehadiran teknologi membantu meningkatkan keterbukaan pemerintah, penggunaan teknologi yang optimal hanya dapat diraih jika para pemimpin daerah pertama-tama memahami teknologi apa yang hendak dipergunakan. Tanpa arah yang jelas, teknologi tidak akan membawa manfaat yang diharapkan. Selain itu, dialog langsung harus tetap menjadi sebuah pilihan yang terintegrasi dalam komunikasi publik. Program Dialog Jumat di Bojonegoro menunjukkan bahwa warga masih cenderung memilih dialog langsung

sebagai sarana komunikasi dengan para pejabat publik, sekaligus menyiratkan bahwa teknologi bukanlah faktor utama dan satu-satunya dalam memungkinkan sebuah pemerintahan terbuka. Hal serupa tampak dalam pengalaman ODL, betapa warga Banda Aceh cenderung memilih perjumpaan tatap muka dengan para pejabat publik dan belum terlalu memanfaatkan penggunaan teknologi. Hal ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya dialog langsung sebagai pilihan yang terintegrasi dalam komunikasi publik. Pemanfaatan teknologi tidak menjadi alasan untuk meniadakan komunikasi langsung dengan warga.

Berkaca dari pengalaman di atas; sejauh dan sebesar apapun kita terkesan sangat mengandalkan kemajuan teknologi, tampaknya dalam konteks Indonesia ada kriteria spesifik untuk reformasi birokrasi dan tata kelola yang tidak dapat dihilangkan: faktor kepemimpinan.

Kedua, perihal kepemimpinan dan birokrasi. Harus diakui bahwa faktor kepemimpinan adalah faktor dominan bagi kesuksesan transformasi di level pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks pemerintah daerah, misalnya, hal ini tercermin pada kasus Bojonegoro, Indragiri Hulu, DKI Jakarta, dan Banda Aceh.¹⁵ Keyakinan para pemimpin dari masing-masing daerah terhadap transparansi dan partisipasi publik tertuang secara konkret dalam kebijakan dan instrumennya sebagai implementasi prinsip-prinsip tersebut. Hanya saja, implementasi kebijakan pada masing-masing daerah menjadi berbeda lantaran perbedaan wajah kepemimpinan di daerah yang bersangkutan. Di daerah yang masih cenderung memiliki ketergantungan pada sosok pemimpin inovatif, implementasi berjalan lambat karena birokrasi baru bergerak setelah mendapat instruksi tertentu dari pimpinan dan bukan atas dasar semangat untuk berubah. Idealnya,

kepemimpinan transformatif mendasarkan kunci keberhasilan pada membangun sistem alih-alih pada sosok. Kepemimpinan transformatif harus sadar bahwa perubahan itu dilembagakan melalui perbaikan sistem serta menularkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas pada jajaran aparat yang ada.

Isu ketergantungan pada sosok pemimpin inovatif ini juga terkait dengan kapasitas pemerintah untuk merespon. Dalam pengalaman para mitra MAVCI, kapasitas merespon pemerintah terhadap suara warga kerap kali terhambat birokrasi yang enggan bergerak. Birokrasi akan merespon sejauh ada intervensi khusus, misalnya setelah didorong atau diperintahkan oleh pemimpin mereka maupun jika mendapat tekanan dari media dan masyarakat sipil (Siregar et al., 2017). Celah antar jenjang inilah yang menyulitkan tercapainya transformasi dan integrasi vertikal.

Namun setidaknya, di dalam refleksi CIPG, ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendorong keterbukaan dan kepemimpinan transformatif kepada kepala daerah: melalui pendekatan individu dan melalui pendekatan institusional. Pendekatan pertama cenderung menekankan insentif yang didapatkan oleh pemimpin daerah, yang dapat berupa reputasi maupun modal politik lain. Sementara itu, pendekatan institusional menekankan pada efisiensi pemerintahan dan kontribusi pada pembangunan secara utuh dalam jangka panjang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa membangun sistem yang transparan akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong rasa percaya masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak dalam pembangunan daerah.

Ketiga, perihal kemitraan. Dalam pelaksanaan program MAVC Indonesia, kemitraan menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan insiatif tertentu. Kendati demikian, tidak

dapat dipungkiri jika faktor ini terkait erat dengan faktor kepemimpinan.

Jika mengacu pada pelbagai pengalaman dalam program MAVC Indonesia, tanggapan pemerintah terhadap aneka inisiatif MAVC Indonesia berbeda-beda antara level desa, kota/kabupaten, dan pusat. Dalam pengalaman Sinergantara, misalnya, kendati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyambut baik Game My Village sebagai sarana bantu perencanaan desa, namun di tingkat desa bervariasi. Sinergantara mendapati dua desa yang cukup responsif dan kooperatif dalam implementasi GMV, namun dua desa yang lain cenderung pasif dalam menanggapi inisiatif ini.

Sementara itu, pengamatan ODL Jakarta sedikit agak berbeda. Dalam kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh, semangat kemitraan ini juga tampak dari para *champions* di level madya pemerintahan. Para *champions* ini memiliki ide dan visi yang serupa dengan program MAVCI serta menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi program terkait. Selain itu, dukungan dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Banda Aceh dalam peningkatan performa T&A di daerah mereka juga menjadi faktor yang memperkuat kemitraan ini. Keberadaan dukungan baik dari pemimpin daerah maupun para birokrat di level madya pemerintahan menjadikan program ini dapat berjalan dengan baik. Pengalaman ODL ini juga hampir senada dengan pengamatan Perkumpulan Prakarsa terhadap beragam inisiatif *e-planning* dan *e-budgeting* di tingkat subnasional. Dalam penerapan *e-government*, Prakarsa melihat bahwa semangat kemitraan mulai tumbuh di dalam institusi-institusi pemerintahan, walaupun lagi-lagi sangat tergantung pada kemauan politis dari para pemimpinnya.

Walaupun secara umum tampak bahwa

semangat kemitraan mulai tumbuh di berbagai inisiatif dengan kadar berbeda, namun pembelajaran lebih lanjut akan lebih bermakna jika melihat lebih dalam ke konteks masing-masing mengingat proses dan luaran dari akuntabilitas sosial sangat erat terkait dengan konteks (O'Meally, 2013).

Penutup: Mempersiapkan langkah ke depan

Sebagai strategi akuntabilitas yang berupaya mengatasi kesenjangan kuasa melalui pengawasan independen yang terkoordinasi dari para pelaku sektor publik di berbagai tingkat, integrasi vertikal sangat terikat erat dengan konteks dan isu. Maka, penting untuk mencatat bahwa integrasi vertikal tidak dapat bekerja secara optimal di semua konteks dan isu. Kendati demikian, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk penerapan integrasi vertikal secara optimal.

Dalam pengalaman para mitra MAVC, tampak setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan.

Pertama, perlu pemahaman menyeluruh akan struktur dan tingkat pemerintahan, termasuk memahami bagaimana setiap tingkat pemerintahan secara vertikal berinteraksi dan bagaimana asimetri informasi antar tingkat dan aktor terjadi. Dari sudut pandang mitra MAVC, memahami secara pasti siapa dan apa dari pemerintah yang akan dilibatkan adalah penting. Perlu diingat, pemerintah bukanlah entitas tunggal yang selalu otomatis bergerak dalam satu arah yang sama. Oleh karena itu, kematangan berinteraksi antar aktor, baik di dalam pemerintahan maupun antar pemangku kepentingan akan menentukan dalam upaya menggerakkan perubahan.

Kedua, pemahaman mengenai struktur pemerintahan juga perlu diikuti dengan pemahaman akan kapasitas pemerintah

untuk merespon. Mengetahui integritas dan rekam jejak masing-masing aktor, dalam hal ini, adalah salah satu cara untuk memahami kapasitas merespon. Selain itu, dukungan dan peningkatan kapasitas pada aktor-aktor pemerintahan maupun penyedia jasa yang lain perlu dilakukan untuk mendorong mekanisme umpan balik terjadi.

Ketiga, memastikan keterlibatan warga negara adalah keharusan. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi perlu dipertimbangkan secara seksama dan dalam porsi yang tepat. Dalam beberapa kasus, cukup dilakukan penyesuaian terhadap teknologi yang ada sehingga menjadikan proses tersebut lebih inklusif. Penggunaan teknologi baru, misalnya melalui pendekatan berbasis TIK, dapat dilakukan sejauh tidak meniadakan pertemuan tatap muka. Dalam hal ini, implementasi kombinasi luring-daring secara tepat adalah penting.

REFERENCES

2016. Ideas for Future Work on Transparency and Accountability. *Carnegie Endowment for International Peace* [Online]. Available from: <http://carnegieendowment.org/2016/05/02/ideas-for-future-work-on-transparency-and-accountability-pub-63318> [Accessed 3 August 2017].
- ARNSTEIN, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35, 216–224.
- FOX, J. 2001. Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society Policy Advocacy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 30, 616–27.
- FOX, J. 2007. Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico. Oxford: Oxford University Press.
- FOX, J. 2014. Social Accountability: What does the evidence really say? In: GPSA (ed.) *GPSA Working Paper Series*. World Bank.
- FOX, J. 2016. Scaling Accountability Through Vertically Integrated Civil Society Monitoring and Advocacy. *Making All Voices Count Working Paper*. Brighton: IDS.
- HALLORAN, B. 2014. *Thinking and Working Politically in the Transparency and Accountability Field*. London, Transparency and Accountability Initiative.
- INDONESIA, O. G. 2015. Indonesia OGP Action Plan 2014–2015. Jakarta: Open Government Indonesia.
- JOSEPH, A. 2005. Media matter, citizens care: The who, what, when, where, why, how, and butts of citizens' engagement with the media. UNESCO.
- LOUREIRO, M., CASSIM, A., DARKO, T., KATERA, L. & SALOME, N. 2016. When Does the State Listen? *IDS Bulletin*, Vol. 47, No. 1, 55–68.
- MALENA, C., FORSTER, R. & SINGH, J. 2004. Social Accountability: An Introduction to The Concept and Emerging Practice. *Social Development Papers*. Washington DC: World Bank.
- O'MEALLY, S. C. 2013. Mapping Context for Social Accountability: A Resource Paper. Washington DC: Social Development Department, World Bank.
- PEIXOTO, T. & FOX, J. 2016. When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness? *IDS Bulletin*, 47, 23–40.
- PUTRI, D. A., KARLINA, M. C. H. & TANAYA, J. 2016. From Smart City to Open City: Lessons from Jakarta Smart City. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
- SAMASSEKOU, A. 2006. Foreword. In: JORGENSEN, F. R. (ed.) *Human Rights in the Global Information Society*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.
- SIREGAR, F., USMANI, M. L., KUMARALALITA, L., NUFAISA, H. & PUTRI, D. A. 2017. Complaining to Improve Governance: Four Stories of Complaint-handling Systems in Indonesia. *Making All Voices Count Research Report*. Brighton: IDS.
- TEMBO, F. 2012. Citizen voice and state accountability. *ODI Working Papers*. London: Overseas Development Institute.

Notes

- 1 TI (Teknologi Informasi) mengacu pada aneka macam teknologi yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, maupun dalam penyebaran informasi. Sementara itu, T&A merupakan rujukan pada konsep transparansi dan akuntabilitas..
- 2 Sebagai bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), LAPOR merupakan sistem pengelolaan pengaduan lintas kanal. Dalam platform ini, warga dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal, antara lain SMS 1708, situs www.lapor.go.id, aplikasi mobile (Android, Blackberry, IOS), maupun media sosial.
- 3 Hingga saat ini, LAPOR! telah terhubung dengan 81 kementerian/lembaga, 5 pemerintah daerah, dan 44 BUMN.
- 4 Making All Voices Count adalah inisiatif internasional yang bekerja di 13 negara di Afrika dan Asia. Inisiatif ini mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memberdayakan warga negara, dan mendukung pemerintahan lebih efektif dan akuntabel melalui solusi-solusi kreatif berbasis inovasi dan teknologi. Ada beragam jenis aktivitas yang didukung oleh MAVC, antara lain adalah hibah inovasi, penskalaan (scaling), penelitian, dan hub teknologi. Lihat <http://www.makingallvoicescount.org/>.
- 5 Akuntabilitas sosial dapat dimaknai sebagai sebuah pendekatan untuk membangun akuntabilitas pemerintahan yang menempatkan keterlibatan langsung/tidak langsung dari para warga sebagai basisnya. Lihat MALENA, C., FORSTER, R. & SINGH, J. 2004. Social Accountability: An Introduction to The Concept and Emerging Practice. Social Development

- Papers. Washington DC: World Bank.
- 6 “[T]o achieve sustainable institutional change, civil society organizations and reformers must band together into coalitions that work at the local, subnational, national, and transnational levels.” Lihat Carothers et al. 2016. Ideas for Future Work on Transparency and Accountability. Carnegie Endowment for International Peace [Online]. Available from: <http://carnegieendowment.org/2016/05/02/ideas-for-future-work-on-transparency-and-accountability-pub-63318> [Accessed 3 August 2017].
 - 7 Bandingkan dengan konsep integrasi horisontal yang cenderung menyorot keterhubungan antar gugus di satu level pemerintahan saja. Termasuk dalam konteks ini adalah misalnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian sebuah isu atau dalam pelaksanaan program kerja atau rencana aksi tertentu.
 - 8 Cek Sekolah-Ku, atas kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII), merupakan mekanisme pengawasan partisipatif dalam memperbaiki layanan dan infrastruktur pendidikan. Cek Sekolah-Ku telah beroperasi di 73 sekolah di empat kota di Indonesia. Adanya nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu meningkatkan respon dan partisipasi pemerintah daerah dalam inisiatif ini, termasuk dalam hal transparansi anggaran sekolah.
 - 9 Sejak 2014, tercatat Game My Village (GMV) telah hadir di empat desa di Kabupaten Bojonegoro, serta di Kabupaten Kendal dan Kota Bandung. Dalam perannya, GMV telah menyediakan beragam peta infrastruktur desa berikut kondisinya, peta fasilitas pelayanan publik, pembentukan forum pengembangan desa dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, serta pemberian rekomendasi rencana pembangunan.
 - 10 Merupakan portal terbaru yang dikembangkan oleh Pattiro sebagai e-created space untuk mendukung penerapan UU Desa. Portal kedesa.id memiliki empat menu utama, yaitu blog, wiki, repositori, dan forum.
 - 11 Aneka e-spaces yang diciptakan dalam konteks Musrenbang berbeda-beda antar daerah. Di Kebumen, e-spaces ini hadir melalui situs pemerintah, Facebook, dan YouTube. Sementara itu, Bandung dan Surabaya telah berinisiatif menggunakan aplikasi Musrenbang Online (e-Musrenbang) untuk menjangkau warga lebih luas.
 - 12 Dapat dilihat dalam beberapa inisiatif keterbukaan, baik di level nasional maupun daerah seperti tampak dalam pelbagai liputan media massa. Sekadar contoh dapat lihat <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/18/10494899/Cegah.Layanan.Buruk.Jokowi.dan.Kuntoro.Teken.LAPOR.atau.untuk.inisiatif.di.level.daerah.lihat.http://nasional.kompas.com/read/2016/04/15/07155901/Mengenal.Manajemen.Pemerintahan.Berbasis.Publik.ala.Bupati.Bojonegoro>, akses pada 1 September 2017.
 - 13 Program Innovating for Open Cities merupakan salah satu dari hibah hub teknologi MAVC di Indonesia, dalam kerja sama dengan Web Foundation. Fokus dari program ini adalah kerja sama dengan pemerintahan di level subnational, secara spesifik adalah dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
 - 14 Salah satu pencapaian Bojonegoro lihat <https://news.detik.com/berita/3183785/hebat-bojonegoro-sejajar-dengan-kota-kota-besar-dunia-soal-transparansi>, akses pada 10 Agustus 2017.
 - 15 Dapat dilihat dalam refleksi CIPG dan ODL Jakarta dalam program MAVC Indonesia.

Membagi Kekuatan Penengah dan Pemampu untuk Keterbukaan

Oleh: Anton Muhajir | Sloka Institute

Pengantar

Pada 4 Januari 2017 lalu Nyoman Sudiasa pulang kampung ke desanya di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Karena ada sebuah urusan, orang dengan gangguan jiwa atau skizofrenia ini mampir ke kantor desa.

Di kantor desa itu dia bertemu teman lamanya, Gede Angkat, sesama orang dengan gangguan jiwa. Sudiasa mengaku senang karena temannya itu sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu agar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Sebelumnya, Angkat mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Namun, jaminan kesehatan yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali itu sudah berhenti pada 31 Desember 2017. Dengan mendapatkan KIS, Angkat kembali bisa mengakses layanan kesehatan rutinnnya, terutama dalam posisinya sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Sudiasa kemudian menuliskan pengalamannya bertemu Angkat yang telah mendapatkan KIS itu ke akun Facebook. Dia menambahkan informasi bahwa masih banyak ODGJ dan pengidap epilepsi yang membutuhkan pengobatan, hak warga yang dijamin oleh undang-undang (UU).

Tulisan Sudiasa yang ditulis pada 5 Januari 2017 itu tak hanya mendapatkan tanda “suka” dari 60 temannya di Facebook tetapi juga dibagi tiga pengguna lainnya. Ada juga komentar dari kepala desa tetangganya yang mengatakan mereka

sedang mengusahakan agar ODGJ di desa itu segera mendapatkan hak sebagai warga negara, jaminan kesehatan gratis sebagaimana dijamin UU, sebagaimana diperoleh Gede Angkat maupun Sudiasa sendiri.

Sudiasa adalah Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bali, salah satu kelompok penerima manfaat program Awasi Jaminan Kesehatan Nasional (AJAKAN) Sloka Institute. Melalui program ini, Sloka Institute ingin meningkatkan peran warga dalam mengawasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui media jurnalisisme warga dan media sosial.

Selain mengikuti beberapa kali diskusi terfokus (FGD) tentang JKN bersama penerima manfaat program lainnya, KPSI Bali juga mendapatkan pelatihan tentang penggunaan media sosial dan video dengan ponsel untuk mengawasi layanan publik pada November 2016 di sekretariat KPSI Bali yang lebih akrab disebut Rumah Berdaya. “Kami jadi lebih tahu tentang program JKN maupun media sosial setelah mendapat pelatihan dari Sloka Institute. Karena itu saya langsung menuliskan pengalaman teman saya mendapatkan KIS di Facebook setelah itu pelatihan yang diadakan Sloka Institute,” kata Sudiasa.

Pengalaman Sudiasa menggunakan media sosial, terutama Facebook, untuk mengawasi – di dalamnya termasuk mengapresiasi – layanan JKN menjadi salah satu contoh bagaimana warga menggunakan teknologi (informasi)

untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik, termasuk transparansi dan akuntabilitas.

Inilah salah satu tujuan program Making All Voices Count (MAVC) di mana kelompok penengah (*intermediary*) dan pemampu (*enabler*) seperti Sloka Institute berperan di dalamnya. Dengan menggunakan teknologi, kelompok rentan atau bahkan terpinggirkan seperti KPSI dan ODGJ bisa mengawasi layanan publik, seperti kesehatan oleh puskesmas ataupun pemerintah desa.

Tulisan ini merupakan refleksi dan pembelajaran bagaimana penengah dan pemampu dalam program MAVC menjalankan perannya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, terutama dalam tata kelola lembaga pemerintahan. Empat mitra MAVC yang menjadi contoh adalah Sloka Institute, Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), dan Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia).

Warisan Pembelajaran

MAVC adalah program kolaborasi global untuk mendorong keterlibatan atau partisipasi warga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola badan publik, terutama lembaga pemerintah, seperti sekolah, rumah sakit, pemerintahan kabupaten, hingga pemerintah desa. Strateginya dengan mengubungkan para aktor, terutama warga yang terorganisir dengan lembaga-lembaga pemerintah, sehingga mereka bisa berinteraksi secara langsung.

Untuk mewujudkan tujuannya, MAVC bersama para mitra organisasi non-pemerintah (ornop) atau organisasi masyarakat sipil (OMS), melibatkan warga dalam programnya dan menggunakan teknologi informasi sebagai alat utama untuk mendorong perubahan. Dengan

demikian penerima manfaat program bisa secara aktif menggunakan berbagai teknologi agar mereka mampu mengawasi kinerja pemerintah sekaligus menyuarakan pandangan-pandangannya secara langsung.

Program yang dikelola secara kolaboratif oleh HIVOS, Ushahidi, dan Institute of Development Studies (IDS) Inggris ini dilaksanakan di Afrika, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Negara lokasi program yaitu Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, Mozambique, Afrika Selatan, Nigeria, Liberia, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina.

Di tiap negara lokasi program, MAVC melakukan tiga kegiatan utama. Pertama, memberikan dana hibah untuk mendukung inovasi dan teknologi yang potensial membantu mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Kedua, melakukan riset untuk membentuk bukti-bukti berdasarkan pengalaman tentang bagaimana dan kenapa menggunakan informasi bisa mendorong terwujudnya tata kelola yang akuntabel. Ketiga, bekerja bersama para pembuat kebijakan, pembentuk opini, dan pemberi pengaruh untuk memastikan bahwa pembelajaran kami bisa berdampak lintas-sektor.

Sejak pertama kali dilakukan pada 2013 lalu, MAVC telah memberikan dukungan dana hibah sebanyak 177 meliputi 57 hibah inovasi, 38 hibah perluasan, 60 hibah riset, 15 penghargaan untuk kompetisi inovasi global, dan 7 hibah untuk *tech hub*. Secara nyata, program tersebut antara lain untuk mendorong transparansi, memerangi korupsi, memberdayakan warga, dan memanfaatkan kekuatan teknologi baru untuk membuat pemerintah lebih efektif dan akuntabel. MAVC tidak hanya membawa perubahan selama pelaksanaan program tetapi juga meninggalkan warisan berupa pembelajaran untuk memastikan agar program-program tatakelola

pemerintah di masa depan, terutama yang memanfaatkan transformasi inovasi dan teknologi, juga lebih tersampaikan, terbuka, dan berdampak.

Menurut Transparansi Internasional, transparansi adalah kondisi di mana pemerintah, perusahaan, organisasi, ataupun individu telah menjadi terbuka dalam menyampaikan informasi, aturan, rencana, proses, dan kegiatannya. Hal ini penting karena mereka memiliki kewajiban untuk terbuka, bisa diperkirakan, dan dimengerti untuk mempromosikan partisipasi dan akuntabilitas. Ada pihak ketiga yang diizinkan untuk dengan mudah melihat apa yang telah mereka kerjakan.

National Democratic Institute (NDI) mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya, yang sekaligus merupakan prasyarat utama dalam akuntabilitas. Ketika semakin banyak pemerintah menerapkan pendekatan *open-data*, memastikan bahwa data bisa dibaca, dianalisis, dan digunakan, pada saat yang sama, makin banyak pula kelompok warga yang menggunakan data untuk mendokumentasikan kualitas kebijakan pemerintah dan program terkait kesehatan, pendidikan, dan pemilu.

Menurut NDI, ketika data tidak tersedia dengan baik, warga memiliki peran untuk mengadvokasi akses terhadap informasi dan mengawasi kebiasaan pemerintah dalam upaya untuk mengumpulkan data secara sistematis.

Adapun akuntabilitas adalah konsep di mana setiap orang, badan, ataupun organisasi (baik publik, swasta, ataupun masyarakat sipil), memiliki tanggung jawab untuk melaporkan aktivitas mereka dan menggunakan kewenangan mereka secara benar, termasuk pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya lain yang dipercayakan kepada mereka.

Akuntabilitas pemerintah mengakui adanya

kebutuhan terhadap interaksi warga dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Partisipasi warga berperan penting dalam membantu mewujudkan dan mengelola akuntabilitas dengan mengorganisir dan menuntut transparansi, kemampuan diperkirakan (prediktabilitas), dan kecepatan respon pemerintah.

Setelah dilakukan pertama kali pada tahun 2013, MAVC akan berakhir pada November 2017. Sebagai bagian dari pelaksanaan program itu, MAVC ingin mewariskan pembelajaran dari program para mitra kerja, termasuk menjawab pertanyaan “bagaimana fungsi penengah dan pemampu bekerja dalam ruang *invited* dan *e-invited* di ekosistem transparansi dan akuntabilitas Indonesia untuk menuntaskan masalah dalam mengakses dan atau meningkatkan layanan publik?”.

Pembelajaran dalam tulisan ini disarikan berdasarkan pengalaman dari empat mitra program MAVC yang bekerja di isu transparansi dan akuntabilitas, yaitu ICW, PATTIRO, Sloka Institute, dan TI Indonesia.

Penengah atau Pemampu?

Empat mitra MAVC di atas bekerja untuk isu berbeda-beda. ICW di sektor pengadaan barang dan jasa, PATTIRO di isu pemerintahan desa, Sloka Institute di isu pelayanan kesehatan, dan TI Indonesia di sektor pendidikan. Dalam bahasa MAVC, keempat ornop tersebut telah menjalankan peran sebagai penengah dan pemampu.

Merujuk pada kamus Oxford, penengah (*intermediary*) adalah seseorang yang berada di tengah dan bergerak aktif dari belakang ke depan di antara dua sisi. Penengah dikenal juga dengan nama berbeda, seperti mediator dan fasilitator. Dalam konteks program MAVC, penengah ini menghubungkan tidak hanya dua aktor tetapi sebagai aktor dalam isu terkait. TI Indonesia misalnya menghubungkan parapihak (*stakeholders*) dalam pendidikan,

yaitu Dinas Pendidikan, pengelola sekolah, orang tua murid, guru, dan ornop lokal.

Adapun pemampu (*enabler*) adalah seseorang yang membuat orang lain mampu untuk mencapai sebuah akhir. Peran aktif sebagai pemampu adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pihak lain agar pihak tersebut mampu untuk terus melakukan upayanya sehingga mencapai hasil sesuai keinginannya. Dalam konteks MAVC, peran ini dilakukan dengan membangun pemahaman melalui diskusi terfokus (FGD), menyediakan ruang, bahkan menyuntikkan keberanian kepada penerima manfaat program.

Masing-masing mitra program dalam contoh pembelajaran ini menggunakan teknologi informasi maupun ruang-ruang konvensional dalam menjalankan peran-peran tersebut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara ringkas, program masing-masing ornop tersebut sebagai berikut:

- **ICW** melaksanakan program pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintah secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Caranya dengan menggunakan platform pengawasan *online* (daring) dan kerja sama secara *offline* (luring).

Untuk mencapai tujuan itu, ICW melakukannya melalui tiga cara. Pertama, menguatkan kapasitas masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat sipil dan jurnalis, untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan lelang berdasarkan *open data*. Kedua, meningkatkan respons daring maupun luring pemerintah lokal serta akuntabilitas pelaksanaan lelang publik. Ketiga, mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengelola fungsi partisipasi publik maupun analisis data spasial untuk mewujudkan

platform pengawasan dalam pembelian barang dan jasa.

Program ini dilakukan dengan melibatkan beberapa mitra lokal dan jurnalis di Makassar, Manado, dan Kendari. Di tiga kota itu, ICW bekerja sama dengan ornop lokal yaitu Yayasan Suara Mitra Bangsa (YASMIB) Makassar, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Manado, dan Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Kendari. Di tingkat nasional, ICW bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

- **PATTIRO** berupaya mendorong agar norma-norma ideal UU Desa dapat diimplementasikan dengan baik dengan cara mempromosikan akuntabilitas dalam penerapan UU Desa. Pattiro melakukannya melalui tiga cara yaitu membuat kajian pelaksanaan UU Desa, membangun hubungan keterikatan (*engagement*) dengan pengambil kebijakan dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, serta menyediakan forum berbasis teknologi informasi sebagai ruang bersama sekaligus mekanisme umpan balik bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan komunitas desa.

Program Pattiro diadakan di tingkat nasional dengan penerima manfaat di kalangan lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil. Adapun lokasi kajian di empat provinsi berbeda dan kelompok warga berbeda di Tuban (Jawa Timur), Kebumen (Jawa Tengah), Provinsi Maluku, dan Riau.

- **Sloka Institute** melaksanakan program Awasi Jaminan Kesehatan Nasional (AJAKAN) melalui media jurnalisisme warga dan media sosial untuk meningkatkan layanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mencapai tujuannya, Sloka Institute melakukan beberapa kegiatan. Pertama, membangun hubungan dengan parapihak yaitu pemerintah, pengelola JKN, pemberi layanan, dan penerima layanan. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemberi layanan maupun pengguna layanan dalam media jurnalisme warga. Ketiga, menyediakan ruang bersama bagi parapihak untuk berinteraksi secara langsung secara daring.

Lokasi program di Denpasar, Bali dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Denpasar, Ombudsman, rumah sakit, Puskesmas, narablog (*blogger*), pengguna Internet, dan warga pengguna JKN.

- **TI Indonesia** melaksanakan program peningkatan tata kelola dan kondisi sekolah melalui pengawasan secara partisipatif terhadap kinerja sekolah. Untuk itu, TI Indonesia membangun hubungan keterikatan dengan aktor di berbagai tingkat dari tingkat lokal hingga pusat, menyediakan forum daring yang terbuka, serta melaksanakan pertemuan rutin melibatkan para aktor dalam tata kelola sekolah. Hasil program ini antara lain adanya mekanisme penanganan keluhan agar ada umpan balik dari komunitas terhadap kondisi pendidikan di daerah mereka.

Program dilaksanakan secara nasional dengan fokus di lima kota yaitu Semarang, Batang (Jawa Tengah), Bojonegoro (Jawa Timur), Makassar, dan Palangka Raya.

Program para mitra MAVC di atas dilakukan di berbagai level mulai dari tingkat komunitas atau kelompok hingga pemerintah pusat. Pendekatan di tiap level cenderung

berbeda-beda, tergantung kondisi dan kewenangan masing-masing. Di level pemerintah pusat, sebagai contoh, TI Indonesia membangun hubungan keterikatan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan di level lokal, mereka bekerja sama dengan Komite Sekolah di masing-masing sekolah. Dengan strategi tersebut, TI Indonesia sebagai penengah berusaha menghubungkan semua aktor untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan.

Amunisi Advokasi

Semua proses untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu bisa diperjuangkan sesuai konteks Indonesia karena tiga hal yaitu dukungan iklim politik, perkembangan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat sipil. Tiga faktor pendukung itu yang membedakan Indonesia saat ini dengan sebelum 1998, sekaligus menjadi modal dan pijakan negara ini untuk menjadi terdepan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas setidaknya di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia pasca-1998 mengalami perubahan signifikan dalam hal kebebasan berekspresi dan demokrasi. Perubahan tersebut disertai dengan lahirnya perangkat-perangkat hukum untuk mendukung kebebasan berekspresi dan partisipasi. Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers salah satunya. Lahirnya UU ini memberikan jaminan bahwa tidak hanya tidak ada lagi pengekanan negara terhadap kebebasan pers tetapi justru sebaliknya, negara mendorong lahirnya media-media baru di negara.

Media-media di Indonesia pun tumbuh serupa cendawan, termasuk media jurnalisme warga. Sloka Institute

memanfaatkan situasi itu dengan membuat media jurnalisme warga BaleBengong sejak 2007 yang dalam konteks MAVC menjadi ruang daring bagi warga untuk bersuara termasuk dalam mengawasi layanan publik, terutama di Bali.

Suara-suara warga itu semakin mudah tersampaikan, dan harapannya lalu terdengar lebih luas termasuk oleh lembaga-lembaga pemerintah, ketika ada amunisi lain bernama perkembangan teknologi informasi. Revolusi teknologi informasi secara global berdampak juga di Indonesia. Alat-alat komunikasi lama, semacam surat dan telepon rumah, berganti dengan alat baru berupa telepon seluler (ponsel). Pada saat yang sama, Internet juga menghadirkan kemudahan bagi ornop untuk menghadirkan ruang bersama secara daring di mana pemerintah dan warga tidak hanya bisa berinteraksi tapi juga saling mengawasi.

ICW memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mendorong pemerintah agar lebih transparan, salah satu contohnya dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa. ICW menggunakan teknologi untuk tiga hal yaitu (1) menyediakan data lelang di tingkat lokal bagi pengguna sehingga mereka bisa mengawasi pelaksanaan lelang, (2) menyediakan perangkat untuk pemerintah lokal agar bisa mencegah penipuan dan korupsi dalam proses lelang, (3) menyediakan dasar bagi hubungan baik dan kerja sama antara pemerintah lokal dengan masyarakat sipil dan jurnalis.

Hal itu didukung pula oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2015 agar semua kementerian, lembaga pemerintah, institusi dan pemerintah daerah menggunakan e-procurement untuk mengurangi peluang kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi ini juga dilakukan dua ornop lain, Pattiro yang mengelola kedesa.id dan TI Indonesia yang membangun situs web ceksekolahku.or.id. Keduanya menjadi ruang untuk membangun transparansi dan akuntabilitas di isu tata kelola desa dan pendidikan. Selain melalui situs web, teknologi informasi yang juga mendukung upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas adalah aplikasi komunikasi pesan ringkas (*instant messenger*), misalnya Pattiro yang membuat grup WhatsApp untuk komunitas desa, dan media sosial, sebagaimana digunakan Sloka Institute untuk mengawasi layanan JKN.

Dua faktor di atas, iklim kebebasan berekspresi dan demokrasi serta peluang teknologi informasi, makin mempunyai kekuatan karena adanya kemauan dan kemampuan bagi masyarakat sipil untuk terlibat. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia makin terbiasa melakukan pekerjaan “lintas-batas”. Jurnalis mau terlibat mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di masing-masing daerah dalam program ICW. Komunitas desa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti warga Desa, Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA), jurnalis, ornop, akademisi, mahasiswa dan lain-lain berkolaborasi dalam program Pattiro untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang lebih baik.

Meskipun demikian situasi yang mendukung terjadinya advokasi tersebut juga masih menghadapi beberapa tantangan, semisal kurang siapnya lembaga-lembaga pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta masih terbatasnya partisipasi oleh masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja badan-badan publik.

Membagi Kekuatan

Untuk itulah maka peran penengah dan pemampu seperti ornop-ornop mitra MAVC diperlukan. Mengacu pada definisi yang telah dijelaskan di bagian awal, maka kedua fungsi tersebut merupakan dua hal berbeda. Penengah lebih bersifat sebagai mediator dan fasilitator sedangkan pemampu berperan terutama dalam peningkatan kapasitas dan penyediaan ruang.

“Menjadi penengah adalah menjadi perantara antara *demand* (warga) dengan *supply* (pemerintah).

Permintaan yang terjadi di tingkat warga (*demand*), kita jembatani agar bisa bertemu dengan pihak pemberi layanan (*supply*).

Adapun *enabler* adalah pencipta situasi baik *online* maupun *offline*. Pattiro, sebagai contoh, menciptakan situasi itu melalui interaksi dengan pemerintah pusat yang berhubungan dengan desa. Misalnya saat diskusi tentang fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD), hadir juga Asosiasi BPD Bekasi dan desa-desa lain di dekat Jakarta.”

Bejo Untung (Pattiro) melalui wawancara.

Kedua peran itu dilakukan secara bertahap dan saling terkait, mulai dari identifikasi hingga pendampingan, agar upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud dan berkelanjutan. Keduanya merupakan peran yang tidak bisa dipisahkan.

“Peran *intermediary* dan *enabler* tidak bisa dipisahkan. Dengan begitu masyarakat mau menggunakan data yang sudah tersedia sementara pemerintah mau menyediakan data tersebut.”

Siti Juliantari, Indonesian Corruption Watch (ICW) dari wawancara.

Berkaca pada pengalaman empat mitra MAVC sebagai fokus pembelajaran dalam laporan ini, peran-peran itu sebaiknya dilakukan secara berurutan (*sequence*) dengan tahapan sebagai **penengah** (*intermediary*) terlebih dulu untuk melakukan identifikasi, memediasi, dan memfasilitasi serta sebagai **pemampu** (*enabler*) untuk meningkatkan kapasitas, menyediakan ruang, dan melakukan pendampingan.

(1) Peran Penengah

a. Identifikasi

Peran pertama sebagai penengah adalah dengan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan para aktor yang terlibat dalam isu masing-masing. Peran ini mutlak dilakukan oleh peran apapun yang dijalankan, baik sebagai penengah ataupun pemampu, sekaligus menjadi dasar dalam menjalankan fungsi-fungsi lain, baik sebagai penengah maupun pemampu.

Metode untuk melakukan identifikasi ini beragam, seperti penilaian awal (*assessment*), diskusi terbatas, atau wawancara mendalam. Tujuannya untuk mendapatkan informasi awal sebagai dasar pelaksanaan program. Identifikasi ini termasuk pula tahapan proses yang akan dilakukan selama proyek.

Sloka Institute misalnya mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dalam program layanan JKN dan apa peran masing-masing. Hasilnya berupa peta pemangku kepentingan (*stakeholders map*) yang berguna untuk menentukan strategi dan pendekatan ke masing-masing aktor. Hal ini penting karena tiap aktor memerlukan pendekatan berbeda. Lembaga pemerintah seperti Dinas Kesehatan memerlukan pendekatan lebih formal dan intens sedangkan OMS lebih informal dan fleksibel.

Selain itu, identifikasi juga perlu untuk mendapatkan informasi tentang tahap-tahap yang sebaiknya dilakukan dalam proses. ICW mengidentifikasi bahwa sudah ada ruang yang tersedia secara daring (*e-invited space*) dengan implementasi open data dalam sistem PBJ elektronik nasional yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). ICW kemudian memanfaatkan ruang transparansi yang sudah ada tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam implementasi PBJ.

b. Mediasi

Setelah memiliki peta pemangku kepentingan, termasuk strategi maupun pendekatannya, maka penengah melakukan peran selanjutnya untuk memediasi para aktor dengan mempertemukan mereka secara luring maupun daring. Dengan peran penengah, para aktor berkomunikasi dalam posisi yang setara dan masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah, misalnya melalui kesepakatan bersama dan kolaborasi program. Mediasi juga menjadi ruang untuk negosiasi, mempertemukan berbagai kepentingan dan pandangan agar memiliki kesepahaman.

Secara luring, Pattiro mempertemukan pemangku kepentingan secara langsung dalam diskusi kebijakan, termasuk mengumpulkan unsur-unsur pemerintahan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi. Misalnya, para kepala desa dan OMS dapat berdiskusi langsung dengan pejabat dari kementerian. Pertemuan secara luring ini saling mendukung pula dengan diskusi melalui media daring, seperti situs web ataupun grup WhatsApp, yang dibentuk untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan UU Desa.

Di sisi lain, ICW juga membangun keterikatan (*engagement*) dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian, pemda dan inspektorat, untuk menggunakan ruang daring sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal atas kinerja PBJ di masing-masing instansi. Di antaranya, kegiatan sosialisasi dan asistensi pengawasan PBJ telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Peran mediasi dilakukan secara bertahap. Para mitra MAVC tidak bekerja sendiri di semua level dan konteks, misalnya lokal dan nasional. Pengalaman TI Indonesia, mereka sendiri memediasi di tingkat nasional dengan lembaga pemerintah pusat, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan mitra di level kabupaten/kota membangun mediasi antara warga sekolah dengan masing-masing pemerintah di tingkat lokal.

“Peran sebagai *intermediary* dilakukan secara bertingkat. TI Indonesia lebih banyak di tingkat nasional dengan mitra di empat kota/kabupaten sedangkan mitra daerah di level kabupaten sampai kemudian turun hingga ke sekolah, seperti dengan murid dan guru.”

Sekar Ratnaningtyas, TI Indonesia

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran mediasi akan lebih mudah dilakukan sesuai dengan konteks lokal. Perlu aktor-aktor di tingkat lokal yang nantinya bisa memediasi secara horizontal, misalnya antara warga sekolah dengan Dinas Pendidikan setempat. Aktor-aktor juga lebih memahami konteks dan kultur setempat sehingga lebih

mudah menjalankan fungsi mediasi ini.

c. Fasilitasi

Dalam beberapa kasus, proses mediasi bisa mengalami beberapa hambatan, misalnya kurangnya kapasitas dan keberanian terutama di kelompok warga. Untuk itulah perlu adanya dukungan agar kelompok warga bisa lebih mudah terlibat dalam proses mediasi. Dalam proses ini, tidak terjadi transfer pengetahuan atau kemampuan melainkan mengambil bentuk pendampingan terhadap kelompok warga yang secara struktural merupakan pihak penerima layanan publik. Hal inilah yang membedakan fungsi fasilitasi dengan fungsi peningkatan kapasitas yang dijalankan peran pemampu. Ketika memfasilitasi, penengah juga tidak hanya memediasi tapi berpihak pada salah satu aktor, dalam konteks ini semuanya mendukung warga atau OMS, sebagai pihak yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas.

TI Indonesia dalam program Cek Sekolah-Ku, memfasilitasi pihak-pihak warga sekolah seperti siswa, orang tua siswa, dan guru dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. TI Indonesia misalnya berperan dalam mengorganisasikan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jaringan lokal di Palangka Raya, Makassar, Semarang, dan Batang.

Hal serupa juga dilakukan dalam Sloka Institute yang memfasilitasi Kelompok Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bali sehingga mereka bisa mendapatkan haknya sebagai penerima layanan JKN gratis.

Tiga fungsi di atas kemudian berproses menuju peran lain sebagai pemampu yaitu untuk meningkatkan kapasitas,

menyediakan ruang, dan mendampingi. Jika dalam peran sebagai penengah para mitra menempatkan diri di tengah-tengah, sehingga harus mampu luwes bergerak dan berubah terutama ketika berada di antara kepentingan yang saling tarik menarik, dalam peran sebagai pemampu bisa berdiri di satu sisi. Sasaran kegiatannya pun lebih spesifik, misalnya orangtua murid, guru, organisasi jurnalis, ataupun OMS lainnya.

(2) Peran Pemampu

Peran-peran sebagai pemampu membutuhkan kemampuan teknis di isu-isu spesifik pula. Dalam pengalaman para mitra MAVC, kemampuan teknis itu terutama dalam akses informasi, di dalamnya termasuk memperoleh dan menyebarkan melalui berbagai media berbasis teknologi informasi, seperti situs web dan grup WhatsApp. Agar para penerima manfaat lebih berdaya, maka pemampu harus menjalankan fungsinya dalam peningkatan kapasitas, penyediaan ruang, dan pendampingan.

Dalam program pengawasan pengadaan barang dan jasa, ICW tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan situs web opentender.net untuk penyediaan data lelang tetapi juga mengidentifikasi transaksi mana saja yang potensial menimbulkan korupsi. Kemampuan teknis semacam itu yang ditularkan kepada jurnalis peserta beasiswa liputan mendalam pengawasan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari program maupun kepada pihak Inspektorat Kota di masing-masing wilayah program.

Sloka Institute memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pengelolaan media jurnalisisme warga dan media sosial yang menjadi modal utama dalam program, termasuk dalam pelatihan-pelatihan kepada parapihak yang terlibat dalam

program AJAKAN. Adanya pengalaman dan kemampuan Sloka Institute dalam mengelola media jurnalisme warga memudahkan kami dalam kegiatan peningkatan kapasitas warga.

a. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil ataupun para pemangku kepentingan lain dalam program-program mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Peran ini dimulai dengan membangun kesadaran (*awareness*) pemangku kepentingan tentang perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola badan publik.

Upaya meningkatkan kesadaran ini dilakukan dengan membagi pengetahuan (*knowledge*) terkait isu yang digeluti. TI Indonesia membangun kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di isu pendidikan kepada para orangtua, murid, dan guru sehingga mereka bersedia terlibat dalam pengawasan pendidikan di sekolah masing-masing.

“*Enabler* sampai pada level peningkatan kapasitas yaitu kemampuan warga sekolah untuk berkomunikasi dengan pihak lain sampai dengan menggunakan *tools* yang disediakan.”

Sekar Ratnaningtyas, TI Indonesia

Ada atau bertambahnya kesadaran tentang transparansi dan akuntabilitas pada kelompok sasaran akan menjadi dasar dalam proses selanjutnya yaitu membagi kemampuan-kemampuan analisis dan teknis (*skill*). Dalam konteks Cek Sekolah-ku, warga sekolah seperti siswa, orangtua, guru, dan komite sekolah mendapatkan peningkatan kapasitas misalnya terkait tata kelola sekolah sampai bagaimana mengakses dan menggunakan situs web ceksekolahku.or.id untuk menyampaikan persoalan terkait tata kelola di sekolah mereka.

Dalam program pengawasan pengadaan barang dan jasa, ICW melakukan perannya kepada jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di tiga kota lokasi program. Adapun Sloka Institute dalam program AJAKAN meningkatkan kapasitas pada staf badan publik, rumah sakit, puskesmas, organisasi masyarakat sipil, hingga Ombudsman.

b. Penyediaan Ruang

Ketika sudah kesadaran sudah terbentuk dan kemampuan sudah terwujud, proses selanjutnya adalah menyediakan ruang bagi para penerima manfaat program. Pemampu berperan besar untuk tidak hanya menciptakan atau menyediakan ruang bagi para pemangku kepentingan tetapi juga secara aktif mengelola ruang-ruang tersebut untuk mencapai tujuan.

Dalam konteks MAVC, semua mitra menggunakan ruang luring dan daring untuk mendukung upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola layanan publik. Pattiro sebagai contoh mengembangkan *created space*, baik konvensional maupun *e-created space*. Ruang itu menjadi tempat bertemunya pemerintah dari tingkat pusat hingga desa sebagai pengambil kebijakan dengan komunitas desa sebagai kelompok penerima manfaat.

“Ruang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok penerima manfaat untuk menyampaikan gagasannya, di mana pemerintah kemudian merujuk pada gagasan-gagasan tersebut sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan. Proses interaksi ini diharapkan dapat berjalan secara simultan, sehingga diarahkan sebagai model *feedback loop mechanism* (FLM) yang berlangsung secara terus menerus. Dalam konteks inilah PATTIRO berusaha menciptakan ekosistem yang

mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan peraturan pendukung UU Desa.”

Laporan Program MAVC Pattiro

Sebagaimana telah disinggung di atas, ruang-ruang konvensional semacam diskusi terfokus, diskusi lintas-aktor, seminar publik, pertemuan rutin, atau semacamnya tersebut saling mendukung dengan ruang-ruang baru yang telah ada sebelumnya ataupun baru diciptakan untuk mendukung program mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks MAVC, inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama: penggunaan teknologi informasi sebagai ruang bagi suara-suara tidak terdengar.

Dalam program AJAKAN, Sloka Institute menggunakan ruang yang sudah ada yaitu media jurnalisme warga BaleBengong, baik di situs web ataupun akun media sosial @BaleBengong. Ruang-ruang inilah yang menciptakan pola komunikasi lebih cair dan egaliter, dan yang lebih penting konstruktif, menuju transparansi dan akuntabilitas.

Tidak hanya menyediakan ruang, para pemampu juga berperan aktif dalam memproduksi materi untuk disebarluaskan melalui ruang-ruang baru tersebut, seperti produksi konten opentender.net oleh ICW, ceksekolahku.or.id oleh TI Indonesia, dan kedesa.id oleh Pattiro. Semua ruang yang disediakan itu juga terbuka untuk publik, terutama kelompok penerima manfaat program, sehingga menjadi bagian penting untuk mewujudkan adanya partisipasi publik dalam pengawasan tata kelola badan publik.

Pengalaman dari empat mitra MAVC, ruang-ruang ini ada yang memang telah diciptakan sebelumnya, misalnya BaleBengong.id dan opentender.net, ataupun baru dibuat untuk tujuan program MAVC, seperti ceksekolahku.or.id dan kedesa.id. Pengamatan sejauh ini menunjukkan bahwa ruang yang sudah ada sebelumnya lebih bisa bertahan daripada yang dibuat untuk tujuan program MAVC. Ini menunjukkan bahwa menggunakan ruang yang ada bisa lebih efektif jika dilihat dari konteks penyediaan ruang ini, daripada membuat ruang baru.

Agar ruang-ruang konvensional maupun baru ini bisa digunakan dengan baik, maka pemampu harus menjalankan fungsi lainnya yaitu pendampingan. Selain itu, ruang-ruang tersebut juga bisa berjalan jika pemampu tetap melakukan fungsinya sebagai penengah, terutama dalam melakukan fasilitasi dan mediasi antar-aktor.

c. Pendampingan

Untuk menjaga keberlanjutan upaya mewujudkan tata kelola badan publik yang transparan dan akuntabel, pemampu harus berperan juga dalam proses pendampingan. Proses ini dilakukan secara ajeg, terus menerus selama pelaksanaan program terutama dalam situasi di mana kelompok penerima manfaat masih memiliki kapasitas terbatas dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan layanan publik.

Dalam program Cek Sekolah-Ku, TI Indonesia mendampingi Agen Sekolah dan komunitas masyarakat, melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan, dan mengawasi tata kelola pendidikan. Agen Sekolah terdiri atas beberapa siswa yang didampingi seorang guru. Mereka berperan melakukan pembaharuan data sekolah,

mempromosikan kanal-kanal pelaporan Cek Sekolah-Ku dan mengelola laporan yang masuk di sekolahnya.

ICW dalam program pengawasan pengadaan barang dan jasa melakukan hal serupa. Pendampingan secara terus menerus dilakukan kepada para jurnalis penerima beasiswa liputan investigasi tentang pengadaan barang dan jasa di masing-masing lokasi. Pendampingan dilakukan bersama AJI Indonesia baik pada saat pelatihan ataupun pada saat pengerjaan laporan. Dengan demikian proses yang dihasilkan pun lebih berkualitas.

Penutup

Sebagai kesimpulan, selama program MAVC, empat mitra narasumber dalam laporan ini telah menjalankan kedua fungsi tersebut, baik sebagai penengah maupun pemampu. Kedua peran ini memang berbeda namun keduanya saling terkait dan berkesinambungan. Jika dilakukan secara berurutan (*sequence*), maka fungsi *intermediary* harus dilakukan terlebih dahulu agar fungsi *enabler* bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Peran sebagai penengah menekankan pada fungsi mediasi dan fasilitasi sementara peran pemampu adalah pada peningkatan kapasitas, penyediaan ruang, dan pendampingan. Kedua peran ini membutuhkan strategi dan pendekatan yang bisa dicapai melalui fungsi identifikasi para aktor maupun kekuatannya masing-masing. Dengan berdasar pada strategi itu, maka upaya membagi kekuatan oleh penengah dan pemampu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan.

Sebagai contoh, setelah diskusi kebijakan tentang BUMDesa, di mana Pattiro menjalankan fungsi mediasi dan

penyediaan ruang, Kemendesa kemudian mengundang Pattiro untuk membahas draf Permendesa tentang BUMDes. Kemendagri juga berjanji akan melakukan pembahasan draf Revisi Permendagri No. 113/2014 dengan mengundang semua pihak yang hadir.

Dalam program Cek Sekolah-Ku, sebagian besar laporan warga yang masuk, terutama tentang infrastruktur dan kegiatan belajar mengajar, telah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dan jajarannya. Hasil audit sosial Cek Sekolah-Ku juga menjadi bahan pembahasan dalam forum kepsek, guru, karyawan. Proses pembuatan RKAS juga telah melibatkan guru-guru untuk menyusun program bersama kepala sekolah dan bendahara.

ICW juga berhasil meningkatkan kapasitas jurnalis dan OMS di daerah untuk melakukan investigasi dan mengawasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ICW juga membuat Nota Kesepahaman dengan pemerintah daerah dan LKPP tentang perlunya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Adapun Sloka Institute berhasil mendorong agar orang-orang dengan gangguan jiwa di Bali bisa mendapatkan haknya dalam layanan JKN, setelah sempat menghadapi kendala akibat proses integrasi JKBM ke JKN. Capaian lain adalah adanya kesepahaman dengan Dinas Kesehatan dan Ombudsman untuk melibatkan publik dalam pengawasan layanan JKN.

Pencapaian-pencapaian di atas bisa terwujud antara lain karena adanya kemauan politik dari badan-badan publik, adanya masyarakat terorganisir yang memiliki kemampuan dan keberanian, serta kolaborasi dengan para pemampu lainnya. Dengan keterbatasan kemampuan dalam hal-hal teknis tertentu, katakanlah bagaimana membuat dan mengelola peta digital yang interaktif, ICW

memerlukan kolaborasi dengan komunitas OpenStreetMap untuk membuat peta pengadaan barang dan jasa.

Tak kalah pentingnya, fungsi-fungsi lain di luar peran sebagai penengah dan pemampu juga tetap terus perlu dilakukan oleh para mitra. Misalnya dengan melakukan pengawasan itu sendiri ataupun terus menerus mengajak publik untuk terlibat melalui program kampanye publik.

Sebagai penutup, sebagaimana disampaikan Siti Juliantari dari ICW, peran sebagai *intermediary* dan *enabler* itu akan lebih mudah ketika sudah ada tools, seperti website opentender.net. Masyarakat tidak mungkin serta merta menggunakan kalau tidak ada pihak yang mendorong dan mendampingi mereka. Perlu ada kampanye untuk mengajak mereka. Dan, proses itu perlu dilakukan secara terus menerus.

“Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Transparansi dan Akuntabilitas yang Didorong oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia”

Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad & Alimah | Infest

Abstrak

Inisiatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah telah dilakukan oleh pelbagai kelompok masyarakat sipil pada jenjang, isu dan sektor yang berbeda. Ragam inisiatif tersebut, pada beberapa praktik, telah menghasilkan pembelajaran dan perubahan dalam memengaruhi akuntabilitas penyelenggara negara. Transparency International (2016) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 96 dari 176 negara untuk persepsi terhadap korupsi. Nilai negara Indonesia naik 2 angka meski turun dalam peringkat. Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam di Asia Tenggara.

Pada keterbukaan informasi publik, implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menghadapi ragam tantangan. Mengacu data Komisi Informasi (2012), indeks keterbukaan informasi publik masih menunjukkan angka yang rendah baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten terutama pada aspek anggaran dan belanja. Laporan keuangan hanya disediakan oleh 32% kementerian, 23% lembaga negara dan 23% provinsi. Dokumen RKA-DIPA juga hanya dipublikasikan oleh 24% kementerian, 6% lembaga negara dan 35% pemerintah provinsi.

Data-data di atas menunjukkan jalan panjang upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Meski terus diupayakan, pelbagai intervensi yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memperkuat keterbukaan menerima respon beragam dari pemerintah. Hal serupa terjadi pada inisiatif Kemitraan Pemerintahan Terbuka (OGP) yang turut melibatkan pemerintah. Beberapa kementerian dan lembaga negara tidak memiliki rencana aksi (renaksi) untuk memperbaiki pelayanan informasi pada masing-masing kewenangannya. Di lain sisi, ragam pendekatan dan metode penguatan yang diupayakan oleh kelompok masyarakat sipil perlu direfleksikan untuk menemukan catatan dan pembelajaran strategis. Kajian atas keragaman level, isu dan pendekatan kelompok masyarakat sipil tersebut dapat memberikan gambaran atas ragam respon yang diterima dari pemerintah. Catatan pembelajaran tersebut akan bernilai dalam upaya-upaya penguatan transparansi di masa yang akan datang.

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan ragam respon pemerintah terhadap inisiatif yang ditawarkan kepada pemerintah. Pendekatan metanalisa dari beberapa pengalaman kelompok masyarakat sipil diharapkan

dapat memberikan gambaran utuh atas keumuman respon pemerintah, keunikan dan kemungkinan kolaborasi antar kedua komponen tersebut. Implikasi dari kolaborasi antar komponen masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan transparansi secara berjenjang menjadi fokus lain dalam penulisan ini. Pembelajaran dari 4 organisasi yang bekerja pada isu transparansi dan akuntabilitas pada beberapa level dan isu yang berbeda akan dapat memberikan gambaran utuh tentang respon pemerintah dan pengaruh dari kolaborasi antar aktor masyarakat sipil pada tingkat keberhasilan inisiatif memengaruhi pemerintah.

1. Pengantar

Terminologi transparansi dan akuntabilitas mulanya digunakan secara terpisah meski kini kerap digunakan sebagai dua istilah yang saling melekat. Transparansi dinilai dapat berkontribusi pada akuntabilitas secara horizontal dari pemerintah kepada masyarakat (Mabilard & Zumofen, 2015). Transparansi bukanlah tujuan akhir, melainkan akuntabilitas itu sendiri. Transparansi adalah mekanisme penghubung untuk memastikan warga akses dan kapasitas memadai untuk memeriksa cara, metode dan capaian badan publik yang melayani kepentingan umum.

Di Indonesia, isu transparansi masih menjadi isu penting paska pengesahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan pemberlakuannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Beberapa inisiatif uji akses informasi yang dilakukan pada beberapa sektor masih menunjukkan minimnya respon pemerintah. Kajian keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta (2014) pada sektor migrasi ketenagakerjaan menunjukkan minimnya akses calon pekerja migran dan keluarga pada informasi publik di beberapa Kota/

Kabupaten, meliputi Cirebon, Banyumas, Wonosobo, Salatiga dan Indramayu. Hal serupa ditemui pada badan publik di tingkat nasional (Kementrian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI/BNP2TKI) dan di negara penempatan Hong Kong (KJRI Hong Kong). Perkumpulan Inisiatif (2011) melakukan Uji akses informasi serupa terhadap badan publik pada tingkat Provinsi (Jawa Barat) guna pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang keterbukaan informasi masih belum merata pada badan publik di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, beberapa aturan pada UU KIP digunakan sebagai celah untuk tidak membuka informasi publik.

Informasi keuangan menjadi salah satu informasi publik yang kerap ditutup oleh badan publik. Informasi keuangan menjadi aspek yang paling sulit diakses dari badan publik. Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) tentang pemantauan keterbukaan informasi publik di Institusi Kepolisian Republik Indonesia salah satunya menunjukkan indikasi tersebut (2011). *Desk study* atas website Polri menunjukkan bahwa informasi keuangan institusi Polri sebagai badan publik sangat sulit ditemukan (baca: tidak dibuka).

Kontras mencatat Polda Sumatera Utara adalah satu-satunya dari 68 kelembagaan polisi (Polda, Polres dan Polsek) terpantau yang menyediakan informasi keuangan berupa Laporan Keuangan per lokasi/satker tahun anggaran 2011.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra, 2013) mencatat rendahnya penyediaan informasi keuangan pada badan publik terutama Dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Fitra menunjukkan bahwa RKA-DIPA adalah dokumen yang jarang dipublikasikan oleh badan publik. Kajian

tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan lebih banyak dipublikasikan tinimbang RKA-DIPA; dan meningkatnya nilai Open Budget Index (OBI) tidak berbanding lurus dengan ketersediaan RKA-DIPA. Mengacu pada laporan evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, baru 30% badan publik di tingkat nasional

hingga kabupaten yang memenuhi standar penerapan UU KIP (Yayasan Tifa, 2013). Upaya pengecualian informasi keuangan secara tidak langsung tidak dapat dibenarkan. Ibad & Hamdi (2014) menunjukkan adanya kecenderungan salah dari pelbaga badan publik yang mencoba untuk menutup dengan tidak

menampilkannya pada media-media informasi.

Jenis Informasi	Kementerian		Lembaga Negara		Provinsi		Partai Politik	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laporan keuangan	11	32%	11	23%	7	23%	0	0
RKA-DIPA	8	34%	3	100%	11	35%		
Lelang Pengadaan barang dan Jasa	34	100%	47	100%	31	100%		
Perda APBD					13	41%		

Tabel 1: ringkasan ketersediaan informasi keuangan pemerintah (Fitra, 2013)

Mengacu pada laporan pelaksanaan keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (2016), angka sengketa informasi yang terdaftar sejak 2011 – 2016 sejumlah 2.684 sengketa dengan 870 sengketa terselesaikan. Angka tersebut tidak mencakup sengketa yang disampaikan kepada Komisi Informasi

di tingkat Provinsi. Proses evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KIP masih menunjukkan angka yang rendah, yaitu 51% dari 397 badan publik dalam lingkup kegiatan evaluasi tersebut. Mengacu pada “self assessment” badan publik dinilai dengan rentang nilai 1 – 100.

Kelembagaan	Nilai	Kualifikasi
Lembaga Negara & LPNK	85,57	Menuju Informatif
Kementerian	73,01	Cukup Informatif
Pemerintah Provinsi	70,68	Cukup Informatif
BUMN	62,53	Cukup Informatif
Perguruan Tinggi Negeri	56,00	Kurang informatif
Lembaga Non Struktural	55,36	Kurang informatif
Partai Politik Nasional	17,84	Tidak Informatif

Tabel II : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP, 2016)

Akses informasi diyakini bermanfaat bagi warga untuk memengaruhi kebijakan pada setiap level pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Meski demikian, Fox (2007) menyatakan adanya akses masyarakat atas informasi masih berada dalam tataran akuntabilitas yang rendah. Akuntabilitas tinggi dinilai sebagai kondisi di mana pemerintah pada setiap tingkat mampu mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan untuk menjawab beragam masalah yang menjadi lingkup kerja. Akses informasi semata dinyatakan Fox tidak dapat menjawab tindakan yang akan dipilih atau dilakukan oleh pemerintah untuk menysasar masalah tertentu. Fox pada konteks ini berkeinginan untuk melangkah lebih jauh bahwa nilai pertanggungjawaban tidak semata berada pada akses informasi, melainkan pada serangkaian tindakan responsif dan proaktif.

Kadmasasmita (tanpa tahun), melihat pertanggungjawaban sebagai kebutuhan menyeluruh sejak perencanaan yang kesemuanya membutuhkan keterbukaan. Konsep bertanggungjawab harus meliputi pelbagai proses sejak perencanaan (program accountability); pembiayaan (fiscal accountability); hingga dampak dari program yang dijalankan oleh pemerintah (outcome accountability). Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga negara tidak semata dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Pelbagai inisiatif juga telah diupayakan oleh kelompok masyarakat sipil, baik secara terpisah maupun dalam kerangka kemitraan bersama dengan pemerintah. Inisiatif ini menysasar beragam sektor, tingkat dan cakupan geografis. Inisiatif tersebut pula dilakukan secara sendiri oleh kelompok masyarakat sipil maupun secara berjejaring. Selama ini, ragam pendekatan diujicoba oleh kelompok masyarakat sipil, seperti Infest Yogyakarta dan Combine Resource Institution pada

isu desa. Tulisan ini akan mencoba memotret ragam inisiatif yang menysasar transparansi dan akuntabilitas. Tulisan akan terfokus pada respon pemerintah terhadap pelbagai inisiatif tersebut pada beberapa level berbeda. Guna melihat keragaman respon pada setiap level, tulisan ini akan mencoba memotret beberapa pembelajaran dalam ragam inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang digagas oleh masyarakat sipil. Pada konteks penulisan ini, respon pemerintah akan menjadi sorotan utama untuk melihat bagaimana inisiatif memengaruhi pemerintah pada level yang beragam pada konteks inisiatif yang berbeda.

Integrasi Vertikal: Sebuah pendekatan dan bingkai

Paparan dalam tulisan ini akan melihat beberapa pembelajaran mengenai respon pemerintah terhadap inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil melalui pendekatan integrasi vertikal. Pendekatan ini melihat bahwa inisiatif pada level yang tunggal (seperti sub nasional, nasional atau internasional saja) dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kini tidak lagi sepenuhnya relevan (Fox, 2001). Fox juga mengkritisi kecenderungan gerakan masyarakat sipil untuk menyelesaikan gejala yang tampak (simptom) tinimbang akar persoalan pada konteks transparansi dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kekuasaan (baca: power) yang bertingkat dan terhubung. Fox ingin melihat pertanggungjawaban sebagai sesuatu yang substantif dan tidak semata menghasilkan keterbukaan prosedural (2007); serta mengukur efektivitas inisiatif dalam jaringan dalam level bertingkat dalam isu transparansi dan akuntabilitas (2016). Meski demikian, Fox (2007) melihat kontribusi akses pada informasi terhadap akuntabilitas pada aspek lainnya. Hal ini

tidak lepas dari semakin baiknya kapasitas warga untuk menilai, mengevaluasi dan menggugat pelaksanaan mandat pelayanan sebagai implikasi dari keterbukaan.

Sutoro Eko (2014) memandang istilah tanggung-gugat sepadan dengan “accountability”. Eko memaknai istilah tersebut sebagai tanggungjawab badan publik kepada masyarakat sekaligus mekanisme gugatan masyarakat terhadap aparatus negara yang memperoleh mandat. Serupa dengan Fox (2007), Eko menegaskan bahwa komponen akses informasi hanya merupakan salah satu bagian saja. Kedua komponen lain dalam terminologi akuntabilitas adalah penegakan mandat oleh pejabat negara, dan; hak masyarakat untuk menggugat apabila mandat tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara mendasar, integrasi vertikal sebagai sebuah pendekatan mengandaikan beberapa komponen: pemantauan sistematis yang terkoordinasi pada setiap level; keterhubungan antar inisiatif yang dikelola oleh masing-masing aktor; dan menggabungkan beberapa pendekatan berbeda yang mampu saling memperkuat (Fox, 2001, 2014). Ekpektasi atas perubahan akuntabilitas perlu kiranya memperhatikan relasi antar aktor penyelenggara.

Setidaknya terdapat 3 relasi yang penting dilihat dalam konteks tersebut: relasi warga dengan negara; relasi negara dengan penyelenggaraan pelayanan, dan relasi antara warga dan penyelenggara layanan (Eko, 2014). Memperhatikan ketiga relasi tersebut, integrasi vertikal menjadi relevan mengingat ketiga relasi tersebut mengandaikan tingkatan yang berbeda.

2. Melihat 2 Pembelajaran

Ragam inisiatif terkait dengan transparansi dan akuntabilitas tidak mungkin ditera dalam tulisan ini. Sebagai model pembelajaran, tulisan ini menawarkan 2 pembelajaran dari advokasi yang dilakukan

oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan isu transparansi dan akuntabilitas.

1. Lumbung Komunitas; Penguatan Data berbasis Komunitas di tingkat desa
Combine Resource Institution (CRI) lahir pada tahun 2001 sebagai sebuah program untuk membangun jaringan informasi berbasis komunitas (community based information network - Combine) di Indonesia. Sejak tahun 2001, CRI bergerak mendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi-Komunikasi (TIK)¹. Pada awalnya, CRI melakukan fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas untuk mengembangkan sistem komunikasinya, seperti radio komunitas. Sejalan dengan pesatnya perkembangan radio komunitas, sejak tahun 2004 CRI mulai mengintegrasikan dan membangun jaringan antarmedia komunitas untuk mempermudah proses pertukaran informasi dan pengetahuan berbasis internet. Upaya tersebut turut didukung dengan pengelolaan sumber daya komunitas yang diwujudkan melalui manajemen sumber daya berbasis komunitas; advokasi hak-hak dasar masyarakat sipil; pemberdayaan ekonomi komunitas; pengurangan risiko bencana.

“Lumbung Komunitas”: Program Pengembangan Sistem Informasi untuk Pengelolaan Sumber Daya/Aset Berbasis Komunitas

CRI merupakan salah satu lembaga perintis Sistem Informasi Desa (SID)². Program Lumbung Komunitas merupakan wahana pengembangan SID yang telah dikelola oleh CRI sejak tahun 2009. CRI mulai mengembangkan SID sejak tahun 2006. Proses

pengembangan SID bermula dari penanganan gempa bumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saat itu sejumlah dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan padahal upaya pemulihan paska bencana membutuhkan data kependudukan. Perangkat desa di wilayah selatan Yogyakarta yang mengalami dampak langsung bencana ini menyadari pentingnya digitalisasi arsip desa.

Pada 2008 kebutuhan tersebut direspon CRI dengan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). SID yang semula disebut SIDESA memiliki dua pengertian. SID dalam arti sempit bermakna “aplikasi” yang membantu pemerintahan desa dalam pendokumentasian data desa. Dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (baca:desa).

CRI bersama dengan beberapa pemerintah desa dan masyarakat mengidentifikasi kebutuhan data di tingkat desa sejak 2008 sebagai langkah awal pembangunan SID. Ragam gagasan yang teridentifikasi diterjemahkan menjadi aplikasi berbasis komputer. Purwarupa sistem ini diujicobakan di Desa Terong, Bantul, D.I. Yogyakarta dan Desa Balerante, Klaten, Jawa Tengah pada 2009. SID pada penerapannya melibatkan 4 prinsip penting, yaitu: prinsip transparansi, partisipasi, kesetaraan, inklusivitas, dan kesinambungan. Menilik prinsip tersebut, SID menghubungkan dua pihak yaitu pemerintah desa dan warga. CRI menganggap bahwa SID tidak akan berjalan utuh bila hanya salah satu pihak yang menggunakan.

Belajar dari Inisiatif SID di Gunung Kidul: Bermula dari Analisis Kemiskinan Partisipatif

Salah satu daerah dampingan CRI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Kabupaten Gunungkidul. Keterlibatan CRI di Gunung Kidul bermula dari proses analisis kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh Perkumpulan IDEA pada 2012. Analisis kemiskinan partisipatif yang dilakukan IDEA, pada saat itu, mengalami hambatan karena tidak adanya alat tata kelola data kemiskinan. Kerjasama IDEA dan CRI bermula dari kebutuhan IDEA dalam tata kelola data. Sejak 2015 CRI mulai mengintensifkan pendampingan hingga 2017 (saat ini). Sejak 2015, CRI mulai menjalankan program sendiri di Gunungkidul. Berdasarkan latar belakang tersebut, meskipun kehadiran CRI berawal dari sebuah kolaborasi yang diinisiasi oleh IDEA, namun dari proses kolaborasi tersebut telah mendorong CRI untuk menginisiasi proses penguatan transparansi secara berkelanjutan di wilayah Gunungkidul.

Dalam proses penerapan SID di Gunungkidul pada tahun 2012, pendataan kemiskinan partisipatif dilakukan di 4 Dusun di Desa Nglegi, dengan melibatkan sembilan orang perwakilan dari masing-masing pedukuhan di Nglegi. Sejak tahun 2015-2016 semua desa di Kabupaten Gunung Kidul mulai mempraktikkan tahapan SID meski belum semuanya melakukan 9 tahapan sebagai langkah panduan menerapkan SID di desanya. Dari sekian tahapan dalam penerapan SID, pendekatan penting yang dilakukan CRI adalah pengorganisasian warga. Keragaman pola kepemimpinan dan konteks sosial budaya setiap daerah yang berbeda

dipertimbangkan CRI dalam penerapan SID. Meski pengorganisasian mampu mengubah budaya pemerintah relasi antara desa dan warga, di tingkat Kecamatan dan Kabupaten advokasi membutuhkan waktu lebih lama. CRI mencoba membangun kolaborasi dengan beberapa aktor dalam tingkatan berbeda guna merespon kebutuhan pada setiap tingkatan. Pada tingkat desa, pengorganisasian menjadi fokus dari CRI untuk membangun kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Perbaikan data dinilai CRI sebagai inisiatif awal untuk memperbaiki akuntabilitas pada kelembagaan desa. Perbaikan data kemiskinan ini dinilai meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan yang disediakan negara.

Proses replikasi penerapan SID yang dilakukan di CRI ini cukup berbeda dengan daerah lain. Di tahun 2012-2014, kolaborasi yang dilakukan IDEA dan CRI secara formal ada kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten, namun pendekatan tersebut dalam prosesnya ternyata tidak menjamin terjadinya percepatan dalam proses perubahan termasuk dalam proses replikasi.

Hal ini berbeda dengan penerapan SID di tahun 2015, tahun dimana CRI bergerak tanpa MoU, perubahan terjadi lebih cepat. Pada saat bersamaan, CRI mulai berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda. Inisiatif tersebut direspon dengan baik, salah satunya adalah dengan adanya tim relawan yang dibentuk Kabupaten.

Inisiatif ini juga direspon oleh PNPM, organisasi masyarakat sipil lain dan Pemerintah Kecamatan. Proses tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dialog intensif antara kelompok masyarakat sipil dan pemerintah. Di lain sisi, pemaparan praktik baik dari pembelajaran tahun-tahun sebelumnya memperbaiki respon pemerintah terhadap inisiatif yang dijalankan oleh CRI bersama mitra strategis lainnya.

Peta Kolaborasi Antar CSO

Proses pendampingan di Kabupaten Gunungkidul yang cukup panjang hingga saat ini (2017), tidak lepas dari peran pelbagai pihak khususnya organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di pelbagai level. Meskipun di tahun-tahun pertama diawali oleh kolaborasi yang dilakukan oleh IDEA dan CRI, namun di tahun-tahun berikutnya proses kolaborasi banyak pihak sudah mulai berjalan. Kolaborasi tersebut juga menjadi kunci keberhasilan terhadap penerapan penguatan transparansi dan akuntabilitas di Gunungkidul. Upaya CRI melibatkan Bappeda memperkuat respon baik pemerintah. Bappeda memiliki peran sentral dalam pembagian peran antar lembaga yang bekerja pada isu desa. Bappeda membagi peran lembaga-lembaga baik organisasi sipil maupun pemerintah yang ingin masuk ke Gunungkidul. Misalnya seperti Kominfo, PNPM, Akademisi melalui program KKN, dan UCP.

Tahun	CSO	Peran
2012- 2014	IDEA	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas, pendampingan dan advokasi data kemiskinan partisipatif di 4 Desa.
	CRI	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas, pendampingan, dan advokasi tata kelola data melalui penerapan SID di 4 Desa
2015	CRI	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas, pendampingan, dan advokasi tata kelola data melalui penerapan SID di semua Desa di Kabupaten Gunungkidul;
		<ul style="list-style-type: none"> Advokasi kebijakan di Tingkat kecamatan dan Kabupaten terkait penerapan SID untuk tata kelola data kemiskinan, serta pentingnya pembentukan tim relawan untuk membantu proses pendampingan penerapan SID.
2016-2017	CRI	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas, pendampingan, dan advokasi tata kelola data melalui penerapan SID di semua Desa di Kabupaten Gunungkidul;
		<ul style="list-style-type: none"> Advokasi kebijakan di Tingkat kecamatan dan Kabupaten terkait penerapan SID untuk tata kelola data kemiskinan, serta pentingnya pembentukan tim relawan untuk membantu proses pendampingan penerapan SID.
	UCP	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dana untuk tata kelola data khusus disabilitas.
		<ul style="list-style-type: none"> Membantu proses pendampingan penerapan SID di Desa-desa di Kabupaten Gunungkidul.
		<ul style="list-style-type: none"> Membantu proses pendampingan penerapan SID di Desa-desa di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel: Bagi Peran dalam Kolaborasi CRI bersama mitra lainnya

Respon Pemerintah

Dalam proses penerapan SID di Gunungkidul, meskipun respon warga awalnya meragukan penerapan SID di desanya, namun di tingkat aparatur desa merespon baik adanya inisiatif

penerapan SID. Respon baik bukan hanya dari pemerintah desa, namun juga dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Berikut adalah peta respon dari pemerintah:

Level Pemerintah		Bentuk Respon
Desa	(+)	Pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah desa; Penyiapan sumber daya pendukung seperti komputer Menghimpun data kependudukan warga dari Kartu Keluarga (KK); Membuka akses masyarakat untuk memonitoring data kemiskinan partisipatif;

Kecamatan	(+)	Membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan proses penerapan SID di masing-masing Desa; Melakukan penyaluran data kemiskinan dari Desa ke Kabupaten. Mengevaluasi proses penerapan SID di masing-masing Desa.
Kabupaten	(+)	Menginisiasi pengaturan tata kelola pembagian peran masing-masing lembaga/organisasi yang masuk ke wilayah Gunungkidul; Menyiapkan tim relawan yang bertugas membantu proses penerapan SID Menyediakan data dasar yang dibutuhkan oleh desa Memberikan masukan maupun gagasan terkait pengembangan SID yang diterapkan wilayah di Gunungkidul.
	(-)	Dukcapil menolak memberikan data warga dengan alasan prosesnya yang panjang, serta menganggap data tersebut bukan data publik; Dukcapil memberikan data kepada desa apabila desa membutuhkan dengan surat dan pemberitahuan resmi desa
	(-)	BPS menolak adanya data kemiskinan partisipatif yang dihasilkan oleh warga, sampai Pemkab menggunakan data BDT (Basis Data Terpadu)

Tabel: Respon Pemerintah Terhadap Inisiatif CRI bersama Mitra

Inisiatif yang menyoal akuntabilitas pemerintah desa ini secara umum bertujuan memastikan pelayanan dasar kepada warga dapat diselenggarakan secara tepat sasaran. Perbaikan data di tingkat desa dinilai akan berkontribusi pada perbaikan layanan di tingkat supra-desa yang mengandalkan data dari desa. CRI meletakkan inisiatif SID pada jantung komunitas: membangun kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas dalam perbaikan data. CRI menggunakan istilah “pembersihan data” yang bermakna memastikan akurasi data pada level terkecil.

Inisiatif di tingkat desa ini diadvokasi pada tingkat selanjutnya. Mengacu pada pembelajaran CRI, terdapat dua komponen

penggerak utama untuk membangun respon positif pemerintah pada level supra desa: 1) membangun pembelajaran dari skala yang kecil sebagai percontohan, 2) menggandeng aktor pemerintah yang dapat memengaruhi sektor lainnya. Ujicoba data kemiskinan dan perapian data di tingkat desa dari beberapa desa percontohan memberikan wawasan baru bagi pemerintah untuk menerima pendekatan yang ditawarkan oleh CRI dan mitra lainnya. Hal ini berimplikasi tidak semata pada perluasan tetapi juga proses kreasi lain yang dilakukan oleh pemerintah supra desa. Respon dari pemerintah Kabupaten adalah upaya menggerakkan Kecamatan. Penerimaan tersebut menggerakkan Kecamatan untuk turut terlibat langsung

dalam proses-proses penyiapan SID dan pada proses-proses yang terkait dengan pemanfaatan data. Kewenangan pembinaan yang melekat pada kecamatan beroperasi dengan baik ketika inisiatif ini berhasil memengaruhi kabupaten. Rekognisi dan apresiasi kabupaten terhadap inisiatif ini tampak dari beberapa hal, seperti penyusunan mekanisme data terpadu. Mekanisme ini memungkinkan kabupaten menggunakan data dari desa yang kemudian dipadukan dalam satu sistem data di tingkat kabupaten. Sistem ini memungkinkan Kabupaten untuk mengevaluasi data dengan membandingkannya dengan data yang telah diverifikasi warga di tingkat desa.

2) Penguatan Akses kelompok Marjinal pada Informasi dan Pengambilan Keputusan di Desa

2.1) Kunci Inisiatif

Inisiatif yang terkait dengan isu desa mulai dikembangkan oleh Infest sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, perubahan pendekatan coba dilakukan oleh Infest untuk memperkuat akses masyarakat pada informasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Infest pada periode 2012-2013 lebih banyak terfokus pada pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks membangun transparansi dan akuntabilitas desa. Pendekatan yang dipilih pada periode tersebut lebih banyak menasar pada aparat desa pada aspek penguatan penyediaan informasi melalui situs (website) desa. Sistem informasi desa³ menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi desa. Upaya yang dilakukan oleh Infest ini, pada akhirnya disadari tidak berkontribusi banyak pada penguatan posisi warga di hadapan pemerintah desa. Keterbukaan

prosedural tersebut justru mengeksklusi beberapa masyarakat yang tidak memiliki akses memadai pada internet. Pada konteks penyediaan informasi, desa justru lebih banyak memanfaatkan situs desa untuk memperkenalkan desa ke “luar”. Informasi yang diproduksi oleh desa justru tidak banyak yang ditujukan untuk melayani masyarakat internal desa. Desa, di lain sisi, merasa terbuka hanya dengan memiliki situs desa.

Respon pemerintah desa yang cukup baik untuk menerima teknologi informasi ini tidak langsung terhubung pada perubahan pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat desa. Antusiasme tampak dari jumlah desa yang mengajukan permohonan untuk difasilitasi dalam penyediaan website desa. “Menulis di situs desa” menjadi pekerjaan lain yang dinilai sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya mendukung perbaikan kinerja pada aparat desa. Alih-alih memberikan informasi kepada masyarakat desa, aparat desa lebih memberikan fokus pada identifikasi aspek desa yang perlu diinformasikan ke luar desa. Mempertimbangkan hal tersebut, sejak awal 2014 Infest memutuskan untuk mengembangkan pendekatan lain yang dapat secara substantif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa bagi warga desa – untuk membedakan terminologi penyediaan informasi yang lebih bertujuan untuk promosi desa kepada aktor di luar masyarakat desa. Infest memandang pendekatan yang semata mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan perubahan di desa terutama pada persoalan akses pada pengambilan keputusan di tingkat desa.

Proses	Aktivitas	CSO yang Terlibat
Penguatan regulasi penerapan UU Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi di tingkat daerah (Kabupaten) • Kajian atas dokumen regulasi di tingkat kabupaten • Advokasi untuk memasukkan isu pembangunan berbasis aset regulasi daerah 	Infest
Penguatan tata kelola perencanaan desa	<p>Penguatan kapasitas desa</p> <p>Penyusunan desa model pemetaan pembelajaran kajian dan advokasi untuk mendorong masuknya perencanaan apresiatif dalam peraturan daerah</p>	Infest, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Medialink.
Penguatan akses masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan	<p>Pembentukan tim masyarakat untuk perumusan data dan perencanaan desa;</p> <p>Penggalian data desa</p>	Infest, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Medialink;
Penguatan keterbukaan informasi publik desa	<p>Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik;</p> <p>Pengawasan penyediaan informasi publik desa</p>	Infest, Medialink, Komunitas Angkringan,
Penguatan akses masyarakat miskin pada Jaminan Kesehatan nasional	<p>Advokasi penggunaan data berbasis lokal</p> <p>Identifikasi penerima PBI JKN</p> <p>Advokasi di tingkat kabupaten</p>	Infest, Medialink
Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa	<p>Pelatihan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>Perumusan SOP keuangan desa;</p>	Infest, Indonesian Budget Center (IBC), Formasi, Sanggar Sekolah Anggaran Sekolah Anti Korupsi (Sakti)

Penerapan Open data keuangan desa	Menyusun mekanisme penerapan data terbuka pengembangan teknologi informasi pendukung pengelolaan keuangan desa Pengembangan platform teknologi untuk penyediaan data terbuka keuangan desa	Infest, Yayasan Air Putih, Medialink
Advokasi kebijakan di tingkat nasional	Advokasi regulasi perencanaan desa yang berbasis pada aset desa Advokasi penerapan data terbuka untuk tata kelola pemerintahan desa	Infest, Medialink

Tabel 3: Peta jalan advokasi akses masyarakat pada pembangunan desa tahun 2015 – 2017

Paska disahkannya 14 Tahun 2014 tentang Desa, Infest melihat beberapa ruang kosong yang perlu diperkuat untuk memastikan akses masyarakat terhadap pembangunan desa pada tingkatan yang berbeda dan tidak semata di tingkat desa. Kajian kesiapan penerapan UU Desa yang dilakukan oleh Infest di 10 Kabupaten (Infest, 2014) menunjukkan ruang kosong kesiapan tidak saja ada pada level desa, melainkan kabupaten dan nasional. Pada tingkat desa, salah satu persoalan yang mengemuka adalah keterbukaan dan model pengambilan keputusan di tingkat desa. Kajian tersebut memaparkan temuan bahwa 83% pengambilan keputusan di tingkat desa dilakukan oleh elit desa (pemerintahan desa bersama dengan kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah serta “tokoh” desa). Akses kelompok marjinal, salah satunya perempuan, masih cukup kecil untuk dapat terlibat dalam

pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini menyebabkan imajinasi perubahan desa menjadi imajinasi elit yang tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan kehendak masyarakat. UU desa memberikan mandat bagi kabupaten untuk menyediakan regulasi yang mengatur implementasi UU tersebut. Di lain sisi, pemerintah kabupaten memiliki fungsi pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa. Ruang tersebut dinilai sebagai peluang penting agar dapat memiliki muatan yang tidak semata mengatur pemerintahan desa yang baik secara prosedur, tetapi ikut memasukkan komponen partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Di lain sisi, supra desa menjadi pihak yang perlu turut diawasi dalam pelaksanaan UU Desa itu sendiri.

Pada periode ini Infest bekerja di beberapa kabupaten yang berbeda, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Malang, Poso, Takalar, Cirebon, Musibanyuasin

dan Tebo. Luasnya cakupan kerja tersebut pada satu sisi memberi gambaran kepada Infest untuk melihat konteks dan ragam persoalan yang mengemuka pada implementasi UU Desa. Di lain sisi, luasnya wilayah cakupan tersebut menuntut adanya kolaborasi secara lebih luas dengan komponen masyarakat sipil lainnya yang bekerja pada isu sama. Kolaborasi antar organisasi bersama Infest bersifat informal. Hal ini tergambar, salah satunya, pada mekanisme bagi peran antara Infest dan Media Lintas Komunitas (Medialink) di mana Infest bekerja pada tingkat sub-nasional (kabupaten dan provinsi) sementara Medialink fokus pada isu tersebut di tingkat nasional. Pembagian peran pada satu sisi menunjukkan perbedaan kapasitas masing-masing organisasi dan irisannya dalam upaya penguatan akses masyarakat pada perencanaan **pembangunan di tingkat desa.**

Sumber Daya Pengetahuan	Aktor yang terlibat
Perencanaan apresiatif desa	Infest, Medialink dan Formasi
Pengelolaan keuangan desa	Infest, IBC dan Formasi
Penguatan pelayanan informasi desa	Infest, Medialink dan Komunitas Angkringan
Penerapan open data keuangan desa	Infest, Medialink dan Yayasan Air Putih

Tabel 4: Kolaborasi pengembangan pengetahuan

Salah satu medan percontohan yang dikembangkan oleh Infest dalam kolaborasi yang cukup intensif adalah di Kabupaten Wonosobo. Pendekatan yang dipilih dalam upaya ini adalah kolaborasi konstruktif bersama dengan

pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam kolaborasi ini, Infest memilih untuk membangun relasi formal dengan kabupaten yang diikat melalui perjanjian kelembagaan antara Kabupaten dan Infest. Pendekatan ini dirasakan sebagai salah satu pendekatan efektif yang telah diujicoba di beberapa Kabupaten dan kota pada program yang berbeda.

2.2) Respon Pemerintah

Pada proses ini, ikatan kelembagaan antara Infest dan pemerintah Kabupaten Wonosobo menjadi kunci perkembangan inisiatif ini. Pihak pemerintah berada langsung dalam arena perubahan yang diinginkan. Infest turut memainkan peran penghubung antar aktor pengelola inisiatif pendukung pada kelompok sasaran yang sama: desa. Hal ini tampak dalam konteks upaya advokasi penerimaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat desa yang digagas oleh Medialink Jakarta (2015 dan 2016). Pada konteks tersebut, Infest mendekatkan inisiatif ini dengan pemerintahan desa untuk mensinkronkan bersama data kemiskinan lokal dengan daftar penerima fasilitas PBI di tingkat desa. Hal ini meningkatkan perubahan di tingkat desa di mana data kemiskinan yang disusun berdasarkan indikator lokal digunakan untuk memeriksa kembali program-program yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun desa yang menysasar kelompok miskin.

Desain pendekatan inisiatif ini adalah memperkuat ruang akses masyarakat dalam ruang pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara langsung inisiatif ini akan bersentuhan dengan 3 level pemerintahan di tingkat kabupaten, yaitu desa, kecamatan dan kabupaten.

Pembuatan desa percontohan menjadi pilihan pertama untuk menemukan model dan pembelajaran.

Di tingkat kabupaten, respon positif diperoleh selama inisiatif ini dijalankan. Masuknya aktor pemerintah kabupaten dalam inisiatif ini mempermudah proses refleksi atas perubahan, capaian dan kegagalan pada masing-masing tahapan dan level desa. Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai mitra langsung inisiatif ini mampu menjalankan fungsi pengawasan, pemberdayaan, penyiapan regulasi dan upaya lain untuk menghubungkan kelompok masyarakat sipil dengan aktor pemerintahan lain yang terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskotika) yang membentuk tim khusus terfokus pada teknis dalam implementasi open data keuangan desa. Pihak Kecamatan sebagai perwakilan pemerintah daerah Wonosobo dapat memainkan peran evaluasi yang cukup baik dalam proses- proses perencanaan desa. Evaluasi sebagai mekanisme yang dimandatkan tidak semata bersifat administratif. Sebagai contoh, 15 kecamatan di Wonosobo membentuk forum belajar desa dan mengevaluasi muatan program desa untuk bisa lebih menyasaraskan kelompok marjinal di tingkat desa.

Respon baik di tingkat Kabupaten mempermudah proses pelaksanaan inisiatif di tingkat desa dan kecamatan. Pada tingkat desa, dukungan pemerintah kabupaten mendorong desa untuk membuka ruang merespon inisiatif tersebut. Meski demikian, respon beragam muncul dari desa dengan keragaman kepemimpinan dan kapasitas desa. Respon beragam ini muncul mengingat kepemimpinan dan terbukanya ruang partisipasi

masyarakat desa untuk mengawasi proses pemerintahan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan.

Pertama, desa dengan kepemimpinan yang terbuka merespon baik inisiatif dengan membuka peluang implementasi menyeluruh dari proses-proses inisiatif ini. Sebagai ilustrasi, desa melakukan “buy in” atas proses partisipasi bersama warga dalam penyusunan data desa dan perencanaan desa (baik RKPDesa untuk siklus tahunan, maupun RPJMDesa untuk siklus 6 tahunan). Penerimaan desa tersebut tampak dari munculnya beberapa regulasi di tingkat desa yang mengakuisisi data yang dikumpulkan oleh tim masyarakat sebagai data desa. Data tersebut kemudian menjadi rujukan dalam proses penyusunan perencanaan desa. Selain itu, beberapa desa mengatur siklus pemutaakhiran data. Kedua, pada desa dengan kepemimpinan yang tertutup, respon menjadi beragam. Pada pelibatan warga, desa dengan model ini memilih untuk secara selektif memilih tim yang “satu suara” dengan kepala desa dengan meminimalkan partisipasi kelompok lainnya. Hal ini berimplikasi pada hasil yang diperoleh pada proses pendataan dan perencanaan.

Pada aspek penguatan akses masyarakat desa pada informasi warga, belajar dari proses perencanaan partisipatif melalui pendekatan perencanaan apresiatif tersebut, kabupaten secara langsung mengatur keterbukaan sebagai bagian yang diwajibkan kepada setiap desa. Inisiatif pemerintah kabupaten ini membuka ruang lebih kepada masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses pembangunan di desa. Hal tersebut menjadi mengikat, mengingat pemerintah kabupaten mewajibkan desa memenuhi komponen

tersebut sebagai prasyarat transfer keuangan desa.

Pada tingkat nasional, upaya advokasi dilakukan dengan menggandeng kelembagaan Open Government Indonesia. Proses ini memang tidak dilakukan pada periode awal inisiatif melainkan pada fase di mana pembelajaran menunjukkan bukti perubahan yang kuat. Advokasi

ini dilakukan melalui mekanisme kelompok kerja isu desa (working group) desa pada kelembagaan OGI yang turut melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Sekretariat OGI secara terpisah menawarkan kepada Kabupaten Wonosobo untuk menjadi percontohan dalam konteks keterbukaan dan akses masyarakat dalam perencanaan desa.

Level	Bentuk Respon
Desa	Menyiapkan tim dari masyarakat dan pemerintahan desa untuk berkolaborasi merespon inisiatif menyusun regulasi lokal desa yang mendukung nilai transparansi dan akuntabilitas Menyediakan sumber daya pendanaan untuk mendukung inisiatif di tingkat desa Membuka akses masyarakat pada perencanaan dan informasi desa
	(-) Membatasi partisipasi warga dengan memilih komponen masyarakat yang "satu suara" dengan pemerintah Membatasi akses perencanaan pada level yang terbatas, seperti hanya pada pendataan saja tetapi tidak masuk dalam perumusan rencana.
Kecamatan	Membantu penguatan kapasitas di tingkat desa; Mengawasi proses pelaksanaan inisiatif di tingkat desa; Mengevaluasi rencana pembangunan desa berdasarkan prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi
Kabupaten Wonosobo	Menjadikan inisiatif sebagai bagian dari program kerja pemerintah Menyiapkan regulasi pendukung Menyiapkan sumber daya manusia untuk terlibat dalam pelaksanaan program Mengalokasikan sumber daya pendanaan untuk memperluas cakupan dan capaian inisiatif Menyediakan infrastruktur pendukung dalam

Provinsi	<p>Merespon inisiatif sebagai semata persoalan aplikasi</p> <p>Menutup diri untuk membangun kajian memadai sebelum proses implementasi alat</p> <p>Lebih terfokus pada bantuan keuangan pelaksanaan implementasi sistem informasi desa</p> <p>Tidak merekognisi keberagaman inisiatif di tingkat kabupaten yang telah</p> <p>terlebih dahulu berkembang</p>
Nasional	
Komisi Pemberantasan Korupsi	<p>Merekognisi inisiatif sebagai model yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas desa</p> <p>Membuka ruang diskusi pertukaran pembelajaran</p>
Kementerian Dalam Negeri	<p>Merekognisi inisiatif sebagai model yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas desa</p> <p>Membuka ruang diskusi pertukaran pembelajaran</p>
Kementerian desa	Tidak merespon inisiatif

Tabel 8: Tabulasi Respon pada beragam tingkat

2.3) Mengidentifikasi Perubahan

Akuntabilitas dan transparansi desa, dalam konteks inisiatif ini, menggerakkan warga desa menjadi pusat pengambilan keputusan pada proses perencanaan desa menggunakan ruang-ruang yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti musyawarah desa (Musdes) dan membuat ruang-ruang baru di mana suara warga dapat disampaikan. Tidak semata itu, warga menegaskan posisinya sebagai salah satu pengambil kebijakan dengan menyusun data-data pokok perencanaan desa melalui pendekatan perencanaan apresiatif. Data desa berupa kewenangan desa, aset desa, peta kesejahteraan, usulan kelompok marjinal dan evaluasi pelayanan publik desa dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMDesa perubahan, RKPDesa (tahunan) dan APBDesa.

Pola tersebut menghasilkan perencanaan desa yang lebih baik dari sisi komposisi. Imajinasi perubahan di

desa yang sebelumnya diejawantahkan elit dalam RPJMDesa kini menjadi imajinasi masyarakat. Selepas periode perencanaan, warga desa didorong untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan desa. Pada konteks tersebut, upaya membangun mekanisme pengelolaan keuangan desa secara partisipatif dengan memperluas keterlibatan warga dalam TPK maupun PTPKD didorong bersamaan dengan upaya membuka data keuangan desa. Data keuangan desa dinilai sebagai salah satu pintu masuk untuk memastikan bahwa pembangunan taat pada perencanaan dan asas akuntabilitas. Beberapa model yang diinisiasi memberikan wawasan baru bagi pemerintah supra-desa untuk menyiapkan mekanisme yang mendukung partisipasi dan memperkuat akuntabilitas tersebut. Selain menyiapkan regulasi, Pemerintah Kabupaten bergerak untuk menyiapkan mekanisme perluasan (scaling up) pada

keseluruhan desa dan mengaktivasi keterlibatan aktor pemerintah lain guna mendukung inisiatif tersebut. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah mampu mengkoordinir beberapa organisasi perangkat daerah lain untuk turut menjadi bagian dalam inisiatif tersebut, termasuk kecamatan.

Mekanisme sanksi merupakan salah satu yang dipersiapkan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk memastikan akuntabilitas desa. Hal ini tampak pada saat pencairan dana transfer ke desa di mana kabupaten menetapkan standar yang baku. Desa diklasifikasi menjadi desa hijau, kuning dan merah. Setiap tingkatan akan mendapatkan perlakuan berbeda termasuk sanksi yang ditetapkan.

Status	Kualifikasi	Konsekuensi
Hijau	Telah menyelesaikan administrasi pencairan dan laporan tahun sebelumnya; Telah menyelesaikan tunggakan pertanggungjawaban periode sebelumnya, seperti kewajiban bayar pajak Telah membuka data keuangan ke masyarakat	Mendapatkan transfer pencairan dana
	Telah menyelesaikan administrasi Masih memiliki tanggungan pertanggungjawaban dari periode sebelumnya Belum membuka informasi keuangan desa	Tidak mendapat dana transfer (tertunda sampai diselesaikan)
Merah	Belum menyelesaikan administrasi Memiliki tunggakan pertanggungjawaban yang belum selesai dari periode sebelumnya Belum membuka informasi keuangan desa Menggelapkan keuangan desa	Tidak mendapat dana transfer (tertunda sampai diselesaikan) Diproses secara hukum.

Tabel 9: Mekanisme sanksi atas pelanggaran akuntabilitas desa

Fox (2007) melihat mekanisme sanksi merupakan bentuk dari akuntabilitas yang tertinggi di mana pelaksana mandat pelayanan tidak saja mampu menjawab kebutuhan informasi dan tetapi juga harus bersedia menerima adanya sanksi. Bagi Fox, transparansi yang berstatus jelas baru

merupakan akuntabilitas pada tingkatan yang rendah. Pada tingkatan akuntabilitas yang tinggi, mekanisme sanksi berlaku bagi pelaksana layanan. [Lihat Tabel 10 di bawah mengenai tingkatan Transparansi dan Akuntabilitas]

Transparansi		Akuntabilitas	
Kabur	Jelas	Lunak	
Diseminasi informasi			
	Warga memantau dan meminta informasi negara menjawab permintaan informasi		
		Sanksi atas kegagalan memenuhi mekanisme pelayanan	

Tabel 10: Irisan akuntabilitas dan transparansi (Fox, 2007).

Mengacu pada kerangka Fox, tersebut Kabupaten Wonosobo sudah ada pada tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi: warga memiliki ruang akses informasi, memiliki kapasitas pemantauan, sekaligus adanya mekanisme sanksi atas ketidakmampuan desa untuk memenuhi standar pada pengelolaan pemerintahan.

Mengingat inisiatif ini menyoar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, respon pemerintah kabupaten dinilai menjadi faktor penentu guna memperkuat akses masyarakat dan menjamin lebih banyaknya suara warga yang disampaikan kepada desa diterima. Respon supra-desa, pada konteks ini membantu upaya penguatan akuntabilitas di tingkat desa. Integrasi vertikal parsial yang dilakukan di Wonosobo – pada periode ini – menghasilkan perubahan pada beberapa tingkat berbeda yang bersumber dari upaya pada tingkatan akar rumput.

3. Sintesa

Kedua inisiatif yang dirangkum dalam paparan sebelumnya, meski dalam taraf parsial, menunjukkan mekanisme integrasi vertikal mulai dari tingkatan desa. Kedua organisasi tersebut melihat perubahan di tingkat desa dipengaruhi oleh partisipasi, sekaligus oleh ragam kebijakan yang mengatur desa pada

supra- desa. Upaya memengaruhi desa dan supra desa dilakukan secara timbal balik: inisiatif di tingkat desa digunakan sebagai alat advokasi di tingkat selanjutnya, dan advokasi di tingkat supra-desa digunakan untuk mendorong perubahan strategis terkait akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa secara lebih luas. Inisiatif tersebut menunjukkan bagaimana upaya di akar rumput dapat didorong menjadi sumber daya perubahan pada pemerintahan di tingkat di atasnya.

Integrasi vertikal, mengacu pada pembelajaran keduanya, memberikan efek saling memengaruhi antar level pemerintahan, sejak desa hingga Kabupaten dan nasional. Meski pada level nasional belum menghasilkan perubahan regulasi yang mengikat, inisiatif ini sedikit banyak sudah memberikan wawasan baru pada pengambil kebijakan di tingkat tersebut. Integrasi pendekatan pada level yang berbeda, memberikan perubahan beragam dengan pendekatan yang berbeda pula. Pembagian peran antar aktor memudahkan para pelaku advokasi untuk memantau dan mengisi ruang kosong dari advokasi yang dilakukan secara tunggal oleh 1 organisasi.

Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan kajian atas dua inisiatif tersebut. Pertama, meski bersifat parsial, inisiatif keduanya menunjukkan bahwa upaya sistematis berjenjang memberikan efek berbeda pada

masing-masing tingkatan. Kedua, upaya membangun advokasi berbasis bukti menjadi lebih efektif memengaruhi perubahan pada tingkat yang lebih tinggi, sementara advokasi regulasi memengaruhi pelaksanaan pada tingkatan yang lebih rendah. Di lain sisi, ketiga, respon pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kapasitas aktor pemerintah. Kedua inisiatif ini menunjukkan upaya kreatif masing-masing pelaku untuk melihat ruang yang memungkinkan perubahan ketika satu pendekatan bersama satu aktor terkendala. Integrasikan vertikal yang mengandaikan upaya advokasi secara lebih luas dan sistematis, memungkinkan kelompok/ organisasi masyarakat sipil untuk menyusun strategi alternatif berhadapan dengan sistem pemerintah yang bertingkat. Inisiatif memiliki opsi lebih untuk memilih aktor pemerintah yang dipengaruhi ketika upaya advokasi di hadapan satu aktor tidak berhasil. Keempat, integrasi vertikal yang menghubungkan inisiatif organisasi masyarakat sipil perlu beranjak dari kesamaan tujuan dan framework untuk menghindari kegagalan advokasi akibat tidak solidnya suara masyarakat sipil.

Daftar Bacaan

- Eko, S., 2014, Menantang akuntabilitas publik dari medan warga, Yapikka, Jakarta.
- Fox, J., 2007, The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability. "Development in Practice, vol. 17, no. 4/5, 2007, pp. 663-671.
- Fox, J., 2016, Doing Accountability differently: A Proposal for the vertical integration for civil society monitoring and advocacy, CHR Michelsen Institute.
- Ibad., M.I., 2013. Buruh Migran Menggugat: Laporan Pemantauan Informasi Publik pada Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013, Infest Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ibad, M.I., & Hamdi, M., 2014. Menjadi Pelayan Informasi: Panduan Teknis untuk PPID. Australia-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), Surabaya.
- Kadmasasmita, A.D., Akuntabilitas keuangan negara: Konsep dan aplikasi, diunduh pada 25 Agustus 2017 dari https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20achmad_djuaeni.pdf.
- Komisi Informasi Pusat, 2016, Laporan tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2016, Jakarta.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2012, Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri, Jakarta.
- Mabilard, V., & Zumofen, R., 2015, The uncertain relationship between transparency and accountability revisited through Swiss cases, IDHEAP, Lausanne.
- Michels, A., & Meijer, A., 2008, Safeguarding public accountability in horizontal government. *Public Management Review*, 10(2), 165-173.
- Widiyatmoko, P., 2011, Uji akses informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD Jawa Barat 2008-2013, Perkumpulan Inisiatif, Bandung.
- Rango Aini Jahja, dkk., 2012. Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa, Combine Resource Institution (CRI), Yogyakarta.
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2013, Indeks Keterbukaan badan publik menyediakan Informasi anggaran secara berkala: Mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis website, Jakarta.
- Yayasan Tifa, 2013, Independent Report On OGP in Indonesia, Jakarta.

Notes

1. Lihat <https://www.combine.or.id/profil-2/>
2. Terminologi sistem informasi desa (SID) digunakan oleh UU 6/2014. Namun, CRI telah menggunakan istilah ini sebelum UU Desa disahkan.
3. Sejak tahun 2011 Infest mengembangkan sistem informasi desa dengan nama Mitra Desa. Sistem informasi ini mulanya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan pendokumentasian pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Pada perkembangannya, sistem ini dikembangkan menjadi "supporting system" dalam pengelolaan data desa secara umum dan pengelolaan keuangan desa.

Riset *Learning*; Tipologi Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pada Sektor *Governance*

Oleh: Siti Fatimah & Santi Widianti¹ | Bandung Institute for Governance Studies

Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang salah satunya ditandai dengan merebaknya berbagai aplikasi-aplikasi untuk menghubungkan pemerintah dengan warganya telah membawa perubahan pada berbagai bidang. Penggunaan aplikasi-aplikasi TIK kini menjadi bagian solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan tata kelola pemerintahan. Melalui pemanfaatan TIK, diharapkan tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tulisan ini akan memaparkan mengenai tipologi pengguna (*user*) yang menggunakan sarana TIK seperti sms, media sosial, serta aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini dalam interaksi membahas isu-isu akuntabilitas dan governance, serta memaparkan bagaimana cara-cara berbasis TIK ini digunakan user secara efektif untuk mendorong respon pemerintah dalam mengadopsi sarana TIK tersebut. Pendekatan difusi inovasi akan digunakan untuk memetakan tipe-tipe pengguna pada inisiatif-inisiatif TIK tersebut.

Untuk menggambarkan tipologi pengguna aplikasi TIK, tulisan ini disusun dalam lima bagian. Bagian pertama, membahas pendekatan difusi inovasi, teori yang digunakan untuk menganalisis tipologi pengguna TIK. Bagian dua membahas inisiatif-inisiatif TIK yang diteliti dalam riset learning ini. Terdapat delapan

inisiatif TIK yang kami amati untuk memahami bagaimana tipe pengguna dari masing-masing inisiatif tersebut. Bagian tiga dan empat memaparkan pengguna dan tipologi pengguna dari 8 (delapan) inisiatif TIK yang diteliti. Bagian lima memaparkan kesimpulan serta pembelajaran mengenai bagaimana inisiatif-inisiatif TIK dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dikaitkan dengan aspek tipologi penggunaannya.

1. Pendekatan Difusi Inovasi untuk Memahami Perkembangan TIK

Inovasi berkaitan dengan munculnya kebutuhan akan adanya suatu perubahan. Inovasi di bidang teknologi informasi merupakan inovasi yang terus berkembang pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan TIK ini, inovasi TIK sudah menjadi bagian kebutuhan tak hanya pada sektor bisnis tetapi pemanfaatannya juga dilakukan pada sektor publik, dalam hal ini pada sektor governance, yaitu bagaimana relasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

Inovasi, dalam hal ini inovasi dalam penggunaan TIK, berhubungan erat dengan proses adopsi. Salah satu yang menjadi rujukan saat mempelajari inovasi adalah teori difusi inovasi. Teori ini dipopulerkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1964.

Menurut Rogers, teori difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Everett mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat dalam sebuah sistem sosial (Wahid & Iswari 2007).

Penggunaan inovasi teknologi memerlukan proses baik bagi individu maupun institusi sebelum memutuskan untuk mengadopsinya. Proses adopsi ini dideskripsikan Rogers (1995) sebagai “proses dimana individu atau pihak pembuat keputusan berkembang dari mengetahui informasi tentang inovasi untuk pertama kalinya, membentuk suatu perilaku terhadap inovasi tersebut, membuat keputusan menerima atau menolaknya, mengimplementasikan inovasi tersebut, hingga melakukan konfirmasi terhadap keputusan itu.”

Ada beberapa tahapan sebelum suatu inovasi baru dapat diterima oleh suatu individu atau kelompok masyarakat. Pengadopsian inovasi oleh *user* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rogers berupaya untuk menjelaskan mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu ketika ia mengadopsi suatu inovasi teknologi. Menurut Rogers, terkait dengan adopsi inovasi, terdapat pola-pola yang dapat diprediksi. Akan terdapat masyarakat yang segera mengadopsi suatu inovasi begitu inovasi tersebut diketahui oleh masyarakat tersebut. Pola lainnya adalah terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan waktu yang lama untuk mengadopsi suatu inovasi baru (Rizal 2012).

Menurut teori difusi inovasi, pengguna terbagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu inovator, pengguna awal (*early adopter*), mayoritas pengguna awal (*early majority*), mayoritas pengguna akhir (*late majority*), dan *laggards* atau orang-orang skeptis

yang mempertahankan kebiasaan lama (Schoorman et al. 2010). Berikut detailnya.

1. Inovator (*Innovators*)

Inovator adalah individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Inovator bisa saja tidak menciptakan inovasi, namun hanya memberikan gagasan baru dari gagasan yang sudah ada. Biasanya orang-orang ini memiliki gaya hidup dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi.

2. Pengguna awal (*Early Adopter*)

Kelompok ini merupakan perintis/pelopor. Ciri dari tipe ini adalah kelompok yang memiliki akses yang luas dan akses kepada inovator. Kelompok sasaran atau kelompok dampingan dari sebuah program pembangunan khususnya program pengembangan inisiatif TIK, merupakan salah satu kelompok yang cukup dekat dengan inovator.

3. Mayoritas awal (*Early Majority*)

Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Kelompok ini merupakan pengikut dini, yaitu orang-orang yang baru mengikuti inovasi. Cirinya adalah penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi, serta kritis.

4. Mayoritas akhir (*Late Majority*)

Kelompok yang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang, tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi.

5. Penentang (*Laggards*)

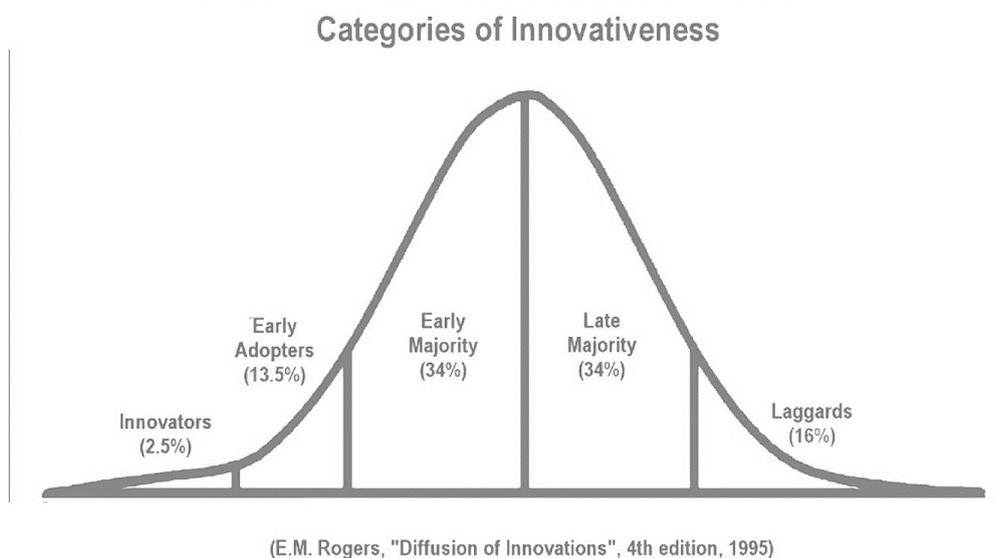
Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka bersifat lebih tradisional, dan segan untuk mencoba hal hal baru. Kelompok ini biasanya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengan mereka. Sekalinya sekelompok *laggard* mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah jauh mengadopsi inovasi lainnya, dan menganggap mereka ketinggalan zaman.

Dalam perkembangan teori difusi inovasi ini, Gabriel Tarde membuat penelitian lebih lanjut dan memperkenalkan kurva difusi berbentuk S (Gambar 1). Pada kurva ini, ada dua sumbu. Sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi oleh pengguna dan sumbu lainnya

menggambarkan dimensi waktu. Menurut Tarde kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi adalah Innovators (2,5%), menyusul Early Adopter (13,5%), Early Majority (34%), Late Majority (34%), dan kelompok terakhir adalah Laggards (16%).

Tulisan ini tidak akan memetakan pengguna inovasi teknologi persis seperti pada gambar 1, karena kami tidak melakukan pengukuran pengguna teknologi dari sisi waktu. Namun melalui perspektif difusi inovasi ini, tulisan ini akan memaparkan jangkauan terjauh dari setiap inisiatif TIK yang diteliti. Pemetaan jangkauan terjauh ini akan sangat berguna bagi para pengembang program-program TIK untuk mencari strategi yang tepat agar inovasi teknologi bisa diterima dan digunakan oleh para pengguna dan tujuan dari dibangunnya aplikasi-aplikasi TIK tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Gambar 1: Kategori Pengguna dihubungkan dengan Waktu



Sumber: http://studimedia2010.blogspot.co.id/2010/03/diffusion-of-innovations-theory_25.html

2. Inisiatif-inisiatif TIK di Sektor Governance

Perkembangan inisiatif-inisiatif TIK telah membawa perubahan pada cara-cara pelayanan publik dilakukan. Di sektor pemerintahan, partisipasi masyarakat semakin menguat dengan dibukanya saluran-saluran komunikasi dengan pemerintah yang dimungkinkan dengan munculnya beragam inovasi-inovasi TIK. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah membuka saluran komunikasi agar interaksi antara warga dan pemerintah dapat terjembatani.

Penggunaan inisiatif-inisiatif TIK juga tidak terbatas di wilayah perkotaan saja, wilayah perdesaan memanfaatkan inisiatif-inisiatif TIK untuk mendukung pembangunan di daerah. Semakin banyak pemerintah desa yang memanfaatkan TIK tak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik tetapi juga untuk menggali potensi desa yang sebelumnya tidak tergarap. Karippacheril (2013) mengidentifikasi upaya intervensi perbaikan pelayanan publik melalui “digital governance” di Indonesia melalui beberapa tingkatan berikut ini:

- informasi: pemerintah berbagi informasi dengan warga;
- komunikasi: “Infomediaries” memperkuat komunikasi pada warga;
- aksi: pemerintah dan aktor non pemerintah mendorong aspirasi dan partisipasi warga; dan
- respon: pemerintah menindaklanjuti laporan-laporan warga.

Inisiatif-inisiatif TIK yang diriset ini tidak hanya berasal dari inisiatif pemerintah, kelompok masyarakat sipil juga aktif melakukan inisiatif ini. Inisiatif TIK yang digagas pemerintah adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

(LAPOR!)², LAPOR BOS (Melaporkan Bantuan Operasional Sekolah)³, dan Jakarta Smart City (JSC)⁴. Sementara inisiatif TIK yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil adalah Cek Sekolahku (CSK)⁵, SMS Informasi Iklim & Cuaca untuk petani/nelayan (SMS Iklim dan Cuaca)⁶, Gerakan Desa Membangun (GDM)⁷, Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS, kemudian akan disebut *Maternal Survival*)⁸, dan Sistem Informasi Desa (SID)⁹.

3. Pengguna Aplikasi TIK pada Sektor Governance

Keberhasilan sebuah proses inovasi, dalam hal ini inovasi aplikasi TIK dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas, sangat didukung oleh keterlibatan pengguna dalam menggunakan aplikasi TIK tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengalaman pengguna sebelum menggunakan aplikasi TIK ini. Memahami latar belakang serta pengalaman bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi TIK, merupakan modal agar suatu inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh pengguna (Norman 1998 dikutip Schuurman et al 2010).

Pada pengguna inisiatif TIK yang diinisiasi oleh pemerintah dan CSO, kami mendalami tipologi pengguna dengan menggali mengenai siapa kelompok sasaran dari setiap inisiatif TIK yang diteliti, siapa target pengguna TIK, serta menggali mengenai bagaimana situasi terkini dari masing-masing pengguna aplikasi TIK yang diteliti. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel 1).

Tabel 1: Kelompok sasaran, target pengguna, dan situasi pengguna saat ini

Inisiatif TIK yang diteliti	Kelompok sasaran program	Target pengguna program/aplikasi TIK	Situasi Pengguna saat ini
LAPOR	Masyarakat pengguna layanan publik di beberapa daerah/wilayah yang sudah terkoneksi dengan sistem LAPOR. Terutama di beberapa daerah yang kepala daerahnya sudah berkomitmen.	Masyarakat pengguna layanan publik khususnya mereka yang terkena dampak dari buruknya pelayanan publik.	Umumnya masyarakat di beberapa daerah yang kepala daerahnya menargetkan sistem LAPOR. Selain itu yang menggunakan adalah umumnya adalah baru “active user”.
Jakarta Smart City	Sejumlah RT/RW yang diwajibkan oleh Pemda Propinsi DKI Jakarta untuk lapor pada aplikasi QLUE.	Masyarakat DKI Jakarta pengguna layanan publik, khususnya ketua RT/RW.	Warga Jakarta mulai menggunakan aplikasi CLUE secara aktif. Tidak terbatas pada mereka yang diwajibkan.
Gerakan Desa Membangun	Pemerintah desa dan aktivis desa di beberapa desa yang didampingi oleh Yayasan Gedhe.	Pemerintah desa, warga desa, dan aktivis desa.	Pemerintah desa, warga desa, dan aktivis desa di desa-desa yang tidak mendapatkan dampingan dari Yayasan Gedhe.
Sistem Informasi Desa	Pemerintah desa dan aktivis desa yang didampingi oleh Combine Resource Institute.	Pemerintah desa, warga desa, dan aktivis desa.	Pemerintah desa, warga desa, dan aktivis desa di desa-desa yang tidak mendapatkan dampingan dari Combine Resource Institute.

LAPOR BOS	Kepala sekolah di sekolah yang mendapatkan dana BOS.	Kepala sekolah di sekolah yang mendapatkan dana BOS. Selain itu pelajar, guru, dan orangtua juga termasuk sasaran pengguna.	Kepala sekolah di sekolah yang mendapatkan dana BOS. Namun pelajar, guru, dan orangtua belum banyak menggunakan aplikasi ini.
Cek Sekolahku	Pelajar, guru, orangtua di beberapa kota/kabupaten yang didampingi oleh TII.	Pelajar, guru, dan orangtua. Warga umum juga bisa menjadi pengguna pada aplikasi ini.	Pelajar, guru, orangtua di sekolah dampingan TII. Kelompok pengguna ini semakin intens melakukan pengawasan terhadap sekolah dan sektor pendidikan.
SMS Iklim	Petani dan Nelayan di beberapa desa yang didampingi oleh PIKUL.	Petani, Nelayan, serta warga lainnya yang memerlukan informasi iklim dan cuaca.	Para petani dan nelayan yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya, sudah merasakan manfaatnya dengan menggunakan aplikasi ini.
Maternal Survival	Bidan-Bidan di beberapa kota dan kabupaten yang pimpinannya sudah menandatangani MoU dengan program EMAS	Para bidan	Para bidan sudah dapat memanfaatkan aplikasi ini.

Kelompok Sasaran Program Aplikasi TIK

Dalam setiap pelaksanaan program inisiatif TIK, kelompok sasaran merupakan kelompok target yang harus mendapatkan penguatan. Kelompok sasaran adalah orang-orang yang secara khusus mendapat training/penjelasan pengarahannya atau

promosi atau bentuk lainnya dari tim proyek inisiatif TIK. Misalnya dalam inisiatif TIK seperti program EMAS dan SMS Iklim dan Cuaca, mereka mendapat pelatihan/penjelasan bagaimana sistem sms gateway yang digunakan dalam program ini berjalan. Kelompok sasaran adalah orang yang secara khusus berinteraksi dengan tim inisiatif TIK.

Untuk inisiatif SMS Iklim dan Cuaca, selain sebagai kelompok sasaran, kelompok ini juga merupakan *final beneficiaries*, yakni penerima manfaat dari isu yang diperjuangkan inisiatif SMS Informasi. Jika tujuannya adalah menyelamatkan nelayan dari risiko anomali cuaca, maka nelayan tersebut adalah beneficiaries terlepas dari apakah nelayan berinteraksi langsung dengan proyek ini atau tidak. Beneficiaries adalah orang-orang yang bisa jadi tidak mendapat pelatihan, akan tetapi diharapkan mendapat manfaat dari inisiatif TIK ini.

Pengguna TIK yang menyasar masyarakat umum/publik adalah inisiatif TIK yang diinisiasi pemerintah seperti LAPOR dan JSC yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memantau kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan layanan publik. Publik adalah orang-orang yang mungkin diharapkan oleh proyek inisiatif TIK untuk menggunakan aplikasi tetapi tidak mendapat pelatihan langsung dari proyek ini. Tim proyek tidak melakukan interaksi apapun dengan publik. Dari seluruh inovasi TIK ini, sebagian inisiatif digunakan oleh publik, sebagian masih terbatas oleh kelompok sasaran program.

Latar belakang pengguna

Sebagian pengguna aplikasi yang dihasilkan inisiatif-inisiatif ini umumnya tidak asing dengan penggunaan TIK. Pengguna inisiatif merupakan orang-orang yang sering menggunakan TIK sebelumnya. Penggagas inovasi TIK pun memperhatikan kebiasaan kelompok sasaran dengan TIK sebelum menentukan jenis TIK untuk program yang dikembangkannya. Contohnya pada inisiatif SMS iklim dan cuaca, Pikul melakukan riset pendahuluan untuk mengetahui kebiasaan komunitas petani/nelayan di Kupang. Umumnya komunitas sudah terbiasa menggunakan pesan singkat sehingga *sms gateway* digunakan untuk inisiatif ini.

Pada program LAPOR BOS, terdapat perbedaan pengalaman menggunakan TIK sebelumnya. Pengguna di daerah perkotaan lebih akrab dengan penggunaan TIK daripada mereka yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Kondisi wilayah yang terpencil ini dapat menyebabkan akses pada ICT terhambat karena keterbatasan sinyal, tidak adanya infrastruktur pendukung, dan lain-lain. Sebaliknya wilayah perkotaan lebih mudah mengakses TIK karena ketersediaan infrastruktur dan lain-lain. Pada inisiatif LAPOR BOS ini, terdapat perbedaan pengalaman pengguna di perkotaan dengan pengguna di wilayah pedesaan. Pengguna LAPOR BOS yang berada wilayah di pedesaan sebelumnya hanya kadang-kadang saja menggunakan TIK. Pengalaman menggunakan TIK untuk pengguna di pedesaan tidak sesering mereka yang bertempat tinggal di kota.

Ketertarikan untuk menggunakan aplikasi pada inisiatif TIK umumnya disebabkan oleh pengaruh isu yang diangkat dan ketertarikan pengguna pada isu tersebut. Pada program LAPOR, ada pengguna aktif (*active user*) yang memang khusus tertarik dengan isu-isu infrastruktur atau pendidikan. Pengguna aktif ini biasanya dihubungi tim LAPOR untuk diminta aspirasinya terkait isu yang menjadi fokus perhatian pengguna aktif ini sebagai bahan masukan. Pada program JSC, pengguna aplikasi lebih bervariasi. Ada yang terpengaruh dengan isu sekaligus juga tertarik dengan isu keterbukaan. Pengguna lainnya tidak tertarik dengan isu keterbukaan tetapi lebih tertarik dengan aplikasi yang digunakan seperti QJUE atau CROP. Pengguna LAPOR yang hanya tertarik dengan aplikasi adalah mereka yang tertarik dengan sistem LAPOR dan ingin mengetahui bagaimana itu bekerja, misalnya apakah jika sudah melapor akan ditanggapi ataukah tidak. Pengguna ini memanfaatkan LAPOR meskipun tidak

menjadi korban pelayanan publik yang buruk. Bila mendapat respon positif, dia akan memberikan/menyampaikan pada orang lain. Kelompok ini termasuk signifikan untuk merekomendasikan ke jaringannya tentang manfaat aplikasi ini, seperti beberapa kelompok yang gemar mengutak-atik aplikasi TIK misalnya kelompok muda.

Hampir semua pengguna inisiatif TIK merupakan kelompok sasaran atau publik. Namun beberapa inisiatif memasukkan korban, dari pelayanan di bidang pendidikan yang masih kurang baik seperti LAPOR BOS dan CSK, menjadi penggunaannya. Pada program LAPOR, selain masyarakat umum, pengguna juga adalah korban dari kebijakan pemerintah atau korban pelayanan publik yang tidak baik. Sebagian pengguna adalah kelompok yang terkena dampak persoalan yang diselesaikan inisiatif ini. Sementara pada program EMAS, kelompok bidan merupakan kelompok yang lebih terdampak secara profesi jika angka kematian ibu dan bayi tinggi, kelompok ini bisa menjadi pihak yang disalahkan.

Tujuan penggunaan TIK

Umumnya pengguna memakai TIK karena berharap aplikasi yang ditawarkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi. Pengguna SID contohnya, adalah pemerintah desa yang membutuhkan TIK sebagai solusi untuk membangun desa berbasis data. Adanya tim desa yang mengimplementasikan rencana pembangunan desa serta pengaruh pemimpin desa berkontribusi pada pengadopsian aplikasi. Pada kasus GDM, solidaritas kelompok dalam hal ini solidaritas desa untuk berbagi informasi berperan dalam keputusan menggunakan aplikasi. Pengadopsian aplikasi bisa dipengaruhi oleh desa-desa sekitar yang sudah mempergunakan aplikasi GDM.

Penggunaan inisiatif TIK juga didorong oleh keinginan untuk mendapat respon pemerintah seperti pada inisiatif LAPOR, LAPOR BOS, JSC, dan CSK. Pengguna mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik setelah pengaduan/keluhan terkait pelayanan publik yang disampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang disediakan aplikasi dari inisiatif-inisiatif tersebut. Pada inisiatif SMS Iklim dan Cuaca, komunitas petani/nelayan menggunakan aplikasi *sms gateway* untuk mendapatkan informasi terkait iklim dan cuaca yang sebelumnya tidak dapat diakses kelompok ini untuk menghadapi anomali cuaca.

Tabel 2: Profil Pengguna Inisiatif TIK

LAPOR	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna LAPOR di wilayah urban umumnya sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dengan mudahnya infrastruktur di perkotaan. • Pengguna LAPOR di daerah menggunakan jalur personal. Mendapat informasi program lewat sosialisasi dan media. Tidak mendapat pelatihan khusus. • Pengguna aplikasi ini biasanya mereka yang menjadi korban pelayanan publik yang buruk, warga yang peduli dengan perbaikan pelayanan publik sampai warga yang mencoba-coba menggunakan aplikasi LAPOR. • Pengguna masih didominasi sekelompok <i>active user</i> yang datanya tercatat di sistem LAPOR. Active user muncul karena aplikasi LAPOR terhubung dengan orang-orang yang aktif memonitor pelayanan publik. Ketika mereka mengetahui aplikasi LAPOR, mereka langsung memanfaatkan untuk mendukung aktifitas yang selama ini selalu mereka lakukan yakni memonitor dengan cara-cara lain sebelumnya.
LAPOR BOS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna adalah komunitas pendidikan yang terdiri dari siswa, orangtua siswa, guru dan pegiat pendidikan yang menginginkan adanya transparansi penggunaan BOS di sekolah. Komunitas pendidikan ini mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaporan dilakukan.
Jakarta Smart City	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna aplikasi merupakan warga yang tinggal di kota, lurah serta RT/RW mendapat dorongan penggunaan aplikasi dan terdapat regulasi yang menguatkan penggunaan aplikasi TIK ini. • Pengguna aplikasi ini biasanya adalah warga yang memiliki persoalan pelayanan publik yang buruk, warga yang akrab dengan penggunaan teknologi terbaru dan sudah biasa menggunakan android serta warga yang senang mencoba-coba aplikasi.
Cek Sekolahku	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna merupakan komunitas pendidikan (siswa, orangtua siswa, guru dan pemerhati pendidikan). Kelompok ini mendapat informasi tentang program, serta mendapat pelatihan mengenai bagaimana program pelaporan lewat CSK ini berjalan. • Pengguna aplikasi ini biasanya memiliki persoalan dengan fasilitas di sekolah dan menginginkan persoalan tersebut dapat direspon serta diperbaiki. Pengguna yang paling tinggi tingkat keaktifannya adalah yang paling akrab dengan teknologi seperti siswa.

SMS Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna adalah komunitas yang tinggal di daerah dan berprofesi sebagai petani/nelayan, memiliki persoalan anomali cuaca, sebelumnya tidak mendapat akses informasi cuaca. • Pengguna memahami penggunaan teknologi sms dan sudah terbiasa menggunakan sms sebelumnya. • Komunitas mendapat pengetahuan mengenai program sms informasi iklim dan cuaca, menghormati pemimpin adat, mendapat pelatihan dan bimbingan terkait program.
Gerakan Desa Membangun	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan yang sebelumnya belum banyak mendapat akses informasi melalui internet. • Pengguna aplikasi ini biasanya memiliki pemimpin muda yang melek teknologi dan berkeinginan untuk menggunakan teknologi untuk memajukan desa serta berjejaring dengan desa-desa yang sudah paham pentingnya teknologi untuk kemajuan desa.
Maternal Survival	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna adalah tenaga kesehatan yang mengetahui program, diberikan informasi tentang program dan dilibatkan dalam program, yakni bidan. • Para tenaga kesehatan ini mendapat pelatihan sebelumnya, didorong untuk berpartisipasi aktif di program. • Kelompok bidan merupakan kelompok profesi yang terdampak bila ada kejadian terkait kematian ibu/bayi.
Sistem Informasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna merupakan masyarakat yang tinggal di pedesaan, sebelumnya tidak terlalu melek teknologi karena tinggal di wilayah terpencil tetapi menginginkan kemajuan desa, mulai diperkenalkan dengan internet lewat program SID, mulai memahami pentingnya teknologi informasi dengan program SID, generasi muda di desa aktif menggunakan internet seiring kemudahan akses pada internet. • Pengguna aplikasi ini menyebar ke desa-desa lainnya.

4. Tipologi Pengguna Aplikasi TIK

Pada bagian ini, akan dibahas jangkauan terjauh para pengguna aplikasi TIK yang diteliti. Dari data-data pengguna delapan inisiatif TIK yang terkumpul, kami mencoba memetakannya dalam kategori-kategori adopter/pengguna menurut Roger, seperti pada paparan sebelumnya. Untuk keperluan ini, kami membuat penyederhanaan tipe-tipe pengguna ini menjadi empat kategori, yaitu innovator, early adopter, majority, dan laggards. Penyederhanaan ini dilakukan setelah kami analisis bahwa pengguna dari 8 inisiatif TIK ini mengelompok menjadi 3 kelompok, yaitu inisiator yang kemudian diklasifikasi sebagai tipe innovator, kelompok sasaran program yang kemudian diklasifikasi sebagai early adopter, dan kelompok target pengguna yang diklasifikasi sebagai majority. Pada tipe majority, kami tidak bisa memastikan, mana yang early dan mana yang late karena data pengguna yang terkumpul tidak memungkinkan untuk meneliti sampai pada pengkategorian tersebut. Pengelompokan tipe-tipe pengguna dapat diamati pada gambar 2 dibawah ini.

Keterangan gambar 2:

Kolom 1: Kategori Innovator

Kolom 2: Kategori Early adopter

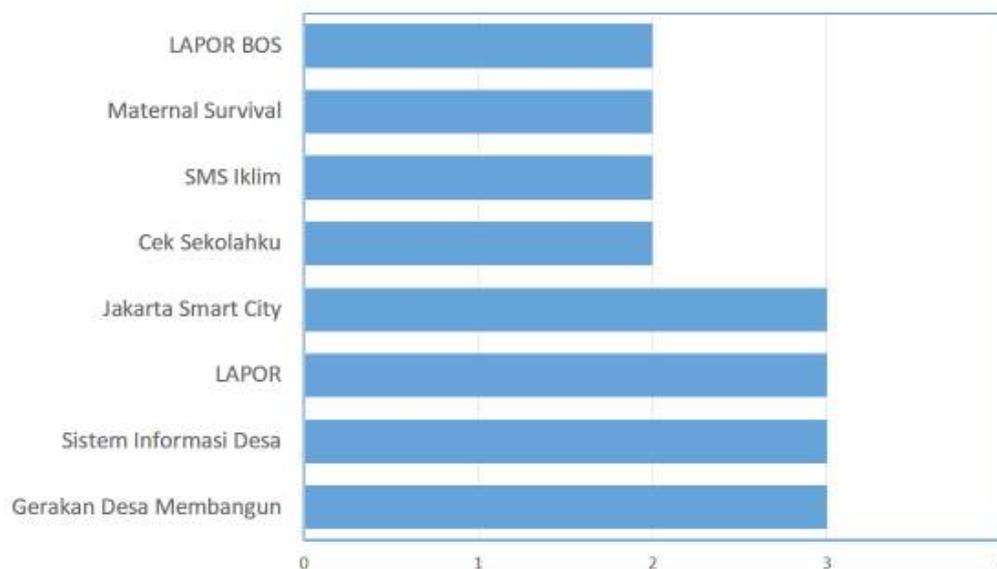
Kolom 3: Kategori Majority

Kolom 4: Kategori Laggards

Jangkauan terjauh untuk pengguna aplikasi LAPOR BOS, Maternal Survival, SMS Iklim, serta Cek Sekolahku adalah pada tipe early adopter (Kolom 2).

Jangkauan terjauh untuk pengguna aplikasi JSC, LAPOR, SID, dan GDM adalah pada tipe majority (Kolom 3).

Menggunakan teori difusi inovasi, dari ciri-ciri yang dideskripsikan di atas, pengguna TIK untuk LAPOR dan JSC termasuk kategori majority karena pengguna adalah masyarakat umum dan bukan merupakan kelompok yang sebelumnya diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi inisiatif-inisiatif tersebut. Pada LAPOR terdapat pengguna yang sering disebut sebagai “active user” yang kiprahnya melebihi dari pengguna biasa. Penyebaran pengguna, sebagai kelompok target aplikasi juga terjadi pada JSC. Pada awalnya, inisiatif ini hanya melibatkan pengurus RT/RW yang mendapat tugas secara khusus agar dapat menyosialisasikan pada warganya untuk menggunakan aplikasi inisiatif JSC. Dalam perkembangannya, warga Jakarta mulai aktif menggunakan aplikasi QLUE untuk



Sumber: hasil analisis

melaporkan complaints. Adanya kelompok active user dan pelebaran pengguna pada warga umum, menurut pengamatan kami, jangkauan yang terjauh dari kedua inisiatif ini, adalah pada kategori majority, dimana pengguna bisa semakin menyebar dan memperkuat penggunaan aplikasi ini.

Hal yang kurang lebih sama, juga terjadi pada inisiatif GDM dan SID. Pengguna kedua inisiatif ini adalah masyarakat wilayah pedesaan yang sebelumnya tidak melek informasi dan teknologi. Penguatan kapasitas kepada kelompok ini membuat pengguna GDM dan SID termasuk pada kategori early adopter. Dalam perkembangannya, penggunaan aplikasi GDM dan SID semakin meluas ke desa-desa lainnya. Dan sekarang semakin banyak desa dan aktivis desa yang menggunakan aplikasi ini sehingga kedua aplikasi ini pada akhirnya sudah mulai menyentuh tipe majority.

Dari pemaparan di atas mengenai tipologi pengguna TIK, pengadopsi pada beberapa inisiatif TIK merupakan pengguna awal (*early adopter*), karena sebagian inisiatif menysasar kelompok target yang terlibat program serta mendapatkan bimbingan dan pelatihan. Begitu suatu inisiatif TIK masuk publik, pengadopsi berikutnya adalah kelompok mayoritas (*majority*), namun pengguna aplikasi dengan kategori ini, masih terbatas. Pada inisiatif JSC dan LAPOR, terdapat pengguna aktif (*active user*) yang selalu menggunakan aplikasi. Kelompok ini merupakan pemerhati yang selalu memonitor kinerja pelayanan publik sebelum aplikasi hadir dan memanfaatkan untuk terus memonitor pelayanan publik dan termasuk mayoritas.

Sementara itu, pengguna inisiatif LAPOR BOS, CSK, SMS Iklim dan EMAS merupakan pengadopsi awal (*early adopters*). Pengguna inisiatif merupakan kelompok sasaran yang mendapat informasi serta dilibatkan dalam program. Pada inisiatif

EMAS misalnya komunitas bidan mendapat pelatihan mengenai bagaimana sistem bekerja. Nama-nama bidan yang terlibat juga terdaftar dalam sistem. Pengguna LAPOR BOS, CSK, dan SMS Iklim juga adalah menysasar kelompok tertentu yang menjadi bagian pilot program. Kelompok sasaran ini merupakan pengadopsi awal. Kategori ini dapat meningkat menjadi mayoritas jika program berkembang dan pengguna merupakan kelompok di luar dari kelompok binaan program.

5. Kesimpulan dan Pembelajaran

1. **Tiga kategori pengguna aplikasi TIK teridentifikasi, yaitu inisiator, kelompok sasaran, dan target pengguna.** Pengguna dengan kategori inisiator teridentifikasi pada semua inisiatif TIK yang diteliti. Dengan demikian semua inisiatif TIK yang diteliti memiliki kategori inisiator. Begitu juga halnya dengan kelompok sasaran, semua inisiatif yang diteliti memiliki kelompok sasaran yang didampingi selama implemetasi program inisiatif TIK. Namun untuk kategori target pengguna, tampaknya hanya inisiatif LAPOR, JSC, GDM, dan SID. Pengguna keempat inisiatif ini tidak terkonsentrasi pada kelompok sasaran, tetapi juga pada target pengguna.
2. **Menggunakan perspektif teori difusi inovasi, tipologi pengguna inisiaif TIK dapat diklasifikasi pada tipe *Innovators*, *Early adopter*, *Majority*, dan *Laggards*.** Para inisiator terdapat pada semua inisiatif TIK yang diteliti. Dengan demikian semua inisiatif TIK memiliki tipe *innovators*. Sama halnya dengan tipe *early adopter*. Semua inisiatif TIK memiliki kelompok sasaran yang didampingi sebagai pengguna aplikasi TIK. Dengan demikian semua inisiatif TIK yang diteliti memiliki tipe *early*

adopter. Berbeda dengan tipe *majority*. Tipe ini hanya terdapat pada inisiatif LAPOR, JSC, GDM, dan SID. Hal ini tampak dari menyebarnya pengguna pada keempat inisiatif ini, penggunanya tidak hanya pada kelompok sasaran program.

3. Jangkauan terjauh pengguna aplikasi TIK yang diteliti adalah tipe majority.

Inisiatif TIK pada program LAPOR, JSC, GDM, dan SID merupakan inisiatif-inisiatif yang dapat menjangkau tipe *majority*. Hal ini terlihat dari para pengguna pada keempat inisiatif ini, tidak terbatas pada kelompok sasaran saja tetapi juga pada pengguna yang lain, dalam hal ini pada target pengguna atau dengan kata lain pengguna keempat inisiatif TIK ini sudah direplikasi secara mandiri pada kelompok-kelompok sasaran yang lain yang bukan merupakan kelompok sasaran pada awal pelaksanaan program inisiatif TIK dilakukan.

4. Kelompok penentang (Laggards) tidak ditemukan secara signifikan pada inisiatif-inisiatif TIK yang diteliti.

Namun demikian, kami menduga kelompok ini biasanya hadir di setiap program inovasi. Kelompok Laggards adalah kelompok yang menentang kehadiran aplikasi TIK karena berbagai hal. Contoh yang paling mudah, aplikasi gojek sangat ditentang oleh ojek pangkalan karena mereka merasa wilayah dan rejeki mereka terganggu dengan kehadiran aplikasi tersebut. Namun belakangan yang terjadi adalah, banyak juga ojek yang beralih menjadi gojek karena gojek lebih menguntungkan ketimbang ojek. Melalui analogi ini, kami berpendapat bahwa kelompok Laggards merupakan kelompok yang strategis untuk didekati oleh para pengembang program inisiatif TIK karena pelibatan kelompok ini, boleh jadi akan mempercepat

tercapainya tujuan diselenggarakannya program inisiatif TIK.

5. **Strategi penguatan pada tipe *innovator* dan *early adopter*, dalam beberapa inisiatif, dapat mendorong munculnya tipe *majority*.** Munculnya pengguna lain, selain kelompok *dampingan*, dapat diamati dari SID dan GDM. Para aktivis desa cukup aktif menyuarakan manfaat dari inisiatif ini, sehingga banyak aktivis-aktivis dari desa lain serta pemerintah-pemerintah desa lainnya bergabung dan memanfaatkan SID serta GDM.
6. **Menyuarakan manfaat penggunaan aplikasi TIK dalam isu-isu perbaikan pelayanan publik serta isu-isu pembangunan lainnya dapat mendorong perluasan jangkauan terhadap pengguna.** Penggunaan TIK dalam berbagai inisiatif dapat mendorong warga untuk menggunakan aplikasi inisiatif TIK dan menjadi partisipan aktif apabila manfaat dari penggunaan TIK tersebut dirasakan oleh warga. Jika manfaat tersebut diketahui dan dirasakan langsung oleh warga maka penggunaan TIK tersebut dapat meluas dari kelompok *innovator* dan *early adopter* menuju kelompok *majority*. Sejauh ini partisipan aktif di luar kelompok sasaran adalah kelompok yang sebelum adanya aplikasi TIK sudah mempunyai *concern* pada isu-isu perbaikan pelayanan publik dan sudah aktif menyuarakan aspirasi.
7. **Penting untuk merumuskan strategi penjangkauan pengguna pada program-program inisiatif TIK.** Mengamati tipe-tipe pengguna, mulai dari *innovator*, *early adopter*, *majority*, dan *laggards*, dapat dipahami bahwa semua aplikasi TIK menginginkan penggunanya sampai pada tipe *majority*. Karena tipe *majority* merupakan pengguna dengan kuantitas

yang sangat besar. Dengan pengguna yang besar, diharapkan tujuan dari pelaksanaan program-program TIK dapat tercapai. Dalam hal ini tujuan untuk mendorong pemerintah agar responsif terhadap laporan-laporan disertai dengan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah dan meningkatkan peran masyarakat untuk menyuarakan laporan untuk perbaikan layanan publik secara lebih baik dapat dicapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Kamal, M. M. (2006) *IT innovation adoption in the government sector: identifying the critical success factors*. *Journal of Enterprise Information Management*, 19(2), 192–222. Retrieved 9 Agustus 2017, available at https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Kamal7/publication/220306470_IT_innovation_adoption_in_the_government_sector_Identifying_the_critical_success_factors/links/567a76dd08ae7fea2e9a0dca.pdf
- Karippacheril, T.G. (2013) *Public Service Delivery in the Era of Digital Governance: Case Studies from Indonesia*. Retrieved 8 Agustus 2017, available at <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25492/98812-BRI-VC-ADD-SERIES-PUBLIC-Box393182B.pdf?sequence=1>
- Rahadi, D.R. (2007) *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik*. Retrieved 9 Agustus 2017, available at <http://www.infodiknas.com/wp-content/uploads/2014/05/PERANAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-DALAM-PENINGKATAN-PELAYANAN-DI-SEKTOR-PUBLIK.pdf>.
- Rizal, F. (2012) *Penerapan Teori Difusi Inovasi dalam Perubahan Sosial Budaya*, Hikmah Vol. VI, No. 01 Januari 2012, 129–140, Retrieved 8 Agustus 2012, available at <http://perpustakaanstainpsp.net/e-journal/index.php/hikmah/article/view/144>
- Rogers, E.M. (1995). *Diffusion of Innovations* (5th Edition). Free Press. New York.
- Schuurman, D., De Moor, K., De Marez, L., & Evens, T. (2010). *Investigating user typologies and their relevance within a living lab-research approach for ICT-innovation*. In *System Sciences (HICSS)*, 2010 43rd Hawaii International Conference on (pp. 1–10). IEEE. Retrieved 8 Agustus 2017, available at https://www.researchgate.net/profile/Dimitri_Schuurman/publication/221181059_Investigating_User_Typologies_and_Their_Relevance_within_a_Living_Lab-Research_Approach_for ICT-Innovation/links/09e4151486dc5177a4000000.pdf.
- Suwarno, Y. (nd) *Inovasi di Sektor Publik*. Retrieved 8 Agustus 2017. Available at https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48685248/inovasi-sektor-publik.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502451560&Signature=7JOSCMDrDZpv7lnotKZ0vLIBVJg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DINOVASI_DI_SEKTOR_PUBLIK.pdf
- Wahid, F. & Iswari, L. (2007) *Adopsi teknologi informasi oleh usaha kecil dan menengah di Indonesia*. Retrieved 7 Agustus 2017, available at [file:///C:/Users/Admin/Downloads/1732-1565-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/1732-1565-1-PB%20(4).pdf).

Notes

1. Peneliti pada *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS), sebuah lembaga riset dan advokasi pada bidang *governance* dan TIK.
2. inisiatif ini dikembangkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4, saat ini bernama KSP/Kantor Staf Presiden) yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi/laporan/keluhan mengenai program pembangunan melalui saluran komunikasi LAPOR. Lebih detail tentang LAPOR dapat dilihat pada tautan ini, <https://lapor.go.id/>.
3. inisiatif TIK ini dikembangkan Kemendikbud untuk menampung keluhan masyarakat terkait penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. Lebih detail tentang LAPOR BOS dapat dilihat pada tautan ini.
4. inisiatif ini dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat ikut memantau kinerja pemerintah melalui aplikasi QLUE yang disediakan untuk menampung laporan/keluhan masyarakat dan selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah. Lebih detail tentang JSC dapat dilihat pada tautan ini, <http://smarcity.jakarta.go.id/>.
5. inisiatif ini melayani laporan komunitas pendidikan terkait layanan sekolah di 4 kota di Indonesia (Semarang, Makasar, Palangkaraya dan Batang). Pelaksana program adalah Transparency International Indonesia (TII). Lebih detail mengenai inisiatif ini dapat dilihat pada tautan berikut, <http://ceksekolahku.or.id/>.
6. inisiatif TIK yang berupa sms gateway ini dikembangkan oleh Pikul, sebuah NGO berbasis si Kupang. Inisiatif ini menyebarkan informasi iklim dan cuaca dari BMKG kepada komunitas petani/nelayan. Lebih detail mengenai inisiatif ini, dapat dilihat pada tautan berikut ini, <http://www.perkumpulanpikul.org/2014/07/bersama-petani-nelayan-mengembangkan-sistim-informasi-iklim-dan-cuaca/>.
7. inisiatif ini bertujuan membangun kemandirian desa melalui TIK yang berbasis di Banyumas, Jawa Tengah. Pemrakarsa program adalah Yayasan Gedhe Nusantara. Lebih detail mengenai inisiatif ini, dapat dilihat pada tautan berikut ini, <http://desamembangun.id/>.
8. inisiatif TIK untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang dilaksanakan di 6 provinsi dan 30 kabupaten, 150 rumah sakit dan 300 puskesmas. Pelaksana program adalah Jhpiego, Yayasan Budi Kemuliaan dan Muhammadiyah atas dukungan USAID. Lebih detail mengenai inisiatif ini, dapat dilihat pada tautan berikut ini, <https://emasindonesia.org/>
9. Inisiatif ini dikembangkan Combine Resource Institution (CRI), sebuah CSO berbasis di Yogyakarta. Inisiatif ini untuk memenuhi kebutuhan desa akan data dan mengembangkan daerahnya berdasarkan data yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Lebih detail mengenai inisiatif ini, dapat dilihat pada tautan berikut ini, <https://www.combine.or.id/tag/sid/>.

The Dynamic of the ICT Citizen Users in Generating the Government Response

Oleh: Siti Nurjanah & Mardiko Saputro | Women Youth Development Institute of Indonesia.

Introduction

This paper addresses the question of what is the type and the position of the information and communication technologies' (ICTs) Users (non-government); and what are the forces that drive and against the creation of government's response on the areas of transparency and accountability (TA) which stimulated by Users through the application/access of the ICT platform?

The study is based on four MAVC project reports, FIK-ORNOP, ICW, Sloka Institute, and WYDII, were assigned by the MAVC's team. We also studied of the projects' online platform. Initially, FAMM's and BIGS's reports were included in this study but we decided to remove them after we've learned that FAMM does not adopt a specific ICT platform in their project with the MAVC; while the demographic information of the citizen Users in BIGS report is mostly unidentified.¹

This paper concluded that users understood on the importance of the ICT platform and they are mostly supporting the concept of transparent and accountable governance, however to enable the platform to be organically embedded – even within the community of the *Invited Users*, it requires various forms of facilitation between User and the online platform to achieve desirable impacts. The forms of facilitations,

especially the offline facilitations– should be consistently applied to ensure the life of the online platform can be measured and assessed to minimize possible gaps between Users and the online platform.

Methodology

Data collection methods and theoretical background

The review of the four project reports – ICW, FIK-ORNOP, Sloka Institute, and WYDII is based on a qualitative analysis. The primary analytical tool refers to this study is the *Stakeholder Analysis*, to assess Users and their position toward the ICT platform, as well as to identify the citizen Users and how Users apply ICT to trigger government's responses. It is crucial to understand that all four project reports have applied offline platform as well – which often equally or more important than the ICT platform. Therefore, any project outcome should be considered not independently as a result of the ICT platform, but as the result of the offline platform as well. Further discussion on the interdependency of the online and offline platforms is examined with the *Network Society* theory coined by a German sociologist, Georg Simmel and popularized by Jan van Dijk and Manuel Castells (van Dijk, 1991; Castells, 2005).

The secondary analytical tool refers the *Force Field Analysis* “to weigh the driving and restraining forces...comprised of people, habits, customs, and attitudes” (Lewin Kurt, 1940s).² This tool addressed and identified the pros-cons around the Users’ ability to generate government’s responses through ICT. Both tools—the *Stakeholder Analysis* and the *Force Field Analysis* are in conformity in examining the type and the position of Users; and to assess the forces that drive and against the Users to generate government responses.

Castells defines *Network Societies* as, “a social structure based on networks operated by information and communication technologies based in microelectronics and digital computer networks that generate, process, and distribute information on the bases of the knowledge accumulated in the nodes of the network...Technology does not determine society, it is society. Society shapes technology according to the needs, values and interest of people who use the technology” (Castells and Cardozo, Page: 3-7, 2005).

The concept of the Network Society is underlying both, the power and inhibitions of the ICT. The effectiveness of ITC platform is based on the ability to “identify the means” generated from the ICT to transform the capacities of communication...It is partial to understand the dynamic, constrains, and possibilities of the new social structure associated with the network society” (Castells and Cardozo, Page: 6, 2005).

The theory provides a foundation on the importance of the assimilation and integration between the online and offline platform as a network society that interconnected, not a separate entity, as a separation of any of the network, as Castells suggests that technologies could serve both, to unite and also to alienate or isolate the members of society/Users

toward/from each other and from the change.

The primary type of documents studied in this research is a midterm report and final reports written in English, which is not the primary language of most project implementers. Semi-structured interviews and discussions with the four project team members via Skype and written emails are essential element of the study, especially to clarify what is described in the report and the actual project or the intended analytical presentation.

Some of these basic semi-structured interviews include exploring the demographic information of Users (gender, age group, literacy level, interest group, profession), types of online activities, Users’ difficulties/challenges to use ICT, relationship between and availability of the online and offline activity; and the discussion include envisioning a project redo, assimilation, and integration between online platform and Users, facilitation between content/message online and offline platform.

Project Profile

All four projects implemented anchored around the Decentralization Law. Law No. 22/1999 on Local Government and Law No. 25/1999 on Fiscal Balance between Central Government and Regions. These Laws are the foundation of the principles of democracy, such as to achieve greater inclusion, women’s empowerment, equity and justice, by strengthening the local autonomous governance. The goal of these four projects studied is clearly carrying out the mission of these principles.

All reports have clearly stated the adoption ICT platform to improve good governance in the government practices. The ICT Users of the aforementioned projects include government officials and the members of communities (NGOs, interest groups,

general public) but this research specifically addressed the citizens/*communities* as Users. In some capacities, the citizens referred as or engaged in the project as representations of an NGO or an interest group. (See table 1: MAVC Project Profile).

Aside from providing the information about the project goal and the outcome, the table above provides general overview on the type of ICT applied and how the Users engaged in the project. Except for Sloka Institute, all of the projects specifically target certain groups of community as the base to establish the online platform. All project implementers confirmed that there is a fundamental need to facilitate

adaption/application of the online platform to offline activities, such as FGDs, trainings or informal discussions (ICW, FIK-ORNOP and WYDII). Therefore, these three NGOs rely heavily on their *Invited Users* to establish and energize the online platform. Although, these three NGOs also provide an open space in their online platform, such as website and social media but the reliable participations mostly still came from the *Invited Users*.

In contrast, Sloka Institute project was designed with the assumption that the large numbers of followers on Twitter that they have acquired—of more than 95,000 followers, would automatically transform

Table 1: Project Profile

MAVC Project Profile					
NGO	Project Title		Space	ICT Platform	Outcome
FIK ORNOP	Program Empowerment for Village Development: Providing Qualitative and Quantitative Data With Participatory Method to Guarantee Transparency and Accountability		Invited	Website, social media	Village website, village information system; several people-based initiatives created
ICW	E-Procurement Potential Fraud Analysis – Network Expansion		Invited	Web-portal, chat-group, social media	Information on tenders, potential fraud; established access to monitor local procurement
Sloka Institute	Using Bali Based Citizen Journalism Media BaleBengong to Improve Quality Government's Universal Health Insurance Scheme (BPJS)		Open, Invited	Website, social media	Improved communication method between health service users and providers
WYDII	A voice for women to deepen Indonesian Democracy		Invited, Open	SMS Gateway, website, social media	Improved women's inclusion in village governance; government 's accommodation to gender mainstreaming budgeting

into active participation. Taking this social capital into account, Sloka Institute then used their relatively large amount of resources to engage/invite health providers (government) to create social media account as a platform for the Users/citizens to communicate directly with the health providers; and almost left out the direct engagement/facilitation with the Citizen Users.³ Sloka Institute has overlooked the most important challenge in the ICT that is to acknowledge the existence of an *invisible wall* that can limit and create discrepancies between access and action (Alan Thorn, 2009).⁴

Castells' and Van Dijk's theory on the *Network Society* fits well in this case, technology is one aspect of network but it is not sufficient to create a strand of society networks to be activated to create changes. The FIK-ORNOP, ICW, and WYDII have anticipated that the online platform should be supplemented with a consistent offline facilitation to create a strand of the network society within Users and to build a sense of collectiveness to move toward the proposed issue. As we've seen from the table 1, these organizations relied on the *invited users* to energize the online platform, and also established the *open space* as a complimentary space.

Who are the ICT Citizen Users?

The demographic information of the Users were not explicitly shown in the reports, especially when the project targets the general public instead of a particular population or group, such as the ICT Users targeted by Sloka Institute. However, the information was gathered during the semi-structured interviews. There are five types of demographic information gathered (gender, age group, literacy level, interest group, and profession). It is intersectional type of information to ensure in the case of an absent of one information can be filled with other type of information. For example, there is intersectionality between the information on literacy level, interest group, and profession.

More than 90% of Users are literate—average Users have high school diploma and beyond. The project equally targets rural Users (FIK ORNOP and WYDII) and urban Users (Sloka and ICW). The general gender representation of the ICT Users is still male dominated—except for the project specifically targeting women, such as WYDII's project (57% female). This male domination of Users was mainly because of a wide stereotyping that the tech area is the male area. Additionally, the type of content/subject of the ICT also often can be gendered. Such as, the issue brought by ICW on anti-corruption. It is still largely popular among male Users. Similarly, FIK-ORNOP Users, were also male-dominated because of the target Users were mainly farmer and fishermen. This gender inequality among Users stays until the final stage of these projects, although these NGOs have tried to engage female and male equally throughout the project implementation

Table 2: Citizens Users

NGO	Demographic Information of Citizen Users				
	Gender	Age group	Literacy Level	Interest group	Profession
FIK-OR-NO	40%: female 60%: male	Young-adult	85%	Youth groups, farmer and fisherman association, women's group	Farmer, fishermen, small-medium entrepreneur, student, homemaker
ICW	30%: female 70%: male	Young-adult	100%	NGOs	Journalists, NGOs
Sloka Institute	40% female 60% male (google analytic)	11-34yo: 94% 34-55yo: 6%	100%	General public	General public/young urban
WYDII	>57% female >42% male	17-34:75% 35-57: 25%	98%	Women's group, Koranic Reciting group, Health Post	Farmer, factory worker, pre-school teacher, homemaker, small business owner, unemployed

Positions of User

Aside from identifying the demographic information of User, the *Stakeholder Analysis* is used to define the position of Users. Specifically, we are adapting a sociologist and demographer's model, Kammi Schmeer (1999). Schmeer defines the position of stakeholder (User) in five categories, Supporter, Moderate Supporter, Neutral, Moderate Opponent, and Opponent. We simplify this model into three categories, Supporter, Neutral, and Opponent. The mechanism to establish these positions include; (1) gathering the information directly reported by the stakeholder in the interviews, (2) gathering the indirect information gathered through other stakeholders and secondary information (i.e., others' perceptions), and (3) gathering the interest information (Schmeer, 1999, Page: 2-15)

Aside from studying the reports, direct information gathered through in-depth Skype interview and email questionnaires with members of the project implementers and with the project partner organization; the indirect information gathered through authors' assessment based on the reports

and the study of the offline platform; and the interest information based on the authors' assessment on the overall advantages or disadvantages of the ICT to Users' interest.

Supporter Position

The *Supporter Users* are the backbone of the project that have participated and pursued the government responses. They do not necessarily have to be quantitatively large, but the project could suffer if the project could not acquire the minimum numbers of the *Supportive Users*. Users classified as *Supporters* have shown positive or agreeable behavior toward the ICT platform and the project objectives. In the case of FIK-ORNOP, ICW and WYDII, the Invited Users have shown a great interest and acceptance to the mission of the project.

These positive and agreeable behaviors and actions, include participating in the project online and offline activities, such as attending FGDs, trainings, participate in SMS, accessing/using web-portal (opentender.net), website (village system information), social media; responding well to the project communications,

sensitizing the platform to others, pursuing communication and connection with government officials.

Some of the conditions that are conducive in creating more Supportive Users include, targeting/focusing a particular group to consistently apply the offline platform. This strategy is aligned with Castells and van Dijk theory of the Network Society that community of Users should be created in order for the technology to be grounded and assimilated with the Users and finds their way to appeal the interest of Users. .

Some of the conditions that are conducive in creating more Supportive Users include, **targeting/focusing a particular group** to consistently apply the offline platform. This strategy is aligned with Castells and van Dijk theory of the Network Society that community of Users should be created in order for the technology to be grounded and assimilated with the Users and finds their way to appeal the interest of Users.

Sloka's project design **was not intended** to build and energize Citizen Users but to facilitate the health providers (government) to be more participatory in their service delivery through social media accounts. As result, although Users of Sloka Institute have also shown some of supporting position, including communication within the BaleBengong Twitter, posting messages, and responses on Facebook, communication and connection, and follow up actions with the health care providers, but the numbers of Users' activities were **limited and less consistent** compare to the three other projects.

The other condition that also is conducive to create more Supportive Users is the **choice of issues** carried out in the online platform. Indonesia is in a transitional democracy which issues of good governance is in the heart of many citizens. All the projects worked around the intervention to support and/or monitor numbers of

government initiatives. The majority of Users **accepted** the importance of the project mission, although their **actions to materialize the mission** were varied. Some of the obstacles, why the project has not met the maximum outcomes, partly because there were some limitations on the ability to reach and mobilize the community/Users.

Neutral Position

Neutral position is the most common position of Users of most projects. Neutral Users exhibit non-participatory, non-committal position or non-objectionable behaviors. These Users have been reached by the project, either through invited or open space, but did not show any positive or negative responses. It is mostly likely that these Users are supporting the project at the cognitive level, but due to the invisible wall, they were unable or unwilling to commit into meaningful participations.

All projects have experienced Users of *Neutral* position, even within the *Invited User*, but most commonly occurred within the **open space**. And this position could be frustrating, especially if the Users remained to be *Neutral* even after all the **approaches were exhausted**. Anton Muhajir of Sloka Institute, for example, finds that Users whom first shown an interest toward the platform by responding the posting on Facebook or Twitter, but then when the Sloka Institute inviting them into more committed steps, they were just **vanished into thin air**. (Muhajir, September 21st, 2017).

Similarly to WYDII, throughout the implementation of the SMS surveys, WYDII has evaluated the SMS traffic to ensure a maximum number of responses were received, and when necessary, WYDII replied to respondents' questions individually. However, there were still some 25% of the total Users remained inactive. We assume that this type of Users is unable

to envision changes that the project could create. These Users usually **never attended** nor were part of the offline platform.

Type of content or level of difficulty to access and use the ICT could make Users reluctant to pursue their online participation. For example, in the case of ICW, the level of difficulty to access and use the web-portal is relatively high for ordinary citizens. Siti Juliantari of ICW describes, “One of the challenges to wider Users’ participation is because the level of difficulty to use the opentender.net is relative high. This can be understood because the terms used in E-procurement are very specific, therefore, Users of opentender.net still limited to those who are *Invited* and received training from ICW. This difficulty also confirmed by Jull Takaliuang – the partner organization of ICW, stated that opentender.net is difficult to use/access even for those who have been trained by ICW. “There are steps to go that required careful mathematical practices to define a valid scoring of a particular government project.⁵ (*Jull Takaliuang, September 5th, 2017*).

Opponent Position

The position of Users is considered opponent when Users exhibit active disagreements and oppositional actions toward the online platform and the project objectives. The opponent position is the least position documented and reported by all project implementers, except for one case of WYDII. In the beginning of the project implementation, there was several male respondents have publicly

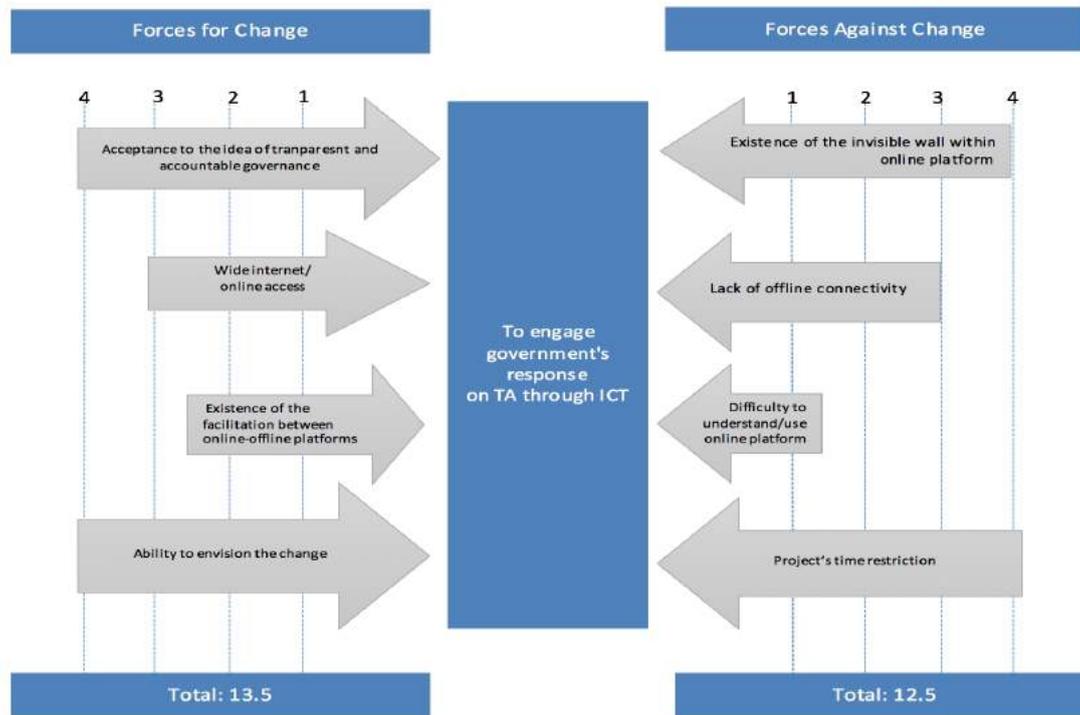
opposed the platform and intimidating other respondents/Users, especially those who are inferior to the opponents. They were spreading fear to Users/respondents and telling Users not to response/reply to WYDII’s SMS surveys. Their opposition to the platform was very vivid and concerning (WYDII, Final Report, November 2nd, 2016).

As the scale of WYDII’s project was relatively small, WYDII was able to reestablish its standing in the village by initiating a series of offline platform, especially with the opponents. We had several meetings with the opponents and addressed their **unfounded accusations**. Although they were not necessarily turned their position into Supporter, but there was a **shift of position** from *Opponent* to *Neutral* position. This shift has greatly diminished the level of obstruction that they have caused in the project. After offline meetings, these opponents stopped spreading the negative comments and opposition but they never turned their position to Supportive position. Their final position was Neutral.

Forces For and Against the Change

Based on the Force Field analysis (Kurt Lewin), there are a multitude of forces that drives and restraints in both ways and have shaped the position of Users.⁶ Once these forces are identified, the project should strategically either drive movement toward the intended change (driving forces) or block movement restraining to the change (hindering forces).

Force Field Analysis Chart



The chart shown has shown that the overall project's driving forces are **greater by one point**, compare to the forces against the change. The majorities Users have accepted that the online platform is a positive initiative in improving the culture of governance in their community, however this positive force is at the same time also **hindered equally** with a great challenge. Many Users still have problem to internalize or embed the online platform in their mind and practices, due to **invisible barriers** between Users and online platform, such as many people still unable to grasp/doubt the materialization of virtual life into offline action, lack of confident on the ability of their government to change, or limited evidences of changes that can be brought from online platform to reality. However, there are also evidences that this *invisible wall* between Users and online platform **can be redirected into positive forces** through offline activities

that had been done by most of the project implementers.

The second important force is the ability of Users to process online content, therefore the facilitation is necessary for a successful application. Based on the force field analysis, the ICT platform has provided a breakthrough of various forms. If it were not for these NGOs initiatives– the track to promote transparent and accountable governance, especially at the village level, would otherwise take more years for the citizens even to know or learn about government initiatives or the necessity to monitor government's work (inclusion). By looking at the present government's capacity and their level of understanding on the principle of democratic governance to carry out the regulation locally (JKN – the National Health Coverage, Village Law), the implementation of these laws would remain **autocratic and out of the public sight**.

Lessons Learned Invited Users Incline to the Supportive Position

Other than WYDII's experience, there is no record of strong opposition reported by the project implementers. The issue of good governance practices is widely accepted and even celebrated in some areas. However, one of the major issues documented was about the ability of the project to reach out to the citizen Users consistently. There are some strong evidences shown by all project implementers that Invited Users are the most *Supportive Users* compared to those who were engaged in *open space*. The inclination of *Invited Users* to Supportive position mainly because there is a built sense of network society or connection between the project implementer, the online-offline platform, and among Users.

An open space is an important part of any online platform, as not all projects have the capacity to reach Users on offline platform since it could be expensive and time consuming. Therefore, an open space should also be offered in any online platform to accommodate greater Users/general public and to equip for the future impact beyond the project life. However, when the project is at initial level, there is a need to establish offline platform to enable the measurement of challenges and successes. Anton Muhajir of Sloka Institute stated, "If we were to go back to start the project, we would do differently; (1) to determine the target group of the program more clearly by identifying which communities are actively using JKN service; (2) adding more program officers due to different roles and levels of each actor in the program, as most of the target groups need intensive assistances, not only trainings and discussions" (*Sloka Institute Report, Page: 28, 2017*).

Compatibility between the Online and Offline Platform

FFIK-OPNOP, WYDII as well as ICW have shown that intermediation and facilitation of online to offline platform have enhanced the solidarity among Users and add to a feeling that one belongs to a *network society*, and therefore breaking down the *invisible barriers* existing within Users. For example, because people who use the SMS platform are almost in daily contact with one another, they often use the opportunity of informal encounters as a means to share their experiences with SMS messaging, inform one another whether they have received SMS survey questions, and how they answered the SMS questions. Overall, the offline platform has helped Users to envision actual changes. The offline platform helped create an electronic social network of Users, also improve solidarity, a sense of belonging, and a greater sense of representation with the realization that social concerns can be placed on the public agenda through online platform. For WYDII, the offline platform has significantly enhanced the level of Users' acceptance and support to the SMS Gateway and embarked the villagers into a new concept of governance. Trainings and discussions held by WYDII have stimulated Users starting to feel and to think as more empowered citizens

The level of content difficulty and the familiarity of the content/platform also influence the level of Users' participation. In the case of ICW, has relatively the highest level of difficulty compared to the issues carried out by FIK-ORNOP, Sloka Institute and WYDII, therefore offline facilitation is a must. Even with trainings and discussions, many of these *Invited Users* still experienced difficulties. Without offline platform, this particular type of issue or ICT platform would be very problematic to proceed.

One of the underlying lessons learned is that some of the most active and Supportive Users did not have a direct access to the ICT platform. Many of FIK-ORNOP Users did not access the online platform directly, rather received the information from the village facilitators. Asram Jaya of FIK-ORNOP stated “those who are considered to be Supportive Users are not specifically confined to those who used the ICT directly, but also to those only received the messages of online platform from the village facilitators. These Users are very important part for the project, being supportive and believing on the practicality and usefulness of the ITC platform, as well as attended most of the offline platform, mobilized, and energized to generate government responses” (Asram Jaya, 9/21/2017).

Another unexpected positive outcome from the establishment of online and offline platforms, is that the project has allowed the youth to take a more meaningful role in the community that never existed before. Age discrimination in this feudalistic village life is the norm. Typically, the public forum is dominated by the older generation. What the ICT project-based brought in the village life is by creating a new space for younger generation to fill in. The area of technology application has naturally been given up by the older generation due to lack of experience and “incomprehensible” level of complexity – which allowed the older generation to compromise their ordinary domineering roles in the community (Asram Jaya, 9/21/2017).

Does Easy Application of ICT Creates More Supporter Users?

An uncomplicated and easy application of ICT that is **doable to all** – even to those with limited educational and social backgrounds is crucial to generate greater supporters. At the same time, **defining**

target groups, and/or both, *invited and open* is also fundamental to the success of the platform. An open online platform alone would most likely disappear in thin air because numbers of issues confined within the *invisible wall* barriers.

WYDII has anticipated that a minimum level of difficulty to use or participate in the online platform will increase the participation. WYDII’s survey participation at its peak reached up to 75%. Throughout the process WYDII has consistently perfected the SMS survey platform, either providing direct responses to Users, as well as ensuring that all questions were current and relevant to Users’ interest. The survey design was easy to process, which only required Users to simply provide numerical or alphabetical responses rather than engaging User in intellectually demanding platform. It is true that an easy access/application of online platform is generating more supportive Users, but how we define an easy or not easy application is **not universal** and should be carefully examined and tested.

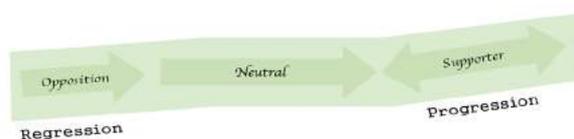
In particular, WYDII’s experience could shed the light on this point. Post WYDII SMS surveys in the village, the village government then created a follow up by creating an “SMS Center” with the purpose for all villagers to openly send any opinion or complaint about any village affairs to the village government. This seems an ideal initiative as the project aimed to achieve. However, the response of the villagers to this initiative is very poor, including those who were part of the WYDII’s SMS surveys.

In response to this concerned, one of the most Supportive SMS Users stated that the reason why she did not participate in the “SMS Center” created by the village government because she simply does not know where to begin. She perceived that the “SMS Center” does not provide “a secure” lead, in which the villagers could

just simply response to agree or disagree on something/issues (passive-supportive Users). Evidently, the platform has given too much space, which **made them feel insecure**, especially she “afraid with the possibility to offend people who are at the higher social-political strata” (Jamilah, October 5th, 2016).⁷

Regression and Progression of Users Position

Flowchart Position of User



Many Users experienced being in the Neutral Position **before they shifted** into more committal or opponent position. But opponent position throughout all project implementations **is rare**. The type and the intensity of both engagements, the popularity of the content, access, and level complexity determine the direction of Users' position, whether they would remain the same (from Neutral), to progressing or to regressing position. The *Neutral* Users will be more likely to progress the position into *Supporter* position, when the implementer started to facilitate the Users. Unfortunately, even among the Supportive Users, their position **is not unconditional**. Numbers of issues could affect their level of interest into lower position that is Neutral position. The evidence is shown in the last WYDII's survey rate was declining from 75% to 73%.

The largest number of Users of all projects is in the *Neutral* position – both from the invited and open Users. Typically, the online platform was accessed by larger

numbers of Users but those who shown their Supportive response were relatively much smaller numbers, most just do not show any indication, either supportive or opposing the platform/project – simply unresponsive (Neutral). Similar to others, WYDII has also established various ICTs (invited and open), SMS surveys, a website, and a Facebook account, but those who have shown Supportive responses were mostly from the **Invited Users**, mostly from the SMS surveys. WYDII SMS surveys response rates were 34% in the first round, 54% in the second round, 69% in the third round, 75% in the fourth round, and 73% in the fifth round, which means about **40% of the Users who were initially in Neutral position were progressing** toward Supportive position, once the project has been established and gained more popularity among the villagers. However, even after all the facilitation and intermediation were pursued, **the 25% of Invited Users remained Neutral** – just did not response, either positively or negatively.

Conclusion; Envision the Change

At some extents, all these four projects have achieved certain level of successes; however all project implementers also admitted that today's project result has not reached its finishing line. The present online platform is served as a catalyst of change, which should be continued active and supported. Asram Jaya of FIK-ORNOP has repeatedly emphasis that the final project outcome should not be constrained to the present outcome, but we should be able to envision where the project would be in the next 3-5 years. The rapid application and the wide access of ICTs in Indonesia – which is among the highest in the world, will continually shape the way people think about and relate with ICTs in their daily life.⁸

Today, the issue of government's transparent and accountability is still intimidating or at least rather uncomfortable subject to raise before the government officials. Partly, it is due to our feudalistic society – especially at the village level, in which questioning the integrity of the superior power is highly discouraged. Secondly, Indonesia is still suffering from the impact of more than three decades under the authoritarian ruler, thus the practice of monitoring government's work is remained to be sensitive areas. That's why the role of technology in intermediating, facilitating, and expediting the process to the change is essential. Most importantly, the projects have provided a fundamental *body of hope* to move forward and to build the culture of inclusion, transparent, and accountable governance in the country.

**Siti Nurjanah is Executive Director of WYDII and Mardiko Saputro is Project Coordinator of MAVC's Suara Kita Project-SMS Gateway in Tunjungtirto, Malang, Jawa Timur.*

Reference:

- Asram Jaya, Head of FIX-ORNOP, Skype interview, September 6th, 2017
- Anton Muhajir, Sloka Institute, Skype Interview, September 6th, 2017
- Van Dijk, Jan, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Q2QYJvXVEa8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=network+society+currently&ots=qdXZJdf5DA&sig=xtTmevSFFfY0DvbSrcXN8_mPRdQ#v=onepage&q&f=false
- Castells, Manuel, <http://www.geof.net/research/2005/castells-network-society>
- Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds., *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005, https://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf
- Jull Takaliuang, Suara Nurani Minaesa, Skype interview,
- Lewin, Kurt (1940s) http://www.valuebasedmanagement.net/methods_lewin_force_field_analysis.html
- Schmeer, Kammi. 1999. "Stakeholder Analysis Guidelines" in *Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform*, Abt Associates, Inc., Bethesda, MD: <http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf>
- Sloka Institute, <https://balebengong.id/kabar-anyar/yuk-belajar-jurnalisme-warga-bareng-sloka-institute.html>
- Sloka Institute, <https://twitter.com/slokainstitute?lang=en>

Siti Juliantari, email semi-structured interviews on September 21st, 2017.

Thorn, Alan (2009-06-23), "Cross Platform Game Development", Jones & Bartlett Publishers.

(Endnotes)

- 1 Semi-structured questionnaires in Indonesian (via email) with FAMB confirmed that the use of ICT is only a complimentary platform, while BIGS has confirmed that their research did look at Users' demographic information.
- 2 <http://study.com/academy/lesson/kurt-lewins-force-field-analysis-change-model.html>
- 3 Skype interview with Anton Muhajir on September 6th, 2017.
- 4 Alan Thorn, 2009, "Cross Platform Game Development" Jones & Bartlett Publishers
- 5 Skype interview with Jull Takaliuang on September 5th, 2017, the partner organization of ICW in Manado, North Sulawesi.
- 6 http://www.valuebasedmanagement.net/methods_lewin_force_field_analysis.html
- 7 Interview with Ibu Jamilah, October 5th, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=LTKaknUdRWo>
- 8 Asram Jaya, Head of FIX-ORNOP, Skype interview, September 6th, 2017

ACSTF

Menginovasi Advokasi demi Kebenaran dan Keadilan



PROFIL

Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) merupakan organisasi yang dilahirkan pada konferensi dengan nama yang sama di Washington DC, yang diadakan oleh *International Forum for Aceh and the Global Peace Centre of the American University* pada tahun 2001. Misionya adalah untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat sipil internasional untuk menyokong dan memelihara proses perdamaian di Aceh, juga untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan cara-cara yang tidak melibatkan kekerasan.

ISU

Setelah melewati lebih dari satu dekade sejak berlangsungnya Kesepakatan Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebelumnya disebutkan dalam kesepakatan tersebut belum juga terwujud. Lobi terus dilanjutkan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia

begitu juga dengan kampanye sipil lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan untuk perubahan kebijakan.

PROYEK

Acehnese Civil Society Task Force dan para mitra mengembangkan sebuah *platform* advokasi yang dirancang untuk memberi para korban semua suara dalam melobi tindakan nyata dalam keadilan transisional. *Platform* ini menggabungkan *polling* warga dan testimonial video untuk mempromosikan keadilan dan rekonsiliasi.

Proyek ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan peningkatan konektivitas Internet di Aceh guna memfasilitasi tuntutan perubahan dalam persepsi kebenaran, rekonsiliasi dan keadilan. Analisis data yang didapatkan dari warga yang dilakukan secara ketat digunakan untuk mendukung perubahan sikap ini dan untuk menantang kesalahpahaman tentang keadilan transisional.

Penguatan Akses Masyarakat Desa pada Pembangunan



PROFIL

Infest menggunakan pendekatan Perencanaan *Asset-Based* dan Partisipasi Masyarakat diselenggarakan di tiga kabupaten yaitu Wonosobo, Jambi dan Banjarnegara. Metode ini berkontribusi terhadap inovasi dalam meningkatkan layanan public di tingkat desa dimana ia merujuk pada kebutuhan dan potensi desa. Infest memilih tiga daerah yang di-scaling-up berdasarkan *rapid assessment* di sembilan daerah yang sudah diselenggarakan sebelum mengerjakan proyek bersama MAVC. Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan isu-isu spesifik seperti penduduk mayoritas pekerja migran, daerah pemekaran baru serta kesiapan atas pelaksanaan data terbuka untuk perencanaan pembangunan partisipatif. Dalam menjalankan Perencanaan *Asset-Based* dan Partisipasi Masyarakat ini, Infest menggunakan platform dasar Mitra Desa yang sudah dikembangkan sejak tahun 2012.

ISU

Desa dengan pengesahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendapat peluang besar untuk menjadi aktor penting dalam pemerataan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Peluang ini diikuti dengan hak dan kewajiban fiskal serta kewenangan yang melekat pada pemerintahan desa. Kajian yang dilakukan oleh INFEST pada awal 2015 menunjukkan problematika penerapan UU Desa yang

terkait dengan kesiapan supra desa (Pemerintah Kabupaten/kota), partisipasi, ruang akses kelompok marjinal dan politik lokal desa. Pada ruang partisipasi, keterlibatan bermakna formalistik kehadiran yang tidak memberikan ruang masyarakat memberikan masukan substantif pada perencanaan desa. Perempuan, dalam jumlah yang besar, masih menjadi kelompok marjinal yang ditempatkan sebagai pelengkap proses-proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa. Kelompok marjinal lain juga masih dipinggirkan. Pembangunan menjadi kehendak elit desa. Di lain sisi, akses informasi masyarakat desa atas perencanaan dan keuangan desa masih sangat terbatas.

PROYEK

INFEST memandang perlu mengujicoba rekayasa sosial yang menggeser masyarakat menjadi jantung pelaku pembangunan sesuai dengan semangat partisipasi substantif dan demokrasi desa yang menjadi amanat UU Desa. Melalui perencanaan partisipatif, INFEST mencoba memperkuat partisipasi publik yang lebih luas terutama kelompok marjinal seperti perempuan, masyarakat adat dan difabel untuk menjadi jantung perencanaan pembangunan sejak penyiapan data yang digunakan pengambilan keputusan. Melalui inisiatif ini INFEST turut mengembangkan platform dan mekanisme data terbuka pada pengelolaan keuangan desa.

Berinovasi untuk memastikan Data Terbuka mengarah pada *Social Benefit*



PROFIL

Open Data Lab Jakarta merupakan sebuah laboratorium penelitian dan inovasi yang bergerak dalam pemanfaatan potensi data terbuka yang berdampak sosial. Open Data Lab Jakarta bertujuan untuk mengembangkan, menguji dan mengevaluasi model, dan membangun bukti untuk nilai data pemerintah, sektor swasta dan data yang dihasilkan oleh warga secara terbuka. Organisasi ini didirikan dan dikelola oleh World Wide Web Foundation, sebuah organisasi non-profit terdaftar di Amerika Serikat, yang didirikan oleh Sir Tim Berners-Lee.

ISU

Pemerintah, lembaga internasional, NGO dan perusahaan swasta menyimpan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, demokrasi yang bertanggungjawab dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, sumber daya ini seringkali sulit diakses dan, jika dapat diakses, umumnya dalam format *non-digital*, dengan syarat dan ketentuan yang ketat atau mahal untuk diakses.

PROYEK

Proyek Open Data InnoCities bertujuan untuk bertindak sebagai perantara inovasi data. Hal ini dapat memberi para aktivis, pengusaha dan peneliti – serta para pendukung pemerintah yang bertanggungjawab – ruang dan sumber pengetahuan untuk mengembangkan, menguji purwarupa dan menguji gagasan mereka untuk solusi berbasis data untuk tantangan sosial, ekonomi dan politik tertentu.

Open Data Lab mendukung individu-individu dan organisasi yang tertarik untuk memanfaatkan kekuatan data, serta membimbing dan menjadi mentor dalam upaya meningkatkan akses, analisis, pemahaman, interpretasi dan penyebaran data.

Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa



PROFIL

Sinergantara adalah sebuah NGO yang beroperasi di Bandung, Jawa Barat sejak tahun 2012. Sinergantara memiliki fokus pada penyediaan pengetahuan tentang kebijakan dan praktik pembangunan. NGO ini memiliki fokus pada isu-isu yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan sosial, dan teknologi informasi.

ISU

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia sebagian besar rendah, dan penggunaan data untuk perencanaan pembangunan desa jarang terjadi. Namun peningkatan kapasitas partisipasi warga negara dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat membantu membangun tingkat kemandirian dengan memobilisasi kesempatan untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan kesehatan dan pendidikan serta untuk mengembangkan inovasi teknologi.

PROYEK

Game My Village

Sinergantara telah mengembangkan sebuah *game* yang memungkinkan warga negara bertindak sebagai perencana desa sehingga mereka dapat mengembangkan desa dengan menggunakan anggaran dan data yang sebenarnya. Kemudian mereka lebih memahami bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan di mana dana dialokasikan.

Proyek *Game My Village* tidak hanya menyalurkan informasi secara satu arah; permainan juga merupakan alat yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah merupakan mitra kunci dalam proyek ini. *Game My Village* membantu memicu percakapan antara para administrator pemerintah yang menggunakan dana untuk layanan publik dan orang-orang yang secara langsung menggunakan layanan tersebut.

Dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan penganggaran daerah – dan menjadikannya mereka bagian dari proses – proyek ini bertujuan memberi pengaruh yang lebih besar kepada warga mengenai bagaimana dana publik digunakan di wilayah mereka, sehingga pada akhirnya juga dapat membantu menjembatani hubungan yang seringkali tidak seimbang antara pemerintah daerah dan orang-orang yang mereka wakili.

Mengurangi Angka Kematian Ibu melalui SMS

Dengan bantuan dana dari *Making All Voices Count*, Sinergantara telah mengembangkan sistem pelaporan berbasis SMS untuk perempuan hamil berisiko tinggi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan cara yang murah dan mudah bagi para pegawai pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang perempuan dengan kehamilan yang berisiko sehingga dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa sistem kesehatan memberikan dukungan yang tepat untuk proses kelahiran yang lebih aman.

Petugas kesehatan pemerintah dan anggota masyarakat dari desa sasaran di Kabupaten Gresik Jawa Timur mengirim peringatan melalui SMS tentang kehamilan berisiko ke *platform* berbasis web. Platform ini mengumpulkan informasi dan lansiran fasilitas medis yang relevan dan menyiapkan perhatian medis untuk wanita dengan kehamilan yang berisiko dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan layanan ini.

Tim untuk proyek ini bertujuan tidak hanya untuk membantu instansi pemerintah agar lebih memonitor kebutuhan perempuan dengan kehamilan yang berisiko dalam jangka waktu pendek, namun juga untuk menyorot kesenjangan layanan kesehatan yang berpotensi mengancam jiwa, sehingga pada akhirnya mungkin menciptakan kesempatan untuk perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat yang lebih terinformasi.

Pemerintah Terbuka: Menilai Pemanfaatan *e-planning* dan *e-budgeting* Pemerintah Daerah di Indonesia



P R A K A R S A
Wellfare Initiative for Better Societies



PROFIL

Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk memelihara dan meningkatkan ide dan aksi dalam isu kesejahteraan melalui penelitian independen yang ketat dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan keadilan sosial dan masyarakat yang sejahtera. Organisasi ini menggabungkan penelitian dengan analisis kebijakan, keterlibatan dan kemampuan berkomunikasi untuk mengubah sebuah gagasan menjadi tindakan.

ISU

Meskipun sudah ada Keppres untuk membangun *platform e-governance* secara nasional pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan dalam tahapan implementasi. Terdapat sejumlah tantangan, seperti contohnya kurangnya sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi informasi. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa laman web pemerintah daerah untuk perencanaan dan *e-budgeting* tidak dikelola dengan baik, dan konten – terutama yang terkait dengan informasi keuangan – tidak selalu dipahami atau digunakan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa *e-governance* di Indonesia hingga saat ini belum memenuhi tujuannya.

PROYEK

Proyek ini mengkaji pelaksanaan *e-budgeting* dan *e-planning* di empat pemerintah daerah. Studi kasus ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam memikirkan rencana pemerintah nasional untuk menerapkan *e-budgeting* dan *e-planning* di tingkat nasional pada tahun 2018, terutama mengenai apakah pendekatan daring sesuai diimplementasikan di Indonesia.

Komponen penelitian proyek ini mengumpulkan bukti dari pejabat yang berasal dari empat pemerintah daerah tersebut, otoritas desa dan anggota masyarakat tentang apakah *e-mechanism* telah digunakan, bagaimana perasaan pengguna tentang pengalaman, dan apakah mereka akan melakukannya lagi.

Mahina Masohi: Aksi Kolektif untuk Akuntabilitas di Indonesia



PROFIL

Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dimulai pada tahun 2000 untuk mendokumentasikan kehidupan para janda yang merupakan korban konflik di Aceh. Sejak saat itu, program ini telah menjadi program pemberdayaan yang komprehensif, yang menempatkan janda dalam posisi yang lebih baik, mempromosikan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga mereka, dan meningkatkan prestise janda di masyarakat.

ISU

Perempuan muda di Indonesia sebagian besar tidak terlihat dalam proses perencanaan dan akuntabilitas untuk pembangunan. Tidak banyak kebijakan yang mempertimbangkan suara dan kehidupan para remaja putri. Akibatnya, potensi mereka tetap tidak terorganisir dan tidak diakui.

PROYEK

FAMM-Indonesia telah membangun keterampilan kepemimpinan dan kapasitas aktivis perempuan muda, sehingga mereka dapat memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertanggungjawaban kebijakan pemerintah di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

Penelitian praktisi ini meningkatkan pemahaman kita tentang strategi yang digunakan oleh para aktivis perempuan muda untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perubahan. Ini dilakukan dengan memahami keadaan mereka dan perubahan apa saja yang ingin dilihat, terlibat dalam tindakan kolektif untuk konsultasi publik dan proses akuntabilitas serta belajar dan mempraktikkan analisis risiko untuk organisasi masyarakat. konsultasi publik dan proses akuntabilitas serta belajar dan mempraktikkan analisis risiko untuk organisasi masyarakat.

Meningkatkan Transparansi, Inklusivitas dan Dampak Penganggaran Partisipatif di Indonesia



PROFIL

Kota Kita merupakan sebuah organisasi non-profit yang telah bekerja untuk mempromosikan dan mendukung penganggaran dan perencanaan partisipatif di kota-kota di seluruh Indonesia sejak tahun 2010. Pekerjaan Kota Kita didasarkan pada kepercayaan bahwa memberdayakan warga dengan meningkatkan kesadaran dan menyediakan alat bagi mereka untuk lebih terlibat dengan pemerintah dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

ISU

Selain memberikan suara untuk memilih pemimpin politik mereka setiap lima tahun, mekanisme penganggaran partisipatif Indonesia – Musrenbang – merupakan salah satu kesempatan bagi warga negara untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka di lingkungan sendiri. Hal ini memiliki potensi besar, namun sering diperlakukan hanya sebagai ‘daftar harapan’ saja.

Hal ini juga telah dipraktikkan secara berbeda di banyak kota di Indonesia dan ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Meningkatkan Musrenbang agar pemerintah menjadi lebih akuntabel dan transparan berarti belajar mengenai perbedaan ini untuk mengembangkan berbagai solusi untuk setiap konteks.

PROYEK

Pekerjaan berkelanjutan Kota Kita mengenai penganggaran partisipatif di Solo telah mengidentifikasi masalah termasuk kurangnya informasi untuk perencanaan dan prioritas proyek, elite lokal yang mendominasi Musrenbang dan pelaksanaan proyek yang tidak dipilih oleh warga. Kota Kita telah mengembangkan solusi untuk masalah-masalah ini yang mencakup profil lingkungan dan alat pelacak yang membagikan informasi tentang pelaksanaan proyek terpilih.

Kota Kita percaya bahwa inovasi teknologi sejenisnya tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat sipil namun juga dapat mendukung transparansi keseluruhan pelaksanaan Musrenbang.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan berbagai kombinasi solusi untuk memperbaiki Musrenbang di enam kota di Indonesia yang dapat:

- Memeriksa kendala dan prospek Musrenbang seperti saat ini dipraktikkan di berbagai kota
- memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu Musrenbang lebih transparan dan inklusif
- mempromosikan pengetahuan dan refleksi kritis terhadap Musrenbang sehingga kebijakan serupa bisa semakin meluas secara nasional.

Mempromosikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU Desa melalui Forum berbasis ICT dan Mekanisme *feedback loop*



PROFIL

PATTIRO merupakan sebuah organisasi terdepan untuk penelitian, advokasi kebijakan, bantuan teknis dan pengembangan model untuk layanan publik dan partisipasi masyarakat. Fokus PATTIRO pada tiga komponen strategis pemerintahan daerah: akuntabilitas sosial, transparansi dan reformasi manajemen keuangan publik.

ISU

Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Desa di Indonesia, otoritas tingkat desa kini memiliki persyaratan hukum untuk mengelola kegiatan dan proses mereka secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 2014 tersebut berfokus pada penguatan demokrasi di tingkat desa. Namun, interpretasi hukum yang bertentangan telah membuat implementasi menjadi bermasalah.

PROYEK

Dengan mempelajari tujuh desa di tiga kabupaten yang berbeda, PATTIRO memeriksa isu-isu mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan desa di lima wilayah strategis, yaitu; pemerintahan desa, perusahaan milik desa, keuangan desa dan aset, kewarganegaraan aktif dan desa adat.

PATTIRO berharap dapat mengidentifikasi gagasan inovatif dalam menerapkan kebijakan desa dan untuk menyorot pelaku utama yang terlibat. Mereka juga melihat faktor-faktor yang membuat praktik yang baik ini dapat menjadi berkelanjutan. Dengan menggunakan ruang diskusi secara online antar pemangku kepentingan, proyek penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kontekstual tentang cara memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang Desa dan untuk berbagi persepsi, pengetahuan serta pengalaman para pemangku kepentingan di dalamnya.

Memahami Implementasi dan Dampak ICT di beberapa Inisiatif Tata Kelola Pemerintah



PROFIL

Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) adalah sebuah lembaga penelitian dan advokasi yang berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia dengan mendorong proses penguatan, demokratisasi, dan pengembangan institusi pemerintah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

ISU

Di Indonesia, walaupun terdapat peningkatan signifikan dalam inisiatif tata kelola yang menggunakan ICT, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aspirasi dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana inisiatif-inisiatif ini dirancang, diterapkan dan berdampak.

Beberapa inisiatif ICT di sektor pemerintahan (atau beberapa aspek di antaranya) berhasil memperkuat akuntabilitas publik. Namun, ada juga banyak inisiatif yang tidak berjalan dan yang tidak dapat berkelanjutan.

Dengan komitmen Indonesia terhadap pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab dan berkemampuan ICT, masyarakat perlu memahami pola keberhasilan dan kegagalan inisiatif ini sehingga proyek yang direncanakan dapat belajar dari kesalahan masa lalu.

PROYEK

Penelitian ini mengeksplorasi pola prakarsa ICT pada sektor pemerintahan di Indonesia dan dampaknya secara keseluruhan.

Tujuannya adalah untuk memberikan bukti yang dapat memperkuat, memberikan arahan, dan mengilhami inisiatif ICT di sektor pemerintahan, terutama yang mempromosikan pemerintah yang responsif dan memiliki akuntabilitas dan gerakan Open Data.



Seberapa publik Alat Pelaporan Publik?



PROFIL

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) merupakan kelompok advisory berbasis penelitian yang berkepentingan untuk berprestasi di bidang sains, teknologi, inovasi dan pemerintahan. CIPG memiliki empat kegiatan utama, yaitu; penelitian, konsultasi, pengembangan kapasitas dan intervensi kebijakan.

ISU

Selama tiga tahun terakhir telah terjadi lonjakan alat pelaporan publik di Indonesia yang menggunakan teknologi untuk memastikan masyarakat dapat secara langsung dan terbuka melaporkan ketersediaan dan fungsi layanan pemerintah.

Salah satu yang paling terkenal adalah LAPOR! yang diluncurkan pada tahun 2012 dan sering disebut sebagai alat pelaporan publik yang paling sukses.

Aktor pemerintah di tingkat menteri, nasional dan lokal telah mencoba untuk meluncurkan alat-alat serupa seperti LAPOR! Namun tingkat keberhasilan dan keterlibatan publiknya bervariasi. 'Penawaran' alat-alat ini saat ini melampaui 'permintaan' dan jelas bahwa keberadaan alat pelaporan publik

tidak secara otomatis mengarah pada peningkatan komunikasi antara warga negara dan negara.

PROYEK

Studi ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan alat pelaporan publik yang ada. Melalui metode penelitian gabungan, studi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- Se jauh mana alat pelaporan publik mencapai tujuan mereka?
- Siapakah pengguna alat yang sebenarnya? Siapa saja yang masih dikesampingkan dan tidak menggunakan platform tersebut?
- Apa saja yang menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam menerapkan alat pelaporan publik?

Melalui penelitian ini, tim CIPG mempertanyakan apakah alat pelaporan publik benar-benar meningkatkan kapasitas negara untuk memberikan layanan publik, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas alat pelaporan publik di Indonesia.

Suara Kita: Menedepankan Suara Perempuan dalam Demokrasi



PROFIL

Women and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII) bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan pemuda untuk menghargai individualitas mereka dan untuk memfasilitasi keanggotaan aktif mereka di masyarakat.

Sejak tahun 2009 WYDII telah memberikan pelatihan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, kesadaran akan lingkungan, kepemimpinan partisipatif, keterlibatan media dan kampanye pemilihan kepada lebih dari 800 orang wanita dan remaja.

ISUE

Indonesia beralih kepada sistem demokrasi pada tahun 1998 dan sejak saat itu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan dan transparansi nilai, terutama pada tahun 2011 saat Indonesia menjadi salah satu negara pendiri Open Government Partnership.

Namun korupsi tetap menjadi masalah yang harus dihadapi. Tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara menurut indeks persepsi korupsi dari Transparency International yang mengukur korupsi di sektor publik.

Partisipasi warga biasa dalam proses pengambilan keputusan rendah dan suara perempuan sebagian besar tidak ada di forum publik.

Undang-Undang Desa baru yang disahkan pada tahun 2014 memberi kesempatan baru



bagi warga negara untuk menjadi lebih terlibat dalam isu-isu tata pemerintahan lokal dan memberi landasan untuk pemimpin lokal memerintah dengan cara yang lebih terbuka, transparan dan responsif.

PROYEK

Suara Kita (Our Voice) memberdayakan setiap perempuan untuk berperan dalam pembentukan kebijakan dan program serta mendorong hubungan yang transparan dan akuntabel antara pemimpin desa dan warga biasa.

Proyek ini diterapkan pada Desa Tunjungtirto dan melalui survei SMS dan pertemuan konsultatif dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pertemuan perencanaan tahunan Desa Tunjungtirto yang dikenal dengan "MusDes."

Dengan menggabungkan dan melaporkan umpan balik dari warga, proyek ini memberi wawasan yang lebih besar untuk para pemimpin mengenai isu dan masalah perempuan di lingkungan desa dan gagasan baru tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan ditemukan.

Menantang Layanan Kesehatan yang Buruk di Indonesia



PROFIL

Sloka Institute adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang pengembangan media, jurnalisme, dan informasi.

ISSUE

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan skema Jaminan Kesehatan Universal pertama (BPJS Kesehatan) untuk memastikan agar semua warga di seluruh negeri memiliki akses terhadap perawatan kesehatan dasar.

Di bawah skema ini, semua warga negara sekarang harus dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas umum, serta layanan dari beberapa organisasi swasta yang telah memilih untuk bergabung dalam skema ini sebagai penyedia layanan. Namun, penerapan skema tersebut mendapat kritikan serius. Dimana terdapat laporan bahwa ada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien yang dibayar oleh pemerintah, namun mengutamakan pasien pribadi yang membayar secara langsung ke rumah sakit.

Institut Sloka menggariskan tiga masalah utama untuk BPJS:

- Tidak ada standar layanan yang jelas yang harus disediakan di bawah skema tersebut
- Tidak ada pemantauan terhadap layanan yang benar-benar didapatkan masyarakat



- Tidak ada mekanisme keluhan, atau cara bagi warga negara agar dapat memberikan masukan.

PROYEK

Untuk memperbaiki situasi ini dan memberikan cakupan yang benar-benar universal, proyek ini memberikan pemantauan warga yang sistematis atas layanan BPJS di Bali. Institut Sloka menggunakan data pemantauan tersebut untuk mendukung kegiatan advokasi seputar perbaikan layanan, dan melatih unit pemerintah daerah (SKPD) dan penyedia layanan untuk memahami dan menyelidiki keluhan yang diajukan melalui platform online Sloka yang sudah ada yaitu Balebegong.id.

Cek Sekolah-Ku: Meningkatkan Kondisi dan Tata Kelola Sekolah melalui Pemantauan Partisipatif



PROFIL

Transparency International Indonesia (TI-I) didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September 2000 oleh sejumlah aktivis anti-korupsi dan pekerja profesional yang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab di Indonesia. TI-I unik di antara NGO Indonesia di Indonesia karena menggabungkan think-tank dan organisasi gerakan sosial.

ISU

Konstitusi Indonesia menuntut setidaknya 20% anggaran negara di tingkat nasional dan lokal harus digunakan untuk pendidikan. Walau komitmen pada skala ini patut dipuji, biaya yang dibelanjakan tidak cukup untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan baik, evaluasi apakah anak-anak mendapatkan guru yang lebih baik, kelas yang lebih baik dan pendidikan yang lebih baik.

Inti masalahnya ada pada sistem pendidikan dimana terdapat korupsi sistemik dan tata kelola yang buruk. Tanpa sistem dan proses untuk melacak uang dan bagaimana pengeluarannya, pejabat publik yang bekerja di sektor pendidikan tidak bertanggung jawab atas uang yang dipercayakan untuk mereka kelola. Antara tahun 2004 dan 2013, terdapat 296 kasus korupsi di sektor pendidikan yang telah

dilaporkan, dengan jumlah total kerugian yang mencapai sekitar 696 triliun rupiah.

PROYEK

Dengan proyek ini, Transparency International bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan di Indonesia.

Proyek ini menggunakan Mekanisme Penanganan Keluhan, yang terdiri dari SMS dan situs web, untuk memungkinkan *feedback* dari masyarakat mengenai kondisi pendidikan di wilayah mereka. Laporan yang terkumpul dikumpulkan dan ditanggapi oleh pemerintah daerah, yang merupakan bagian penting dari proyek ini. Laporan juga dibagi dengan orang tua, guru dan siswa, yang masukannya penting dalam menekan pemerintah daerah untuk bertindak dan merespons.

Proyek ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan partisipasi di antara masyarakat dan pemerintah daerah tempat mereka bekerja dan pada akhirnya, untuk membuat otoritas pendidikan dan sekolah sendiri lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana sekolah.

Mengubah Sistem Perlindungan Anak di Indonesia



PROFIL

Save the Children adalah organisasi independen terkemuka di dunia yang ditujukan untuk melindungi anak-anak. Mereka bekerja di sekitar 120 negara dan berjuang agar setiap anak dapat mencapai potensi penuh mereka.

ISU

Indonesia memiliki tingkat pelembagaan perawatan khusus untuk anak tertinggi di dunia. Dengan setengah juta anak-anak yang tinggal di institusi perawatan dan jumlah institusi tersebut bertambah lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir, masalah yang mengkhawatirkan tersebut terus berkembang.

Layanan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah berfokus pada penyediaan dukungan melalui institusi dan seringkali menjadi satu-satunya cara bagi keluarga untuk mengakses dukungan untuk anaknya. Keluarga memberi hak asuh anak pada institusi perawatan. Akibatnya, semakin banyak keluarga mengandalkan institusi pemerintah yang memiliki sedikit akuntabilitas terhadap layanan yang mereka berikan.

PROYEK

Proyek ini untuk memastikan bahwa anak-anak dan keluarga mereka memiliki kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman mereka mengenai layanan perlindungan anak dan bekerja demi membentuk sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap pihak.

Fokus proyek ini adalah keluarga-keluarga yang telah menempatkan anak-anak di institusi, atau berisiko melakukan hal itu. Melalui video, rapat konsultasi, saluran bantuan khusus dan wawancara individual, proyek ini mengumpulkan cerita dan feedback tentang betapa mudahnya layanan perlindungan anak untuk diakses, dan sebaik apa kualitas institusi ini sebenarnya.

Model ini adalah yang pertama dari jenisnya di Indonesia dan berdasarkan tanggapan positif pemerintah terhadap penelitian yang dipimpin oleh anak dapat menjadi terobosan dalam mendorong terjadinya reformasi perlindungan anak.

Konten Terbuka di Kalimantan



PROFIL

Wikimedia Indonesia mendedikasikan diri untuk mendorong pertumbuhan, pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Organisasi ini didirikan dengan tujuan membina pengetahuan secara umum, dan *open source* pada khususnya.

The Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) bekerja sama dengan sejumlah organisasi kemanusiaan internasional utama, seperti Palang Merah, Doctors Without Borders, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dengan instansi pemerintah untuk mengembangkan peta yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka di setiap bencana.

ISU

Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia menerima bantuan sebesar \$419,2 juta pada tahun 2014.

Memutuskan bagaimana, dimana dan pada siapa uang itu dialokasikan – dan juga memantau apakah alokasi dana membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan – adalah tugas yang sangat besar dan kurangnya data yang *solid* memiliki akibat pertanggungjawaban atas uang yang digunakan menjadi sangat lemah.

Tidak ada pemantauan sentral yang menyatukan data dari para pemangku kepentingan dengan pelaporan tingkat masyarakat dari warga di seluruh Indonesia yang menunjukkan apakah layanan telah dipenuhi dan berjalan dengan baik.

Tanpa data ini tidak mungkin meminta pemerintah dan organisasi untuk

memperhitungkan pembelanjaan dana secara efektif dan untuk mendukung proyek pembangunan yang lebih baik dan lebih berdampak di Indonesia.

PROYEK

Perkumpulan Wikimedia Indonesia dan Humanitarian OpenStreetMaps telah mengembangkan toolkit untuk memudahkan organisasi dan individu lokal untuk menyediakan konten terbuka di wilayah mereka melalui Wikipedia dan OpenStreetMaps.

Proyek ini bertujuan untuk membantu organisasi dan pemerintah dalam merencanakan dan mengukur dengan lebih baik bagaimana uang publik dan dana bantuan dibelanjakan dengan memastikan masyarakat biasa dapat memberikan penilaian berkelanjutan mengenai perubahan status layanan di wilayah mereka.

Dengan memanfaatkan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook dan Twitter, proyek ini mendukung pembuatan konten bagi orang-orang yang tidak berkomunikasi dalam bahasa utama Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas.

Tim ini berharap dapat menyediakan model data bersumber dari masyarakat untuk memandu proyek pembangunan nasional dan internasional serta menciptakan pengeluaran dana yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menantang Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Open Data



PROFIL

Sejak tahun 1998, Indonesia Corruption Watch telah bekerja dalam berbagai kegiatan yang mempromosikan sistem birokrasi, politik dan ekonomi yang bersih. Melanjutkan proyek percontohan yang menjalin hubungan baik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengidentifikasi korupsi di Aceh dan Blitar, situs web opentender.net dibuat. Platform ini telah membantu memberikan landasan bagi hubungan pemerintah dan masyarakat sipil yang konstruktif.

ISU

Pemerintah Indonesia sedang dalam proses berusaha membuat pembelanjaan negara lebih terbuka dan bertanggungjawab dengan menggunakan sistem *e-Procurement* publik, dimana proses pengadaan barang dan jasa untuk sebagian besar kontrak pemerintah dapat diakses secara online.

Dengan meningkatnya profil internasional yang dibawa oleh komitmen *Open Government Partnership* yang ambisius dan sebagai pusat teknologi terkemuka untuk Asia Tenggara, pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin jalan dalam transparansi pengadaan dalam scope regional – hal ini hanya dapat terjadi jika informasi yang dipublikasikan benar-benar digunakan untuk memantau prosesnya secara independen.



PROYEK

Indonesia Corruption Watch (ICW) terus mengembangkan Program Analisis Potensi Penyelewengan pengadaan barang dan jasa. Untuk mengatasi tantangan ini, ICW menganalisis data procurement nasional dan mengunggah temuannya di situs web, yang terbukti telah menjadi alat yang ampuh untuk melacak penyimpangan dan memastikan bahwa data yang dapat diakses publik dapat dipahami oleh publik mengenai belanja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

Scaling-up program terdahulu memasukkan Organisasi Masyarakat Sipil, media, inspektorat jenderal pemerintah dan pejabat procurement untuk memanfaatkan situs web tersebut supaya dapat menyelidik potensi kecurangan dalam proses *procurement*.

Proyek ini adalah contoh unik bagaimana membuka data dapat melibatkan banyak aktor dalam memantau dan memotivasi tata pemerintahan yang lebih efektif.

Pengumpulan Data Partisipatif untuk Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkualitas



PROFIL

Berdiri pada tanggal 4 Juli 1990, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan semula bernama Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FIK-LSM) Sulawesi Selatan. Forum ini turut berjuang menggulingkan kekuasaan Soeharto. Saat ini, lembaga yang memiliki visi “terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang kuat, demokratis dan berkeadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara” ini memiliki 46 lembaga anggota. Status kenggotaan lembaga saat ini masih dalam proses klarifikasi ulang. Saat ini, ada sejumlah lembaga yang sudah tidak eksis lagi karena permasalahan dana yang perlu ditelaah ulang sebagai anggota FIK ORNOP.

ISU

Setelah bertahun-tahun bekerja di akar rumput dan pemerintahan Sulawesi Selatan, FIK ORNOP melihat adanya kesenjangan data di tingkat desa. Mereka mendorong dibuatnya sebuah instrument untuk menumbuhkan pembangunan yang partisipatif, terbuka dan bertanggungjawab. Sebagian besar data didapat dari BPS namun tidak mencukupi kebutuhan dari

tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa dan rumah tangga. Dengan menggunakan metode Participatory Local Social Development, FIK ORNOP berusaha menjembatani kesenjangan data tersebut.

PROYEK

PLSD sudah digunakan di lima desa sejak 2013 dan Bersama MAVC, FIK ORNOP mengembangkannya di empat desa tambahan. Hasil dari metode ini, pemerintah desa memiliki peta untuk mengukur potensi ekonomi, politik, kebudayaan, lembaga, sumber daya manusia, demografi berdasarkan pekerjaan, jenis kelamin, kemampuan ekonomi rumah tangga, dan untuk mengukur aset desa sebagai landasan perencanaan pembangunan.

Dari Rating Pos Pembuangan ke Kota Bebas Sampah



PROFIL

BSID berdiri sejak tahun 2014. Gerakan ini merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan yang menginginkan setiap daerahnya dan Indonesia bebas dari sampah, bukan berarti tidak ada sama sekali namun pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik hingga tidak menjadi masalah. Harapan itulah yang menjadi benang merah para inisiator gerakan BSID yaitu: Greeneration Foundation, Perkumpulan YPBB dan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB untuk berkolaborasi bersama.

ISU

BSID fokus membangun peranti berbentuk website serta SMS gateway yang akan mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam sistem persampahan, mendorong akuntabilitas pelayanan pemerintah, sekaligus mendorong sistem persampahan menjadi berbasis masyarakat.



PROYEK

BSID merupakan salah satu pemenang dalam Global Innovation Competition yang diselenggarakan di Ghana tahun 2016. Bersama MAVC, kolaborasi tiga organisasi ini membangun platform peratingan tempat sampah sementara (TPS) yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan kota Bandung agar jumlah sampah mendekati nol di semua wilayah. Manajemen sampah tidak hanya soal mengangkut sampah saja namun juga terkait perilaku masyarakat untuk mengurangi jumlahnya dengan berbagai cara. Di sisi lain, platform digital sistem persampahan ini diharapkan akan membuat pengelolaan sampah yang lebih terbuka dan tercipta dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Kepercayaan Rakyat: Sebuah Keharusan dalam Kepemerintahan

Kolaborasi dan sinergitas pemerintah, masyarakat, akademisi dan pebisnis menjadi hal yang sangat penting di era sekarang. Percepatan pembangunan dan penanganan persoalan di tengah masyarakat tidak dapat dituntaskan sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan dan partisipasi warga masyarakat (*citizen participation*) bagaimana pun akan memperkuat pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Partisipasi dapat memperkuat manakala pemerintah membuka ruang partisipasi dan merespon pelbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Keterbukaan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut perlu dikelola secara tepat, cepat dan bermanfaat. Ragam inovasi dan teknologi informasi sebagai sarana dibutuhkan sebagai faktor pemungkin (*enablers*) terwujudnya kondisi ideal tersebut.

Semangat keterbukaan pemerintahan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan komponen masyarakat. Interaksi mutual tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat, membuka ruang terciptanya solusi bersama atas persoalan, serta memungkinkan tersusunnya imajinasi perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Upaya tersebut bisa mereduksi adanya kelompok yang secara langsung maupun tidak termarjinalkan dalam proses

pembangunan. Kemakmuran di suatu daerah harus berkembang berlandaskan keadilan dan keterbukaan.

Bojonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia, telah lama dikenal sebagai kabupaten miskin. Hal tersebut diperparah dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Muara dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah tersebut adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Bojonegoro menyadari bahwa perbaikan pelayanan dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama dengan masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, sejak 2008 pemerintah Bojonegoro mencoba membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat; serta membuka akses informasi bagi masyarakat guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut turut didukung dengan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memastikan akses masyarakat pada pembangunan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Partisipasi warga: sebuah pendekatan

Langkah awal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dilakukan melalui “**dialog publik**” sejak 2008 hingga kini. Forum ini dilakukan pada setiap Jumat di Pendopo Bupati dan disiarkan melalui radio

pemerintah dan swasta. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Di lain sisi, masyarakat memperoleh tanggapan langsung dari pemerintah. Kegiatan ini digelar sebagai ruang dialog warga-pemerintah guna menemukan solusi bersama dalam merespon kebutuhan dan persoalan di tengah masyarakat. Guna memperkuat hasil dan proses awal tersebut, Bupati Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik.

Alat komunikasi pemerintah-warga turut dibangun guna memfasilitasi dialog. Masyarakat Bojonegoro dapat menghubungi bupati melalui pesan singkat Short Message Services (SMS); dan pesan berbasis aplikasi Whatsapp. Layanan ini dibuka selama 24 jam. Radio Malowopati FM milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga difungsikan untuk menerima pengaduan warga. Masyarakat dapat pula menyampaikan pengaduan, aspirasi dan komplain memanfaatkan aplikasi LAPOR 1708 (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semua laporan masyarakat tersebut, ditindaklanjuti oleh Unit Kerja yang membidangi selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja dan harus dijawab melalui sistem. Mekanisme evaluasi atas respon Unit Kerja dilakukan pada setiap Jumat, termasuk untuk mengevaluasi apabila ditemukan unit kerja yang belum merespon pengaduan masyarakat.

Penguatan akses informasi dan pelayanan responsif ini membangun kultur baru dalam pola pelayanan kepada masyarakat. Di lain sisi, hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara lebih menyeluruh -termasuk kepada Satuan Perangkat

daerah (SKPD). Kepercayaan yang semula ditujukan kepada sosok bupati dan wakilnya, perlahan menjadi kepercayaan kepada pemerintah sebagai sebuah institusi.

Pendekatan partisipasi masyarakat tidak hanya mengubah perilaku masyarakat dalam berkontribusi terhadap perumusan kebijakan, namun juga mengubah perilaku pejabat pemerintah. Kolaborasi pemangku kepentingan 4 (empat) sekawan yaitu : Akademisi, Business, Government, dan Community/ Citizen, merupakan pilar dalam perumusan kebijakan di pemerintahan terbuka dengan strategi “4Ds”: dialog, direct, distribute and digital.

Regulasi lainnya yang menguatkan akses informasi masyarakat Bojonegoro adalah: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai penjabaran Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; 3) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Pengawasan Pengendalian Pembangunan; 4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016; 5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Mekanisme Respon Pemerintah (Government Responsiveness)

Guna memayungi mekanisme respon pemerintah terhadap kebutuhan warga, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati

Pengawasan Pengendalian Pembangunan (TKBP3). Peraturan ini menyediakan ruang pembahasan sinergis persoalan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Proses “*management review*” menjadi salah satu wadah yang diaktivasi dalam peraturan tersebut. TKBP3 terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Sistem Monitoring/ sistem Pemantauan, Pengelolaan Layanan Pengaduan On-line Rakyat (LAPOR), Kelompok Kerja Open data portal data Indonesia (data.go.id) dan Kelompok Kerja Pengawasan.

Isu strategis diidentifikasi, salah satunya, menggunakan aplikasi LAPOR. Ragam masukan yang terkumpul digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengawasan baik oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) maupun oleh Bupati. Kebijakan bupati dan program kerja SKPD dirumuskan hasil identifikasi tersebut serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten. Proses identifikasi usulan warga dalam Musrenbang pun sudah difasilitasi oleh aplikasi e-musrenbang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam perencanaan penganggaran menerapkan prinsip: *money follows problems, money is for solutions, solutions are for sustainable development*. Mekanisme-mekanisme tersebut memungkinkan adanya perumusan kebijakan dan perencanaan partisipatif yang tepat, cepat dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan warga

Pemerintah Terbuka (Open Government)

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 terpilih menjadi salah satu *pioneer* pada *subnational Open Government Partnership* beserta 14 wilayah lainnya. Pencapaian tersebut melalui proses panjang yang

telah dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Meski demikian, predikat pemerintah terbuka bukanlah tujuan upaya perbaikan ini, melainkan kesejahteraan warga.

Menjadi pemerintahan yang terbuka, bagi Bojonegoro lebih bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*higher mutual trust*) dan semakin tingginya dampak baik terhadap kesejahteraan rakyat (*higher positive impact*). Proses ini belumlah sempurna, tetapi merupakan sesuatu yang perlu terus berjalan dan dikembangkan. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim *Open Government Indonesia (OGI)* --yang terdiri dari unsur Bappenas, Kantor Staf Presiden dan Organisasi Masyarakat Sipil-- menunjukkan bahwa inisiatif di Bojonegoro masih menghadapi pelbagai tantangan, seperti sumberdaya manusia, prasarana, dan ketersediaan teknologi informasi.

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu percontohan inisiatif *Open Government Partnership* menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan turut berkontribusi kepada semakin baiknya kepercayaan masyarakat. Keterbukaan diharapkan berkontribusi positif terhadap perubahan pada tingkat masyarakat dan pemerintahan itu sendiri. Kabupaten Bojonegoro merumuskan beberapa rencana aksi pemerintahan terbuka yang meliputi: 1) Revolusi Data, untuk memetakan persoalan nyata di tengah masyarakat yang harus ditangani; (2) penguatan akuntabilitas pemerintah desa, (3) peningkatan sistem transparansi anggaran daerah, (4) penguatan transparansi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, (5) perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Upaya Bojonegoro dalam revolusi data memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertindak sebagai pengguna dan

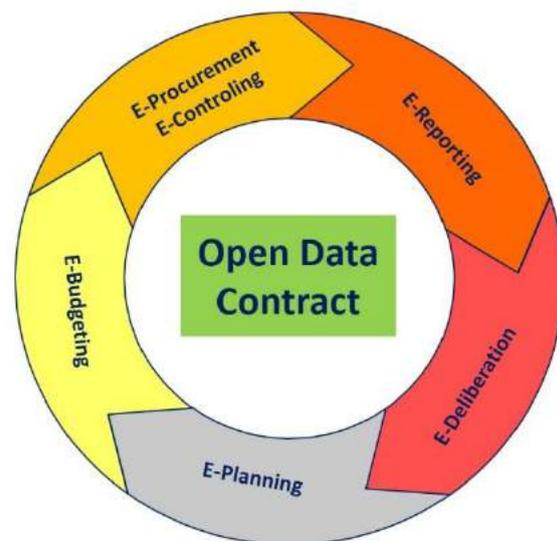
produsen data. Mengatasi kekosongan data dasar sosial, ekonomi, dan demografi, Bojonegoro mengembangkan aplikasi data terbuka Dasa Wisma. Aplikasi ini dibangun berdasarkan gerakan masyarakat yang dipimpin oleh perempuan untuk mengumpulkan data demografi dan layanan tingkat desa. Untuk setiap 10 rumah tangga (dasa wisma) di sebuah desa, seorang administrator sipil wanita terlatih memasukkan data ke dalam aplikasi data. Mitra OMS sedang mengembangkan dasbor visual dan menggabungkan semua data lokal ke dalam portal data nasional Indonesia.

Desa sebagai unit masyarakat terkecil diapresiasi keberadaannya dalam pembangunan sebagai entitas pemerintahan lokal sekaligus masyarakat berpemerintahan di mana demokrasi dapat tumbuh dan berkembang. Masyarakat diberi keleluasaan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi administrasi desa. Publikasi penggunaan dan akuntabilitas anggaran desa dilaksanakan dengan pemasangan billboard anggaran desa di tempat strategis desa dan dipublikasikan pula di situs desa. Beberapa desa juga telah mempublikasikan informasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan melalui situs desa, seperti Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo (lihat : <https://pejambon-bjn.desa.id/transparansi-anggaran/>).

Upaya meningkatkan transparansi sistem anggaran daerah merupakan salah satu cara Bojonegoro membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi anggaran diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan mempublikasikan pelbagai informasi anggaran pada website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Beberapa informasi dapat dipantau secara langsung (real time), seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (lihat, [http://](http://www.bpkadbojonegoro.com/sp2d)

www.bpkadbojonegoro.com/sp2d), rincian penjabaran APBD masing-masing SKPD (lihat : <http://www.bpkadbojonegoro.com/transparansi>).

Transparansi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dapat membantu memerangi korupsi, meningkatkan hasil dan kompetisi. Masyarakat Bojonegoro dapat terlibat dalam pemantauan untuk memastikan ketepatan dan ketaatan hukum pada proses pengadaan mulai dari proses lelang hingga pengerjaan. Keterbukaan dokumen kontrak dapat mendorong persaingan sehat antar penyedia jasa dan barang.



Bojonegoro juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi, dan memfasilitasi umpan balik warga tentang kualitas, dan tanggapan pemerintah terhadap pengaduan ini melalui pengembangan Standar Pelayanan Publik. Dengan demikian, kami berfokus pada layanan kesehatan, perizinan, dan pendidikan sebagai layanan dasar dan berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan standar layanan.

Capaian Pemerintah Bojonegoro

Prinsip pemerintahan terbuka yang telah dijalankan Kabupaten Bojonegoro, yang satu sisi telah menguatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, memberikan beberapa capaian sebagai berikut :

1. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro yang meningkat baik pada sektor minyak dan gas (migas) maupun nonmigras. Laju Pertumbuhan dengan Migas pada tahun 2016 sebesar 21,95 (5,86 tanpa migas) dan inflasi sebesar 2,71 di tahun yang sama.
2. Angka kemiskinan di Bojonegoro menurun. Pada tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro telah keluarga dari urutan sepuluh besar Kabupaten Miskin di Provinsi Jawa Timur. Angka itu merosot dari 28,38 tahun 2006 menjadi 14,34 sebelas tahun kemudian.
3. Pencapaian target-target target-indikator Sustainable Development Goals menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik pada pelbagai cakupan SDG's.

Beranjak dari uraian di atas, keterbukaan pemerintah dan kemampuan untuk membangun mekanisme partisipasi akan berkontribusi pada capaian-capaian pembangunan. Ruang kolaborasi masyarakat-pemerintah kian meningkatkan kualitas pembangunan yang pada akhirnya akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Inovasi, bagaimana pun, menjadi kunci dalam dalam proses-proses tersebut.

Kesemuanya, dimulai dengan membangun kolaborasi dan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah; akses masyarakat pada informasi pembangunan dan pelayanan; dan adanya mekanisme penanganan keluhan dan usulan dari masyarakat.

Bojonegoro, Maret 2018
DR. H. SUYOTO, M.SI
Bupati Bojonegoro 2008-2018



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



OMIDYAR NETWORK



Sida